

Filsafat Pendidikan Multikultural

Multikulturalisme merupakan pengakuan atas pluralisme budaya. Pluralisme budaya merupakan suatu proses internalisasi nilai-nilai di dalam suatu komunitas. filsafat pendidikan multikultural didefinisikan sebagai sebuah kebijakan sosial yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemeliharaan budaya dan saling memiliki rasa hormat antara seluruh kelompok budaya di dalam masyarakat. pembelajaran multikultural pada dasarnya merupakan program pendidikan bangsa agar komunitas multikultural dapat berpartisipasi dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang ideal bagi bangsanya. dalam konteks yang luas, filsafat pendidikan multikultural mencoba membantu menyatukan bangsa secara demokratis, dengan menekankan pada perspektif pluralitas masyarakat di berbagai bangsa, etnik, kelompok budaya yang berbeda. Akhirnya semoga tulisan ini bermanfaat untuk kita semua dalam memahami lebih dalam tentang filsafat pendidikan multicultural.



FILSAFAT PENDIDIKAN MULTIKULTURAL

Dr (C). Irjus Indrawan, S.Pd.I., M.Pd.I, dkk

Filsafat Pendidikan Multikultural

Dr (C). Irjus Indrawan, S.Pd.I., M.Pd.I
Hadion Wijoyo, S.E., S.H., S.Sos., S.Pd., M.H., M.M., Ak., CA., QWP®
Hermawan Winditya, SS., M.Hum., M.Pd
Dr. I Wayan Budi Utama, M.Si
Christian Siregar, S.Th., M.Pd
Dr. Suherman, S.Kom, M.M.

Editor :
Prof. Dr. H. Mukhtar Latif, M.Pd



FILSAFAT PENDIDIKAN MULTIKULTURAL

Dr (C). Irjus Indrawan, S.Pd.I., M.Pd.I
Hadion Wijoyo, S.E., S.H., S.Sos., S.Pd., M.H., M.M., Ak., CA.,
QWP®
Hermawan Winditya, SS., M.Hum., M.Pd
Dr. I Wayan Budi Utama, M.Si
Christian Siregar, S.Th., M.Pd
Dr. Suherman, S.Kom, M.M.



PENERBIT CV. PENA PERSADA

FILSAFAT PENDIDIKAN MULTIKULTURAL

Penulis:

Dr (C). Irjus Indrawan, S.Pd.I., M.Pd.I
Hadion Wijoyo, S.E., S.H., S.Sos., S.Pd., M.H., M.M., Ak., CA., QWP®
Hermawan Winditya, SS., M.Hum., M.Pd
Dr. I Wayan Budi Utama, M.Si
Christian Siregar, S.Th., M.Pd
Dr. Suherman, S.Kom, M.M.

Editor:

Prof. Dr. H. Mukhtar Latif, M.Pd

ISBN : 978-623-6504- -

Cover Design:

Retnani Nur Brilliant

Layout :

Fajar T. Septiono

Penerbit CV. Pena Persada

Redaksi :

Jl. Gerilya No. 292 Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas
Jawa Tengah

Email : penerbit.penapersada@gmail.com

Website : penapersada.com

Phone : (0281) 7771388

Anggota IKAPI

All right reserved

Cetakan pertama : 2020

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang.
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan cara
apapun tanpa izin penerbit.

PRAKATA PENULIS

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan tulisan buku ini dengan judul FILSAFAT PENDIDIKAN MULTIKULTURAL.

Multikulturalisme merupakan pengakuan atas pluralisme budaya. Pluralisme budaya merupakan suatu proses internalisasi nilai-nilai di dalam suatu komunitas. Filsafat pendidikan multikultural didefinisikan sebagai sebuah kebijakan sosial yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemeliharaan budaya dan saling memiliki rasa hormat antara seluruh kelompok budaya di dalam masyarakat. Pembelajaran multikultural pada dasarnya merupakan program pendidikan bangsa agar komunitas multikultural dapat berpartisipasi dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang ideal bagi bangsanya. Dalam konteks yang luas, filsafat pendidikan multikultural mencoba membantu menyatukan bangsa secara demokratis, dengan menekankan pada perspektif pluralitas masyarakat di berbagai bangsa, etnik, kelompok budaya yang berbeda.

Semoga tulisan ini bermanfaat untuk kita semua dalam
FILSAFAT PENDIDIKAN MULTIKULTURAL

.

Pekanbaru, 1 Juli 2020

DAFTAR ISI

PRAKATA PENULIS.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv

BAB I

SEJARAH PENDIDIKAN MULTIKULTURAL.....	1
A. Manajemen Pendidikan	1
B. Filsafat Pendidikan.....	11
C. Hakikat Manusia	17
D. Hakikat Kebudayaan.....	29

BAB II

HAKIKAT PENDIDIKAN MULTIKULTURAL.....	36
A. Antara Pluralisme dan Multikulturalisme	36
B. Sejarah Multikulturalisme	38
C. Hakikat Multikulturalisme	46
D. Hakikat Pendidikan Multikulturalisme	48
E. Prinsip, Tujuan, Fungsi dan Perspektif Pendidikan Multikultural.....	53

BAB III

TEORI DAN PENDEKATAN PENDIDIKAN

MULTIKULTURAL.....	59
A. Teori Pendidikan Multikultural	59
B. Pendekatan Terhadap Pendidikan Multikultural.....	61
C. Tahap-Tahap Integrasi Materi Multikultural ke Dalam Kurikulum.....	70

BAB IV

PENGEMBANGAN PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DI

INDONESIA	83
A. Pendahuluan	83
B. Kunci Pendidikan Multikultural: Melihat Orang Lain	85
C. Model Pengembangan	91
D. Strategi Pengembangan	96

BAB V	
AGAMA DAN PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DI	
INDONESIA.....	101
A. Kerangka Teoretis	101
B. Perubahan Paradigma Pendidikan Agama	102
C. Payung Hukum	107
 BAB VI	
NILAI-NILAI PENDIDIKAN ISLAM BERBASIS	
MULTIKULTURAL	114
A. Pluralisme dan Multikulturalisme dalam Perspektif Agama Islam.....	114
B. Nilai-Nilai Pendidikan Islam Berbasis Multikultural	120
 BAB VII	
NILAI-NILAI PENDIDIKAN KATOLIK BERBASIS	
MULTIKULTURAL	125
A. Gereja Katolik Selayang Pandang.....	125
B. Pandangan Gereja Katolik tentang Multikulturalisme.....	128
C. Multikulturalisme dalam Dokumen Gereja Katolik	131
D. Pandangan Umat Katolik terhadap Multikulturalisme.....	
 BAB VIII	
NIAI-NILAI KRISTEN PENDIDIKAN BERBASIS	
MULTIKULTURAL	135
A. Pendahuluan.....	135
B. Pengertian Pluralisme, Multikulturalisme Dan Toleransi Beragama	138
C. Pentingnya Pemahaman Pluralistik-Multikultural dan Toleransi Beragamadalam Perspektif Alkitab Di Tengah Masyarakat Plural Yang Berpotensi Konflik	144
D. Pendidikan Agama Kristen Yang Memuat Nilai-Nilai Pluralisme, Multikulturalisme Dan Toleransi Beragama ...	154

BAB IX

NILAI-NILAI PENDIDIKAN HINDU BERBASIS

MULTIKULTURAL.....	160
A. Pendahuluan.....	160
B. Kerangka Pemikiran.....	162
C. Paradigma Baru Dalam Pendidikan Agama.....	163
D. Hindu dan Multikulturalisme	165

BAB X

NILAI-NILAI PENDIDIKAN BUDDHA BERBASIS

MULTIKULTURAL.....	175
A. Pengantar	175
B. Maklumat Raja Asoka	175
C. Bhinneka Tunggal Ika	179
D. Ajaran Buddha tentang Multikultural.....	181
E. Nilai-Nilai Pendidikan Buddha berbasis Multikultural.....	182

DAFTAR PUSTAKA.....	192
----------------------------	------------

BIODATA PENULIS.....	209
-----------------------------	------------

BAB I

SEJARAH PENDIDIKAN MULTIKULTURAL

A. Manajemen Pendidikan

1. Pengertian

Manajemen berasal dari bahasa Latin, yaitu dari asal kata *manus* yang berarti menjadi tangan dan *agere* yang berarti melakukan. Kata itu digabung menjadi kata kerja *managere* yang artinya menangani. *Managere* diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi *management*, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi manajemen atau pengelolaan. Manajemen pendidikan dapat didefinisikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya pendidikan mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien.¹

George R. Terry menyatakan bahwa manajemen merupakan sebuah kegiatan; pelaksanaannya disebut manajing dan orang yang melakukannya disebut manajer. Individu yang menjadi manajer menangani tugas-tugas baru yang seluruhnya bersifat “manajerial” yang penting diantaranya adalah menghentikan kecenderungan untuk melaksanakan segala sesuatu seorang diri saja.²

Manajemen, menurut Warren Bennis, adalah proses penempatan orang pada posisi yang tepat (*getting people to do what needs to be done*). Agar tujuan-tujuan organisasi bisa tercapai secara efektif dan efisien.³ manajemen menurut istilah adalah proses mengkordinasikan berbagai aktivitas kerja sehingga dapat selesai secara efisien dan efektif

¹ Husain Usman, *Manajemen Teori, Praktik dan Riset Pendidikan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), hlm. 7.

² George R. Terry, *Prinsip-prinsip Manajemen*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hal. 9

³ Warren Bennis, *on Becoming a Leader* (Philadelphia; Basic Book inc, 2009), hal. 34

dengan dan melalui orang lain.⁴ Tony Bush menganggap bahwa manajemen adalah satu ilmu pengetahuan yang menjelaskan tentang proseduralisme yang wajib dilalui oleh seorang pemimpin untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi yang sudah dicanangkan dan direncanakan sebelumnya.⁵ Manajemen, menurut Warren Bennis, adalah proses penempatan orang pada posisi yang tepat (*getting people to do what needs to be done*). Agar tujuan-tujuan organisasi bisa tercapai secara efektif dan efisien.⁶

Fred Luthans dan Jonathan P. Doh mendefinisikan

“management is the process of completing activities with and through other people”.⁷ Menurut Fredrick Taylor *Management, the art of management is defined as knowing exactly what you to do, and then seeing that seeing that they do in the best and cheapest way*.⁸ Selanjutnya Dimeck menyebutkan bahwa : *Management is knowing where you want to go, what shall you must do, what the forces are which to which you must deal, and how to handle your ship, and your crew effectively and with out waste, in the process of getting there*.⁹ Sedangkan Mondy, Sharplin, dan Phippo mengartikan manajemen sebagai *“the process of getting thing done through the effort of other people”*.¹⁰

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa manajemen bermakna proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, proses kontrol, dan

⁴Robbin dan Coulter, *Manajemen* (ed. kedelapan), (Jakarta: PT Indeks, 2007), hal. 8

⁵ Tony Bush, *Leadership and Management Development* (Los Angeles & London: SAGE Pub. 2008), hal. 6

⁶Warren Bennis, *on Becoming a Leader* (Philadelphia: Basic Book inc, 2009), hal. 34

⁷ Fred Luthans dan Jonathan P.Doh, *International Management Culture, Strategy and Behaviour*, (lincoln:University of Nebraska, 2012) hal. 1

⁸Fredrick Taylor W, *Scientific Management*, (Happer and Breos: New York, 2007), hal.2.

⁹Dimeck, *The Executive in Action*, (New York: Harpen and Bross, 2007), hal. 10.

¹⁰Mondy, R.W., Sharplin, A dan Plippo, *Management, Concept and Practices*, (Boston: Allyn and Bacon, Inc, 2008), hal. 9.

ditambah dengan aturan-aturan mengikat orang-orang yang ada di dalam organisasi. Di sisi lain, tujuan adanya manajemen adalah tercapainya efisiensi waktu, anggaran, dan ditambah efektifitas orang yang bekerja dan program yang akan dilaksanakan.

Perkembangan ilmu manajemen juga menambah marak kajian manajemen lembaga pendidikan secara luas. Para pakar ilmu manajemen pendidikan, membumbui ilmu manajemen yang ada di dunia pendidikan dengan fitur-fitur baru yang berkembang berkembang. Buchari Alma, dkk, menggagas budaya baru pengelolaan pendidikan yang berbasis pada korporasi pendidikan. Gagasan ini, secara sederhana, bisa dipahami sebagai wujud atau bentuk baru pengelolaan pendidikan yang tradisional ke arah yang lebih lentur, modern, dan profesional. Melalui gagasan korporasi pendidikan ini, maka lembaga pendidikan tidak hanya berorientasi pada peserta didik, dan pengelolaan internal. Melainkan melihat dunia yang luas; antara lain kepada pelanggan, pasar (*market*), dan peningkatan sumber daya (*resources*) yang dimiliki lembaga.¹¹

Dalam UU Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 pasal 1 dan 3, “pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”.¹²

Pendidikan adalah segala upaya, latihan dan sebagainya untuk menumbuhkan segala potensi yang ada dalam diri manusia baik secara mental, moral dan

¹¹Buchari Alma, dkk, *Manajemen Corporate dan Strategi Pemasaran Lembaga Pendidikan* (Bandung: UPI Press, 2005), hal. 23

¹² Didin Kurniadin dan Imam Machali, *Manajemen Pendidikan Konsep dan Prinsip Pengelolaan Pendidikan*, (Jogjakarta: Ar- Ruzz Media, 2012), Hlm. 11

fisik untuk menghasilkan manusia yang dewasa dan bertanggung jawab sebagai makhluk yang berbudi luhur. Pendidikan sebagai usaha membina dan mengembangkan pribadi manusia dari aspek-aspek rohaniah dan jasmaniah juga harus berlangsung secara bertahap. Oleh karena suatu kematangan yang bertitik akhir pada optimalisasi perkembangan/pertumbuhan, baru dapat tercapai bilamana berlangsung melalui peroses demi peroses kearah tujuan akhir perkembangan atau pertumbuhannya.¹³

Manajemen pendidikan dapat juga diartikan sebagai aktifitas yang memadukan sumber-sumber pendidikan agar terpusat dalam usaha mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan.¹⁴ Sedangkan Sondang P Siagian mengartikan manajemen sebagai kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka mencapai tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain.¹⁵

Manajemen pendidikan adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa proses pengelolaan usaha kerja sama kelompok manusia yang tergabung dalam organisasi pendidikan agar kegiatan dapat terlaksana dengan efektif dan efisien.¹⁶

Berdasarkan pendapat di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen pendidikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya pendidikan mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien untuk menumbuh kembangkan segala potensi yang ada dalam diri manusia

¹³ M. Arifin, *Filsafat Pendidikan Islam*, Cet. III, (Jakarta ; Bumi Aksara, 1993), hlm. 11

¹⁴ Made Pidarta, *Manajemen Pendidikan Indonesia*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), Hlm. 4

¹⁵ Sondang P Siagian, *Filsafah Administrasi*, (CV Masaagung, Jakarta : 1990), hlm, 5

¹⁶ Irjus Indrawan. *Pengantar Manajemen Sarana dan Prasarana Sekolah*. Yogyakarta: Deepublish. 2015. Hlm. 2

baik secara mental, moral dan fisik untuk menghasilkan manusia yang dewasa dan bertanggung jawab sebagai makhluk yang berbudi luhur

2. Tujuan Manajemen Pendidikan

Mempelajari manajemen pendidikan bertujuan untuk:

- a. Terwujud suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan.
- b. Tercipta peserta didik yang aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
- c. Terpenuhi salah satu dari empat kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan (tertunjangnya kompetensi profesional sebagai pendidik dan tenaga kependidikan sebagai manajer).
- d. Tercapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien.
- e. Terbekali tenaga kependidikan dengan teori tentang proses dan tugas administrasi pendidikan (tertunjangnya profesi sebagai manajer atau konsultan manajemen pendidikan).
- f. Teratasi masalah mutu pendidikan.¹⁷

3. Fungsi dan Prinsip Manajemen Pendidikan

a. Fungsi Manajemen Pendidikan

Manajemen pendidikan merupakan suatu cabang ilmu yang usianya masih muda sehingga banyak yang belum mengenal dengan istilah manajemen. Istilah lama yang sering digunakan adalah administrasi. Sebenarnya pengertian kedua istilah tersebut tidaklah sama. Kata administrasi lebih cenderung kepada pekerjaan tulis menulis, sedangkan istilah manajemen lebih kepada suatu pekerjaan yang dilakukan pimpinan, sehingga

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 125

lebih menunjuk pada kegiatan sebuah organisasi. Manajemen pendidikan adalah aktivitas memadukan sumber-sumber pendidikan agar terpusat dalam usaha untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan sebelumnya.¹⁸

Manajemen Pendidikan berfungsi sebagai perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan.

1) Perencanaan (Planning)

Planning adalah aktivitas pengambilan keputusan mengenai sasaran apa yang akan dicapai, tindakan apa yang akan diambil dalam rangka pencapaian tujuan dan siapa yang akan melaksanakan tugas-tugasnya. Dalam dunia pendidikan, perencanaan merupakan pedoman yang harus dibuat dan dilaksanakan sehingga usaha pencapaian tujuan lembaga itu dapat efektif dan efisien.¹⁹

Dalam kaitannya dengan perencanaan pengembangan lembaga pendidikan Islam, dapat dilakukan beberapa langkah antara lain: mengkaji kebijakan yang relevan, menganalisis kondisi lembaga, merumuskan tujuan pengembangan, mengumpulkan data dan informasi, menganalisis data dan informasi, merumuskan dan memilih alternatif program, menetapkan langkah-langkah kegiatan pelaksanaan.²⁰

2) Pengorganisasian

Organisasi diartikan sebagai kumpulan orang dengan sistem kerja sama untuk mencapai tujuan

¹⁸Made Pidarta, *Manajemen pendidikan indonesia*, (Jakarta: PT Bina Aksara, 1988), hlm.4

¹⁹ Didin Kurniadi dan Imam Machali, *Op. Cit.*, hlm129

²⁰ Baharudin dan Makin, *Manajemen Pendidikan Islam*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010) hlm. 99-100

bersama. Dalam sistem kerja sama secara jelas diatur siapa yang menjalankan apa, siapa bertanggung jawab atas siapa, arus komunikasi dan memfokuskan sumber daya pada tujuan. Pengorganisasian adalah proses, membagi kerja kedalam tugas-tugas yang lebih kecil, membebaskan tugas-tugas itu kepada orang yang sesuai dengan kemampuannya, dan mengalokasikan sumber daya, serta mengkoordinasikannya dalam rangka efektifitas pencapaian tujuan organisasi²¹

3) Actuating/ Penggerakan

Penggerakan adalah hubungan anatara aspek-aspek individual yang ditimbulkan adanya hubungan terhadap bawahan untuk dapat mengerti dan memahami oembagian pekerjaan yang efektif dan efisien.

4) Controlling/ Pengawasan

Pengawasan adalah proses penentuan apa yang dicapai. Berkaitan standara apa yang sedang dihasilkan, penilaian pelaksanaan, serta bilamana perlu diambil tindakan korektif. Ini yang memungkinkan pelaksanaan dapat berjalan sesuan rencana.²²

b. Prinsip Manajemen Pendidikan

Dalam melakukan manajemen organisasi pendidikan, maka perlu memperhatikan prinsip manajemen dalam setiap masing-masing komponen pendidikan.

²¹ Nanang Fattah, *Landasan Manajemen Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 71.

²² Ibid., hlm. 102-105

1) Manajemen kurikulum

Prinsip dan fungsi manajemen kurikulum yang harus diperhatikan dalam melaksanakan manajemen kurikulum adalah beberapa hal sebagai berikut, yaitu:

- a) Produktivitas, hasil yang akan diperoleh dalam kegiatan kurikulum merupakan aspek yang harus dipertimbangkan dalam manajemen kurikulum.
- b) Demokratisasi, pelaksanaan manajemen kurikulum harus berasaskan pada demokrasi yang menempatkan pengelola, pelaksana dan subjek didik pada posisi yang seharusnya dalam melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab untuk mencapai tujuan kurikulum.
- c) Kooperatif, untuk memperoleh hasil yang diharapkan dalam kegiatan manajemen kurikulum perlu adanya kerja sama yang positif dari berbagai pihak yang terlibat.
- d) Efektifitas dan efisien, rangkaian kegiatan manajemen kurikulum harus mempertimbangkan efektifitas dan efisien untuk mencapai tujuan kurikulum, sehingga kegiatan manajemen kurikulum tersebut memberikan hasil yang berguna dengan biaya, tenaga dan waktu yang relatif singkat.
- e) Mengarahkan visi, misi dan tujuan yang ditetapkan, dalam kurikulum, proses manajemen kurikulum harus dapat memperkuat dan mengarahkan visi, misi dan tujuan kurikulum.²³

2) Manajemen Tenaga Kependidikan

Prinsip-prinsip manajemen tenaga kependidikan:

²³ Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI, *Manajemen Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 192.

a) Perencanaan Pegawai

Penyusunan rencana personalia yang baik dan tepat memerlukan informasi yang lengkap dan jelas tentang pekerjaan yang harus dilakukan dalam organisasi.

b) Pengadaan Pegawai

Untuk mendapatkan pegawai yang sesuai dengan kebutuhan, dilakukan kegiatan rekrutment.

c) Pembinaan dan Pengembangan Pegawai

Organisasi senantiasa menginginkan agar personil-personilnya melaksanakan tugas secara optimal dan menyumbangkan segenap kemampuannya untuk kepentingan organisasi, seta bekerja lebih baik dari hari-ke hari.

d) Promosi dan Mutasi

Setelah diperoleh dan ditentukan calon pegawai yang akan diterima, kegiatan selanjutnya adalah mengusakan supaya calon pegawai tersebut menjadi anggota organisasi yang sah sehingga mempunyai hak dan kewajiban sebagai anggota organisasi atau lembaga.

e) Pemberhentian Pegawai

Dalam kaitannya dengan tenaga kependidikan di sekolah, khususnya pegawai negeri sipil, sebab-sebab pemberhentian pegawai ini dapat dikelompokkan ke dalam tiga jenis, yaitu pemberhentian atas permohonan sendiri, pemberhentian oleh dinas atau pemerintah, pemberhentian sebab lain-lain.

f) Kompensasi

Pemberian kompensasi selain dalam bentuk gaji dapat juga berupa tunjangan, fasilitas perumahan, kendaraan dan lain-lain.

g) Penilaian Pegawai

Penilaian tenaga pendidikan ini difokuskan pada prestasi individu dan peran sertanya dalam kegiatan sekolah.²⁴

3) Manajemen Kesiswaan

Prinsip-prinsip manajemen kesiswaan

- a) Perencanaan penerimaan siswa
- b) Pembinaan siswa
- c) Kelulusan

4) Manajemen Keuangan

Prinsip-prinsip manajemen keuangan

- a) Prosedur anggaran
- b) Prosedur akuntansi keuangan
- c) Pembelajaran, perdugaan, dan prosedur pendistribusian
- d) Prosedur investasi
- e) Prosedur pemeriksaan

5) Manajemen Sarana dan Prasarana

Prinsip-prinsip manajemen sarana dan prasarana

- a) Perencanaan kebutuhan
- b) Pengadaan
- c) Penyimpanan
- d) Penginventarisasian
- e) Pemeliharaan

²⁴ E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), hlm. 42-45

- f) Penghapusan sarana dan prasarana pendidikan
- 6) Manajemen Hubungan Masyarakat
 - Prinsip-prinsip manajemen hubungan masyarakat
 - a) Komunikasi
 - b) Saling pengertian
 - c) Saling membantu
 - d) Kerjasama
- 7) Manajemen Layana Khusus
 - Prinsip-prinsip manajemen layana khusus
 - a) Perpustakaan
 - b) Kesehatan
 - c) Bimbingan konseling
 - d) Layana psikologis
 - e) Keamanan.²⁵

B. Filsafat Pendidikan

Di dalam dunia pendidikan, berfilsafat adalah suatu hal yang penting, karena dengan berfilsafat dunia pendidikan akan mengetahui hakikat dari makna, tujuan, metode, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan pendidikan itu sendiri. Arti penting dari berfilsafat itu sendiri adalah agar tujuan-tujuan yang telah diketahui dan ditetapkan dapat tercapai. Sebagaimana Ali Khalil Abu 'Ainaini merumuskan pengertian filsafat pendidikan yang dikutip oleh Prof. Dr. H. Ramayulis dalam "bukunya Filsafat Pendidikan Islam" bahwa filsafat pendidikan itu sebagai "kegiatan-kegiatan pemikiran yang sistematis, diambil dari sistem filsafat sebagai cara untuk mengatur dan menerangkan nilai-nilai tujuan pendidikan yang akan dicapai (direalisasikan).²⁶ Filsafat adalah studi secara kritis mengenai masalah-masalah yang timbul dalam kehidupan

²⁵ Rohiat, *Manajemen Sekolah*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 26.

²⁶ Ramayulis. *Filsafat Pendidikan Islam (Analisis Filosofis Sistem Pendidikan Islam)*. Jakarta. Kalam Mulia. 2015. Hlm. 4

manusia dan merupakan alat dalam mencari jalan keluar yang terbaik agar dapat mengatasi semua permasalahan hidup dan kehidupan yang dihadapi. Dalam pengertian yang luas, filsafat bertujuan memberikan pengertian yang dapat diterima oleh manusia mengenai konsep-konsep hidup secara ideal dan mendasar bagi manusia agar mendapatkan kebahagiaan dan kesejahteraan.

Dari uraian di atas, dapat dikatakan bahwa ruang lingkup filsafat adalah semua lapangan pemikiran manusia yang komprehensif. Segala sesuatu yang mungkin ada dan benar-benar ada (nyata), baik material konkret maupun nonmaterial (abstrak). Jadi, objek filsafat itu tidak terbatas.²⁷

1. Pengertian Filsafat

Ahli filsafat mengemukakan pendapat mereka mengenai pengertian filsafat yaitu :

- a. Plato (427 - 348 SM) mengatakan bahwa filsafat adalah pengetahuan tentang segala yang ada (ilmu pengetahuan yang berminat mencapai kebenaran yang asli).
- b. Aristoteles (382 - 322 SM) mengatakan bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran, yang di dalamnya terkandung ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika (filsafat menyelidiki sebab dan asas segala benda).
- c. Marcus Tullius Cicero (106 - 43SM) Filsafat adalah pengetahuan tentang sesuatu yang maha agung dan usaha-usaha untuk mencapainya.
- d. Al-Farabi (meninggal 950 M), filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang alam dan bertujuan menyelidiki hakikat yang sebenarnya.
- e. Immanuel Kant (1724 - 1804), mengatakan filsafat itu ialah ilmu pokok dan pangkal segala pengetahuan yang mencakup di dalamnya empat persoalan, yaitu:
 - 1) Apakah yang dapat kita ketahui? (dijawab oleh metafisika)

²⁷ M. Noor Syam, *Filsafat Pendidikan dan Dasar Filsafat Pancasila*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1988), hlm. 22

- 2) Apakah yang dapat kita kerjakan? (dijawab oleh etika)
 - 3) Sampai di manakah harapan kita? (dijawab oleh agama)
 - 4) Apakah yang dinamakan manusia? (dijawab oleh antropologi)
- f. Fuad Hasan, guru besar psikologi UI, filsafat adalah suatu ikhtiar untuk berpikir radikal, artinya mulai dari radiksnya suatu gejala, dari akarnya suatu hal yang hendak dimasalahkan. Dan dengan jalan penjajakan yang radikal itu filsafat berusaha untuk sampai kepada kesimpulan-kesimpulan yang universal.
 - g. Hasbullah Bakry: filsafat adalah ilmu yang menyelidiki segala sesuatu dengan mendalam mengenai ketuhanan, alam semesta dan manusia, sehingga dapat menghasilkan pengetahuan tentang bagaimana hakikatnya sejauh yang dapat dicapai oleh akal manusia, dan bagaimana sikap manusia itu seharusnya setelah mencapai pengetahuan itu.
 - h. Notonagoro : filsafat itu menelaah hal-hal yang menjadi objeknya dari sudut intinya yang mutlak dan yang terdalam.
 - i. Decrates (1596 - 1650): filsafat adalah kumpulan segala pengetahuan dimana Tuhan, alam dan manusia menjadi pokok penyelidikannya.
 - j. Harun Nasution: filsafat adalah berfikir menurut tata tertib (logika) dengan bebas (tak terikat tradisi, dogma, atau agama) dan dengan sedalam-dalamnya sehingga sampai ke dasar-dasar persoalan.
 - k. D.C. Mulder mengemukakan pendapatnya bahwa filsafat itu adalah suatu pemikiran teoritis tentang susunan kenyataan sebagai satu keseluruhan.
 - l. Fung Yu Lan: filsafat adalah pikiran yang sangat sistematis dan refleksif.

m. I.R Poedjawijatna, berpendapat filsafat ialah ilmu yang berusaha untuk mencari sebab yang sedalam-dalamnya bagi segala sesuatu berdasarkan pikiran belaka.

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa filsafat adalah ilmu yang menggambarkan usaha manusia untuk mencari dan menemukan kebenaran atau kenyataan baik yang mengenai diri sendiri maupun segala sesuatu yang dijadikan sebagai objeknya.

2. Pengertian Filsafat Pendidikan

Filsafat dan pendidikan merupakan dua istilah yang berdiri pada makna dan hakikat masing-masing, namun ketika keduanya digabungkan ke dalam satu tema khusus, maka ia pun memiliki makna tersendiri yang menunjuk ke dalam suatu kesatuan pengertian yang tidak terpisahkan. Kendatipun filsafat pendidikan telah dipandang sebagai suatu disiplin ilmu yang berdiri sendiri, namun bukanlah berarti bahwa kajiannya hanya sekedar menelaah sendiri pendidikan dan atau filsafat semata. Filsafat pendidikan adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari filsafat secara keseluruhan, baik dalam sistem maupun metode.

Omar Mohammad Al-Toumy Al-Syaibany menyebutkan bahwa filsafat pendidikan adalah pelaksanaan pandangan filsafat dan kaidah-kaidah filsafat dalam bidang pengalaman kemanusiaan yang disebut dengan pendidikan. M. Arifin M.Ed. mengemukakan bahwa filsafat pendidikan adalah upaya memikirkan permasalahan pendidikan. Ali Khalil Abu Al-Ainain mengemukakan pula bahwa filsafat pendidikan adalah upaya berpikir filosofis tentang realitas kependidikan dalam segala lini, sehingga melahirkan teori-teori pendidikan yang berguna bagi kemajuan aktivitas pendidikan itu sendiri.

Menurut John Dewey, filsafat pendidikan merupakan suatu pembentukan kemampuan dasar yang fundamental,

baik yang menyangkut daya piker (intelektual), maupun daya perasaan (emosional), menuju tabiat manusia. Sementara menurut Thompson, filsafat artinya melihat suatu masalah secara total dengan tanpa ada batas atau implikasinya; ia tidak hanya melihat tujuan, metode atau alat-alatnya, tapi juga meneliti dengan saksama hal-hal yang dimaksud. Keseluruhan masalah yang dipikirkan oleh filosof tersebut merupakan suatu upaya untuk menemukan hakikat masalah, sedangkan suatu hakikat itu dapat dibakukan melalui proses kompromi.²⁸

Filsafat pendidikan adalah aktivitas pikiran yang teratur yang menjadikan filsafat sebagai jalan untuk mengatur, menyelaraskan, dan memadukan proses pendidikan. Artinya, filsafat pendidikan dapat menjelaskan nilai-nilai dan maklumat-maklumat yang diupayakan untuk mencapainya. Dalam hal ini, filsafat, filsafat pendidikan, dan pengalaman kemanusiaan merupakan faktor yang integral.²⁹

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil pengertian bahwa filsafat pendidikan sebagai ilmu pengetahuan normatif dalam bidang pendidikan merumuskan kaidah-kaidah, norma-norma dan ukuran tingkah laku perbuatan yang sebenarnya dilaksanakan oleh manusia dalam kehidupannya.

Dalam buku filsafat pendidikan karangan Prof. Jalaludin dan Drs. Abdullah Idi mengemukakan bahwa Jhon S. Brubachen mengatakan hubungan antara filsafat dan pendidikan sangat erat sekali antara yang satu dengan yang lainnya. Kuatnya hubungan tersebut disebabkan karena kedua disiplin tersebut menghadapi problema-problema filsafat secara bersama-sama.

Pendidikan dianggap sebagai wahana terbaik bagi pewarisan dan pelestarian nilai-nilai yang nyatanya sekedar

²⁸ H.M. Arifin, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1993),

²⁹ Al-Syaibani, *Filsafat Pendidikan Islam*, Alih Bahasa Hasan Langgulong, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), hlm. 36

yang resmi, sedang berlaku dan direstui bahkan wajib diajarkan di semua sekolah dengan satu penafsiran resmi yang seragam pula. Dinamika sistem pendidikan yang berlangsung di Indonesia dalam berbagai era kesejarahan akan menguatkan pandangan ini, betapa dunia pendidikan memiliki keterkaitan sangat erat dengan kondisi sosial-politik yang tengah dominan.

Hubungan antara filsafat dan filsafat pendidikan menjadi sangat penting karena filsafat menjadi dasar, arah, dan pedoman suatu sistem pendidikan. Filsafat merupakan ide-ide dan idealisme, dan pendidikan merupakan usaha dalam merealisasikan ide-ide tersebut menjadi kenyataan, tindakan, tingkah laku, bahkan membina kepribadian manusia.

Menurut Ali Saifullah, antar filsafat, filsafat pendidikan, dan teori pendidikan terdapat hubungan yang suplementer: filsafat pendidikan sebagai suatu lapangan studi mengarahkan pusat perhatian dan memusatkan kegiatannya pada dua fungsi tugas normatif ilmiah, yaitu:

- a. Kegiatan merumuskan dasar-dasar, tujuan-tujuan pendidikan, konsep tentang hakikat manusia, serta konsepsi hakikat dan segi pendidikan.
- b. Kegiatan merumuskan sistem atau teori pendidikan yang meliputi politik pendidikan, kepemimpinan pendidikan, metodologi pendidikan dan pengajaran, termasuk pola-pola akulturasi dan peranan pendidikan dalam pembangunan masyarakat.³⁰

3. Urgensi Filsafat Pendidikan

- a. Dengan berfikir filsafat seseorang bisa menjadi manusia, lebih mendidik dan membangun diri sendiri.
- b. Seseorang dapat menjadi orang yang dapat berfikir sendiri.

³⁰ Zuhairini, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bina Aksara, 1991), hlm. 18

- c. Memberikan dasar-dasar pengetahuan, memberikan pandangan yang sintesis pula sehingga seluruh pengetahuan merupakan satu kesatuan.
- d. Hidup seseorang tersebut dipimpin oleh pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang tersebut. Sebab itu mengetahui pengetahuan-pengetahuan terdasar berarti mengetahui dasar-dasar hidup diri sendiri.
- e. Bagi seorang pendidik filsafat mempunyai kepentingan istimewa karena filsafatlah yang memberikan dasar-dasar dari ilmu-ilmu pengetahuan lainnya yang mengenai manusia seperti misalnya ilmu mendidik.³¹

C. Hakikat Manusia

1. Manusia Sebagai Ciptaan Tuhan

Manusia merupakan makhluk multi dimensi karena hakikat manusia jika dilihat dari kedudukan kodratnya, manusia terdiri atas dua unsur yakni sebagai makhluk pribadi berdiri sendiri dan sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Sebagai makhluk pribadi berdiri sendiri, manusia dalam batas-batas tertentu memiliki kemauan bebas (*free-will*) yang menjadikan manusia memiliki kemandirian dan kebebasan. Sebagai makhluk Tuhan, manusia tidak bisa melepaskan diri dari ketentuan-ketentuan Tuhan (takdir-Nya). Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa paling sempurna dibandingkan dengan makhluk lainnya. Karena manusia mempunyai akal dan pikiran untuk berfikir secara logis dan dinamis, serta mampu membatasi diri dengan perbuatan yang tidak harus dilakukan, dan kita bisa memilih perbuatan mana yang positif dan mana yang negative.

Pada dasarnya manusia tersusun atas dua unsur yaitu materi dan immateri, jasmani dan rohani. Unsur materi (tubuh) manusia berasal dari tanah dan roh manusia berasal

³¹ Irvan Jaya Musrida Batosai, *Dasar, Tujuan, Dan Peranan Filsafat* diakses dari <https://Van88.Wordpress.Com/Dasar-Tujuan-Dan-Peranan-Filsafat/>, Pada tanggal 02 April 2015

dari substansi immateri. Tubuh mempunyai daya fisik jasmani yaitu mendengar, melihat, merasa, meraba, mencium dan daya gerak. Sedangkan roh mempunyai dua daya yaitu daya berfikir yang disebut dengan akal yang bepusat dikepala dan daya rasa yang berpusat di hati (Rohiman Notowidagdo 1996:17).

Menurut Mustafa Zahri (1976:121) unsur immateri pada manusia terdiri dari roh, qalbu, aqal, dan nafsu. Unsur-unsur immateri manusia diuraikan sebagai berikut:

a. Roh

Roh diartikan sebagai pemberian hidup dari Tuhan kepada manusia. Roh ini mendapat perintah dan larangan dari Tuhan. Bertanggung jawab atas segala gerak-geriknya dan memegang komando atas segala kehidupan manusia. Roh bukan jasad dan bukan pula tubuh. Keberadaannya tidak melekat pada sesuatu.

b. Hati (Qalb)

Menurut Al-Ghazali, *qalb* memiliki dua arti yaitu arti fisik dan metafisik. Arti fisik yaitu jantung, berupa segumpal daging yang berbentuk buak memanjang yang terletak di pinggir dada sebelah kiri. Sedangkan arti metafisik, yaitu batin sebagai tempat pikiran yang sangat rahasia dan murni, yang merupakan hal yang *lathif* (yang halus) yang ada pada diri manusia. Qalb ini bertanggung jawab kepada Tuhan, ditegur, dimarahi serta dihukum. Qalb menjadi bahagia apabila selalu ada di sisi Tuhan dan berusaha melepaskan dari belenggu selain Tuhan. Dengan qalb manusia dapat menangkap rasa, mengetahui dan mengenal sesuatu dan pada akhirnya memperoleh ilmu (Dawam Raharjo, 1987:7).

c. Potensi Manusia (Akal)

Manusia memiliki sesuatu yang tidak ternilai harganya, anugerah yang sangat besar dari Tuhan, yakni akal. Sebagai makhluk yang berakal, manusia dapat

mengamati sesuatu. Dalam pandangan Al-Ghazali, akal mempunyai empat pengertian yaitu:

- 1) Sebutan yang membedakan manusia dengan hewan.
- 2) Ilmu yang lahir disaat anak mencapai usia akil balig, sehingga dapat membedakan perbuatan baik dan buruk.
- 3) Ilmu-ilmu yang didapat dari pengalaman sehingga dapat dikatakan "siapa yang banyak pengalaman, maka ia orang yang berakal".
- 4) Kekuatan yang dapat menghentikan dorongan naluriyah untuk menerawang jauh ke angkasa, mengekang dan menundukkan syahwat yang selalu menginginkan kenikmatan (Ali Gharishah. Tt: 18-19) .

d. Nafsu

Nafsu dalam istilah psikologi lebih dikenal dengan sebutan daya karsa, dalam bentuk bereaksi, berusaha, berbuat, berkemauan, atau berkehendak. Pada prinsipnya nafsu selalu cenderung pada hal yang sifatnya keburukan, kecuali nafsu tersebut dapat dikendalikan dengan dorongan-dorongan yang lain, seperti dorongan akal, dorongan hati nurani yang selalu mengacu pada petunjuk Tuhan.

Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, secara kodrati dianugerahkan hak dasar yang disebut hak asasi tanpa perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Manusia juga memiliki suatu keluhuran dan martabat naluriyah, motivasi, atau pendorong manusia dalam berbagai hal. Manusia sebagai makhluk sosial tentu saja ingin memenuhi segala kebutuhannya baik kebutuhan primer, sekunder, ataupun kebutuhan tersier. Setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia dengan adanya sebuah dorongan akan pemenuhan suatu hal tertentu, yaitu motivasi. Motivasi merupakan suatu dorongan untuk mewujudkan perilaku tertentu yang terarah, sebagai pendorong

kemampuan, usaha, keinginan, menentukan arah dan menyeleksi tingkah laku kepada suatu tujuan tertentu. (Surya, 2003 : 107).

Dalam rumusan ilmu mantiq (logika), kita temukan sebuah rumusan tentang manusia dari hewan, yaitu *al-insan hayawanun nathiq*, yang artinya insan itu adalah hewan (bukan hewan) yang *nathiq*, yang mengeluarkan pendapat dan berkata-kata dengan mempergunakan pikirannya. Tegasnya, manusia adalah hewan yang berpikir.

Pada saat-saat tertentu dalam perjalanan hidupnya, manusia mempertanyakan tentang asal-usul alam semesta dan asal-usul keberadaan dirinya sendiri. Prof. Dr. R. F. Beerling, "sepanjang zaman telah dicoba orang menyatakan dengan berbagai macam cara, dimana letak hakikat perbedaan manusia, misalnya dengan binatang. Bahwa ia pandai tertawa, bahwa ia memiliki perasaan malu, bahwa ia membedakan antara yang baik dan yang buruk, bahwa ia memiliki kemauan yang bebas. Semuanya ini adalah sifat-sifat yang mungkin menimbulkan pandangan tentang manusia secara filsafat yang panjang lebar. Akan tetapi yang tipis sekali ialah bahwa manusia itu makhluk bertanya."³²

Manusia adalah makhluk pencari kebenaran, kebenaran yang dicari manusia ialah kebenaran tentang sesuatu yang menjadi masalah manusia atau yang dimasalahkan manusia. Ada tiga teori kebenaran yaitu sebagai berikut:

a. Teori Korespondensi

Teori korespondensi tentang kebenaran (*the correspondence theory of truth*) menyatakan bahwa kebenaran adalah kesesuaian antara pernyataan dengan kenyataan atau dengan kata lain pernyataan yang sesuai dengan kenyataan.

³² H. Endang Saifuddin Anshari, M.A., *Wawasan Islam: Pokok-pokok Pikiran tentang Paradigma dan Sistem Islam*, cet. I, (Jakarta: Gema Insani, 2004), hal. 8

b. Teori Konsistensi/koherensi

Teori konsistensi tentang kebenaran (*the consistence theory of truth*) menjelaskan bahwa kebenaran ialah kesesuaian antara suatu pernyataan dengan pernyataan lainnya yang sudah lebih dahulu kita ketahui, terima dan akui sebagai benar. Teori ini juga disebut teori penyaksian (yustifikasi) tentang kebenaran, karena memang menurut teori ini suatu putusan dianggap benar apabila mendapat penyaksian (yustifikasi) oleh putusan-putusan lainnya terdahulu yang sudah diketahui dan diakui sebagai benar.

c. Teori Pragmatis

Teori pragmatis tentang kebenaran (*the pragmatic theory of truth*) ialah bahwa suatu ucapan, dalil atau teori itu dianggap benar tergantung berfaedah atau tidaknya ucapan, dalil atau teori tersebut bagi manusia untuk bertindak dalam penghidupannya. Jadi, kriteria kebenaran pragmatis adalah:

- 1) Adakah kegunaannya (utility)
- 2) Dapatkah dikerjakan (workability)
- 3) Apakah pengaruhnya (satisfactory consequences) memuaskan atau tidak?³³

Keinginan hendak mengetahui kebenaran merupakan salah satu dari gerak asli pikiran manusia, demikian menurut S. Takdir Alisjahbana. Kebenaran dari dunia yang dilihat, didengar, dan dipikirkan merupakan kebenaran yang hendak dicari oleh manusia. Manusia belum puas dengan kenyataan yang dihadapinya secara langsung dengan panca inderanya. Ia mencari kebenaran yang tersembunyi dibalikny. Manusia akan berusaha

³³ Didiek Ahmad Supadie, Sarjuni. Pengantar Studi Islam, *et. II*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hal. 19-20.

mendapatkan kebenaran yang ia cari dengan pengetahuan yang dimilikinya.³⁴

Sebagai insan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, manusia harus mengabdikan kepada Sang Pencipta. Untuk mengabdikan kepada Sang Pencipta maka manusia harus memiliki ilmu agama. Manusia dapat menghayati agama melalui proses pendidikan agama, penanaman sikap dan kebiasaan dalam beragama dimulai sedini mungkin, meskipun masih terbatas pada latihan kebiasaan (*habit formation*). Tetapi sebagai pengembangan pengkajian lebih lanjut tentunya tidak dapat diserahkan hanya kepada satu pihak sekolah saja atau orang tua saja melainkan keduanya harus berperan. Untuk memenuhi kebutuhan manusia tentang pengetahuan agama, maka dimasukkannya kurikulum pendidikan agama di sekolah-sekolah. Tugas pendidikan agama yaitu membina pribadi manusia untuk mengerti, memahami, menghayati, dan mengamalkan aspek-aspek religi dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Selaras dengan pandangan manusia sebagai makhluk beragama, maka menggali nilai-nilai yang melandasi pendidikan itu hendaknya memperhatikan nilai-nilai yang bersumber pada Tuhan Yang Maha Esa dengan menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan akhirat.

2. Manusia Sebagai Makhluk Individu dan makhluk Sosial

Didalam diri manusia terdapat dua kepentingan yaitu kepentingan individu dan kepentingan bersama. Kepentingan individu didasarkan manusia sebagai makhluk individu, karena pribadi manusia yang ingin memenuhi kebutuhan pribadi. Kepentingan bersama didasarkan manusia sebagai makhluk sosial (kelompok) yang ingin memenuhi kebutuhan bersama. Manusia sebagai makhluk individu diartikan sebagai person atau perseorangan atau sebagai diri pribadi. Manusia sebagai diri pribadi

³⁴ S. Takdir Alisjahbana, *Pembimbing ke Filsafat*, (Jakarta: Pustaka Rakyat, 1952), hal.36-37

merupakan makhluk yang diciptakan secara sempurna oleh Tuhan Yang Maha Esa.³⁵

Manusia sebagai makhluk individu memiliki unsur jasmani dan rohani, unsur fisik dan psikis, unsur raga dan jiwa. Seorang individu adalah perpaduan antara faktor genotipe dan fenotipe. Faktor genotipe adalah faktor yang dibawa individu sejak lahir, ia merupakan faktor keturunan, dibawa individu sejak lahir. Kalau seorang individu memiliki ciri fisik dan karakter atau sifat yang dibawa sejak lahir, maka ia juga memiliki ciri fisik dan karakter atau sifat yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Faktor lingkungan ikut berperan dalam pembentukan karakteristik yang khas dari seseorang. Istilah lingkungan merujuk pada lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Lingkungan fisik seperti kondisi alam sekitarnya, baik itu lingkungan buatan seperti tempat tinggal (rumah) dan lingkungan bukan buatan. Lingkungan sosial merujuk pada lingkungan dimana seseorang individu melakukan interaksi sosial.³⁶

Selain sebagai makhluk individu, manusia juga sebagai makhluk sosial artinya manusia sebagai warga masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak mungkin dapat hidup sendiri atau mencukupi kebutuhan sendiri. Setiap manusia cenderung untuk berkomunikasi, berinteraksi, dan bersosialisasi dengan manusia lainnya. Telah berabad-abad konsep manusia sebagai makhluk sosial itu ada, yang menitikberatkan pada pengaruh masyarakat yang berkuasa kepada individu, yakni memiliki unsur-unsur keharusan biologis, yang terdiri dari :

- a. Dorongan untuk makan.
- b. Dorongan untuk mempertahankan diri.
- c. Dorongan untuk melangsungkan hubungan beda jenis.³⁷

³⁵ Rusmin Tumanggor, *dkk. ilmu sosial dan budaya*. (Jakarta: Kencana, 2010) hal 53

³⁶ Elly M. Setiadi, *Ilmu sosial dan budaya dasar* (Jakarta : Kencana, 2006) hal 59-62.

³⁷ Elly M. Setiadi, *Ilmu sosial dan budaya dasar* (Jakarta : Kencana, 2006) hal. 55

Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial juga dikarenakan pada diri manusia ada dorongan untuk berhubungan (berinteraksi) dengan orang lain. Ada kebutuhan sosial (Social need) untuk hidup berkelompok dengan orang lain. Ada kebutuhan sosial (social need) untuk hidup berkelompok dengan orang lain. Manusia berbeda dengan hewan, untuk mempertahankan hidupnya ia dibekali dengan akal. Insting yang dimiliki manusia sangat terbatas, ketika bayi lahir misalnya, ia hanya memiliki insting menangis, jika bayi lapar maka ia akan menangis, kedinginan pun ia akan menangis, pipis pun ia akan menangis. Manusia memiliki potensi akal untuk mempertahankan hidupnya. Namun potensi yang ada dalam diri manusia itu hanya mungkin berkembang bila ia hidup dan belajar ditengah-tengah manusia.

Pada hakikatnya manusia berperan ganda, yaitu sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Dalam berinteraksi dengan sekitar, ada hubungan secara vertikal dan hubungan secara horizontal. Manusia sebagai makhluk sosial artinya manusia tidak bisa hidup sendirian.

Ada tiga teori yang dapat membantu menerangkan modern dan kualitas hubungan antar manusia:

a. Teori transaksional (model pertukaran sosial)

Menurut teori ini, hubungan antarmanusia berlangsung mengikuti kaidah transaksional, yaitu apakah masing-masing merasa memperoleh keuntungan dalam transaksinya atau malah merugi.

b. Teori Peran

Menurut teori ini, sebenarnya dalam pergaulan sosial itu sudah ada scenario yang disusun oleh masyarakat, yang mengatur apa dan bagaimana peran setiap orang dalam pergaulannya.

c. Teori Permainan

Menurut teori ini, klasifikasi manusia itu hanya terbagi tiga, yaitu anak-anak, orang dewasa, dan orang tua.

Manusia memang tidak akan lepas dari berhubungan dengan orang lain. Dalam hubungan itu kita harus bisa memahami peranan dan kedudukan masing-masing. Jangan sampai terjadi kesalahan, karena itu, bisa membuat tidak harmonisnya hubungan kita dengan sesama manusia. Untuk menjaga hubungan yang harmonis sebagai individu dan makhluk sosial, umumnya setiap suku bangsa memiliki nilai-nilai dan tradisi yang dapat dikembangkan menjadi model kedamaian yang kondusif bagi ekeratan antar-suku bangsa, agama, ras, dan perbedaan lainnya. Dalam praktiknya hubungan transaksional ini bermacam-macam sifatnya. Adakalanya bersifat barter atau pertukaran langsung seperti jual beli. Dapat pula transaksional ini bersifat kekeluargaan atau kekerabatan.

Interaksi adalah proses dimana orang-orang berkomunikasi saling memengaruhi dalam pikiran dan tindakan. Interaksi sosial merupakan hubungan timbal balik antara individu dengan individu, antara kelompok dengan kelompok, antara individu dengan kelompok.

a. Interaksi sosial sebagai faktor utama dalam kehidupan.

Interaksi merupakan syarat utama terjadinya aktivitas-aktivitas sosial. Ada beberapa faktor-faktor yang mendasari berlangsungnya interaksi sosial yaitu :

1) Faktor Imitasi

Faktor imitasi mempunyai peranan sangat penting dalam proses interaksi sosial.

2) Faktor Sugesti

Yang dimaksud sugesti disini ialah pengaruh psikis, baik yang datang dari dirinya sendiri maupun dari orang lain, yang pada umumnya diterima tanpa adanya daya kritik.

3) Faktor Identifikasi

Di faktor ini dapat diketahui bahwa hubungan sosial yang berlangsung pada identifikasi adalah lebih mendalam daripada hubungan yang berlangsung atas proses-proses sugesti maupun imitasi.

4) Faktor Simpati

Simpati adalah perasaan tertariknya orang yang satu terhadap orang yang lain. Simpati timbul tidak atas dasar logis rasional, melainkan berdasarkan penilaian perasaan seperti juga pada proses identifikasi.

b. Syarat-syarat terjadinya interaksi sosial

Ada beberapa syarat terjadinya interaksi sosial, yaitu :

1) Adanya kontak sosial (Social Contact)

Kontak sosial ada yang bersifat positif dan ada yang bersifat negatif. Kontak sosial yang bersifat positif dapat mengarahkan seseorang pada suatu pertentangan bahkan dapat menyebabkan tidak terjadinya interaksi sosial.

2) Adanya komunikasi

Komunikasi adalah proses menyampaikan pesan dari satu pihak ke pihak lain sehingga terjadi pengertian bersama.

Selain itu kontak sosial dapat terjadi dan berlangsung dalam tiga bentuk, yaitu :

- 1) Antara orang perorangan.
- 2) Antara orang perorangan dengan suatu kelompok atau sebaliknya.
- 3) Antara kelompok manusia dengan kelompok manusia lainnya.

Dinamika interaksi Sosial terbagi tiga, yaitu:

1) Akulturasi Budaya

Akulturasi adalah proses sosial yang timbul apabila suatu kelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu sedemikian rupa dipengaruhi oleh unsur-unsur suatu kebudayaan lain sehingga unsur-unsur lain itu diterima dan disesuaikan dengan unsur-unsur kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan hilangnya identitas kebudayaan asli.

2) Proses Asimilasi dapat terjadi jika terjadi hal sebagai berikut :

- a) Kelompok-kelompok manusia dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda-beda. Kelompok manusia ini saling bergaul secara intensif dalam kurun waktu yang lama.
- b) Pertemuan budaya-budaya antarkelompok itu masing-masing berubah watak khasnya dan unsur-unsur kebudayaannya saling berubah sehingga memunculkan.
- c) suatu watak kebudayaan yang baru.
- d) Inovasi

Proses pembaruan(Inovasi) dapat digolongkan dalam bentuk :

- 1) Discovery adalah penemuan unsur-unsur kebudayaan yang baru berupa gagasan individu atau kelompok.
- 2) Invention adalah tindak lanjut inovasi berupa pengakuan, penerimaan, dan penerapan proses *discovery* oleh masyarakat.³⁸

Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial, juga karena pada diri manusia ada dorongan dan kebutuhan untuk berhubungan (interaksi) dengan orang lain, manusia juga tidak akan bisa hidup sebagai manusia kalau tidak hidup di tengah-tengah manusia. Tanpa bantuan manusia lainnya, manusia tidak mungkin bisa berjalan dengan tegak. Dengan bantuan orang lain, manusia bisa menggunakan tangan, bisa berkomunikasi atau bicara, dan bisa mengembangkan seluruh potensi kemanusiaannya.

Dapat disimpulkan, bahwa manusia dikatakan sebagai makhluk sosial, karena beberapa alasan, yaitu :

1. Karena manusia tunduk pada aturan yang berlaku.
2. Perilaku manusia mengharapkan suatu penilaian dari orang lain.
3. Manusia memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain.
4. Potensi manusia akan berkembang bila ia hidup di tengah-tengah manusia.

Ciri manusia dapat dikatakan sebagai makhluk sosial adalah adanya suatu bentuk interaksi sosial didalam hubugannya dengan makhluk sosial lainnya yang dimaksud adalah dengan manusia satu dengan manusia yang lainnya. Secara garis besar faktor-faktor personal yang mempengaruhi interaksi manusia terdiri dari tiga hal yakni :

1. Tekanan emosional. Ini sangat mempengaruhi bagaimana manusia berinteraksi satu sama lain.
2. Harga diri yang rendah. Ketika kondisi seseorang berada dalam kondisi manusia yang direndahkan maka akan memiliki hasrat yang tinggi untuk berhubungan dengan orang lain kondisi tersebut dimana orang yang direndahkan membutuhkan kasih sayang orang lain atau dukungan moral untuk membentuk kondisi seperti semula.

3. Isolasi sosial. Orang yang terisolasi harus melakukan interaksi dengan orang yang sepaham atau sepemikiran agar terbentuk sebuah interaksi yang harmonis.³⁹

D. Hakikat Kebudayaan

1. Pengertian Kebudayaan

Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta yaitu *buddhayah*, yang merupakan bentuk jamak dari *buddhi* (budi atau akal) diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi, dan akal manusia. Dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut *culture*, yang berasal dari kata Latin Colere, yaitu mengolah atau mengerjakan. Bisa diartikan juga sebagai mengolah tanah atau bertani. Kata *culture* juga kadang diterjemahkan sebagai “kultur” dalam bahasa Indonesia. Budaya adalah suatu pola hidup menyeluruh. budaya bersifat kompleks, abstrak, dan luas. Banyak aspek budaya turut menentukan perilaku komunikatif. Unsur-unsur sosio-budaya ini tersebar, dan meliputi banyak kegiatan sosial manusia.⁴⁰

Sedangkan secara terminologi budaya adalah suatu hasil dari budi dan atau daya, cipta, karya, karsa, pikiran dan adat istiadat manusia yang secara sadar maupun tidak, dapat diterima sebagai suatu perilaku yang beradab. Sedangkan organisasi adalah kesatuan (*Entity*) sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan.

Menurut Koenjaraningrat, budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sansekerta yaitu *buddhayah*, bentuk jamak dari *buddhi* yang diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Berpikir adalah

³⁹ <http://pumariksa.blogspot.com/2013/03/makalah-hakekat-manusia-sebagai-mahluk.html>

⁴⁰ Deddy Mulyana dan Jalaluddin Rakhmat. 2006. *Komunikasi Antarbudaya: Panduan Berkomunikasi dengan Orang-Orang Berbeda Budaya*. Bandung: Remaja Rosdakarya. hal. 25

perbuatan operasional yang mendorong untuk aktif berbuat demi kepentingan dan peningkatan hidup manusia.⁴¹

Kenurut Ki Hajar Dewantara, kebudayaan berarti buah budi manusia adalah hasil perjuangan manusia terhadap dua pengaruh kuat, yakni zaman dan alam yang merupakan bukti kejayaan hidup manusia untuk mengatasi berbagai rintangan dan kesukaran di dalam hidup dan penghidupannya guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang pada lahirnya bersifat tertib dan damai.⁴² kebudayaan dapatlah dilihat sebagai dialektika masa lampau dan masa depan yang bersintesis pada masa sekarang.⁴³

Konsep kebudayaan berhubungan dengan beberapa aspek luar yang hendak diteliti oleh seorang ilmuwan. konsep-konsep yang dibuat membantu penenliti dalam melakukan pekerjaannya sehingga ia tahu apa yang harus sipelajari. Salah satu yang diperhatikan dalam penelitian Antropologi adalah perbedaan dan persamaan mahluk manusia dengan mahluk bukan manusia seperti simpanse atau orang utan yang secara fisik banyak mempunyai kesamaan-kesamaan.⁴⁴ Semua materi yang terkandung dalam suatu kebudayaan diperoleh manusia secara sadar lewat proses belajar. Lewat kegiatan belajar inilah diteruskan kebudayaan dari generasi yang satu kepada generasi selanjutnya. Dengan demikian, kebudayaan yang telah lalu bereksistensi pada masa kini dan kebudayaan masa kini disampaikan ke masa yang akan

⁴¹ Abraham Nurcahyo dan Yudi Hartono, *Pengantar Antropologi; Bahan Ajar Untuk Peguruan Tinggi*, (Magetan: Lembaga Edukasi Swastika, 2008), hlm. 37

⁴² Abraham Nurcahyo dan Yudi Hartono, *Pengantar Antropologi; Bahan Ajar Untuk Peguruan Tinggi*, (Magetan: Lembaga Edukasi Swastika, 2008), hlm. 38

⁴³ Hans D. Jaeng.2000. *Manusia, kebudayaan dan lingkungan*. Yogyakarta : pustaka pelajar.hlm.67

⁴⁴ Abraham Nurcahyo dan Yudi Hartono, *Pengantar Antropologi; Bahan Ajar Untuk Peguruan Tinggi*, (Magetan: Lembaga Edukasi Swastika, 2008), hlm. 39

datang. Kebudayaan mempunyai kemampun mengikat waktu.⁴⁵

Dalam kehidupan masyarakat sehari-hari tidak terlepas dari ikatan budaya yang diciptakan. Ikatan budaya tercipta oleh masyarakat yang bersangkutan, baik dalam keluarga, organisasi, bisnis maupun bangsa. Budaya membedakan masyarakat satu dengan yang lain dalam cara berinteraksi dan bertindak menyelesaikan suatu pekerjaan. Budaya mengikat anggota kelompok masyarakat menjadi satu kesatuan pandangan yang menciptakan keseragaman berperilaku atau bertindak. Seiring dengan bergulirnya waktu, budaya pasti terbentuk dalam organisasi dan dapat pula dirasakan manfaatnya dalam memberi kontribusi bagi efektivitas organisasi secara keseluruhan. Budaya organisasi mengacu pada sistem makna bersama yang dimiliki oleh anggota yang membedakan organisasi dari organisasi lain.⁴⁶

Manusia dalam kehidupannya memiliki tiga fungsi, sebagai makhluk Tuhan, individu dan sosial budaya, yang saling berkaitan dimana kepada Tuhan memiliki kewajiban untuk mengabdikan pada Tuhan, sebagai individu harus memenuhi segala kebutuhan pribadinya dan sebagai makhluk sosial budaya harus hidup berdampingan dengan orang lain dalam kehidupan yang selaras dan saling membantu.⁴⁷ Sebagai makhluk sosial manusia akan hidup bersama dengan manusia lain yang akan melahirkan suatu bentuk kebudayaan. Karena kebudayaan itu sendiri diperoleh manusia dari proses belajar pada lingkungan juga hasil pengamatan langsung. Kebudayaan itu dapat diterima dengan tiga bentuk:

- a. Melalui pengalaman hidup saat menghadapi lingkungan.
- b. Melalui pengalaman hidup sebagai makhluk sosial.

⁴⁵ Abraham Nurcahyo dan Yudi Hartono, *Pengantar Antropologi; Bahan Ajar Untuk Peguruan Tinggi*, (Magetan: Lembaga Edukasi Swastika, 2008), hlm. 40

⁴⁶ Stephen P. Robbins, Timothy A Judge. *Organizational Behavior*. America: Pearson Educational. 2013. hal. 512

⁴⁷ Elly M. Setiadhi. *Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar*, Kencana, Jakarta, 2012, hal. 48

- c. Melalui komunikasi simbolis (benda ,tubuh, gerak tubuh, peristiwa dan lain yang tahu sejenis).

Karena tiap kebudayaan berbeda namun pada dasarnya memiliki hakikat yang sama, yaitu:

- a. Terwujud dan tersalurkan lewat perilaku manusia
- b. Sudah ada sejak lahirnya generasi dan tetap ada setelah pengganti mati
- c. Diperlukan manusia yang diwujudkan lewat tingkah laku
- d. Berisi aturan yang berisi kewajiban, tindakan yang diterima atau tidak, larangan, dan pantangan.⁴⁸

2. Wujud kebudayaan

Talcot Persons dan A.L Kroeber membedakan wujud budaya sebagai suatu sistem dari gagasan-gagasan serta konsep-konsep dan wujud budaya manusia sebagai rangkaian dan aktivitas manusia. Menurut Koentjaraningrat (1981), kebudayaan mempunyai 3 wujud yaitu :

- a. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan dan sebagainya.
- b. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas berpola dari manusia dan masyarakat.
- c. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.
- d. Berdasarkan wujudnya kebudayaan dapat digolongkan menjadi dua komponen yaitu :

1) Kebudayaan Material

Kebudayaan material mengacu pada semua ciptaan masyarakat yang nyata, konkret. Termasuk dalam kebudayaan material ini adalah temuan-temuan yang dihasilkan dari suatu penggalian arkeolog seperti : mangkuk, tanah liat, perhiasan, senjata, dan sebagainya kebudayaan material juga mencakup barang-barang

⁴⁸ Elly M. Setiadi. *Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar*, Kencana, Jakarta, 2012, hal.48

seperti televisi, pesawat terbang, stadion olahraga, pakaian, dan mesin cuci.

2) Kebudayaan nonmaterial

Kebudayaan nonmaterial adalah ciptaan-ciptaan abstrak yang diwariskan dari generasi kegenerasi, misalnya dongeng, cerita rakyat , lagu dan tarian masyarakat.⁴⁹

3. Unsur-unsur kebudayaan

Kuntjaraningrat (1974) membagi kebudayaan menjadi unsur-unsur yang terdiri dari sistem religius dan upacara keagamaan, sistem dan organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan, bahasa, kesenian sistem mata pencaharian, serta sistem teknologi dan peralatan. Kebudayaan sebagai sebuah keseluruhan dari kehidupan masyarakat. Menurut C. Kluckhohn terdapat 7 unsur dalam kebudayaan yaitu : Bahasa, Sistem pengetahuan, Organisasi social, Sistem peralatan hidup dan teknologi, Sistem mata pencaharian, Sistem religi, Kesenian.⁵⁰

4. Fungsi kebudayaan

Menurut ahli Antropologi Amerika Ralph Linton menganggap bahwa kebudayaan adalah warisan sosial yang mempunyai dua fungsi yaitu sebagai fungsi bagi penyesuaian diri dengan masyarakat dan fungsi bagi penyesuaian diri dengan lingkungan. Masyarakat dan budaya saling bergantung satu sama lain. Implementasi penyesuaian diri antara masyarakat dan kebudayaan berlangsung dalam proses-proses sebagai berikut:

a. Sosialisasi

Sosialisasi adalah proses interaksi terus menerus yang memungkinkan manusia memperoleh identitas diri serta

⁴⁹ Abraham Nurcahyo Yudi Hartanto, *Pengantar Antropologi Bahan Ajar untuk Perguruan Tinggi* (Magetan:Lembaga Edukasi Swastika, 2008), hlm. 53

⁵⁰ Abraham Nurcahyo Yudi Hartanto, *Pengantar Antropologi Bahan Ajar untuk Perguruan Tinggi* (Magetan:Lembaga Edukasi Swastika, 2008), hlm. 56

memperoleh ketrampilan sosial. Proses ini dimulai sejak manusia lahir ke dunia (bayi). Dalam kehidupannya maka masyarakat terdapat norma-norma dan aturan-aturan yang harus ditaati setiap masyarakat. Dalam proses sosialisasi antara golongan sosial dan golongan ekonomi terdapat perbedaan misalnya antara keluarga yang kaya berkecukupan dengan keluarga gelandangan berkekurangan, maka pola asuhnya juga berbeda.

b. Enkulturas

Enkulturas artinya pembudayaan, maksudnya adalah proses membudayakan anak manusia agar menjadi manusia yang berbudaya. Manusia yang berbudaya diawali di dalam sistem kehidupan bersama yang disebut kelompok lokal yang meliputi lebih dari satu keluarga atau satu keluarga yang diperluas dimana kelompok lokal atau bentuk masyarakat harus mempunyai tatanan atau biasa disebut dengan pranata. Menurut Koentjaraningrat pranata adalah sistem norma atau aturan mengenai suatu aktivitas masyarakat yang khusus. Oleh adanya pranata maka perbedaan-perbedaan menjadi beraturan. Menurut J. Van Baal perbedaan itu meliputi jenis kelamin, umur, tempat dan kekerabatan. Menurut Arnold van Gennep kehidupan manusia penuh dengan perubahan-perubahan status dari status tertentu ke status lain yang ditandai dengan adanya upacara seperti kelahiran, pertunangan, perkawinan dll. Dalam antropologi peralihan status tertentu ke status lain disebut dengan inisiasi yaitu tindakan penegralan dalam soal-soal yang sebelumnya tidak diketahui dan harus diketahui oleh orang-orang dewasa.⁵¹

c. Internalisasi

Internalisasi adalah proses penerimaan dan menjadikan warisan sosial (pengetahuan budaya) sebagai isi

⁵¹ Abraham Nurcahyo dan Yudi Hartono, *Pengantar Antropologi; Bahan Ajar Untuk Peguruan Tinggi*, (Magetan: Lembaga Edukasi Swastika, 2008), hlm. 43-45

kepribadian yang dinyatakan dalam perilaku sehari-hari selama hayat dikandung badan. Proses internalisasi berlangsung sepanjang masa-masa pertumbuhan dan perkembangan anak ditengah lingkungan masyarakat. Dengan adanya pengalaman seseorang memiliki pengetahuan dan nilai-nilai ideal atau sistem nilai dan dinyatakan dalam perilaku. Sistem nilai dapat bersumber dari unsur-unsur kebudayaan. Menurut Koentjoroningrat kebudayaan meliputi tujuh unsur, yaitu: Bahasa, Sistem pengetahuan, Organisasi Sosial, Sistem peralatan hidup dan teknologi, Sistem mata pencaharian hidup, Sistem religi dan kesenian. Pengalaman memiliki sistem nilai seseorang yang dibedakan oleh masyarakat dan budaya sebagai tempat internalisasi berlangsung.

Menurut Antropolog Hildred Geertz Indonesia terdapat banyak adat istiadat yang berbeda-beda yang membentuk kepribadian masyarakat mendukung adat istiadatnya. Namun kepribadian rata-rata dapat diuraikan menjadi kepribadian individu-individu yaitu ciri-ciri watak individu yang konsisten yang berbeda dengan individu lain, dimana ciri-ciri tersebut dibedakan oleh perbedaan pengetahuan, kehendak keinginan serta perasaan antara satu individu dengan individu lain. Menurut Dananjaya Indonesia sampai saat ini masih bersifat Bhineka dari pada tunggal ika, padahal semboyan Indonesia adalah Bhineka tunggal ika.⁵²

⁵² Abraham Nurcahyo dan Yudi Hartono, *Pengantar Antropologi; Bahan Ajar Untuk Peguruan Tinggi*, (Magetan: Lembaga Edukasi Swastika, 2008), hlm. 42

BAB II

HAKIKAT PENDIDIKAN MULTIKULTURALISME

A. Antara Pluralisme dan Multikulturalisme

Multikulturalisme merupakan pengakuan atas pluralisme budaya. Pluralisme budaya merupakan suatu proses internalisasi nilai-nilai di dalam suatu komunitas. John Dewey seorang filsuf pendidikan, telah melahirkan karya besarnya mengenai hubungan antara demokrasi dan pendidikan (Tilaar, 2004: 1789). Dewey mengaitkan antara proses demokrasi dan proses pendidikan. Demokrasi bukan hanya masalah bentuk pemerintahan, tetapi merupakan suatu *way of life*. Sebagai *way of life* dari suatu komunitas, maka hal itu tidak mungkin dicapai tanpa proses pendidikan. Proses pendidikan itu sendiri seharusnya merupakan suatu proses demokrasi. Demikian cara berpikir John Dewey dalam memelihara dan mengembangkan suatu masyarakat demokrasi.

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat pluralis dan multikultural. Indonesia terkenal dengan pluralitas suku bangsa yang mendiami kepulauan nusantara. Di dalam penelitian etnologis misalnya, diketahui bahwa Indonesia terdiri atas kurang lebih 600 suku bangsa dengan identitasnya masing-masing serta budaya yang berbeda-beda. Selain dari kehidupan suku-suku tersebut yang terkonsentrasi pada daerah-daerah tertentu, terjadi pula konsentrasi suku-suku di tempat lain karena migrasi atau karena mobilisasi penduduk yang cepat. Melalui sensus 2000 tercatat 101 suku bangsa di Indonesia dengan jumlah total penduduk 201.092.237 jiwa sebagai warga Negara (Suryadinata, 2003: 101). Kepulauan nusantara merupakan ajang pertemuan dari agama-agama besar di dunia. Penyebaran agama-agama besar tersebut tidak terlepas dari letak geografis kepulauan nusantara di dalam perdagangan dunia. Pengaruh-pengaruh penyebaran agama Hindu, Budha, Islam, Katolik, Kristen, serta agama-agama juga kepercayaan lainnya sangat berpengaruh terhadap eksistensi

Nusantara. Membangun masyarakat multi etnis dan budaya seperti Indonesia, menuntut suatu pandangan baru mengenai nasionalisme Indonesia. Nasionalisme Indonesia yang lahir sejak kebangkitan nasional oleh pemuda Indonesia telah mengalami perubahan-perubahan di dalam perkembangan selanjutnya, khususnya di era reformasi. Perlu membangun sebuah nasionalisme Indonesia yang multikultural, yang diimplementasikan lewat pendidikan nasional. Pandangan baru atau rumusan kembali mengenai nasionalisme Indonesia perlu didukung oleh warga negara Indonesia yang cerdas juga bermoral.

Pluralisme bangsa adalah pandangan yang mengakui adanya keragaman di dalam suatu bangsa, seperti yang ada di Indonesia. Istilah plural mengandung arti berjenis-jenis, tetapi pluralisme bukan berarti sekedar pangakuan terhadap hal tersebut. Namun mempunyai implikasi-implikasi politis, sosial, ekonomi, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, pluralisme berkaitan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Banyak negara yang menyatakan dirinya sebagai negara demokrasi tetapi tidak mengakui adanya pluralisme di dalam negaranya itu.

Kebudayaan merupakan salah satu modal pokok dalam kemajuan suatu bangsa. Dasar multikulturalisme antara lain adalah menggali kekuatan suatu bangsa yang tersembunyi di dalam budaya yang beragam. Multikulturalisme dapat juga menumbuhkan sikap fanatisme budaya dalam masyarakat. Apabila fanatisme muncul maka akan terjadi pertentangan di dalam kebudayaan yang pada akhirnya akan menghancurkan seluruh sendi-sendi kehidupan dari suatu komunitas. Apabila multikulturalisme digarap dengan baik, maka akan muncul rasa penghargaan dan toleransi terhadap sesama komunitas dengan budayanya masing-masing. Kekuatan di dalam masing-masing budaya dapat disatukan dalam mewujudkan kesatuan bangsa. Kekuatan bersama itu dapat menjadi pengikat yang kuat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sikap saling menghargai satu sama lain dalam keragaman adalah tujuan dari multikulturalisme itu sendiri.

B. Sejarah Multikulturalisme

Manusia tidak pernah ditakdirkan untuk sama seutuhnya, namun hanya ditakdirkan untuk berbeda. Realitas hidup manusia beragama dan multidimensi. Terdapat perbedaan-perbedaan mendasar identitas manusia sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial. Perbedaan-perbedaan ini pada awalnya menjadi fakta kajian dan menimbulkan debat filosofis-historis dalam kurun waktu yang panjang. Terdapat aliran pemikiran yang coba memberikan penilaian kritis atas realitas perbedaan manusia ini, atau yang disebut pemikiran monismemoral.

Monisme moral mengklaim bahwa hanya ada satu jalan hidup yang sungguh manusiawi, paling baik dan yang lainnya adalah tidak utuh (**Parekh, 2008:32**). Artinya hanya ada satu nilai tertinggi dalam hidup manusia dan nilai-nilai lain hanyalah sebagai instrumen atau sarana saja bagi manusia untuk mencapai nilai tersebut. Monisme mengklaim bahwa nilai kebenaran misalnya harus bersifat tunggal. Bagi kaum monisme, kejahatan, seperti kesalahan bisa terjadi dalam berbagai bentuknya, namun yang baik seperti kebenaran, pada dasarnya bersifat tunggal menurut kodratnya (**Parekh, 2008: 30**). Setiap budaya manusia bisa berbeda dalam menghayati nilai kebaikan itu, namun sama-sama menjunjung tinggi satu moralitas yang sama. Moralitas yang sama itu tampil dalam hal dimensi kemanusiaan, struktur alam dunia, dan ide tentang Tuhan yang menyatukan manusia dari latar belakang budaya apapun.

Untuk meneguhkan pandangan mereka, penganut monisme menunjukkan asumsi-asumsi penting sebagai dasar klaim argumentasi mereka. Kaum monisme merumuskan klaim-klaim asumtif tersebut (**Parekh, 2008:35-36**) sebagai berikut:

1. Keseragaman kodrati semua manusia kendatipun terpisah oleh ruang dan waktu, sama-sama memiliki kapasitas unik, motivasi dan cita-citahidup.
2. Terdapat keunggulan moral akan kesamaan atas perbedaan

yang ada.

3. Menegaskan karakter manusia yang *transcendental* secara sosial.
4. Terdapat ilmu pengetahuan total tentang sifat manusia
5. Kodrat manusia sebagai dasar hidup baik menegaskan kesatuan kebaikan dan kebenaran

Bentuk paling nyata monisme terdapat dalam dua aliran besar yakni: naturalisme dan kulturalisme. Naturalisme menekankan kesetaraan subjek manusia pada semua lapisan budaya masyarakat. Menurut Parekh (2008, hal. 158), naturalisme memandang bahwa manusia pada hakikatnya sama dan perbedaan-perbedaan yang mereka miliki adalah dangkal secara moral. Klaim naturalisme ini lalu membuat reaksi dari aliran kulturalisme. Kulturalisme menegaskan manusia tidak sama secara individual, tetapi harus sama secara kultural. Kulturalisme menyatukan kesamaan-kesamaan universal yang *de facto* terdapat pada semua budaya (Sutrisno, 2011:151). Universalitas semacam ini akan membentuk model budaya yang homogen. Muncullah istilah *monokulturalisme* yang mengidealkan keseragaman budaya-budaya. Monokulturalisme mirip homogenitas. Naturalisme dan kulturalisme sama-sama terjebak dalam *mainstream* yang ekstrem, parsial, dan saling mempersalahkan. Keduanya sama-sama mendukung pandangan monisme moral. Padahal monisme moral memiliki kekurangan fundamental dalam memposisikan manusia sebagai makhluk berbudaya dalam keanekaragaman. Monisme moral memiliki cacat dalam dirinya karena memandang perbedaan sebagai sebuah penyimpangan atau patologi moral (Parekh, 2008:70). Semua manusia harus sama saja! Perspektif ini tidak ideal, kurang lengkap dan parsial. Di titik inilah kita memerlukan paradigma alternatif untuk mengatasi persoalan monisme moral ini. Maka dibutuhkan suatu paradigma alternatif *fair-holistik* mengenai keanekaragaman moral dan kultural sebagai kerangka teoretik lebih memuaskan tentang “manusia dan

kebudayaan” (Fios: 2013). Bagian berikut ini akan dibahas pandangan tentang pluralism budaya.

Kita sudah melihat pandangan monisme-monokultural pada bagian sebelumnya yang dianggap memiliki kelemahan atau cacat dalam memandang kebudayaan dalam konteks keanekaragaman budaya. Aliran yang mengkritik pandangan monokultur-monistik tampil dalam filosofi pluralisme budaya. Pluralisme budaya memiliki pandangan bahwa realitas sosial manusia pada dasarnya merupakan suatu keragaman atau pluralistik. Di sini akan dikemukakan tiga pemikir utama yakni Vico, Montesquieu dan Herder yang meletakkan dasar filosofis penting terkait idealisme pluralisme atau keanekaragaman budaya umat manusia yang sedikit lebih maju cara berpikirnya daripada klaim-klaim monisme.

Vico adalah orang yang pertama kali menggunakan pandangan historis mengenai manusia dan menekankan keunikan dari setiap masyarakat (Parekh, 2008: 77). Menurut Vico, faktor geografis, sejarah dan refleksi diri, organisasi masyarakat berbeda memungkinkan setiap masyarakat tidak seragam, melainkan berdiri di atas prinsip-prinsip hidup yang berbeda. Setiap masyarakat mengembangkan kemampuan diri, menciptakan kebutuhan dan menggagas cita-cita (tujuan hidup) sendiri, dan mengembangkan keyakinan serta filosofi masing-masing dengan cara yang unik-khas. Setiap masyarakat mengekspresikan pikiran dan menghayati bentuk/cara hidup yang berbeda satu sama lain. Fenomena ini menentukan kompleksitas setiap masyarakat dan kebudayaan manusia. Karena masyarakat sangat berbeda, Vico berpendapat bahwa memahami masyarakat merupakan aktivitas yang sangat kompleks (Parekh, 2008: 78). Tiap masyarakat memiliki rasionalitas internal sendiri, yang sering kali berbeda dari rasionalitas eksternal penilaian orang lain dari luar. Akal budi biasanya hanya memperhatikan hal-hal yang universal dari setiap budaya, sehingga terkadang mengabaikan dimensi kekhususan dan spesifikasinya. Karena itu tindakan memahami/menilai budaya lain, patut diklaim sebagai suatu

sesat pikir budaya. Kendatipun demikian, Vico merekomendasikan suatu humanisme-rasional yang dikembangkan untuk menilai agama, masyarakat, etnis dan epos sejarah bangsa manusia yang berbeda. Vico mengakui keanekaragaman kultural dan meyakini setiap masyarakat mengusahakan perkembangan budaya masing-masing ke arah yang diidealkan mereka.

Montesquieu juga sangat sensitif akan persoalan keanekaragaman kultural seperti Vico, namun memiliki pandangan agak berbeda. Montesquieu tertarik pada kategori masyarakat Eropa dan Non Eropa. Bagi Montesquieu, keanekaragaman kultural adalah sifat kehidupan manusia yang berkembang perlahan-lahan dan mutlak (Parekh, 2008: 84). Mustahil kita menemukan dua masyarakat yang persis sama di bumi ini. Tiap masyarakat mempunyai adat-istiadat, praktik, sistem hukum, struktur keluarga, bentuk pemerintahan yang mendorong keinginan, tindakan/sikap dan cita-cita moral berbeda satu sama lain. Kendatipun masyarakat memiliki sistem hukum adat maupun tradisi yang sama, pengaruhnya pada setiap individu pun berbeda-beda. Setiap bangsa manusia memiliki kapasitas rasional untuk berkembang ke tingkat kemajuan yang lebih baik dan lebih tinggi dalam hal peradabannya.

Bagi Herder, setiap kebudayaan secara unik dihubungkan dengan pengalaman sebuah kelompok masyarakat (*volk*), nenek moyang dan keturunan historisnya, dan mengungkapkan cara di mana para anggota kelompok masyarakat tersebut memahami dan secara imajinatif menafsirkan pengalaman-pengalaman (Parekh, 2008: 98). Faktor lingkungan alam berperan sangat sentral dalam pembentukan budaya setiap masyarakat. Alam telah membuat setiap manusia dan budaya ada secara berbeda. Dimensi akal budi manusia memungkinkan setiap manusia melakukan kreativitas-inovatif dalam alam untuk mengembangkan dirinya. Tiap kebudayaan memiliki identitas tunggal, bagus, tak dapat dipahami, identitas yang tidak dapat dihilangkan,

melekatkan visi berbeda tentang kehidupan manusia, merealisasikan kapasitas manusia yang berbeda, menanamkan kebaikan dan perilaku yang berbeda, dan memiliki keunikan 'inti kebahagiaan', spirit, etos dan atmosfer berbeda (Parekh, 2008: 98). Setiap komunitas budaya memiliki bahasa/verbalisme masing-masing yang digunakan dalam cara berkomunikasi. Tiap manusia bertumbuh utuh dalam kemanusiaan di dalam budaya. Di luar budaya, manusia pincang dalam pertumbuhannya! Bagi Herder, pengaruh budaya meresap ke dalam cara pikir, perasaan dan penilaian, makanan, pakaian, gerak secara fisik, cara berbicara, cara mengendalikan diri atau sosial, kesenangan, sakit, cita-cita, mimpi, imajinasi, kepekaan estetika dan moral. Sebuah bangsa, menurut Herder, adalah 'keluarga besar' yang merepresentasi sebuah bahasa, budaya, masyarakat dan 'sebuah karakter nasional' dan berpeluang untuk menghilangkan kesatuan internal budaya masing-masing karena tujuan akhir yakni membentuk sebuah budaya nasional.

Ketiga pemikir di atas sama-sama menunjukkan kritik terhadap monisme moral dan memberikan dasar alternatif bagi munculnya suatu perspektif pluralisme budaya. Ketiga pemikir dimaksud membuka arah baru bagi pandangan relativisme budaya. Pandangan ini mengakomodasi semua manusia dalam berbagai budaya untuk bertumbuh- kembang menuju cita-cita masyarakatnya sendiri yang lebih baik dan lebih tinggi dalam peradabannya. Kendatipun masih memiliki kelemahan, pemikiran pluralisme ini sudah lebih maju dari monisme dan meletakkan dasar penting bagi konstruksi sebuah multikulturalisme budaya.

Kelemahan gagasan ketiga pemikir pluralisme budaya (Parekh, 2008: 110-112) di atas dapat dijabarkan dalam pokok-pokok pikiran sebagai berikut:

1. Mereka memandang kebudayaan sebagai satu-kesatuan organis dan terintegrasi, dan mengabaikan keanekaragaman serta ketegangan internalnya (*fallacy of holism*).
2. Mereka mengasumsikan kebudayaan merupakan unit

tersendiri, memiliki jiwa, etos atau prinsip organisasi, dan bisa diindividualisasikan serta dibedakan satu dengan yang lainnya (*fallacy of distinctness*).

3. Mereka cenderung memiliki pandangan statis tentang kebudayaan (*positivist, historicist or end of history fallacy*).
4. Mereka melihat setiap kebudayaan sebagai ekspresi organis dan unit dari semangat, jiwa, karakter nasional, tingkat perkembangan mental, atau hasrat dan insting terdalam dari masyarakat bersangkutan (*fallacy of ethnicization of culture*).
5. Mereka memiliki pandangan yang sangat konservatif terhadap kebudayaan (*fallacy of closure*).
6. Ketiganya terutama Herder melihat kebudayaan sebagai sejenis agen kolektif yang bertindak otonom, menguasai, menuntut atau mengekspresikan dirinya sendiri dalam suatu institusi terpercaya & praktik-praktik tertentu, dan mengikuti logika hukum internalnya sendiri (*fallacy of cultural determinism*).
7. Mereka memisahkan kebudayaan dari struktur ekonomi dan politik masyarakat yang lebih luas, mengabaikan konsolidasi antar budaya dengan konteks umum (*fallacy of cultural autonomy*).

Karena monisme dan pluralisme belum cukup maksimal dalam mengkonseptualisasikan manusia dan kebudayaan, konstruksi sebuah perspektif berparadigma multikulturalisme menjadi *conditio sine qua non* (mutlak) di atas jagad realitas sosial budaya manusia yang berbeda-beda di muka bumi ini. Pada awalnya multikulturalisme muncul untuk menyikapi para imigran dari negara lain yang masuk ke negara tertentu. Sejak tahun 1960 hingga 1970-an arus gelombang imigran di negara-negara Barat hampir tak bisa terbendung. Ketika para imigran masuk ke suatu negara baru, mereka pun menuntut pengakuan akan identitas budaya mereka di negara baru sebagai wujud aspirasi memperjuangkan hak-haknya. Di sini muncul problem dilematis budaya. Di satu sisi identitas perbedaan budaya tak dapat ditolak secara informal, sementara di sisi lain identitas

dimaksud perlu diakui secara formal dalam konteks nasional negara tujuan yang baru. Mau tidak mau setiap individu dituntut untuk bersikap terbuka dan menghargai kenyataan perbedaan budaya yang ada.

Hans George Gadamer pernah mengatakan: "*Wir muessen doch miteinander leben lernen!*". Terjemahan kata-kata berbahasa Jerman ini kira-kiranya bermakna: "Kita harus belajar hidup bersama". Gadamer sesungguhnya mendeklarasikan suatu kebenaran mendasar bahwa kita manusia masih harus terus belajar untuk hidup bersama dalam praksis sosial kita. Dan kita mampu untuk melakukan hal itu. Karena manusia mampu mengubah dunia lingkungannya menjadi dunia budaya (Noerhadi, 2013:9). Kapasitas rasio manusia sebagai *homo rationale* (Aristoteles) mampu menggerakkan setiap manusia untuk mengembangkan diri dan dunianya ke arah yang lebih baik dan berkeadaban.

Penghayatan koeksistensi kita sebagai manusia bukanlah suatu pengalaman yang sudah final, melainkan sebuah ziarah dalam proses menjadi (*becoming*) yang belum tuntas. Perjalanan kita menuju peradaban selalu mengandaikan capaian puncak-puncak sementara saja. Karena kita masih harus terus bergerak maju menuju puncak lain yang sudah membeberkan kepada kita seabrek persoalan baru dalam konteks kebersamaan kita sebagai *zoon politicon* (makhluk sosial), menyitir istilah filosofisnya Aristoteles. Ziarah dinamika kebudayaan kita seolah-olah merupakan perjalanan menuju *unhorizon limited*, horizon yang tak terbatas.

Kebersamaan kita sebagai makhluk berbudaya dalam konteks Indonesia selalu tak pernah bebas dari masalah. Kebersamaan kita masih mencuatkan seabrek persoalan dalam berbagai ekspresinya: konflik agama, konflik suku, konflik kelompok, konflik golongan dll. Kebersamaan kita bukan tanpa masalah! Namun justru eksistensi kita masih saja menimbulkan masalah itulah, maka multikulturalisme hadir sebagai term yang urgen-relevan bagi wacana diskursif kita akan realitas perbedaan (*diversity*) kita. Kita tidak cukup hanya sampai pada

monisme atau pun pluralisme budaya saja. Kita perlu bergerak lebih maju lagi menuju capaian puncak peradaban yang lain. Dari monisme moral dan pluralisme budaya, kita lalu bergerak menuju filosofi multikulturalisme.

Filosofi multikulturalisme merupakan refleksi kritis dalam konteks realitas pluralisme masyarakat kontemporer dalam berbagai dimensinya termasuk ras, etnis, sub-etnis, golongan, agama dll. Multikulturalisme menjadi isu seksi dalam melihat realitas pluralisme kultur di bumi ini. Potensi tantangan hubungan antarkelompok budaya berbeda di dunia tidak bisa dipandang sebelah mata saja. Diperlukan filosofi multikulturalisme sebagai 'strategi kebudayaan' yang masih relevan-urgen diaplikasikan di dunia yang terdiri dari berbagai latar belakang kelompok berbeda ini. Multikulturalisme merujuk pada suatu konstruksi cara pandang (filosofi) yang bertujuan menjelaskan, menjustifikasi, dan mempromosikan diversitas budaya, kesadaran akan perbedaan kultur, dan semangat keterbukaan dalam menghayati identitas perbedaan sosial kita. Sebagai konsekuensinya, multikulturalisme merujuk pada konstruksi filosofi yang mengkristalisasikan nilai, sikap dan perspektif relevan dalam konteks pluralisme budaya. Multikulturalisme perlu dirujuk sebagai ideologi penting yang perlu disosialisasikan secara meluas dalam forum diskusi ilmiah di institusi pendidikan maupun percakapan informal praksis dalam ranah sosial kemasyarakatan. Lebih dari itu multikulturalisme malah harus menjadi 'strategi kebudayaan' menyiasati globalisasi/modernisasi melalui penciptaan kebijakan politik (*politics policy*) yang mengakui identitas perbedaan-perbedaan kultur-etnis. Multikulturalisme layak menjadi visi bersama semua kelompok budaya berbeda di dunia kalau mau mewujudkan kondisi kondusif tumbuhnya iklim kedamaian, keselarasan dan keharmonisan yang menenggang realitas diversitas budaya.

C. Hakikat Multikulturalisme

Multi artinya banyak, sedangkan kulturalisme artinya aliran atau ideologi budaya. Multikulturalisme berarti pandangan yang mengakomodasi banyak aliran atau ideologi budaya. Multikulturalisme mengkonsepkan pandangan terhadap keanekaragaman kehidupan di dunia, ataupun kebijakan kebudayaan yang menekankan tentang penerimaan terhadap adanya keragaman, dan berbagai macam budaya di dalam realitas masyarakat menyangkut nilai-nilai, sistem sosial, praktik budaya, adat-kebiasaan, dan filosofi politik yang dianut dalam konteks tertentu. Multikulturalisme tidak bertujuan untuk menciptakan keseragaman ala monisme atau pun penciptaan budaya universal ala pluralisme. Multikulturalisme lebih maju dari monisme dan pluralisme.

Multikulturalisme sudah diuraikan oleh banyak pemikir budaya yang menaruh minat besar pada persoalan manusia sebagai makhluk berbudaya di antaranya Raz dan Will Kymlicka. Kedua tokoh ini dan beberapa tokoh lain sudah membuka ruang wacana penting ke arah munculnya fajar matahari multikulturalisme. Multikulturalisme, ideologi semacam apakah itu?

Yang dimaksud multikulturalisme adalah kajian yang berkembang dekade ini ketika kenyataan pluralisme kebudayaan, agama dan identitas etnik dalam sistem politik demokrasi terbuka tidak mendapatkan ruang ekspresi toleransinya untuk tumbuh unik dan berbeda terutama ketika sistem politik negara hukum dengan *'equality before the law'*, menisbikan identitas-identitas unik kultural keragaman (Sutrisno, 2011: 148). Padahal substansi multikulturalisme merujuk pada tatanan ideal di mana individu-individu yang ada bersama dalam realitas masyarakat dengan identitas berbeda bisa saling menerima perbedaan tanpa takut ditolak, apalagi didiskriminasi oleh orang atau kelompok lain.

Walau istilah multikulturalisme pertama kali muncul di Swedia tahun 1957, Kanada adalah negara pertama yang mengakui multikulturalisme sebagai bagian integral dari

identitas nasional dan diadopsi sebagai kebijakan nasional pada tahun 1960 (International Encyclopedia, 2010: 2979). Sesudah Kanada baru diikuti beberapa negara lain seperti Australia, New Zealand, Swedia, Inggris dan Belanda. Multikulturalisme dianggap sebagai kebijakan politik (*politic policy*) yang mampu mengatur realitas pluralisme negara-negara yang berbeda dalam aspek ras, etnis, keyakinan spiritual, hak-hak minoritas, orientasi seksual, ledakan arus imigrasi dan lain sebagainya. Dalam konteks ini, Kanada patut dicatat sebagai negara pertama yang memberikan apresiasi positif terhadap multikulturalisme cara pendekatan kebudayaan efektif menyiasati pluralisme sosial. Pendekatan kebudayaan melihat realitas masyarakat dari sudut pandang mentalitas orang, nilai yang diacu individu atau bersama, penyatu nilai bersama yang merekatkan bangsa majemuk dengan keikaan 'saling hormat' menghormati, toleransi pada perbedaan serta hak hidup etnik, agama, golongan tanpa saling mendiskriminasi satu sama lain (Sutrisno, 2011:137-138).

Dimensi dasar filosofi multikulturalisme memiliki banyak kristalisasi makna. Masyarakat multikultural dan multikulturalisme merujuk pada suatu masyarakat yang menunjukkan tiga (3) keanekaragaman utama yakni: keanekaragaman subkultural, keanekaragaman perspektif, dan keanekaragaman komunal (Parekh, 2008: 16-17). Multikulturalisme merupakan istilah yang mensintesiskan berbagai realitas perbedaan dalam kebudayaan manusia yang multidimensional. Multikulturalisme merupakan perspektif rasional atau paradigma logis yang digunakan untuk memahami manusia dan gejala kebudayaan yang dihayatinya dalam realitas kebersamaan aku dengan yang lain (*others*). Multikulturalisme menjadi suatu strategi budaya dalam memahami dan mengkonsepkan manusia serta hubungan-hubungan sosial yang dibangun sebagai makhluk sosial dan makhluk berbudaya. Multikulturalisme memberikan ruang toleransi seluas-luasnya bagi tumbuh-kembangnya berbagai kebudayaan manusia untuk berproses menjadi jati diri sendiri

seperti apa adanya.

D. Hakikat Pendidikan Multikulturalisme

Multikulturalisme mendukung perbedaan dan memperjuangkan berbagai kepentingan kelompok termasuk kelompok minoritas dalam berbagai dimensi sosialnya (etnis, ras, agama, politik, budaya, gender dll). Multikulturalisme dalam tataran ideal mendorong ke arah terbentuknya suatu *politic of recognition* (politik pengakuan) identitas setiap budaya yang berbeda di dalam *nation state* (negara bangsa). James Banks dikenal sebagai perintis pendidikan multikultural.

Banks yakin bahwa sebagian dari pendidikan lebih mengarah pada mengajarkan bagaimana berpikir daripada apa yang dipikirkan. Ia menjelaskan bahwa siswa harus diajari memahami semua jenis pengetahuan, aktif mendiskusikan konstruksi pengetahuan (*knowledge construction*) dan interpretasi yang berbeda-beda (Banks, 1993). Siswa yang baik adalah siswa yang selalu mempelajari semua pengetahuan dan turut serta secara aktif dalam membicarakan konstruksi pengetahuan. Siswa juga perlu disadarkan bahwa di dalam pengetahuan yang diterima itu terdapat beraneka ragam interpretasi yang sangat ditentukan oleh kepentingan masing-masing. Peserta didik harus dibiasakan menerima perbedaan yang ada di sekitarnya.

Selanjutnya Banks (2001) berpendapat bahwa pendidikan multikultural merupakan suatu rangkaian kepercayaan (*set of beliefs*) dan penjelasan yang mengakui dan menilai pentingnya keragaman budaya dan etnis di dalam bentuk gaya hidup, pengalaman sosial, identitas pribadi, kesempatan pendidikan dari individu, kelompok maupun negara. Ia mendefinisikan pendidikan multikultural adalah ide, gerakan, pembaharuan pendidikan dan proses pendidikan yang tujuan utamanya adalah untuk mengubah struktur lembaga pendidikan supaya siswa baik pria maupun wanita, siswa berkebutuhan khusus, dan siswa yang merupakan anggota dari kelompok ras, etnis, dan kultur yang bermacam-macam itu akan memiliki

kesempatan yang sama untuk mencapai prestasi akademis di sekolah (Banks, 1993).

Howard (1993) berpendapat bahwa pendidikan multikultural memberi kompetensi multikultural. Melalui pendidikan multikultural sejak dini diharapkan anak mampu menerima dan memahami perbedaan budaya yang berdampak pada perbedaan *usage* (cara individu bertingkah laku); *folkways* (kebiasaan-kebiasaan yang ada di masyarakat), *mores* (tata kelakuan di masyarakat), dan *customs* (adat istiadat suatu komunitas). Dengan pendidikan multikultural, peserta didik mampu menerima perbedaan, kritik, dan memiliki rasa empati, toleransi pada sesama tanpa memandang golongan, status, gender, dan kemampuan akademik (Farida Hanum, 2005). Hal senada juga ditekankan oleh Musa Asya'rie (2004) bahwa pendidikan multikultural bermakna sebagai proses pendidikan cara hidup menghormati, tulus, toleransi terhadap keragaman budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat plural, sehingga peserta didik kelak memiliki kekenyalan dan kelenturan mental bangsa dalam menyikapi konflik sosial di masyarakat.

Merujuk apa yang dikemukakan Parekh (1997), multikulturalisme meliputi tiga hal. Pertama, multikulturalis meberkenaan dengan budaya; kedua, merujuk pada keragaan yang ada; dan ketiga, berkenaan dengan tindakan spesifik pada respon terhadap keragaman tersebut. Akhiran "isme" menandakan suatu doktrin normatif yang diharapkan bekerja pada setiap orang dalam konteks masyarakat dengan beragam budaya. Proses dan cara bagaimana multikulturalisme sebagai doktrin normative menjadi ada dan implementasi gagasan-gagasan multikultural yang telah dilakukan melalui kebijakan-kebijakan politis, dalam hal ini kebijakan-kebijakan pendidikan.

Lingkungan pendidikan adalah sebuah sistem yang terdiri dari banyak faktor dan variabel utama, seperti kultur sekolah, kebijakan sekolah, politik, serta formalisasi

kurikulum dan bidang studi. Bila dalam hal tersebut terjadi perubahan maka hendaklah perubahan itu fokusnya untuk menciptakan dan memelihara lingkungan sekolah dalam kondisi multicultural yang efektif. Setiap anak seyogianya harus beradaptasi diri dengan lingkungan sekolah yang multikultural. Tujuan utama dari pendidikan multikultural adalah mengubah pendekatan pelajaran dan pembelajaran ke arah memberi peluang yang sama pada setiap anak. Jadi tidak ada yang dikorbankan demi persatuan. Untuk itu, kelompok-kelompok harus damai, saling memahami, mengakhiri perbedaan tetapi tetap menekankan pada tujuan umum untuk mencapai persatuan. Siswa ditanamkan pemikiran lateral, keanekaragaman, dan keunikan itu dihargai. Ini berarti harus ada perubahan sikap, perilaku, dan nilai-nilai khususnya civitas akademika sekolah. Ketika siswa berada diantara sesamanya yang berlatar belakang berbeda mereka harus belajar satu sama lain, berinteraksi dan berkomunikasi, sehingga dapat menerima perbedaan di antara mereka sebagai sesuatu yang memperkaya mereka.

Perbedaan-perbedaan pada diri anak didik yang harus diakui dalam pendidikan multikultural, antara lain mencakup penduduk minoritas etnis dan ras, kelompok pemeluk agama, perbedaan agama, perbedaan jenis kelamin, kondisi ekonomi, daerah/asal-usul, ketidak mampuan fisik dan mental, kelompok umur, dan lain-lain (Baker,1994:11). Melalui pendidikan multicultural ini anak didik diberi kesempatan dan pilihan untuk mendukung dan memperhatikan satu atau beberapa budaya, misalnya sistem nilai, gaya hidup, atau bahasa.

Pendidikan multikultural menyangkut tiga hal pokok:

1. Kesadaran Nilai Penting Keragaman Budaya

Kiranya perlu peningkatan kesadaran bahwa semua siswa memiliki karakteristik khusus karena usia, agama, gender, kelas sosial, etnis, ras, atau karakteristik budaya tertentu yang melekat pada diri masing-masing. Pendidikan multikultural berkaitan dengan ide bahwa

semua siswa tanpa memandang karakteristik budayanya itu seharusnya memiliki kesempatan yang sama untuk belajar di sekolah. Perbedaan yang ada itu merupakan keniscayaan atau kepastian adanya namun perbedaan itu harus diterima secara wajar dan bukan untuk membedakan. Artinya, perbedaan itu perlu diterima sebagai suatu kewajaran dan perlu sikap toleransi agar masing-masing dapat hidup berdampingan secara damai tanpa melihat unsure yang berbeda itu membedakan.

2. Gerakan Pembaharuan Pendidikan

Ide penting yang lain dalam pendidikan multicultural adalah sebagian siswa karena karakteristiknya, ternyata ada yang memiliki kesempatan yang lebih baik untuk belajar disekolah favorit tertentu, sedang siswa dengan karakteristik budaya yang berbeda tidak memiliki kesempatan itu.

Beberapa karakteristik institusional dari sekolah secara sistematis menolak kelompok untuk mendapat pendidikan yang sama, walaupun itu dilakukan secara halus, dalam arti dibungkus dalam bentuk aturan yang hanya bisa dipenuhi oleh segolongan tertentu dan tidak bias dipenuhi oleh golongan yang lain. Ada kesenjangan ketika muncul fenomena sekolah favorit yang didominasi oleh golongan orang kaya karena ada kebijakan lembaga yang mengharuskan untuk membayar uang pangkal yang mahal untuk bisa masuk dalam kelompok sekolah favorit itu.

Pendidikan multicultural bias muncul berbentuk bidangstudi, program dan praktik yang direncanakan lembaga pendidikan untuk merespon tuntutan, kebutuhan, dan aspirasi berbagai kelompok. Sebagaimana ditunjukkan oleh Grant dan Seleeten (dalam Sutarno, 2007), pendidikan multikultural bukan sekedar merupakan praktik aktual atau bidang studi atau

program pendidikan semata, namun mencakup seluruh aspek-aspek pendidikan.

3. Proses Pendidikan

Pendidikan multikultural yang juga merupakan proses pendidikan yang tujuannya tidak akan pernah terealisasi secara penuh. Pendidikan multikultural adalah proses menjadi, proses yang berlangsung terus-menerus dan bukan sebagai sesuatu yang langsung tercapai. Tujuan pendidikan multikultural adalah untuk memperbaiki prestasi secara utuh bukan sekedar meningkatkan skor.

Persamaan pendidikan, seperti halnya kebebasan dan keadilan, merupakan ide yang harus dicapai melalui perjuangan keras. Perbedaan ras, gender, dan diskriminasi terhadap orang yang berkebutuhan akan tetap ada, sekalipun telah ada upaya keras untuk menghilangkan masalah ini. Jika prasangka dan diskriminasi dikurangi pada suatu kelompok, biasanya keduanya terarah pada kelompok lain atau mengambil bentuk yang lain. Karena tujuan pendidikan seharusnya bekerja secara kontinyu meningkatkan persamaan pendidikan untuk semua siswa.

Pemikiran-pemikiran tentang pendidikan multikultural, saat ini telah mengalami perubahan jika dibandingkan konsep awal yang muncul pada tahun 1960-an. Beberapa di antaranya membahas pendidikan multikultural sebagai suatu perubahan kurikulum, mungkin dengan menambah materi dan perspektif baru. Yang lain berbicara tentang isu iklim kelas dan gaya mengajar yang dipergunakan kelompok tertentu. Yang lain berfokus pada isu sistem dan kelembagaan seperti jurusan, tes baku, atau ketidakcocokan pendanaan antara golongan tertentu yang mendapat jatah lebih, sementara yang lain kurang mendapat perhatian. Sekalipun banyak perbedaan

konsep pendidikan multikultural, ada sejumlah ide yang dimiliki bersama dari semua pemikiran dan merupakan dasar bagi pemahaman pendidikan multikultural, yaitu sebagai berikut.

- a. Penyiapan pelajar untuk berpartisipasi penuh dalam masyarakat antar-budaya.
- b. Persiapan pengajar agar memudahkan belajar bagi siswa secara efektif, tanpa memperhatikan perbedaan atau persamaan budaya dengan dirinya.
- c. Partisipasi sekolah dalam menghilangkan kekurangan pedulian dalam segala bentuknya. Pertama-tama dengan menghilangkan kekurangan pedulian di sekolahnya sendiri, kemudian menghasilkan lulusan yang sadar dan aktif secara social dan kritis.
- d. Pendidikan berpusat pada siswa dengan memperhatikan aspirasi dan pengalaman siswa.
- e. Pendidik, aktivis, dan yang lain harus mengambil peranan lebih aktif dalam mengkaji kembali semua praktik pendidikan, termasuk teori belajar, pendekatan mengajar, evaluasi, psikologi sekolah dan bimbingan, materi pendidikan, serta buku teks.

E. Prinsip, Tujuan, Fungsi dan Perspektif Pendidikan Multikultural

Prinsip pendidikan multicultural menurut Groski adalah sebagai berikut.

1. Pemilihan materi pelajaran harus terbuka secara budaya didasarkan pada siswa. Keterbukaan ini harus menyatukan opini-opini yang berlawanan dan interpretasi-interpretasi yang berbeda.
2. Isi materi pelajaran yang dipilih harus mengandung perbedaan dan persamaan dalam lintas kelompok.
3. Materi pelajaran yang dipilih harus sesuai dengan konteks waktu dan tempat.

4. Pengajaran semua pelajaran harus menggambarkan dan dibangun berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang dibawa siswa kekelas.
5. Pendidikan hendaknya memuat model belajar mengajar yang interaktif agar mudah dipahami.

Multikulturalisme bukan hanya sebuah wacana tetapi sebuah ideologi yang harus diperjuangkan, karena dibutuhkan sebagai landasan bagi tegaknya demokrasi, HAM, dan kesejahteraan hidup masyarakatnya. Multikulturalisme bukan sebuah ideologi yang berdiri sendiri terpisah dari ideologi-ideologi lainnya, dan multikulturalisme membutuhkan seperangkat konsep-konsep yang merupakan bangunan konsep-konsep untuk dijadikan acuan bagi yang memahaminya dan mengembang luaskannya dalam kehidupan bermasyarakat.

Pendidikan multicultural berusaha menolong siswa mengembangkan rasa hormat kepada orang yang berbeda budaya, member kesempatan untuk bekerja bersama dengan orang atau kelompok orang yang berbeda etnis atau rasnya secara langsung, menolong siswa untuk mengakui ketepatan dari pandangan-pandangan budaya yang beragam, menolong siswa mengembangkan kebanggaan terhadap warisan budaya mereka, menyadarkan siswa bahwa konflik nilai sering menjadi penyebab konflik antar kelompok masyarakat (Savage & Armstrong, 1996). Farris & Cooper (1994) mengemukakan bahwa tujuan pendidikan multicultural adalah mengembangkan kemampuan siswa untuk memandang kehidupan dari berbagai perspektif budaya yang berbeda dengan budaya yang mereka miliki, dan bersikap positif terhadap perbedaan budaya, ras, dan etnis. Banks (dalam Skeel, 1995), mengidentifikasi tujuan pendidikan multikultural, adalah:

1. Untuk memfungsikan peranan sekolah dalam memandang keberadaan siswa yang beraneka ragam;

2. Untuk membantu siswa dalam membangun perlakuan yang positif terhadap perbedaan kultural, ras, etnik, kelompok keagamaan;
3. Memberikan ketahanan siswa dengan cara mengajar mereka dalam mengambil keputusan dan ketrampilan sosialnya; dan
4. Untuk membantu peserta didik dalam membangun ketergantungan lintas budaya dan member gambaran positif kepada mereka mengenai perbedaan kelompok.

Lebih lanjut, pendidikan multicultural dibangun atas dasar konsep yang meluas mengenai pendidikan untuk kebebasan (Dickerson, 1993; Banks, 1994); yang bertujuan:

1. Membantu siswa mengembangkan pengetahuan, sikap dan keterampilan untuk berpartisipasi di dalam demokrasi dan kebebasan masyarakat;
2. Memajukan kepada kebebasan, kecakapan, keterampilan terhadap lintas batas-batas etnik dan budaya untuk berpartisipasi dalam beberapa kelompok dan budaya orang lain. Melalui pembelajaran multikultural, siswa dapat mencapai kesuksesan dalam mengurangi prasangka dan diskriminasi (Banks, 1996). Dengan kata lain, variable sekolah terbentuk dimana besar kelompok rasial dan etnis yang memiliki pengalaman dan hak yang sama dalam pendidikan. Pelajar mampu mengembangkan keterampilannya dalam memutuskan sesuatu secara bijak. Mereka lebih menjadi suatu subyek dari pada menjadi obyek dalam suatu kurikulum. Mereka menjadi individu yang mengatur dirinya sendiri dan merefleksi kehidupan untuk bertindak secara aktif. Mereka membuat keputusan dan melakukan sesuatu yang berhubungan dengan konsep, pokok-pokok masalah, atau masalah masalah yang mereka pelajari. Mereka mengembangkan visis sosial yang lebih baik dan memperoleh ilmu pengetahuan dan keterampilan serta mengkonstruksinya dengan sistematis dan empatik. Seharusnya guru mengetahui bagaimana berperilaku

terhadap para pelajar yang bermacam-macam kulturenya di dalam kelas. Mereka mengetahui perbedaan-perbedaan nilai-nilai dan kultur dan bentuk-bentuk perilaku yang beraneka ragam.

Secara konseptual pendidikan multicultural menurut Groski mempunyai tujuan sebagai berikut.

1. Setiap siswa mempunyai kesempatan untuk mengembangkan prestasi mereka.
2. Siswa belajar bagaimana belajar dan berpikir secara kritis.
3. Mendorong siswa untuk mengambil peran aktif dalam pendidikan, dengan menghadirkan pengalaman-pengalaman mereka dalam konteks belajar.
4. Mengakomodasikan semua gaya belajar siswa.
5. Mengapresiasi kontribusi dari kelompok-kelompok yang berbeda.
6. Mengembangkan sikap positif terhadap kelompok-kelompok yang mempunyai latar belakang berbeda.
7. Untuk menjadi warga yang baik di sekolah maupun di masyarakat.
8. Belajar bagaimana menilai pengetahuan dari perspektif yang berbeda.
9. Untuk mengembangkan identitas etnis, nasional, dan global.
10. Mengembangkan ketrampilan-ketrampilan mengambil keputusan dan analisis secara kritis sehingga siswa dapat membuat pilihan yang lebih baik dalam kehidupan sehari-hari.

Meminjam system klasifikasi Robinson, Nasikun (2005) menyampaikan bahwa ada tiga perspektif multikulturalisme di dalam sistem pendidikan:

1. perspektif "*cultural assimilation*";
2. perspektif "*cultural pluralism*"; dan
3. perspektif "*cultural synthesis*".

Yang pertama, merupakan suatu model transisi di dalam sistem pendidikan yang menunjukkan proses asimilasi anak atau subyek didik dari berbagai kebudayaan atau masyarakat sub nasional ke dalam suatu "core society". Yang kedua, suatu sistem pendidikan yang menekankan pada pentingnya hak bagi semua kebudayaan dan masyarakat sub nasional untuk memelihara dan mempertahankan identitas kultural masing-masing. Yang ketiga merupakan sintesis dari perspektif asimilasionis dan pluralis, yang menekankan pentingnya proses terjadinya eklektisisme dan sintesis di dalam diri anak atau subyek didik dan masyarakat, dan terjadinya perubahan di dalam berbagai kebudayaan dan masyarakat sub nasional. Selanjutnya Nasikun berpendapat bahwa di dalam masyarakat Indonesia yang sangat majemuk ini yang diperlukan adalah aplikasi pilihan perspektif pendidikan yang ketiga. Perspektif pendidikannya sendiri memberikan peran pada pendidikan multicultural sebagai instrumen bagi pengembangan eklektisisme dan sintesis beragam kebudayaan sub nasional pada tingkat individual dan masyarakat dan bagi promosi terbentuknya suatu "melting pot" dari beragam kebudayaan dan masyarakat subnasional.

Pilihan perspektif pendidikan "sintesis multikultural" memiliki rasional yang paling dasar di dalam hakekat tujuan suatu pendidikan multikultural, yang dapat diidentifikasi melalui tiga tujuan (Ekstrand dalam Nasikun, 2005), yaitu tujuan "attitudinal", tujuan "kognitif", dan tujuan "instruksional". Pada tingkat *attitudinal*, pendidikan multikultural memiliki fungsi untuk menyemai dan mengembangkan sensitivitas kultural, toleransi kultural, penghormatan pada identitas kultural, pengembangan sikap budaya responsif dan keahlian untuk melakukan penolakan dan resolusi konflik. Pada tingkat kognitif, pendidikan multikultural memiliki tujuan bagi pencapaian kemampuan akademik, pengembangan pengetahuan tentang kemajemukan kebudayaan, kompetensi untuk melakukan

analisis dan interpretasi perilaku kultural, dan kemampuan membangun kesadaran kritis tentang kebudayaan sendiri. Pada tingkat instruksional, pendidikan multikultural memiliki tujuan untuk mengembangkan kemampuan melakukan koreksi atas distorsi-distorsi, stereotipe-stereotipe, peniadaan-peniadaan, dan mis-informasi tentang kelompok-kelompok etnis dan kultural yang dimuat di dalam buku dan media pembelajaran, menyediakan strategi-strategi untuk melakukan hidup di dalam pergaulan multikultural, mengembangkan ketrampilan-ketrampilan komunikasi interpersonal, menyediakan teknik-teknik untuk melakukan evaluasi dan membentuk menyediakan klarifikasi dan penjelasan-penjelasan tentang dinamika-dinamika perkembangankebudayaan.

BAB III

TEORI DAN PENDEKATAN PENDIDIKAN MULTIKULTURAL

A. Teori Pendidikan Multikultural

Indonesia adalah salah satu negara multikultural terbesar di dunia. Kenyataan ini dapat dilihat dari kondisi sosio-kultural maupun geografis yang begitu beragam dan luas. Berdasarkan hal itu, maka diperlukan strategi khusus untuk memecahkan persoalan tersebut melalui berbagai bidang; sosial, ekonomi, budaya, dan pendidikan. Berkaitan dengan hal ini, maka pendidikan multikultural menawarkan satu alternatif melalui penerapan strategi dan konsep pendidikan yang berbasis pada pemanfaatan keragaman yang ada di masyarakat, khususnya yang ada pada siswa seperti keragaman etnis, budaya, bahasa, agama, status sosial, gender, kemampuan, umur, dan sebagainya.

Pendidikan multikultural didefinisikan sebagai sebuah kebijakan sosial yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemeliharaan budaya dan saling memiliki rasa hormat antara seluruh kelompok budaya di dalam masyarakat. Pembelajaran multikultural pada dasarnya merupakan program pendidikan bangsa agar komunitas multikultural dapat berpartisipasi dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang ideal bagi bangsanya. Dalam konteks yang luas, pendidikan multikultural mencoba membantu menyatukan bangsa secara demokratis, dengan menekankan pada perspektif pluralitas masyarakat di berbagai bangsa, etnik, kelompok budaya yang berbeda.

Pendidikan multikultural masih diartikan sangat ragam, dan belum ada kesepakatan, apakah pendidikan multikultural tersebut berkonotasi pendidikan tentang keragaman budaya, atau pendidikan untuk membentuk sikap agar menghargai keragaman budaya. Kamanto Sunarto menjelaskan bahwa pendidikan multikultural biasa diartikan sebagai pendidikan keragaman budaya dalam masyarakat, dan terkadang juga diartikan sebagai pendidikan yang menawarkan ragam model

untuk keragaman budaya dalam masyarakat, dan terkadang juga diartikan sebagai pendidikan untuk membina sikap siswa agar menghargai keragaman budaya masyarakat.⁵³

Sementara itu, Calarry Sada dengan mengutip tulisan Sleeter dan Grant menjelaskan bahwa pendidikan multikultural memiliki empat makna (model), yakni: (1) pengajaran tentang keragaman budaya sebuah pendekatan asimilasi kultural, (2) pengajaran tentang berbagai pendekatan dalam tata hubungan sosial, (3) pengajaran untuk memajukan pluralisme tanpa membedakan strata sosial dalam masyarakat, dan (4) pengajaran tentang refleksi keragaman untuk meningkatkan pluralisme dan kesamaan.⁵⁴ Gagasan pendidikan multikultural di Indonesia sendiri, sebagaimana dijelaskan oleh H.A.R Tilaar adalah pendidikan untuk meningkatkan penghargaan terhadap keragaman etnik dan budaya masyarakat.⁵⁵ Sementara Conny R. Semiawan memiliki perspektif tersendiri tentang pendidikan multikultural, bahwa seluruh kelompok etnik dan budaya masyarakat Indonesia memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas, dan mereka memiliki hak yang sama untuk mencapai prestasi terbaik di bangsa ini.⁵⁶

Apapun definisi yang diberikan para pakar pendidikan adalah fakta bahwa bangsa Indonesia terdiri dari banyak etnik, dengan keragaman budaya, agama, ras dan bahasa. Indonesia memiliki falsafah berbeda suku, etnik, bahasa, agama dan budaya, tapi memiliki satu tujuan, yakni terwujudnya bangsa Indonesia yang kuat, kokoh, memiliki identitas yang kuat,

⁵³ Kamanto Sunarto, *Multicultural Education in Schools, Challenges in its Implementation*, dalam *Jurnal Multicultural Education in Indonesia and South East Asia*, Edisi I, 2004, h 47.

⁵⁴ Clarry Sada, *Multicultural Education in Kalimantan Barat; an Overview*, dalam *Jurnal Multicultural Education in Indonesia and South East Asia*, Edisi I, 2004, h. 85.

⁵⁵ H.A.R. Tilaar, *Multikulturalisme, Tantangan-Tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional*, Grasindo, Jakarta, 2004, hal. 137-138.

⁵⁶ Conny R. Semiawan, *The Challenge of a Multicultural Education in a Pluralistic Society; the Indonesian Case*, dalam *Jurnal Multicultural Education in Indonesia and South East Asia*, Edisi I, 2004, h. 40.

dihargai oleh bangsa lain, sehingga tercapai cita-cita ideal dari pendiri bangsa sebagai bangsa yang maju, adil, makmur dan sejahtera. Untuk itu, seluruh komponen bangsa tanpa membedakan etnik, ras, agama dan budaya, seluruhnya harus bersatu pada, membangun kekuatan di seluruh sektor, sehingga tercapai kemakmuran bersama, memiliki harga diri bangsa yang tinggi dan dihargai oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Oleh sebab itu, mereka harus saling menghargai satu sama lain, menghilangkan sekat-sekat agama dan budaya. Semua itu, sebagaimana Azyumardi Azra tegaskan, bukan sesuatu yang *taken for granted* tetapi harus diupayakan melalui proses pendidikan yang multikulturalistik, yakni pendidikan untuk semua, dan pendidikan yang memberikan perhatian serius terhadap pengembangan sikap toleran, respek terhadap perbedaan etnik, budaya, dan agama, dan memberikan hak-hak sipil termasuk pada kelompok minoritas.⁵⁷ Dengan demikian, pendidikan multikultural dalam konteks ini diartikan sebagai sebuah proses pendidikan yang memberi peluang sama pada seluruh anak bangsa tanpa membedakan perlakuan karena perbedaan etnik, budaya dan agama, yang memberikan penghargaan terhadap keragaman, dan yang memberikan hak-hak sama bagi etnik minoritas, dalam upaya memperkuat persatuan dan kesatuan, identitas nasional dan citra bangsa di mata dunia internasional.

B. Pendekatan Terhadap Pendidikan Multikultural

Implementasi pendidikan multikultural di berbagai negara berbeda-beda. Bila melihat salah satu contoh pendidikan multikultural di Amerika, sebagaimana dikutip oleh Tilaar dari hasil penelitian Banks, implementasi pendidikan multikultural di Amerika meliputi berbagai dimensi, yakni:

⁵⁷ Azyumardi Azra, Pendidikan Multikultural; Membangun Kembali Indonesia Bhineka Tunggal Ika, dalam Tsafafah, Vol. I, No. 2, 2003, h. 20.

1. Dimensi kurikulum, yakni bahwa norma-norma kultur yang akan disampaikan pada siswa diintegrasikan dalam sebuah mata pelajaran, dengan rumusan kompetensi yang jelas.
2. Dimensi ilmu pengetahuan, yakni bahwa perumusan keilmuan dari norma dan aturan kultur yang akan disampaikan itu dirumuskan melalui proses penelitian historis dengan melihat pada pengalaman sejarah tokoh-tokoh yang sangat konsisten dalam memperjuangkan multikulturalisme.
3. Perlakuan pembelajaran yang adil, yakni bahwa perlakuan dalam pembelajaran harus disampaikan secara *fair* dan adil, tanpa membedakan perlakuan terhadap mereka yang berasal dari etnik tertentu, atau dari strata ekonomi tertentu.
4. Pemberdayaan budaya sekolah, yakni bahwa lingkungan sekolah sebagai *hidden curriculum*, harus member dukungan terhadap pengembangan dan pembinaan multikulturalisme, baik dalam penyediaan fasilitas belajar, fasilitas ibadah, layanan adminisitrasi maupun berbagai layanan lainnya'⁵⁸

Dengan mengutip pengalaman Amerika, prosedur yang harus ditempuh dalam implementasi pendidikan multikultur di Indonesia adalah, penyiapan kurikulum, yakni menyisipkan berbagai kompetensi yang harus dimiliki siswa tentang multikulturalisme pada mata pelajaran yang relevan, karena multikulturalisme baru sebuah gerakan dan belum menjadi sebuah ilmu yang komprehensif.

Kemudian, diikuti dengan perumusan berbagai materi yang sesuai dengan kompetensi yang hendak dicapai, dan diikuti dengan rumusan proses pembelajaran yang lebih memberikan peluang bagi para siswa untuk pembinaan dan pengembangan sikap, di samping pengetahuan dan keterampilan sosial yang terkait dengan upaya pengembangan sikap multikulturalistik. Indonesia sendiri belum memiliki pengalaman pendidikan multikultural yang terdesain secara terencana, karena belum ada pengalaman yang dikontrol dalam

⁵⁸ Ibid, h. 138.

sebuah penelitian akademik. Akan tetapi, jika mengutip Will Kymlicka, yang mencoba mendeskripsikan *Multicultural Citizenship*, pengalaman di Amerika Utara, maka materi-materi yang seharusnya dihantarkan dalam pendidikan multikultural adalah sebagai berikut :

1. Tentang hak-hak individual dan hak-hak kolektif dari setiap anggota masyarakat, yakni setiap individu dari suatu bangsa memiliki hak yang sama untuk terpenuhi seluruh hak-hak asasi kemanusiaannya, seperti hak untuk memeluk sebuah agama, hak untuk memperoleh kehidupan yang layak, hak atas kesempatan berusaha dan yang sebagainya. Demikian pula, secara kolektif, walaupun mereka berasal dari kelompok etnik minoritas dan tidak memiliki perwakilan dalam birokrasi dan lembaga legislatif, tapi mereka memiliki hak yang sama dengan kelompok mayoritas untuk menyampaikan aspirasi politiknya, mengembangkan budayanya, dan yang sebagainya.⁵⁹
2. Tentang Kebebasan individual dan budaya, yakni bahwa setiap individu termasuk dari etnik minoritas memiliki kebebasan untuk berkreasi, berkarya, bahkan untuk mengembangkan dan memajukan budayanya. Kelompok etnik mayoritas harus menghargai hak-hak minoritas untuk mengembangkan kreativitas dan budayanya itu.⁶⁰
3. Tentang keadilan dan hak-hak minoritas, yakni seluruh anggota masyarakat memiliki hak yang sama untuk memperoleh keadilan dari negara, dan bahkan mereka juga memiliki hak untuk mengembangkan kultur etniknya, termasuk etnik minoritas yang harus mampu mengelola bahasa, dan berbagai institusi sosialnya, agar tidak hilang dalam budaya kelompok etnik minoritas.⁶¹
4. Jaminan minoritas untuk bisa berbicara dan keterwakilan aspirasinya dalam struktur pemerintahan atau legislatif. Mereka memiliki hak untuk bisa terwakili, tetapi, karena

⁵⁹ Will Kymlicka, *Multicultural Citizenship, A Liberal Theory of Minority Rights*, Oxford University Press, New York, 2000, h. 34.

⁶⁰ Ibid, h. 75.

⁶¹ Ibid, h. 12.

system kepartaian, seringkali kemudian ada kelompok-kelompok etnik, budaya dan kepentingan yang tidak terwakili, seperti wanita pekerja yang belum tentu terwakili di parlemen, etnik kecil yang belum tentu terwakili sehingga aspirasi dan suaranya tidak bisa tersampaikan pada proses pengambilan keputusan tentang kebijakan pembangunan.⁶²

5. Toleransi dan batas-batasnya, yakni bahwa etnik minoritas yang tidak memiliki wakil langsung di lembaga legislatif atau dalam lembaga birokrasi pemerintahan, harus dilindungi oleh etnik atau kelompok mayoritas yang menguasai lembaga-lembaga pemerintahan sebagai lembaga otoritatif untuk pengambilan kebijakan-kebijakan publik. Akan tetapi, mereka yang berusaha memperhatikan hak-hak minoritas tersebut memiliki berbagai keterbatasan, karena harus memperhatikan etnik atau kelompok mayoritas yang justru mereka wakili. Oleh sebab itu, hak-hak minoritas itu tetap memperoleh perhatian, namun dalam keterbatasan.⁶³

Inilah berbagai materi yang senantiasa mereka perhatikan dalam pembinaan bangsanya agar tetap kuat dan terus berkembang, bahkan seluruh budaya termasuk dari etnik minoritas diberi kesempatan untuk membina dan mengembangkannya. Nilai dan norma di atas ditransformasikan dan dikembangkan pada siswa-siswa sekolah melalui pelajaran sejarah, yang di dalamnya juga termasuk *civic education*.

Kurikulum menjadi faktor yang menentukan dalam Pendidikan Multikultural. Di sekolah-sekolah Amerika Serikat terdapat berbagai pendekatan dalam melakukan reformasi kurikulum multikultural. Pada bagian ini akan diuraikan berbagai pendekatan Pendidikan Multikultural, khususnya di Amerika Serikat. Setiap negara, termasuk Indonesia mempunyai permasalahan unik yang berbeda-beda, namun

⁶² Ibid, h. 131.

⁶³ Ibid, h. 152.

ada sejumlah permasalahan yang sama dan kita bisa banyak belajar negara lain, termasuk Amerika Serikat yang sudah lama mendalami dan mengembangkannya. Kita tahu bahwa perintis Pendidikan Multikultural berasal dari negara ini. Berikut ini akan kita telaah bersama-sama perkembangan kurikulum untuk Pendidikan Multikultural.

1. Kurikulum Berpusat Pada Paham Budaya Utama

Amerika Serikat terbentuk dari berbagai kelompok ras, etnis, agama, dan budaya yang berbeda. Sebagian besar kurikulum sekolah, buku teks, dan materi pelajaran kurang memberi perhatian pada kelompok ini. Bahkan, sebagian besar kurikulum, buku teks, dan materi pelajaran lebih berfokus pada *White Anglo-Saxon Protestants*.⁶⁴ Kelompok budaya yang dominan di masyarakat Amerika Serikat ini sering disebut aliran utama budaya orang Amerika. Kurikulum yang hanya berfokus pada aliran utama (budaya dominan) Amerika dan mengabaikan pengalaman, budaya dan sejarah dari kelompok etnis, ras, budaya dan agama yang lain akan memiliki konsekuensi yang negatif. Konsekuensi negatif bagi siswa Amerika dari aliran utama maupun siswa dari kulit berwarna yang bukan termasuk dalam kelompok dominan ini. James A. Banks berpendapat bahwa kurikulum yang berpusat pada aliran utama (*a mainstream-centric curriculum*) ini justru dapat menjadi satu cara utama yang memperkuat rasisme dan etnosentrisme dan hal ini diabadikan di sebagian besar sekolah dan di masyarakat Amerika. Kurikulum berpusat pada aliran utama memiliki konsekuensi negatif terhadap siswa dari aliran utama karena kurikulum ini memperkuat rasa superioritas yang keliru (*false sense of superiority*), memberi mereka konsepsi yang salah tentang hubungan mereka dengan kelompok ras dan etnis lainnya, dan menolak kesempatan memperoleh manfaat dari pengetahuan, perspektif, dan kerangka pikir yang dapat diperoleh dari

⁶⁴ Banks, J.A. (1993). *Multicultural Education: Issues and Perspectives*. Needham Height, Massachusetts : Allyn and Bacon hal 195

mengkaji dan mengalami budaya dan kelompok lain. Kurikulum yang berpusat pada aliran utama juga mengabaikan kesempatan siswa Amerika aliran utama untuk melihat kebudayaan mereka dari sudut pandang budaya lain. Jika orang melihat kebudayaan mereka dari sudut pandang budaya lain, mereka dapat memahami budayanya sendiri secara lebih utuh. Dengan demikian mereka dapat melihat bagaimana keunikannya dan perbedaannya dari budaya lain, dan memahami secara lebih baik bagaimana budaya itu berhubungan dan berinteraksi dengan budaya lainnya.

Kurikulum berpusat aliran utama berpengaruh secara negatif terhadap siswa kulit berwarna, seperti orang Afrika-Amerika, Hispanis, dan Asia-Amerika. Kurikulum itu mengabaikan pengalaman dan budaya mereka dan tidak menggambarkan impian, harapan, dan perspektif kelompok yang tidak termasuk aliran utama ini. Siswa akan dapat belajar secara maksimal dan amat termotivasi jika kurikulum sekolah menggambarkan budaya, pengalaman, dan perspektif mereka. Beberapa siswa kulit berwarna diasingkan di sekolah tempat dia belajar karena mereka mengalami konflik budaya dan diskontinuitas yang disebabkan perbedaan budaya antara sekolah dengan masyarakat mereka. Sekolah dapat membantu untuk menjadi juru penengah antara budaya rumah dan sekolah dari siswa kulit berwarna dengan mengimplementasikan kurikulum yang menggambarkan budaya dari kelompok dan komunitas etnis mereka. Sekolah dapat dan seharusnya mengefektifkan penggunaan budaya masyarakat dari siswa kulit berwarna saat mengajar mereka seperti mata pelajaran menulis, seni, bahasa, sains dan matematika. Pada pendekatan berpusat aliran utama, peristiwa, tema, konsep, dan isu dipandang terutama dari perspektif kelas menengah Anglo-Amerika dan Eropa. Perkembangan peristiwa dan budaya seperti eksplorasi orang Eropa di Amerika dan perkembangan music.

Amerika dipandang dari perspektif Anglo dan Eropa dan dievaluasi dengan menggunakan kriteria dan sudut pandang dari aliran utama. Jika eksplorasi orang Eropa atas Amerika dipandang dari perspektif berpusat Eropa, Amerika dipandang sebagai “ditemukan” oleh penjelajah Eropa seperti Columbus dan Cortes. Pandangan bahwa penduduk asli di Amerika diketemukan oleh orang Eropa menyiratkan bahwa budaya Indian tidak ada hingga mereka “ditemukan” oleh orang Eropa. Sesudah itu orang Eropa menempati dan mengklaim bahwa tanah itu yang didiami oleh Indian Amerika itu menjadi pemilik yang sah (*rightfully owner*). Pandangan Anglosentris, yang mengabaikan keberadaan kelompok Indian Amerika ini sangat mewarnai gaya penulisan. Dengan pilihan kata seperti yang mendiami (*settlers*), dan pemberontakan (*rebelled*), penulis menjustifikasi pengambilan tanah Indian dan menggambarkan perlawanan mereka sebagai pemberontakan. Ini yang tidak masuk akal. Bandingkan dengan peristiwa Perang Kemerdekaan I dan II yang terjadi sekitar tahun 1775 dan 1783. Oleh pemerintah Hindia Belanda, peperangan itu dianggap sebagai aksi polisional. Jadi “perang kemerdekaan itu” dipandang sebagai aksi polisi yang mengatasi kekacauan.

Jika bentuk dan sifat pengembangan budaya AS seperti musik dan tari, dipandang dari perspektif berpusat-aliran utama, bentuk seni tertentu menjadi penting dan berarti hanya jika diakui atau dilegitimasi oleh kritikus dan artis aliran utama. Musik dari seniman Afrika-Amerika seperti Chuck Berry dan Little Richard tidak dipandang sebagai signifikan oleh masyarakat aliran utama sampai penyanyi kulit putih seperti Beatles dan Rod Stewart secara publik mengakui secara signifikan musik mereka sendiri benar-benar dipengaruhi oleh seniman Afrika-Amerika. Seringkali artis kulit putih mengakui bentuk dan inovasi budaya etnis oleh orang Asia-Amerika, Afrika Amerika, Hispanis, dan Amerika Asli.

2. Upaya Menyusun Kurikulum Multikultural

Sejak gerakan hak-hak sipil tahun 1960-an, para pendidik sedang mencoba, dengan berbagai cara, mengintegrasikan kurikulum sekolah secara lebih baik dengan materi etnis dan berupaya mengubah kurikulum berpusat Eropah (aliran utama). Hal ini dibuktikan dengan sulitnya merumuskan tujuan sekolah karena adanya berbagai pertimbangan yang kompleks. Ideologi Kaum Asimilasi yang kuat yang dianut oleh sebagian besar pendidik AS adalah satu alasan utama. Ideologi asimilasionis membuat pendidiknya sulit berpikir beda tentang bagaimana masyarakat dan budaya AS berkembang dan memperoleh komitmen untuk membuat kurikulum multikultural. Individu yang memiliki ideologi asimilasionis yang kuat berpandangan bahwa peristiwa dan perkembangan paling penting di masyarakat AS dihubungkan dengan warisan negara Inggris dan bahwa kontribusi kelompok etnis dan budaya yang lain tidak begitu penting.

Jika pendidik mempelajari ideologi dan konsepsi multikultural tentang budaya Amerika Serikat secara benar, maka mereka mampu memandang arti pentingnya pengalaman dan kontribusi dari berbagai kelompok budaya, etnis, dan religi bagi perkembangan Amerika Serikat.

Perlawanan ideologis (*ideological resistance*) merupakan faktor utama yang memperlambat dan masih lambatnya perkembangan multikultural, namun faktor lain juga mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangannya. Perlawanan politis terhadap kurikulum multikultural sangat berkaitan dengan perlawanan ideologis. Beberapa orang yang menentang kurikulum multikultural meyakini bahwa pengetahuan adalah kekuatan dan bahwa perspektif multikultural masyarakat AS menantang struktur kekuatan yang ada. Jadi mereka berpandangan bahwa kemunculan kurikulum multikultural bisa dianggap sebagai kekuatan baru yang membahayakan eksistensi dari kelompok yang

menjadi aliran utama ini. Mereka yakin bahwa kurikulum berpusat pada aliran utama yang dominan mendukung, memperkuat, dan membenarkan struktur sosial, ekonomi dan politik yang ada. Kurikulum berpusat pada aliran utama berusaha mempertahankan status quo. Sedangkan perspektif dan sudut pandang multikultural akan membenarkan dan mempromosikan perubahan sosial dan rekonstruksi sosial. Ada dua sisi yang berhadapan yakni kelompok aliran utama ingin mempertahankan status quo seperti sekarang ini dan kelompok multikultural yang ingin melakukan rekonstruksi sosial.

Pada tahun-tahun terakhir perdebatan hangat terjadi tentang seberapa jauh kurikulum seharusnya berpusat Eropah dan Barat dan seberapa jauh seharusnya menggambarkan perbedaan kultural, etnis dan rasial di Amerika Serikat. Paling tidak ada tiga posisi utama yang dapat diidentifikasi dalam perdebatan ini. Tradisionalis Barat berpendapat Barat, seperti didefinisikan dan dikonseptualisasi di masa lampau, seharusnya menjadi fokus di dalam kurikulum sekolah dan perguruan tinggi di Amerika Serikat dan bahkan seluruh dunia. Ahli Afrosentris berpendapat bahwa kontribusi Afrika dan orang Afrika seharusnya mendapat penekanan yang lebih di dalam kurikulum. Multikulturalis berpendapat bahwa sekalipun Barat harus mendapat penekanan lebih dalam kurikulum, Barat harus mengkonseptualisasi kembali sehingga menggambarkan kontribusi orang kulit berwarna dalam membentuk budaya Barat. Juga mengajarkan tentang jurang pemisah antara ideal dan realitasnya tentang rasialisme, gender, dan diskriminasi dari budaya Barat. Multikulturalis juga yakin bahwa di samping mempelajari tentang Barat, siswa seharusnya mempelajari kebudayaan dunia yang lain, seperti budaya di Afrika, Asia, dan Timur Tengah, dan Amerika, termasuk seperti apa mereka adanya sebelum bangsa Eropa datang.

Faktor lain yang memperlambat pelembagaan kurikulum multikultural mencakup rendahnya tingkat pengetahuan tentang budaya etnis yang dikuasai sebagian besar pendidik dan beratnya beban pelajaran yang ada pada buku teks. Pengajar harus memiliki pengetahuan yang mendalam tentang budaya etnis dan juga memiliki pengalaman mengintegrasikan materi, pengalaman, dan sudut pandang etnis dalam kurikulum. Pengajar menceritakan pada siswanya bahwa Columbus menemukan Amerika dan bahwa Amerika adalah suatu “dunia baru” karena mereka hanya memiliki sedikit pengetahuan tentang aneka budaya Amerika Asli yang ada di Amerika selama lebih dari 40.000 tahun. Padahal bangsa Eropa baru menempati Amerika dalam jumlah yang signifikan pada abad enam belas.

Beberapa studi telah menyatakan bahwa buku teks masih menjadi sumber utama pengajaran, khususnya mata pelajaran tertentu seperti studi sosial, membaca, dan seni bahasa. Beberapa perubahan signifikan telah dibuat dalam buku teks sejak gerakan hak-hak sipil tahun 1960-an. Banyak kelompok etnis dan wanita telah muncul dalam buku teks saat ini dibandingkan masa lampau. Namun, materi tentang kelompok etnis dalam buku teks biasanya disajikan dari perspektif aliran utama, mengandung informasi dan kepahlawanan yang diseleksi dengan menggunakan kriteria aliran utama, dan jarang terintegrasi secara konsisten dan total. Informasi seputar kelompok etnis biasanya dibahas dalam unit, topik, dan bagian teks yang khusus. Mereka mendekati pengajaran bermuatan etnis dalam caracara yang terpilah-pilah.

C. Tahap-Tahap Integrasi Materi Multikultural ke Dalam Kurikulum

Sejak tahun 1960-an dapat diidentifikasi ada empat pendekatan yang mengintegrasikan materi etnis dan multikultural ke dalam kurikulum:

1. Pendekatan kontribusi (*The Contributions Approach*)

Level 1 ini adalah satu dari yang paling sering dan paling luas dipakai dalam fase pertama dari gerakan kebangkitan etnis (*ethnic revival movement*). Juga sering digunakan jika sekolah mencoba mengintegrasikan materi etnis dan multikultural ke dalam kurikulum aliran utama.

Ciri pendekatan kontribusi adalah dengan memasukkan pahlawan etnis dan bendabenda budaya yang khas ke dalam kurikulum, yang dipilih dengan menggunakan kriteria budaya aliran utama. Jadi individu seperti Crispus Attucks, Benjamin Bannaker, Sacajawea, Booker T. Washington, dan Cesar Chavez sebagai pahlawan dari kelompok multikultural ditambahkan dalam kurikulum. Mereka dibahas saat pahlawan Amerika aliran utama seperti Patrick Henry, George Washington, Thomas Jefferson, dan John F. Kennedy dipelajari dalam kurikulum inti. Elemen budaya yang khas seperti makanan, tari, musik dan benda kelompok etnis dipelajari, namun hanya sedikit memberi perhatian pada makna dan pentingnya budaya khas itu bagi komunitas etnis.

Karakteristik penting dari pendekatan kontribusi adalah bahwa kurikulum aliran utama tetap tidak berubah dalam struktur dasar, tujuan, dan karakteristik. Persyaratan implementasi pendekatan ini adalah minimal yang hanya mencakup pengetahuan dasar mengenai masyarakat AS dan pengetahuan tentang pahlawan etnis dan peranan dan kontribusinya terhadap masyarakat dan budaya AS. Individu yang menentang ideologi, nilai dan konsepsi masyarakat yang dominan dan yang mendukung reformasi sosial, politik, dan ekonomi radikal jarang dimasukkan dalam pendekatan kontribusi. Jadi Booker T. Washington lebih mungkin dipilih untuk studi dibandingkan dengan W.E.B Du Bois, dan Sacajawea lebih mungkin dipilih daripada Geronimo. Kriteria yang digunakan untuk memilih pahlawan etnis untuk dipelajari dan penentuan keberhasilan perjuangannya berasal dari masyarakat aliran

utama dan bukan dari komunitas etnis. Akibatnya, pemakaian pendekatan kontribusi biasanya menghasilkan studi tentang pahlawan etnis yang hanya menggambarkan satu perspektif penting dalam komunitas etnis. Dalam pendekatan kontribusi, individu yang lebih radikal dan kurang konformis yang hanya menjadi pahlawan bagi komunitas etnis cenderung untuk diabaikan dalam buku teks, materi pembelajaran dan aktivitas yang dipakai.

Pendekatan kepahlawanan dan hari libur adalah varian dari pendekatan kontribusi. Dalam pendekatan ini, materi etnis terutama terbatas pada hari, minggu dan bulan spesial yang berhubungan dengan peristiwa dan peringatan etnis. Cinco de Mayo, HUT Martin Luther King, dan Minggu Sejarah Afrika Amerika merupakan contoh hari dan minggu etnis yang diperingati di sekolah. Selama perayaan ini, pengajar melibatkan siswa dalam pelajaran, pengalaman, dan pawai sejarah yang berkaitan dengan kelompok etnis yang sedang diperingati. Ketika pendekatan ini digunakan, kelas mempelajari sedikit atau tidak sama sekali tentang kelompok etnis sebelum atau sesudah peristiwa atau kesempatan khusus itu.

Pendekatan kontribusi memberi kesempatan pada guru untuk mengintegrasikan materi etnis ke dalam kurikulum secara cepat dengan memberi pengenalan tentang kontribusi etnis terhadap masyarakat dan budaya AS. Pengajar yang komit untuk mengintegrasikan materi etnis ke dalam kurikulum hanya memiliki sedikit pengetahuan tentang kelompok etnis dan hanya sedikit merevisi kurikulum. Akibatnya, mereka menggunakan pendekatan kontribusi saat mengajarkan tentang kelompok etnis. Guru-guru ini seharusnya mendorong, mendukung, dan memberi kesempatan untuk mempelajari pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan untuk mereformasi kurikulumnya dengan menggunakan satu atau beberapa pendekatan yang efektif.

Seringkali ada tuntutan politik yang kuat dari komunitas etnis terhadap sekolah untuk mencantumkan pahlawan, kontribusi dan budaya mereka ke dalam kurikulum sekolah. Kekuatan politik ini dapat mengambil bentuk tuntutan atas pahlawan dan kontribusi pahlawan dari kelompok mereka karena pahlawan aliran utama seperti Washington, Jefferson, dan Lincoln sangat nampak dalam kurikulum sekolah. Masyarakat etnis kulit berwarna ingin melihat pahlawan dan kontribusi mereka sendiri berdampingan dengan masyarakat aliran utama. Kontribusi tersebut dapat membantu mereka merasa dicantumkan (inklusi struktural), teruji, dan persamaan. Inklusi kurikulum juga memfasilitasi penelitian tentang kelompok etnis dan budaya yang menjadi korban kekuatan dan kekuasaan yang ada saat ini.

Pendekatan kontribusi juga merupakan pendekatan paling awal bagi pengajar untuk digunakan untuk mengintegrasikan materi etnis ke dalam kurikulum. Namun, pendekatan ini memiliki beberapa kelemahan serius. Jika integrasi kurikulum dilengkapi terutama dengan memasukkan pahlawan dan kontribusi etnis, siswa tidak memperoleh pandangan global tentang peranan kelompok etnis dan budaya di masyarakat AS. Lebih dari itu, mereka melihat isu dan peristiwa etnis terutama sebagai tambahan terhadap kurikulum dan akibatnya budaya itu hanya berkedudukan sebagai tempelan terhadap sejarah utama perkembangan bangsa dan terhadap kurikulum inti dari seni bahasa, studi sosial, seni, dan bidang pelajaran yang lain.

Pengajaran isu etnis dengan menggunakan kepahlawanan dan kontribusi juga cenderung untuk mengabaikan konsep dan isu penting yang berkaitan dengan korban dan penindasan dari kelompok etnis dan perjuangan melawan rasisme dan kekuasaan. Isu seperti ras, kemiskinan, dan penindasan cenderung diabaikan dalam pendekatan kontribusi untuk integrasi kurikulum.

Cenderung berfokus pada suatu keberhasilan dan pengesahan dari mitos Horatio Alger bahwa semua orang Amerika yang berkemauan untuk bekerja keras dapat beranjak dari miskin menjadi kaya dan menaikkan sendiri dengan usaha mereka sendiri.

Kisah keberhasilan dari sejarah etnis seperti Booker T. Washington George Washington Carver, dan Jackie Robinson, biasanya diceritakan dengan fokus pada kesuksesan mereka, dengan sedikit perhatian pada rasisme dan hambatan lain yang mereka hadapi dan bagaimana mereka berhasil mengatasi rintangan yang mereka hadapi. Siswa seharusnya belajar tentang proses seseorang menjadi pahlawan di samping tentang status dan peranannya sebagai pahlawan. Hanya jika siswa mempelajari proses individu menjadi pahlawan akan membuat mereka memahami secara utuh bagaimana individu, khususnya individu kulit berwarna, mencapai dan mempertahankan status pahlawan dan proses menjadi pahlawan apa yang berarti bagi kehidupan mereka sendiri.

Pendekatan kontribusi seringkali menghasilkan peremehan budaya etnis, studi tentang karakteristik aneh dan eksotis mereka, dan penguatan stereotipe dan salah konsepsi. Jika fokusnya adalah pada kontribusi dan aspek unik dari budaya etnis, siswa tidak terbantu untuk memandangnya sebagai keseluruhan yang lengkap dan dinamis. Pendekatan kontribusi juga cenderung berfokus pada gaya kelompok etnis daripada struktur lembaga seperti rasisme dan diskriminasi, yang secara kuat mempengaruhi kesempatan hidup mereka dan tetap membuatnya lemah dan terpinggirkan.

Pendekatan kontribusi terhadap integrasi materi dapat memberi siswa dengan pengalaman sesaat yang dapat diingat dengan pahlawan etnis, namun seringkali gagal untuk membantunya memahami peran dan pengaruh pahlawan itu dalam konteks keseluruhan dari sejarah dan masyarakat Amerika. Jika pahlawan etnis dipelajari terpisah

dan menjadi bagian dari konteks sosial dan politis di mana mereka hidup dan bekerja, siswa hanya memperoleh pemahaman parsial tentang peranan dan signifikannya dalam masyarakat. Jika Martin Luther King, Jr. dipelajari di luar konteks sosial dan politik rasisme pelembagaan di AS Selatan pada tahun 1940 dan 1950 an, dan tanpa perhatian yang lebih tajam dari rasisme pelembagaan di Utara selama periode ini, signifikansi utuhnya sebagai pembaharu sosial tidak ternyatakan ataupun dimengerti oleh siswa.

2. Pendekatan Aditif (*Additive Approach*)

Tahap kedua Pendekatan penting lain terhadap integrasi materi etnis terhadap kurikulum adalah penambahan materi, konsep, tema dan perspektif terhadap kurikulum tanpa mengubah struktur, tujuan dan karakteristik dasarnya. Pendekatan Aditif (Tahap 2) ini sering dilengkapi dengan penambahan suatu buku, unit, atau bidang terhadap kurikulum tanpa mengubahnya secara substansial. Contoh pendekatan ini meliputi penambahan buku seperti *The Color Purple* pada suatu unit tentang abad duapuluh, penggunaan film *Miss Jane Patman* selama unit tentang 1960-an, dan penambahan tentang suatu unit pada tawanan Jepang Amerika selama studi Perang Dunia II di sebuah kelas sejarah Amerika Serikat. Pendekatan aditif memungkinkan pengajar untuk memasukkan materi etnis ke dalam kurikulum tanpa restrukturisasi, suatu proses yang akan memakan waktu, usaha, latihan dan pemikiran kembali dari maksud, sifat dan tujuan kurikulum yang substansial. Pendekatan aditif dapat menjadi fase awal dalam upaya reformasi kurikulum transformatif yang didesain untuk menyusun kembali kurikulum total dan untuk mengintegrasikannya dengan materi, perspektif dan kerangka pikir etnis.

Namun pendekatan ini memiliki beberapa kelemahan seperti dari pendekatan kontribusi. Yang paling penting adalah pandangan tentang materi etnis dari perspektif

sejarawan, penulis, artis, dan ilmuwan aliran utama yang tidak memerlukan restrukturisasi kurikulum. Peristiwa, konsep, isu, dan masalah yang diseleksi untuk studi diseleksi dengan menggunakan kriteria dan perspektif Eurosentris dan aliran utama sentris. Jika mengajar suatu unit seperti Gerakan Barat pada kelas sejarah di AS kelas 5, guru dapat mengintegrasikan unit dengan menambahkan materi tentang Oglala Sioux Indian. Namun, unit tetap berpusat dan difokuskan pada aliran utama. Suatu unit disebut Gerakan Barat dan Eropah sentris sebagai aliran utama karena berfokus pada orang Eropah Amerika dari bagian Timur ke Barat Amerika Serikat. Oglala Sioux telah ada di Barat dan akibatnya tidak bergerak menuju ke barat. Unit mungkin menyebut Invasi dari Timur, dari sudut pandang Oglala Sioux. Black Elk, orang suci Oglala Sioux, mengeluhkan pemusnahan orang-orangnya yang berpuncak pada kekalahan mereka di Wounded Knee Creek pada 29 Desember 1890. Kurang lebih 200 laki, perempuan, dan anak Sioux terbunuh oleh pasukan AS. Black Elk berkata, "Ranting-ranting bangsa (Sioux) patah dan terpecah. Tidak ada lagi pusat, dan pohon yang dikeramatkan telah mati."

Black Elk tidak memandang tanahnya "Barat," tetapi lebih pada pusat dunia. Ia memandang arah utama secara metafisik. Jika mengajar tentang gerakan orang Eropah melintasi Amerika Utara, pengajar seharusnya membantu siswa memahami bahwa kelompok budaya, ras, dan etnis yang berbeda sering memiliki konsepsi dan sudut pandang yang berbeda dan bertentangan atas peristiwa sejarah, konsep, isu, dan perkembangan yang sama. Pemenang dan yang ditundukkan seringkali memiliki konsep yang berlawanan atas peristiwa sejarah yang sama. Namun, biasanya sudut pandang pemenang yang terlembagakan dalam sekolah dan masyarakat aliran utama. Ini terjadi karena sejarah dan buku teks biasanya ditulis oleh orang yang menang perang dan memperoleh keuntungan untuk

mengontrol masyarakat, dan bukan oleh yang kalah - korban dan lemah. Perspektif dari kedua kelompok perlu untuk membantu kita memahami secara penuh sejarah, budaya dan masyarakat kita.

Orang yang ditaklukkan dan orang yang menaklukkan memiliki sejarah dan budaya yang saling menjalin dan saling berhubungan secara berbelit-belit. Mereka harus mempelajari masing-masing sejarah dan budaya yang lain untuk memahaminya secara utuh. Pendekatan aditif gagal membantu siswa melihat masyarakat dari perspektif budaya dan etnis yang berbeda dan memahami cara yang saling berhubungan sejarah dan budaya dari kelompok etnis, ras, budaya, dan religi yang berbeda.

Isi, materi, dan isu yang ditambahkan ke dalam kurikulum seperti embel-embel daripada bagian integral dari unit pelajaran dapat menjadi problematis. Problem mungkin muncul jika buku seperti *The Color Purple* atau film seperti *Miss Jane Pittman* ditambahkan pada unit jika siswa kekurangan konsep, latar belakang materi, dan kematangan emosional sehubungan dengan isu dan masalah dalam materi ini. Penggunaan efektif dari materi yang kompleks dan bermuatan emosi biasanya memerlukan guru yang membantu siswa mempelajari secara bertahap dan berkembang, memiliki latar belakang materi yang kuat serta memiliki kematangan sikap. Penggunaan kedua materi ini di kelas dan sekolah yang berbeda telah menimbulkan masalah utama bagi pengajar yang menggunakannya. Suatu kontroversi masyarakat timbul. Masalah berkembang karena materi digunakan pada siswa yang tidak memiliki latar belakang isi atau kepuasan sikap untuk meresponnya secara memadai. Menambahkan materi etnis ke dalam kurikulum menurut cara yang sporadis dan terpilah-pilah dapat menyebabkan masalah pedagogis, kesulitan bagi guru, kebingungan siswa, dan kontroversi masyarakat.

3. Pendekatan Transformasi (*The transformation approach*)

Pendekatan transformasi berbeda secara mendasar dari pendekatan kontribusi dan aditif. Pada kedua pendekatan, materi etnis ditambahkan pada kurikulum inti aliran utama tanpa mengubah asumsi dasar, sifat, dan strukturnya. Dalam pendekatan transformasi ada perubahan dalam tujuan, struktur, dan perspektif fundamental dari kurikulum.

Pendekatan transformasi (tahap 3) mengubah asumsi dasar kurikulum dan menumbuhkan kompetensi siswa dalam melihat konsep, isu, tema dan problem dari beberapa perspektif dan sudut pandang etnis. Perspektif berpusat pada aliran utama adalah hanya satu di antara beberapa perspektif darimana isu, masalah, konsep, dan isu dipandang. Tidak mungkin dan tidak inginlah untuk melihat setiap isu, konsep, peristiwa atau masalah dari sudut pandang setiap kelompok etnis AS. Lebih dari itu, tujuan seharusnya memungkinkan siswa untuk melihat konsep dan isu lebih dari satu perspektif dan melihat peristiwa, isu, atau konsep yang sedang dipelajari dari sudut pandang kelompok etnis, budaya dan ras partisipan yang paling aktif, atau berpengaruh paling meyakinkan.⁶⁵

Isu kurikulum esensial yang terdapat dalam reformasi kurikulum multikultural bukan penambahan dari daftar panjang dari kelompok, pahlawan, atau kontribusi etnis namun pemasukan berbagai perspektif, kerangka pikir, dan materi dari berbagai kelompok yang akan memperluas pemahaman siswa akan sifat, perkembangan, dan kompleksitas masyarakat AS. Jika siswa sedang mempelajari revolusi dari koloni Inggris, perspektif dari revolusi Anglo, loyalis Anglo, Afrika Amerika, India, dan Inggris adalah esensial bagi mereka untuk memperoleh suatu pemahaman utuh tentang peristiwa yang signifikan dalam sejarah

⁶⁵ Ibid., Hal 203

Amerika. Siswa harus mempelajari revolusi dari berbagai kelompok yang berbeda ini untuk dipahami secara utuh.

Dalam seni bahasa, jika siswa sedang mempelajari sifat bahasa Inggris Amerika, mereka seharusnya dibantu untuk memahami perbedaan bahasa dan kekayaan linguistik di Amerika Serikat dan hal-hal dari berbagai kelompok regional, kultural, dan etnis mempengaruhi perkembangan bahasa Inggris AS. Siswa seharusnya juga mengkaji bagaimana penggunaan bahasa normatif berbeda dalam konteks sosial, wilayah dan situasi. Pemakaian bahasa Inggris orang kulit hitam sesuai untuk konteks sosial dan kultural tertentu dan tidak cocok untuk yang lain. Ini juga benar bagi bahasa Inggris AS baku. AS kaya bahasa dan dialek. Negara ini memiliki lebih dari 20 juta warga Hispanis. Spanyol adalah bahasa pertama sebagian besar dari mereka. Sebagian besar dari sekitar 30 juta bangsa Afrika Amerika berbicara baik dengan bahasa Inggris baku maupun bahasa Inggris kulit hitam. Perbedaan bahasa yang kaya di Amerika Serikat mencakup lebih dari dua puluh lima bahasa Eropah, Asia, Afrika, dan bahasa Timur Tengah, serta bahasa Indian Amerika. Sejak tahun 1970-an, bahasa dari Indo China, digunakan berbicara oleh kelompok seperti orang Hmong, Vietnam, Laos, dan Kamboja, lebih memperkaya perbedaan bahasa di Amerika Serikat.

Jika mempelajari musik, tari, dan sastra, guru seharusnya memperkenalkan siswa dengan bentuk-bentuk seni di antara etnis AS yang amat berpengaruh dan memperkaya tradisi seni dan sastra negara ini. Hal-hal yang berkaitan dengan musikus Afrika Amerika seperti Bessie Smith, W.C. Handy, dan Leontyne Price yang telah mempengaruhi sifat dan perkembangan musik AS seharusnya dikaji saat mempelajari perkembangan musik AS. Orang Afrika Amerika dan Puerto Rico mempengaruhi perkembangan tarian orang Amerika. Penulis dari orang kulit berwarna seperti Langston Hughes, N. Scott Momaday, Carlos Bulosan dan lain-lain bukan hanya telah

mempengaruhi secara signifikan perkembangan sastra Amerika, namun juga memberikan perspektif unik dan menampakkan sastra dan masyarakat Amerika.

Jika mempelajari sejarah, bahasa, musik, seni, sains, dan matematika AS, penekanan seharusnya bukan pada cara-cara di mana berbagai kelompok etnis dan budaya itu telah berkontribusi pada aliran utama budaya dan masyarakat AS. Lebih dari itu, penekanan seharusnya pada bagaimana budaya dan masyarakat AS pada umumnya muncul dari sintesis dan interaksi kompleks dari elemen budaya yang berbeda yang asalnya dari berbagai kelompok budaya, ras, etnis, dan agama yang membentuk masyarakat Amerika. Banks menyebut proses ini *multiple acculturation* dan berpendapat bahwa sekalipun Anglo-Saxon Protestan adalah kelompok dominan di Amerika Serikat secara kultural, politis, dan ekonomis, akan terjadi salah pengertian dan tidak akuratlah untuk menggambarkan budaya dan masyarakat AS sebagai budaya Anglo-Saxon Protestan. Kelompok etnis dan budaya AS yang lain amat mempengaruhi, membentuk, dan berpartisipasi dalam perkembangan dan pembentukan masyarakat dan budaya AS. Orang Afrika Amerika, misalnya, amat mempengaruhi perkembangan budaya AS selatan, sekalipun mereka hanya memiliki sedikit kekuasaan politik dan ekonomi.

Konsepsi akulturasi ganda (*a multiple acculturation conception*) dari masyarakat dan budaya AS mengarah pada perspektif bahwa memandang peristiwa etnis, sastra, musik, dan seni sebagai bagian integral dari yang membentuk budaya AS secara umum. Budaya WASP hanya dipandang sebagai bagian dari keseluruhan budaya yang lebih besar. Jadi mengajari sastra Amerika tanpa melibatkan penulis kulit berwarna yang signifikan memberikan pandangan yang parsial dan tidak lengkap tentang sastra, budaya, dan masyarakat AS.

4. Pendekatan Aksi Sosial (*The Social Action Approach*)

Pendekatan Aksi Sosial mencakup semua elemen dari pendekatan transformasi namun menambahkan komponen yang mempersyaratkan siswa membuat keputusan dan melakukan aksi yang berkaitan dengan konsep, isu, atau masalah yang dipelajari dalam unit. Tujuan utama dari pengajaran dalam pendekatan ini adalah mendidik siswa melakukan untuk kritik sosial dan perubahan sosial dan mengajari mereka ketrampilan pembuatan keputusan. Untuk memperkuat siswa dan membantu mereka memperoleh kemandirian politis, sekolah seharusnya membantunya menjadi kritikus sosial yang reflektif dan partisipan yang terlatih dalam perubahan sosial. Tujuan tradisional dari persekolahan yang telah ada adalah untuk mensosialisasi siswa sehingga mereka menerima tanpa bertanya ideologi, lembaga, dan praktek yang ada dalam masyarakat dan negara.

Pendidikan politik di Amerika Serikat secara tradisional meningkatkan kefasihan politik daripada aksi politik. Tujuan utama dari pendekatan aksi sosial adalah untuk membantu siswa memperoleh pengetahuan, nilai, dan ketrampilan yang mereka butuhkan untuk berpartisipasi dalam perubahan sosial sehingga kelompok-kelompok ras dan etnis yang terabaikan dan menjadi korban ini dapat menjadi berpartisipasi penuh dalam masyarakat AS dan negara akan lebih dekat dalam mencapai ide demokrasi. Untuk berpartisipasi secara efektif dalam perubahan sosial yang demokratis, siswa harus diajar kritik sosial dan harus dibantu untuk memahami inkonsistensi antara ideal dan realitas sosial, kegiatan yang harus dilakukan untuk mendekatkan jurang pemisah ini, dan bagaimana siswa, sebagai individu dan kelompok, dapat mempengaruhi sistem politik dan sosial pada masyarakat AS. Dalam pendekatan ini, pengajar adalah agen perubahan sosial (*agents of social change*) yang meningkatkan nilai-nilai demokratis dan kekuatan siswa.

Empat pendekatan untuk integrasi materi multikultural ke dalam kurikulum sering dipadukan dalam situasi pengajaran aktual. Satu pendekatan, seperti pendekatan kontribusi, dapat dipakai sebagai wahana untuk bergerak ke yang lain, yang lebih menantang secara intelektual seperti pendekatan transformasi dan pendekatan aksi sosial. Tidak realistis untuk mengharapkan guru berpindah secara langsung dari kurikulum yang amat berpusat pada aliran utama ke pendekatan yang berfokus pada pembuatan keputusan dan aksi sosial.

Guru yang memiliki kurikulum yang berpusat pada aliran utama mungkin memakai peringatan ulang tahun Martin Luther King sebagai kesempatan untuk mengintegrasikan kurikulum dengan materi etnis, di samping memikirkan secara serius tentang bagaimana materi tentang orang Afrika Amerika dan kelompok etnis yang lain dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum secara berangsur-angsur.

BAB IV

PENGEMBANGAN PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DI INDONESIA

A. Pendahuluan

Bayangkan pandemi covid19 yang telah membunuh banyak orang, jutaan orang di Indonesia terpapar, sebagian meninggal dunia dan sebagian lainnya harus tersandera karena isolasi mandiri di rumah dan di rumah sakit. Kondisi ini menjadi alasan yang jelas untuk mengembangkan serum atau obat yang mampu mengatasi virus covid19. Demikianpun halnya dengan pendidikan multikulturalisme. Di Amerika Serikat pendidikan multikultural bermula dari gerakan multikulturalisme yang dimulai tahun 1950-an dalam bentuk gerakan civil rights (perjuangan hak sipil). Persoalan intinya adalah persamaan kaum kulit hitam dan kaum kulit putih. Jadi, isu dan masalah rasial (diskriminasi) menjadi faktor pemicu pendidikan multikultural. Sementara itu, di Inggris pendidikan multikultural dikembangkan karena migrasi penduduk Karibia dan Asia, serta Negara-negara Persemakmuran. Tuntutannya adalah kesetaraan hak sosial, kesetaraan perlakuan di ruang publik dan pendidikan. Selanjutnya, pendidikan multikultural di Australia berlatar belakang diskriminasi suku Aborigin. Lain halnya latar belakang pendidikan multikultural di Kanada. Pendidikan multikultural hadir bersamaan dengan perkembangan sosial dimana memang sejak awal terdiri dari budaya yang berasal dari imigran. Dari beberapa negara tersebut, terlihat bahwa pendidikan multikultural bisa mempunyai polanya sendiri-sendiri sesuai dengan kesadaran dan proses pengolahannya (Moeis, 2014).

Di Indonesia lain lagi pemicunya. Sebagaimana dikatakan Siswantara (2017), Indonesia mempunyai 600-an bahasa daerah, 300-an suku bangsa yang hidup di kurang lebih 17 ribu kepulauan Nusantara. Pendiri bangsa tentunya sangat menyadari ke-Indonesia-an yang akan dibentuk dan bertekad untuk bersemboyan: Bhinneka Tunggal Ika. Jauh sebelum

kemerdekaan, kesadaran keragaman Indonesia juga sudah menaungi kesadaran kaum muda Indonesia, bahkan sejak zaman Sriwijaya dan Majapahit. Dengan kesadaran penuh atas perbedaan dan keragaman, pada tanggal 28 Oktober 1928 di Batavia, mereka menyatakan: satu tumpah darah dan tanah air Indonesia, satu Bangsa Indonesia, satu Bahasa Indonesia. Bagi para pemuda/i bangsa ini, persatuan berada di atas perbedaan demi kemerdekaan bangsanya. Semangat ini terus menjiwai pemimpin bangsa di awal kemerdekaan, salah satunya, nampak dalam rumusan Pancasila khususnya sila kesatu dan ketiga. Sangat jelas bahwa dalam era kemerdekaan, faktor eksternal menjadi pendorong terjadinya persatuan yang mampu mengatasi perbedaan kepentingan dan golongan (SARA). Berbekal kemerdekaan, Indonesia bertekad membangun masyarakat demokratis. Untuk itu, tentunya dibutuhkan sistem pendidikan yang menjunjung keragaman masyarakat. Mengapa? Keragaman merupakan sebuah keniscayaan yang tak terelakan dalam masyarakat. Melupakan keragaman dalam pendidikan merupakan celah tak terperhatikan yang rentan membawa masalah sosial, salah satunya konflik horisontal. Maka, pendidikan multikultural menjadi celah penting yang membawa pendewasaan dialogis, bukan hanya masing-masing pribadi tetapi seluruh masyarakat itu sendiri.

Indonesia merupakan bangsa dengan aneka suku, budaya, agama, golongan, ras, etnis, kelas sosial, dan sebagainya. Singkatnya, multikultural sebagaimana Amerika, Australia, Inggris, dan negara maju lainnya. Walaupun tersusun atas berbagai keragaman, demikian Moeis, masing-masing bangsa mempunyai latar belakang (alasan historis) dalam mengembangkan pendidikan multikultural. Latar belakang ini setidaknya bisa menjadi alasan dan memberikan warna bagaimana pendidikan multikultural dikembangkan dan dilaksanakan.

B. Kunci Pendidikan Multikultural: Melihat Orang Lain

Dari berbagai pendapat pakar pendidikan multikultural, dapat dikatakan proses dan tujuan pendidikan multikultural adalah bergerak ke arah “memanusiakan manusia” di mana peserta didik diharapkan mampu memahami dan berelasi baik dengan dirinya sendiri, dengan orang lain, dengan alam dan lingkungan budayanya (Driyarkara, 1980).Terkait dengan itu maka kunci pendidikan multikultural adalah bagaimana kita melihat orang lain.Dalam hal ini kita ditolong untuk dapat melihatnya dengan lebih jelas melalui kacamata filsafat Emmanuel Levinas dengan etika tanggung jawabnya. Levinas, salah satu dari sekian banyak pakar filsafat yang turut menyuarakan nilai kemanusiaan, berusaha mengayuh makna yang lain (l'autrui atau the other). Bagi Levinas, orang lain adalah pembuka horizon keberadaan kita, bahkan pendobrak menuju ketransendenan kita. Levinas memandang orang lain itu ada dan indah. Keberadaan orang lain tidak boleh direduksi sebatas pemahaman (tematisasi dan konseptualisasi) belaka namun harus ditempatkan dalam apa yang disebut Levinas relasi atau pertemuan tatap muka. Etika dan moral bagi Levinas tidak dapat dipisahkan karena merupakan filsafat pertama. Menurut Levinas, etika bukanlah menyangkut teori mengenai baik-buruknya tindakan tertentu. Etika bukan sebuah aturan universal yang ajek dan harus diikuti seluruh umat manusia. Etika, menurut Levinas, merupakan relasi yang lahir dari pertemuan konkret dengan orang lain yang memiliki wajah. Pertemuan konkret yang dimaksud Levinas adalah pertemuan yang nyata, face to face, diri kita dengan orang lain. Relasi etis adalah relasi yang terlahir dari pertemuan seperti itu. Bukan “pertemuan” yang terjadi di dalam kepala kita, bukan gagasan-gagasan atau asumsi-asumsi personal kita tentang orang lain. Jadi pertama-tama untuk mengetahui bagaimana itu relasi etis, kita harus secara konkret berhadapan dengan orang lain (Tjaya, 2012).

Dengan itu Levinas mengkritik tradisi filsafat barat yang berakar kuat pada filsafat Yunani, yang senada dengan bahasa

psikoanalisa, yang menggaungkan “mencintai kebijaksanaan (love of wisdom)”. Bagi Levinas kebijaksanaan itu tidak hanya harus dicintai dalam tataran konseptual, melainkan dioperasionalkan dalam tataran praksis yaitu “kebijaksanaan cinta dalam pelayanan cinta (wisdom of love at the service of love)” antarindividu dan kelompok (Marcus, 2008). Bagi Levinas, perjumpaan dengan orang lain ini adalah momen yang paling primordial di dalam kehidupan. Selain kehadirannya menuntut tanggung jawab dari saya, kehadiran orang lain juga membuat saya menemukan identitas dan keunikan saya. Dengan bertanggung jawab terhadapnya, saya menemukan ke-aku-an diri saya.

Lebih jauh Levinas memahami bahwa perjumpaan dengan orang lain memiliki makna pengalaman transendensi. Perjumpaan dengan orang lain membuka cakrawala transendensi bagi manusia, “kemuliaan dari Yang-Tak-Terhingga.” Tuhan hadir dalam diri orang lain. Oleh karena itu, dengan bertanggung jawab terhadap kehadiran orang lain, kita mewujudkan penghayatan iman kita akan Tuhan. Pelayanan kita dalam tanggung jawab akan kehadiran orang lain, berarti juga kita melayani Tuhan yang hadir dalam diri sesama. Pemikiran ini, yang bersifat humanis-transendental, kiranya sejalan dengan pendapat kaum agamis bahwa melayani sesama berarti melayani Tuhan dan sebaliknya mengabaikan orang lain berarti mengabaikan Tuhan yang hadir di dalam diri sesama tersebut.

Oleh filosofi Levinas yang menekankan etika tanggung jawab antara satu dengan yang lain maka kita ditolong memaknai hakikat pluralitas dengan segala dimensi perbedaan di dalamnya, baik itu keberagamaan, kesukuan, keetnisitan, kebudayaan dan sebagainya, bahwa setiap kelompok mesti mampu melihat “orang lain” sebagai momen etis jika ingin menjadikan pluralitas tidak sekedar wacana retorik. “Orang lain” di sini berarti yang secara hakiki berbeda dengan pribadi atau kelompok saya. Maka momen etis yang dimaksud adalah bentuk apresiasi atas perbedaan bukan sarana untuk

membentuk eksklusivisme yang berujung pada gap antara mayoritas dan minoritas.

Dalam pandangan Levinas, apa yang diperlukan adalah terus-menerus sadar bahwa ada-ku selalu terkait orang lain. Kesadaran interdependensi tersebut akan menggugah hati dan rasio kita untuk tidak membunuh orang lain yang hadir di hadapan kita lewat penampakan muka (*le ephiphane du visage*). Dengan melihat yang lain sebagai momen etis maka gap antara mayoritas dan minoritas diminimalisasi. Ide Levinas barangkali tidak seideal dengan realitas namun setidaknya momen etis itu bisa mewujudkan pertemuan yang sungguh-sungguh bukan yang samar-samar. Sungguh-sungguh berarti pertemuan yang berlangsung didasarkan pada apresiasi atas kekhasan yang ada sembari menemukan titik temu dari kekhasan masing-masing. Kalau itu sama-samar maka faktor pengkondisianlah yang berperan. Cepat atau lambat, faktor ini akan mengubah disposisi orang lain sebagai momen etis menjadi orang lain sebagai neraka (Sartre).

Dalam konteks multikultural di Indonesia, bagaimana bisa memaknai tanggung jawab sebagai momen pertemuan? Sebenarnya cukup sederhana dan tidak terlalu berat untuk dipraktekan. Apa yang diperlukan adalah terus-menerus sadar bahwa ada-ku selalu terkait orang lain. Kesadaran interdependensi tersebut akan menggugah hati dan rasio kita untuk tidak membunuh orang lain yang hadir dihadapan kita lewat penampakan muka (*le ephiphane du visage*). Jika kesadaran demikian selalu diasah maka ke manapun pribadi pergi dan di manapun bertemu orang asing rasa tanggung jawab akan menyeruak secara spontan. Untuk direnungkan lebih dalam, orang lain dalam konteks kehidupan beragama di Indonesia adalah para penganut agama yang beragam: Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu dan berbagai aliran kepercayaan; dalam konteks kesukuan/kedaerahan di Indonesia mereka (orang lain itu) adalah orang Batak, Palembang, Manado, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Papua dan sebagainya; dalam konteks jenis kelamin mereka

adalah laki-laki atau perempuan, bahkan kelompok-kelompok dengan orientasi seksual berbeda. Dalam artian, tanggapan kelompok yang satu terhadap kehadiran kelompok yang lain. Dalam konteks pluralitas agama misalnya, apa makna kehadiran agama lain bagi saya sebagai seorang Muslim, Kristiani (Katolik dan Protestan), Buddhis, Hindu dan penganut Konghucu? Apakah kehadiran agama lain bermakna dan meyokong keimanan pribadi? Atau justru, menjadi ancaman. Jika kehadiran mereka di sekeliling menjadi anugerah untuk berbagi pengalaman maka saya siap bertanggung jawab?

Untuk mewujudkan perjumpaan tersebut, ada dua karakteristik tanggung jawab yang perlu direfleksikan supaya bisa menjadi horizon yang membuka cakrawala berpikir, yakni (a) tanggung jawab yang (harus) bersifat konkret dan (b) tanggung jawab yang bersifat asimetris. Konkret yang dimaksud Levinas adalah mengacu pada pribadi sebagai subyek. Artinya tanggung jawab tersebut konkret karena tindakan tanggung jawab itu berasal dari pribadi yang juga bersifat konkret. Tanggung jawab itu bertumpu pada pribadi. Karena konkret maka arahnya pun konkret. Levinas menegaskan bahwa tanggung jawabku pada Tuhan harus mendapat bentuk konkretnya dalam tanggung jawabku kepada sesama, orang lain (Levinas, 1985). Saya yang konkret harus bertanggung jawab terhadap orang lain secara konkret. Saya harus menunjang dan melengkapi kehidupannya. Karena orang lain itu mewahyukan diri sebagai yang melarat, miskin, telanjang dan lapar, maka saya harus mengambil sikap tanggung jawab atasnya dengan seluruh keberadaannya. Saya tidak mungkin tinggal diam atau membiarkannya begitu saja, karena dia selalu memohon bantuan dari saya. Mengakui orang lain sebagai yang konkret berarti saya harus mendekatinya dan memberikan sesuatu sesuai kebutuhannya. Artinya, saya tidak boleh mendekatinya dengan tangan kosong. Tanggung jawab ala Levinas juga bersifat asimetris. Artinya tanggung jawab tanpa mengharapkan timbal balik. Pandangan Levinas ini

berbeda dengan pemahaman Martin Buber tentang relasi antara manusia. Menurut Buber salah satu karakteristik relasi “Aku-Engkau” dalam konteks relasi antarmanusia adalah ketimbal-balikan (reciprocity) atau mutualitas (mutuality). Ketimbal-balikan atau mutualitas merupakan esensi dari relasi “Aku-Engkau” ala Buber. Buber mengatakan, “Relasi bersifat timbal balik. Sesamaku bertindak padaku sebagaimana saya bertindak padanya.” (Buber, 1996). Jadi, relasi terjadi dalam pemberian dan penerimaan timbal-balik antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Kepenuhan eksistensi manusia ditemukan dalam mutualitas relasinya. Maka bagi Buber, “ketimbal-balikan” menjadi “pintu gerbang masuk menuju eksistensi. Dengan relasi timbal balik ini, manusia menemukan kediriannya. Levinas mengeritik relasi Buber dengan mengatakan, relasi itu bukan resiprositas melainkan asimetri. Levinas tidak melihat tanggung jawab dari dua arah. Hakekat pribadi adalah bertanggung jawab tanpa mengharapkan kembali. Resiprositas adalah urusan-nya. Levinas mengkritik konsep relasi intersubjektif atau relasi “Aku-Engkau” dari Buber. Bagi Levinas perjumpaan akan kokoh direalisasi bila ada tindakan konkret dan tak menuntut balasan dari pihak sebelah.

Levinas memandang orang lain mengakibatkan saya bertanggung jawab. Inilah kejadian yang sama sekali menentukan. Sedangkan relasi “Aku-Engkau” pada Buber melewati begitu saja ciri etis tersebut dan itulah kelemahannya yang utama (Bertens, 1985). Levinas ingin menunjukkan bahwa hubungan interpersonal antara aku dan orang lain selalu bersifat asimetris dan bukan berpola resiprositas. Artinya aku boleh memberikan hidupku bagi orang lain tanpa aku menuntut orang lain dan menjadikan mereka sebagai keuntungan bagiku. Ini bersifat pamrih, unconditional relationship. Singkatnya, jika bagi Buber relasi intersubjektif selalu berpola being-with dan karena itu simetris, maka bagi Levinas relasi itu senantiasa being-for karena itu asimetris. Aku-bagi-Kamu tidak boleh dibalik menjadi Kamu-bagi-Aku

(Adiprasetya, 2000). Kewajiban etis yang muncul dengan muka harus dipahami secara asimetris. Apa yang diberikan pada orang lain, tidak boleh dituntut balasan.

Menilik dua karakteristik tanggung jawab Levinas di atas, sekiranya akan semakin kuat maknanya jika dibenturkan dengan ajaran kasih dan kepedulian terhadap sesama pada setiap agama. Perjumpaan akan kokoh direalisasi bila ada tindakan konkret dan tak menuntut balasan dari pihak sebelah. Maka dari itu, titik temu—berdasarkan pemikiran Levinas—yang memungkinkan perjumpaan yang sungguh-sungguh dalam pluralitas hidup beragama dengan latar belakang budaya dan suku yang berbeda-beda di Indonesia adalah tanggung jawab.

Namun perlu digarisbawahi bahwa tanggung jawab itu mesti bersumber pada kesediaan secara pribadi, menghayati inti ajaran agama yang dianut (tanggung jawab iman) sehingga menjadi inspirasi tindakan nyata dalam keadaan apapun saat bertemu penganut lain. Dengan menghayati ajaran imannya, pribadi akan selalu diingatkan bahwa saya adalah orang yang harus melakukan kebaikan, tidak menuntut dan menunggu orang lain. “Tidak menuntut dan menunggu dari orang lain” boleh disebut sebagai unconditional responsibility.

Jaminan pada kemampuan setiap individu, terutama masyarakat Indonesia, memaknai orang lain dalam kehidupan beragama adalah kesadaran untuk bertanggung jawab secara konkret dan tidak menuntut balas jasa. Semua akan dilakukan dengan sadar dan ikhlas demi sebuah perjumpaan yang sungguh-sungguh dalam pluralitas keberagamaan yang berbalut pluralitas kesukuan dan kebudayaan. Perjumpaan tersebut akan benar-benar terwujud oleh sebab dalam keseharian, bertemu orang lain dimaknai sebagai momen etis bukan neraka (Sartre). Kalau orang lain dipandang sebagai neraka maka manusia secara hakiki bukan sebagai homo religius tetapi homo homini lupus yang siap menjadi bom waktu yang kapan saja akan menghancurkan kehadiran yang lain. Jika tanggung jawab hilang maka tidak menutup

kemungkinan, manusia akan terus diteror diskriminasi kemanusiaan sepanjang hayatnya (Putra, 2019).

C. Model Pengembangan

Berbagai tipologi atau model pendidikan multikultural telah dikembangkan, khususnya di Amerika Serikat yang menjadi episentrum pendidikan multikultural sejak awal, namun pada umumnya mengacu pada model yang dikembangkan oleh Banks (1994) serta Sleeter dan Grant (1993). Model yang mereka kembangkan berbeda namun tidak benar-benar eksklusif (Chandra, 2003). Gary Burnett (1994) adalah salah seorang pakar dan pemerhati pendidikan multikultural yang mengembangkan sebuah tipologi/model alternatif dengan menggabungkan pendekatan Banks dan Sleeter-Grant. Tipologi yang diusulkannya membagi program pendidikan multikultural ke dalam tiga kategori sesuai dengan penekanan utama mereka. Yang pertama mencakup program berorientasi konten (*content-oriented program*), yang merupakan pendekatan yang paling umum dan segera dikenal dalam pendidikan multikultural. Dalam bentuknya yang paling sederhana, program jenis ini menambahkan kilau multikultural ke kurikulum standar.

Versi yang lebih updated dan mumpuni sebenarnya adalah mengubah kurikulum. Kategori kedua mencakup program-program yang berorientasi pada siswa (*student-oriented program*) untuk menjawab kebutuhan akademik kelompok-kelompok siswa tertentu, biasanya kelompok minoritas. Kategori ketiga termasuk program yang berorientasi sosial, pada kehidupan masyarakat (*socially-oriented program*), yang berupaya mereformasi sekolah dan konteks politik serta budaya pendidikan. Mengidentifikasi kategori-kategori ini dapat membantu tenaga pendidik dan pihak-pihak terkait mengembangkan program yang mencerminkan keragaman siswa.

Lebih jauh dengan ketiga model ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Program yang berorientasi pada konten (Content-Oriented Program). Upaya yang berorientasi pada konten adalah jenis pendidikan multikultural yang paling umum dan dapat segera dikenali. Tujuan utamanya adalah memasukkan konten tentang berbagai kelompok budaya dalam kurikulum dan materi pembelajaran untuk meningkatkan pengetahuan nara didik tentang kelompok-kelompok ini. Dalam bentuknya yang paling sederhana, jenis program ini menambahkan jargon multikultural ke dalam standar isi kurikulum, mungkin menggabungkan beberapa bacaan/artikel pendek tentang kisah kepahlawanan (di Indonesia, misalnya cerita sejarah Sisingamangaraja, Panglima Besar Soedirman, Pangeran Diponegoro, Christina Martha Tiahahu, Cut Nyak Dhien dan lain-lain) atau beberapa bentuk perayaan khas dalam agama/budaya lokal yang dijadikan hari libur nasional di kelas (di Indonesia contohnya Hari Raya Waisak, Nyepi, Natal, Idul Adha, Awal Puasa Bulan Ramadhan dan sebagainya). Versi lain dari area program yang berorientasi konten mengambil pendekatan yang lebih menyeluruh, menambahkan banyak bahan multikultural dan tema (pembelajaran tematik) ke dalam kurikulum.

Versi yang lebih updated secara aktif bermaksud mengubah kurikulum. Menurut Banks (1994), program-program ini memiliki tiga tujuan: 1) untuk mengembangkan konten multikultural di seluruh disiplin ilmu; 2) untuk memasukkan berbagai sudut pandang dan perspektif yang berbeda dalam kurikulum; dan 3) Untuk mengubah kanon, sehingga akhirnya mengembangkan paradigma baru dalam kurikulum. Program-program semacam itu sering mengambil bentuk yang Sleeter dan Grant sebut sebagai "kelompok tunggal studi"; di Amerika contoh umumnya termasuk program studi tentang kulit hitam, etnis, dan wanita.

Dalam beberapa kasus, program studi kelompok tunggal dapat memainkan peran utama dalam transformasi

seluruh sekolah, seperti, misalnya, dalam pengembangan sekolah Afrosentris independen (Shujaa, 1992). Beberapa sekolah juga telah menciptakan ruang kelas gender tunggal, dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak perempuan yang jauh dari distraksi kelas gender campuran. Sekolah Afrosentris dan ruang kelas satu jenis kelamin, menggabungkan elemen dari program berorientasi konten dengan aspek program yang berorientasi pada siswa, sebagaimana dijelaskan berikut ini.

2. Program yang berorientasi pada siswa (Student-Oriented Program). Karena pendidikan multikultural adalah upaya yang mencerminkan keberagaman yang semakin berkembang di ruang kelas, maka banyak program bergerak melampaui revisi kurikulum untuk secara khusus mengatasi kebutuhan akademik kelompok siswa tertentu yang ditentukan sebelumnya dengan cermat, biasanya siswa dari kelompok minoritas. Terutama, seperti yang dicatat Banks, sementara program kurikuler berupaya untuk meningkatkan kumpulan pengetahuan tentang berbagai kelompok etnis, budaya, dan gender, maka program yang berorientasi pada siswa lebih dimaksudkan untuk meningkatkan prestasi akademik kelompok-kelompok ini, bahkan ketika ia tidak melibatkan perubahan ekstensif dalam isi kurikulum.

Seperti yang dijelaskan oleh Sleeter dan Grant, banyak dari program ini tidak dirancang untuk mengubah kurikulum atau konteks sosial pendidikan, tetapi untuk membantu siswa yang berbeda secara bahasa atau secara budaya melalui proses transisi masuk ke pendidikan arus utama (educational mainstream). Untuk melakukan hal ini, program-program ini sering menggunakan latar belakang linguistik dan budaya yang beragam dari siswa sebagai pintu masuknya. Hasilnya, program yang berorientasi pada siswa dapat, dengan sendirinya, mengambil banyak bentuk, beberapa di antaranya yang biasanya tidak dianggap

sebagai jenis pendidikan multikultural. Banks menguraikan empat kategori program ini dalam arti luas: 1) Program yang menggunakan penelitian ke dalam gaya belajar yang berbasis budaya dalam upaya untuk menentukan gaya mengajar mana yang akan digunakan terhadap kelompok siswa tertentu; 2) program bilingual atau bikultural; program bahasa yang dibangun berdasarkan bahasa dan budaya siswa Afrika-Amerika; dan 3) program matematika dan sains khusus untuk siswa minoritas atau perempuan.

Sebagai hasil dari variasi ini—dan karena tujuannya adalah berusaha membantu siswa melalui masa transisi untuk masuk ke pendidikan arus utama—maka banyak program yang berorientasi pada siswa dapat dipandang sebagai program yang bersifat kompensasi/pengganti; pada kenyataannya, program ini sering hampir tidak dapat dibedakan dari program kompensasi yang lain yang mungkin tidak multikultural dalam penekannya.

3. Program yang berorientasi pada sosial kemasyarakatan (Socially-Oriented Program). Program-program jenis ini berusaha untuk mereformasi sekolah dan konteks budaya serta iklim politik sekolah, bertujuan tidak hanya untuk meningkatkan prestasi akademik atau untuk meningkatkan isi pengetahuan multikultural, tetapi bertujuan menghasilkan peningkatan dampak yang lebih luas dalam hal toleransi budaya dan ras serta mengurangi bias. Menurut Banks, kategori program ini tidak hanya mencakup program yang dirancang untuk merestrukturisasi dan mendesegregasi (penghapusan iklim rasialisme) sekolah, tetapi juga program yang dirancang untuk meningkatkan semua jenis kontak di antara ras-ras yang ada: program untuk mendorong guru dari kelompok minoritas agar lebih berkembang dalam hal berinteraksi, program anti-bias dan program pembelajaran kooperatif.

Sebagaimana digambarkan oleh Sleeter and Grant, jenis pendidikan multikultural ini (Socially-Oriented

Program) menekankan "hubungan manusia (human relation)" pada semua bentuknya dan menggabungkan beberapa karakteristik dari kedua jenis program lainnya (Content-Oriented Program dan Student-Oriented Program); yakni bahwa hal ini, dapat memerlukan revisi kurikulum untuk menekankan kontribusi sosial positif kelompok etnis dan budaya, sambil menggunakan penelitian tentang gaya belajar untuk meningkatkan prestasi siswa dan mengurangi ketegangan rasial di dalam kelas. Tetapi Sleeter dan Grant juga memperluas jenis pendidikan multikultural ini dengan memasukkan ke dalamnya suatu jangkauan yang jauh lebih luas dari program-program dengan orientasi sosial-kemasyarakatan dan tujuan aktivis sosial. Program yang mereka rujuk itu, yang sangat jarang – dan yang nampaknya akan lebih bersifat kontroversial karena dapat menimbulkan banyak perdebatan – menekankan pluralisme dan kesetaraan budaya dalam masyarakat Amerika yang majemuk sebagai suatu keseluruhan, tidak hanya di sekolah-sekolah.

Untuk mencapai tujuannya, program semacam itu bisa menggunakan sejumlah pendekatan. Banyak yang menekankan penerapan ketrampilan berpikir kritis untuk mengkritik rasisme, seksisme, dan aspek represif lainnya dari masyarakat Amerika; beberapa menekankan aspek multi bahasa; yang lain mencoba untuk menggali masalah dari sejumlah besar sudut pandang yang berbeda dari budaya dominan; sementara yang lain masih bisa memanfaatkan pendekatan pembelajaran kooperatif dan keterampilan pengambilan keputusan untuk mempersiapkan siswa menjadi warga yang aktif secara sosial.

Kategori pendidikan multikultural sebagaimana yang digambarkan dengan jelas di atas ini setidaknya dapat memfasilitasi para pendidik dan pihak-pihak terkait lainnya yang berkepentingan, yang mencoba mengembangkan program yang mencerminkan keragaman siswa mereka.

Meskipun sangat berbau Amerika, artikulasi umum dari program dan tujuan pendekatan yang spesifik dapat membantu mengatasi beberapa hal terkait retorika politik seputar pendidikan multikultural, termasuk memberi landasan bersama bagi pendidik dan pembuat kebijakan untuk mendiskusikan semua isu yang terkait dengan masalah pendidikan multikultural.

D. Strategi Pengembangan

Strategi adalah cara yang digunakan untuk mengatasi atau memenangkan persoalan, khususnya yang spesifik. Masalah spesifik kita di Indonesia berkenaan dengan realitas multikultural sedikitnya ada dua. Pertama, sebagaimana dikatakan Sumartana (dalam Sularso dkk., 1998) adalah bahwa pada umumnya warga masyarakat kita belum dapat memikirkan secara sungguh-sungguh konsekuensi dari kemajemukan dalam masyarakat. Sehingga tidak mengherankan pasca keruntuhan Orde Baru (1998) bangsa Indonesia dihadapkan pada kerawanan konflik horisontal yang kerap mewarnai kehidupan masyarakat. Untuk itu diperlukan sebuah pijakan baru yang lebih mengarah kepada solidaritas kultural di mana perdamaian harus dilakukan melalui dialog perdamaian.

Untuk menumbuhkan sikap-sikap yang mengarah kepada pembentukan solidaritas kultural di kalangan generasi muda perlu diupayakan melalui berbagai cara dan wahana. Pendidikan multikultural di Indonesia adalah salah satu upaya yang bisa dilakukan sekarang ini. Kedua, kendatipun pendidikan multikultural mulai banyak diberlakukan di lingkungan-lingkungan sekolah namun realitanya pendidikan itu hanya mempersiapkan nara didik dengan kesadaran budaya etnik mereka sendiri, padahal

“tujuan pendidikan multikultur adalah untuk mempersiapkan nara didik dengan sejumlah pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperlukan

dalam lingkungan budaya etnik mereka, budaya nasional, dan antar budaya etnik lainnya”.

Pendidikan sebagai pengembangan kesadaran budaya seperti ini, demikian diistilahkan Moeis, masih berada dalam taraf soft multikulturalisme (kesadaran multikultural yang hanya di permukaan saja), belum berhasil dibumikan dan berdampak signifikan dalam kehidupan nara didik di lingkungan yang lebih luas daripada rumah dan sekolah.

Lalu bagaimana strategi agar pendidikan multikultural di Indonesia benar-benar efektif dapat mencapai sasarnya? Dalam rangka pengembangan pendidikan multikultural di Indonesia setidaknya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan.

Pertama, nilai inti pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural mengusung minimal empat nilai penting, yaitu: a) apresiasi terhadap adanya kenyataan pluralitas budaya, b) pengakuan terhadap harkat dan hak asasi manusia, c) pengembangan tanggung jawab masyarakat dunia, dan d) pengembangan tanggung jawab manusia terhadap planet bumi (Butet dkk., 2018).

Kedua, tujuan pendidikan multikultural. Nieto (1996) merujuk kepada berbagai pemikiran mengatakan esensi tujuan pendidikan multikultural adalah sebagai berikut: Pertama, membimbing peserta didik mengembangkan konsep diri yang positif, yakni meraih pemahaman yang luas tentang makna dirinya dalam perspektif budaya lain melalui cara memberikan pemahaman tentang sejarah, budaya dan sumbangannya terhadap keragaman kelompok atau masyarakat. Kedua, mempersiapkan para peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam meraih kesetaraan dalam organisasi dan institusi dengan memberikan pemahaman, disposisi dan ketrampilan dalam mendistribusikan kembali kekuasaan dan pendapatan secara proporsional di tengah keragaman kelompok atau masyarakat. membuka peluang dan kesempatan bagi semua peserta didik untuk mendapatkan kemudahan dalam pendidikan, sekaligus mendorong mereka

memiliki sikap kritis dalam memaknai keadilan sosial dan meringankan penderitaan sesama yang di akibatkan oleh dalam masyarakat. Keempat, menumbuhkan empati peserta didik terhadap penderitaan atau kesengsaraan yang dialami oleh sesama dari suku dan ras lain yang di akibatkan oleh keunikan, ciri – ciri fisik dan karakter budaya mereka. Kelima, memberikan tempat yang layak dan utama pada sejarah dan pengalaman hidup peserta didik dalam proses pembelajaran multikultural. Keenam, memotivasi peserta didik untuk belajar tuntas dan meningkatkan berbagai ketrampilan berfikir yang relevan dalam iklim pembelajaran yang akrab dan kontekstual. Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut maka yang paling di butuhkan adalah guru-guru yang berkompeten dan memiliki kepedulian dan komitmen terhadap hal yang terkait dengan pembelajaran multikultural. Para guru yang dipayungi oleh kebijakan sekolah yang reformis dan didukung orang tua siswa, dituntut untuk kreatif dan inovatif menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, dalam arti lingkungan yang demokratis dan bermakna bagi peserta didik untuk memperoleh pengalaman tentang kebersamaan dalam keberbedaan dengan sukses. Dalam hal tersebut sekolah dituntut memainkan perannya lebih nyata dalam pengembangan sikap, perilaku dan nilai-nilai masyarakat yang demokratis. Singkatnya, untuk mencapai tujuan hakiki pendidikan multikultural perlu melibatkan transformasi atau perubahan dalam tiga dimensi, yakni perubahan diri pribadi (the transformation of self), perubahan sekolah dan lingkungan keluarga (the transformation of schools and schooling) dan terakhir adalah perubahan masyarakat (the transformation of society) (Wiyanarti, 2017).

Ketiga, karakteristik pendidikan multikultural. Nieto dan Bode (2008) menyebutkan ada tujuh karakteristik yang harus ada dalam pendidikan multikultural, yakni: “Pertama, pendidikan multikultural bersifat antirasisme. Kedua, ini hal mendasar, pendidikan multikultural harus dianggap sama pentingnya dengan membaca, menulis, dan matematika.

Ketiga, pendidikan multikultural sangat penting bagi semua siswa, tidak hanya bagi siswa kulit berwarna, atau bagi mereka yang dianggap kurang beruntung. Keempat, pendidikan multikultural meresap (pervasive). Ia meresap dalam semua aspek kehidupan sekolah, lingkungan, pelajaran, hubungan antara guru, nara didik dan komunitas sekolah yang lebih besar. Kelima, pendidikan multikultural menjunjung tema keadilan sosial. Keenam, pendidikan multikultural adalah proses berkelanjutan, proses kompleks yang tidak pernah sepenuhnya lengkap. Akhirnya, pendidikan multikultural adalah pedagogi kritis, membangun pengalaman, pengetahuan, dan sudut pandang peserta didik dan guru ”.

Keempat, pendidikan multikultural idealnya menyentuh empat ranah atau kawasan dalam implementasinya, yakni kawasan kognitif (pengembangan pengetahuan), kawasan attitude (pengembangan sikap), kawasan psikomotorik (pengembangan praktik fisik) dan yang terakhir adalah kawasan life skill (pengembangan kecakapan hidup) sehingga pendidikan multikultural itu tidak hanya diimplementasikan di ruang kelas tetapi juga di ruang keluarga dan ruang kehidupan masyarakat dalam arti yang lebih luas.

Kelima, integrasi pendidikan multikultural. Azra (2002) mengaitkan peran penting Departemen Pendidikan Nasional RI dengan pelaksanaan pendidikan multikultural. Pelaksanaannya, demikian Azra, dapat dilakukan sebagai pelajaran ekstra-kurikuler atau menjadi bagian kurikulum sebagai mata pelajaran terpisah, berdiri sendiri (separated) atau sebaiknya terpadu atau terintegrasi (integrated). Terkait dengan pemikiran Azra itu, para pakar pemerhati pendidikan multikultural di Indonesia dalam berbagai karya tulis ilmiah, menyebutkan salah satu mata pelajaran yang relevan bagi pengimplementasian pendidikan multikultural adalah Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Sebagaimana dikatakan Choirul (2010), pelajaran pendidikan kewarganegaraan yang telah diajarkan di sekolah dasar hingga perguruan tinggi, sebaiknya disempurnakan dengan memasukkan pendidikan

multikultural, seperti budaya lokal antar daerah kedalamnya, agar generasi muda bangsa dapat berperan dengan baik sebagai pemersatu bangsa Indonesia. Lebih jauh Cuga (2012) mengatakan pendidikan kewarganegaraan sebagai wahana pendidikan multikultural harus mampu melakukan transformasi dalam berbagai hal, tidak dengan kondisi saat ini. Seharusnya yang menjadi landasan pengembangannya adalah budaya dan lingkungan peserta didik yang kemudian akan bermuara kepada nilai-nilai budaya nasional seperti yang dilaksanakan pada masa lalu dalam pendidikan kewarganegaraan. Dalam pendidikan demokrasi, tingkah laku seseorang yang sesuai dengan nilai-nilai demokrasi tidak akan datang dari atas tetapi harus tumbuh dari diri sendiri dan lingkungannya. Oleh karena itu, pendidikan multikultural pertama-tama dilahirkan di dalam apresiasi dan penghayatan terhadap hak dan kewajiban seseorang di dalam masyarakat lokalnya dengan nuansa budaya lokal yang harus dihormati dan dihargai. Dalam era globalisasi, pengenalan terhadap nilai-nilai moral dalam masyarakat sendiri merupakan pegangan untuk menghadapi dunia global yang memiliki nilai-nilai moral yang terbuka. Apabila peserta didik telah mempunyai modal pengenalan dan penghayatan terhadap nilai-nilai budaya sendiri maka hal ini merupakan “perisai” untuk memfilter nilai-nilai baru yang dilahirkan oleh globalisasi. Selanjutnya Cuga merekomendasikan pengembangan kurikulum yang menggunakan pendekatan pendidikan multikultural dengan berdasarkan pada prinsip: 1) keragaman budaya menjadidasar dalam menentukan filsafat, teori, model dan hubungan sekolah denganlingkungan sosial-budaya setempat; 2) keragaman budaya menjadi dasar dalammengembangkan berbagai komponen kurikulum seperti tujuan, konten, proses,dan evaluasi; 3) budaya di lingkungan unit pendidikan adalah sumber belajar danobjek studi yang harus dijadikan bagian dari kegiatan belajar anak didik; 4)kurikulum berperan sebagai media dalam mengembangkan kebudayaan daerahdan kebudayaan nasional.

BAB V

AGAMA DAN PENDIDIKAN MULTIKULTURALISME DI INDONESIA

A. Kerangka Teoretis

Menurut Liliweri (2005) multikulturalisme bertautan dengan doktrin atau “isme” tentang penyadaran individu atau kelompok atas keberagaman kebudayaan, yang pada gilirannya mempunyai kemampuan untuk mendorong lahirnya sikap toleransi, dialog, kerjasama diantara beragam etnis dan ras. Etnik adalah setiap kelompok sosial yang ditentukan oleh ras, adat istiadat, bahasa, nilai dan norma budaya dan lain-lain yang pada gilirannya mengindikasikan adanya kenyataan kelompok yang minoritas atau mayoritas dalam suatu masyarakat. Sedangkan klasifikasi ras meliputi tampilan fisik yang juga menjadi dasar untuk membedakan kelompok etnik itu. Dari paparan tersebut tercatat dua hal penting dari multikulturalisme yaitu (1) adanya proses penyadaran individu atau kelompok atas keberagaman kebudayaan; dengan tujuan (2) mendorong lahirnya sikap toleransi, dialog dan kerjasama diantara beragam etnis dan ras.

Hubungan dengan sesama harus dilihat sebagai interaksionisme yang memandang hubungan diri dengan “yang lain” secara dialektis. Pandangan ini menyangkal bahwa identitas tertentu sama artinya dengan sama sekali berbeda dari yang bukan penyandang identitas tersebut. Malahan pandangan ini menegaskan bahwa identitas diri sangat erat kaitannya dengan identitas “yang lain” (dan sebaliknya), bahwa diri maupun “yang lain” senantiasa berubah dan bahwa keduanya sama sekaligus berbeda. Interaksionisme meyakini bahwa pertukaran kultural maupun sosial tidak dan juga tidak harus menyebabkan penghapusan perbedaan atau pelestariannya, tetapi akan melakukan tantangan diri, pembelajaran dan pertumbuhan yang terus menerus (Fay,2002).

Salah satu bentuk atau proses penyadaran individu atau kelompok atas keberagaman kebudayaan itu adalah melalui pendidikan agama. Penanaman nilai-nilai kemanusiaan melalui pendidikan agama diharapkan mampu menghasilkan manusia-manusia yang memiliki sikap toleransi. Ketika terjadi berbagai kerusuhan dan tindak kekerasan yang bernuansa agama maka disinyalir bahwa pendidikan agama telah gagal membentuk manusia yang memiliki kesalehan dan kesantunan sosial.

B. Perubahan Paradigma Pendidikan Agama

Biku Parekh, proponent teori multikulturalisme sebagaimana dikutip Budiman (2005) merekomendasikan bahwa multikulturalisme bukan sebagai sebuah doktrin politik dengan muatan programatik, tidak pula sebagai sebuah aliran filsafat dengan teori yang khas tentang tempat manusia di dunia, melainkan lebih sebagai sebuah perspektif atau cara melihat kehidupan manusia. Ada tiga pandangan mendasar multikulturalisme yang menurut Parekh sering disalahpahami.

Pertama, manusia terikat secara kultural dalam arti bahwa mereka hidup dan tumbuh dalam sebuah dunia yang telah terstruktur secara kultural, dan bahwa mereka menjalankan kehidupan dan relasi-relasi sosialnya dalam kerangka sistem makna dan pemaknaan yang diturunkan secara kultural. Tapi bukan berarti bahwa manusia sepenuhnya dideterminasi oleh kebudayaannya dalam pengertian tidak bisa tumbuh di atas kategori-kategori pemikirannya yang secara kritis mengevaluasi nilai-nilai dan sistem maknanya, melainkan bahwa mereka secara mendalam dibentuk olehnya, bisa mengatasi sebagian tapi tidak seluruh pengaruhnya, dan dengan sendirinya memandang dunia dari dalam sebuah kebudayaan.

Kedua, budaya yang berbeda merepresentasikan sistem makna dan visi tentang kehidupan yang baik yang juga berlainan. Karena masing-masing telah menyadari keterbatasan kapasitas dan emosi, dan hanya mampu menangkap sebagian saja dari totalitas eksistensi manusia, maka ia membutuhkan

budaya-budaya lain dalam membantu memahami dirinya dengan lebih baik, menekan egosentrismenya, serta mencegah kekuatan egonya untuk mengabsolutkan diri.

Ketiga, setiap budaya secara internal bersifat plural, serta merefleksikan sebuah dialog diantara tradisi dan jalinan pemikiran yang berbeda. Ini tidak berarti tanpa identitas, tetapi identitas yang bersifat cair, plural dan terbuka. Artinya, budaya itu tumbuh dari berbagai interaksi baik yang dilakukan secara sadar maupun tidak dengan yang lain, mengidentifikasikan dirinya melalui yang lain. Oleh karena itu setiap budaya membawa unsur-unsur budaya lain dalam dirinya (Budiman,2005).

Berbeda dengan Parekh yang memandang multikulturalisme bukan sebagai doktrin politik, Liliweri berasumsi bahwa multikulturalisme sebagai seperangkat kebijakan pemerintah pusat yang dirancang sedemikian rupa agar seluruh masyarakat dapat memberikan perhatian kepada kebudayaan dari semua kelompok etnik atau suku bangsa. Dasar pertimbangannya bahwa bagaimanapun juga, semua kelompok etnik atau suku dan bangsa telah memberi kontribusi bagi pembentukan dan pembangunan suatu bangsa. Di samping itu di hampir sebagian besar negara, multikulturalisme merupakan konsep sosial yang diintroduksi ke dalam pemerintahan agar pemerintah dapat menjadikannya sebagai kebijakan pemerintah. Rasionalisasi masuknya multikulturalisme dalam perumusan kebijakan pemerintahan, karena hanya pemerintah yang dianggap sangat representatif ditempatkan di atas kepentingan maupun praktik budaya dari semua kelompok etnik dari suatu bangsa. Akibatnya adalah bahwa setiap kebijakan pemerintah diharapkan mampu mendorong lahirnya sikap apresiatif, toleransi, prinsip kesetaraan antara pelbagai kelompok etnik, termasuk kesetaraan bahasa, agama, maupun praktik budaya lainnya (Liliweri, 2005). Contohnya di Amerika Serikat, demi kepentingan politik, konsep multikulturalisme dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan universitas bagi mendidik

mahasiswa yang datang dari beragam latar belakang etnik dan bahkan ras di seluruh dunia.

Di Indonesia sendiri multikulturalisme masih sebatas wacana di kalangan elite dan akademisi, belum menjadi bentuk kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Ketidakjelasan tentang pendekatan dalam multikulturalisme di Indonesia apakah akan berangkat dari *ius solis*, *ius sanguinis* ataukah *melting* votakan lebih memperburuk kohesi sosial ke depan. Kondisi ini lebih memperburuk keadaan karena dengan sistem hukum yang tidak kondusif serta begitu kuatnya tekanan yang dialami kelompok minoritas, maka kekhawatiran akan terjadinya konflik yang berujung pada tindak kekerasan sangat beralasan.

Oleh karena itu pendidikan agama masih menjadi harapan meskipun mulai dipersoalkan banyak orang (Heelas,2003; Kimball,2003; Supono,2003). Ketidakberdayaan sistem pendidikan agama wajar dipertanyakan ketika pluralisme tidak dihargai banyak orang di Indonesia; ketika begitu banyak orang tega membunuh sesamanya hanya karena mereka menganut sistem keyakinan yang berbeda - untuk tidak menyebut berbeda agama- atau ketika orang dengan sangat mudah melakukan kekerasan hanya karena berbeda etnik dan sebagainya.

Beberapa hal yang dapat dicatat sebagai penyebab atau paling tidak memberikan kontribusi atas disfungsi pendidikan agama di Indonesia antara lain bahwa selama ini yang diberikan di sekolah-sekolah bukanlah pendidikan agama tetapi pelajaran agama. Pengajaran lebih pada proses *transfer* ilmu, sedangkan pendidikan lebih ditekankan kepada pembentukan kesedaran dan kepribadian anak didik di samping transfer ilmu dan keahlian. Pendidikan di Indonesia saat ini lebih ditekankan kepada upaya peningkatan kemampuan akal (kecerdasan intelektual) sehingga kurang memperhatikan kecerdasan-kecerdasan yang lain seperti kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual (Sukidi,2002). Kenyataan ini terlihat pada penghargaan yang berlebihan kepada ilmu-ilmu murni

yang bersifat positivis dari pada ilmu-ilmu humaniora. Ilmu-ilmu humaniora hanya dipandang sebagai pelengkap karena dipandang kurang menjamin masa depan anak didik (Noer,2005).

Pendidikan agama sebagai bagian penting dari pendidikan humaniora dipandang telah gagal karena hanya menstransfer pengetahuan agama kepada peserta didik namun kurang berhasil dalam menterjemahkan pengetahuan agama tersebut menjadi bekal untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan agama selama ini hanya sebatas mengajarkan ajaran agama secara skriptural (sesuai doktrin-doktrin dalam kitab sucinya) dan kurang kontekstual oleh karenanya kurang teraplikasikan dalam kehidupan nyata. Ajaran-ajaran agama yang termuat dalam kitab suci semestinya menjadi agama sosial yaitu internalisasi ajaran agama yang selanjutnya dipraktekkan dalam kehidupan nyata sebagai pedoman perilaku (O'Dea;1985; Nottingham,1985; Scharf,1995).

Kuatnya pengaruh kapitalisme juga dipandang sebagai penyebab kurang berhasilnya pendidikan agama di Indonesia. Sebagai fakta sejarah kapitalisme tidak mungkin dilepaskan dari kehidupan masyarakat termasuk dalam bidang agama. Kapitalisme tak mungkin dihindari namun harus digiring menuju keseimbangan dan harmoni dengan alam melalui teologi kontekstual. Teologi merupakan hasil dari penerapan penalaran terhadap wahyu sebagai upaya untuk memperluas pemahaman tentang petunjuk-petunjuk dan kehendak-kehendak Tuhan, dan untuk menambah wilayah aplikasi pemahaman yang diterapkan. Artinya pendidikan agama harus berusaha agar agama dapat tampil dalam performa yang menawan, yang secara fleksibel dapat menyediakan nilai-nilai yang berlaku dalam berbagai diferensiasi sosial. Agama tidak harus menjadi ideologi baru sebagai sesuatu yang kuat, sakral, atau sesuatu yang baku yang turun dari langit. Munculnya berbagai bentuk anarkhis belakangan ini disebabkan adanya kesalahan dalam menterjemahkan ajaran-ajaran agama sehingga memandang bahwa ajaran agamanyalah yang paling

benar sementara agama orang lain kurang lengkap dan bahkan keliru (Hendropuspito,1986:152). Agama telah menjadi teodisi sehingga menutup kemungkinan terjadinya proses dialogis, padahal agama dalam situasi ini haruslah menjamin partisipasi individu, membebaskan, dan dapat menjamin multikulturalisme (Halim, 2002). Teodisi berarti mempertahankan kebaikan dan keadilan Tuhan dalam menakdirkan atau membiarkan kejahatan moral dan alamiah maupun penderitaan manusia.

Di sisi lain masyarakat saat ini, sebagaimana diungkapkan oleh Berger, sedang mengalami *anomie* (Nashir,1999; Triguna; 2005), yaitu suatu keadaan di mana setiap individu manusia kehilangan ikatan yang memberikan perasaan aman dan kemantapan dengan sesama manusia lainnya, sehingga menyebabkan kehilangan pengertian yang memberikan petunjuk tentang tujuan dan arti kehidupan ini. Beragamnya konsepsi tentang hakikat manusia membawa pandangan yang berbeda-beda tentang apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya, masuk dalam wilayah domestik lewat kecanggihan teknologi informasi di jaman global.

Globalisasi telah menimbulkan semakin tingginya intensitas pergulatan antara nilai-nilai budaya lokal dan global. Sistem nilai lokal yang selama ini digunakan sebagai acuan pola laku tidak jarang mengalami transformasi. Proses globalisasi juga telah merambah wilayah kehidupan agama yang serba sakral menjadi sekuler, dapat menimbulkan ketegangan bagi umat beragama (Ardika,2005). Modernisasi pada level tertentu sesungguhnya menyebabkan merosotnya agama, baik dalam ranah masyarakat maupun ranah individu. Beberapa institusi keagamaan telah kehilangan kekuatan dan pengaruhnya dalam berbagai masyarakat, namun demikian baik keyakinan dan praktek-praktek keagamaan lama maupun baru terus berkembang dalam kehidupan individu, kadang membentuk suatu institusi baru serta mendorong begitu semaraknya semangat keagamaan. Dengan demikian

modernisasi yang melahirkan masyarakat yang sangat beragama dan lonjakan quantum dalam komunikasi interkultural, dua faktor yang mendorong munculnya pluralisme dan bukan tegaknya (atau penegakan kembali) monopoli agama (Berger, 2003).

Dengan kata lain bahwa saat ini sudah bukan jamannya lagi bagi adanya pengakuan kebenaran mutlak oleh satu agama tertentu sehingga menisbikan kebenaran-kebenaran lainnya. Oleh karena itu pendidikan perbandingan agama menjadi sangat penting untuk diberikan kepada anak didik sehingga mereka menjadi terbiasa bergaul dalam masyarakat dengan sistem keyakinan yang berbeda. Pendidikan perbandingan agama tidak dimaksudkan untuk membanding-bandingkan agama yang ada kemudian menetapkan suatu agama sebagai satu kebenaran mutlak namun pendidikan perbandingan agama yang bersifat dialogis (Khan, 2003).

Menyoal pendidikan agama dalam masyarakat multikultur ada baiknya mencermati apa yang disampaikan oleh Durkheim bahwa agama hanya bisa dipahami dengan melihat peran sosial yang dimainkannya dalam menyatukan komunitas masyarakat (Turner, 2003). Dengan kata lain bahwa pendidikan agama secara fungsional harus bisa mempersatukan masyarakat. Hal ini akan tercapai bila tumbuh kesadaran bahwa agama merupakan fenomena budaya yang otonom yang tidak bisa direduksi menjadi hanya sebatas kepentingan ekonomi dan tuntutan politis dalam masyarakat multikultur.

C. Payung Hukum

Triguna (2004) mengatakan bahwa salah satu ciri dinamika kebudayaan adalah integrasi dan disintegrasi. Integrasi digambarkan sebagai harmoni maksimal pada masing-masing unsur budaya. Sedangkan disintegrasi mengandung pengertian sebaliknya. Dalam kerangka ini dinamika kebudayaan bukan saja linier melainkan memiliki ritme. Pertama-tama berupa integrasi atau strukturasi,

kemudian terjadi proses destrukturisasi akibat ketidakmampuan kebudayaan menampung berbagai kebutuhan baru. Destrukturisasi atau disintegrasi itu sendiri sekaligus dijadikan momentum untuk menghasilkan integrasi baru atau restrukturisasi yang lebih luas. Disintegrasi itu sendiri merupakan keadaan *krisis*, namun dianggap sebagai suatu hal yang normal, karena dalam strategi kebudayaan itu sendiri diperlukan adanya ketahanan.

Untuk mencapai ketahanan sosial budaya Indonesia, pertama-tama perlu dibuat 'peta' tentang konteks budaya kekinian yang dikepung oleh arus globalisasi. Thomas Friedman dalam bukunya *The Lexus and the Olive Tree* (2000) menyatakan bahwa 'ancaman globalisasi saat ini adalah globalisasi'. Artinya, sistem di dalam globalisasi itu sendiri menyimpan potensi penghancuran. Globalisasi bagi Friedman telah menyebabkan pemberdayaan individu secara luar biasa, yang kemudian juga melahirkan *Super-Empowered Angry Man* di akhir abad 20. Pemikiran Friedman ini seolah-olah membenarkan pemikiran periode kelima Marx yang berbicara bahwa dalam kapitalisme terdapat benih-benih penghancuran dalam dirinya sendiri.

Ritme cepat globalisasi yang ditentukan oleh negara-negara adidaya pada gilirannya telah menimbulkan dikotomi baru dalam hubungan multilateral, yaitu negara *centrum* dan *periferi*. Negara-negara yang tidak mengikuti irama globalisasi secara 'global' dimasukkan ke dalam katagori negara 'primitif' dan ini merupakan lahan subur bagi sikap ketidakberumahan. Ujung dari rasa ketidakberumahan ini adalah pemutarbalikan nilai-nilai yang selama ini diintroduksi melalui jaringan teknologi informasi oleh negara-negara centerum. Kegiatan pembalikan nilai-nilai oleh negara periferi diteranltrasikan oleh politikus menjadi kata teroris.

Akar dari paradoks globalisasi itu bertalian dengan pandangan tentang ilmu pengetahuan dan teknologi yang berasal dari paradigma kebudayaan Barat. Revolusi dalam ilmu pengetahuan telah merintis jalan bagi suatu revolusi lainnya.

Revolusi ilmu pengetahuan menjadi nyata ketika dinyatakan dalam aparatus teknologi produksi. Oleh karena itu, peranan ilmu dalam produksi semakin besar. Jarak antara penemuan dengan menerapkan praktis, yaitu penggunaannya dalam industri semakin kurang.

Meskipun pertengahan abad ke-20 permintaan teknologi dan produksi merupakan faktor pendorong kemajuan ilmu, namun belakangan ini terjadi perubahan penekanan, yakni ilmu merupakan pendorong perkembangan produksi. Semakin maju suatu negara, baik dalam bidang ekonomis maupun teknologisnya, perkembangan ekonomi dan sosialnya semakin tergantung pada ilmu. Pengertian mengenai teknologipun berubah.

Salah satu keberhasilan penyebaran kebudayaan Barat ialah meluasnya anggapan bahwa ilmu dan teknologi yang berkembang di Barat merupakan suatu yang universal. Hal ini terlihat dalam beberapa gejala. Pada satu pihak, timbul skeptisisme terhadap masyarakat, sementara di pihak lain timbul antusiasme terhadap ilmu dan teknologi Barat secara signifikan. Fenomena ini telah membawa implikasi bahwa ilmu dan teknologi [yang dihasilkan dunia Barat] bersifat universal. Celakanya, hal ini merupakan bentuk internalisasi masyarakat Timur dan Indonesia untuk menerima cara produksi dominan. Pada sisi inilah globalisasi telah merasuki berbagai sistem nilai sosial dan budaya Timur [termasuk Indonesia] sehingga terbuka pula konflik nilai antara teknologi dan nilai-nilai ketimuran.

Gencarnya serbuan teknologi disertai nilai-nilai intrinsik yang diberlakukan di dalamnya, telah menimbulkan isu mengenai globalisasi dan pada akhirnya menimbulkan nilai baru tentang kesatuan dunia. Radhakrishnan dalam bukunya *Eastern Religion and Western Thought* (1924) menyatakan “untuk pertama kalinya dalam sejarah umat manusia, kesadaran akan kesatuan dunia telah menghentak kita, entah suka atau tidak, Timur dan Barat telah menyatu dan tidak pernah lagi terpisah. Kedekatan spasial telah membuka jalan bagi

terjalinnnya suatu kedekatan spiritual dan saling menukar warisan pemikiran dan emajinasi. Jika terlalu terpaku pada sejarah masa lampau Eropa atau Asia saja, manusia tidak akan memperoleh pencerahan. Pemikiran dan pengalaman sebagian besar manusia tidak bisa diabaikan tanpa resiko tertentu. Jika hendak memperbaiki kedangkalan yang timbul akibat keasyikan sepihak dan eksklusif, entah itu dengan pemikiran Timur atau pemikiran Barat, jika memperkuat kehidupan batin dengan martabat dari suatu pengalaman yang lebih sempurna dan universal, maka perlu ada kesadaran untuk memahami budaya-budaya satu sama lain, dengan tidak harus mendominasi di antara yang lainnya.

Pandangan Radhakrishnan itu sesungguhnya mengandung kritik internal bagi pemikir agama 'tradisionalis'. "Kita seringkali berbangga bila berhasil menghilangkan sama sekali pengaruh luar, karena sesungguhnya kemajuan spiritual atau ilmiah yang dicapai setiap kelompok keluarga manusia bukan digunakan untuk dirinya semata, tetapi untuk semua umat manusia. Di samping itu tidak ada kekuasaan yang dimiliki oleh suatu ras manusia atas ras lainnya. Yang membedakan di antara keduanya adalah masalah kadar. Sebut saja, mitisisme India kuno atau rasionalisme Eropa modern hanyalah suatu perkembangan yang memiliki ritmenya sendiri. Artinya, isu mengenai penyatuan budaya adalah suatu keniscayaan dan keinginan suatu negara mendominasi, apalagi menjajah juga suatu keniscayaan. Jika demikian, bagaimana suatu bangsa menyusun strategi kebudayaan agar ketahanan budaya tidak mengalami disharmoni dan disorientasi ?

Untuk memasuki inti suatu peradaban, diperlukan usaha yang sistematis dan terencana, terutama dalam mempelajari ide-ide tersembunyi dari gagasan-gagasan religiusnya. Sejak awal agama telah menjadi penopang budaya manusia. Agama adalah pencapaian agung dari pengalaman menakjubkan umat manusia. Ia adalah bentuk kehidupan terdalam yang merefleksikan tahap-tahap berbeda, kompleks dan saling bertentangan dari kehidupan manusia. Oleh karena itu,

“tatanan dunia baru harus memiliki dorongan spiritual untuk memberikan kesantunan dan landasan rasional bagi program sosial”. Munculnya berbagai problem sosial, kekerasan, dan lahirnya berbagai sekte spiritual di tengah-tengah produk modernitas menunjukkan adanya kebutuhan spiritual dalam diri manusia yang belum terpenuhi. Spiritualitas tidak hanya dapat dipenuhi dengan keberhasilan duniawi dan atau pencapaian ilmu pengetahuan materialis. Dalam memenuhi spiritualitas, manusia menciptakan ideal-ideal dan untuk itu ia bersedia berjuang dan berkorban melalui doa dan pemujaan.

Doa dan pemujaan dalam bentuk ritual merupakan usaha manusia terbesar untuk mencapai sifat kedewataan. Agama adalah disiplin yang menyentuh suara hati dan membantu berjuang untuk melawan kekuatan gelap (*butha*), kenistaan (*nista*), menyelamatkan manusia dari ketamakan (*tamas*), nafsu (*kama*) dan kebencian (*dvesa*) serta memberikan kekuatan moral (*susila*) dan keberanian dalam usaha menyelamatkan dunia (*dira purusa*). Sebagai disiplin pikiran, agama memiliki alat-alat penting dan utama untuk mengatasi kejahatan yang mengancam eksistensi dunia yang beradab. Ia mengimplikasikan penyerahan pikiran dan tindakan kepada kebenaran-kebenaran *Pararatman*.

Dalam kenyataannya selama ini agama yang diharapkan memberikan solusi, ternyata telah mengalami reduksi fatal. Dogma yang dahulu merupakan jalan menuju kedewataan, sekarang justru menjadi penghambat, malahan agama dimaknai sebagai penghalang antara manusia dengan Tuhan dan telah merusak simplisitas pokok kehidupan spiritual. Agama harus dimaknai sebagai kekuatan penyatu yang memperkuat solidaritas masyarakat Indonesia, meskipun terdapat kelemahan-kelemahan pada historisnya. Agama merupakan panggilan menuju petualangan spiritual. Ia bukan teologi, tetapi praktek disiplin. Hakikat agama bukan hanya berhenti pada dogma dan credo dalam ritus dan upacara, tetapi berupa kebijaksanaan paling dalam dari segala jaman, *sanatana dharma*.

Ketidakhadiran spirit spiritualitas dalam kehidupan sosial politik telah menghasilkan sikap tirani pemegang kekuasaan serta tersudutnya kelompok minoritas sehingga dinamika kebudayaan yang lahir dari sistem politik demokratis menjadi mandeg. Padahal tujuan demokrasi adalah kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Artinya, semua individu apapun ras dan agamanya harus diterima ke dalam masyarakat politik semata-mata berdasarkan ke-manusia-an mereka. Setiap anggota individu dewasa memiliki hak atas suatu pangsa yang setara. Ketika menyatakan 'semua manusia setara atau semua negara setara' yang dimaksud adalah semua manusia atau negara adalah pusat dari nilai absolut. Tindakan yang lahir dari sikap bahwa manusia atau negara tertentu saja memiliki nilai absolut sementara manusia atau negara lain hanya memiliki nilai instrumental, sebagai alat untuk memenuhi tujuan kita, seharusnya tidak perlu terjadi lagi. Sebuah negara demokrasi akan menjadi sebuah negara ademokratis jika tetap melakukan penindasan terhadap minoritas dan opini minoritas. Jika suatu minoritas ditindas atau dibungkam, maka demokrasi menjadi sebuah tirani.

Spiritualitas merupakan etos bagi kehidupan sosial budaya Indonesia. Spiritualitas ini merupakan ketahanan utama dalam menyongsong era globalisasi. Dalam semangat spiritualitas, tidak ada ruang sedikitpun bagi manusia untuk menjadi Tuhan [*playing God*], menentukan dan mempermainkan jiwa manusia lain. Tugas manusia yang beragama adalah melaksanakan *yadnya* dan menciptakan visi kesejahteraan bersama dalam terminologi *brotherhood* bukan *kinship*. Oleh karena visi tentang kesejahteraan umat manusia adalah satu visi yang muncul secara alami, maka tidak ada kewajiban bagi manusia untuk menyebarkannya dengan cara paksa apalagi dengan cara menjajah dalam bentuk baru.

Menurut Hartono mantan Ketua Badan Pembinaan Hukum Nasional, pascareformasi ada kecenderungan yang semakin menguat meninggalkan UUD 1945 dan Pancasila sebagai asas yang menjwai sistem hukum nasional Indonesia.

Berkenaan dengan hal itu ia melihat perlunya asas hukum yang menyatukan semua perbedaan, sesuai motto bhineka tunggal ika. Hartono mengatakan bahwa pada masa Orde Baru, yang dianut adalah sistem unifikasi hukum yang menekankan kesatuan dan persamaan. Setelah reformasi, yang mencuat adalah pluralisme. Misalnya, masyarakat agama ingin agar hukum agamanya dipakai, sementara masyarakat adat ingin hukum adat diterapkan. "Pluralisme di era reformasi bahkan melebihi zaman kolonial. Semua ingin fahamnya diterapkan" tandas Hartono. Oleh karena itu ia mengharapkan agar asas hukum dikembalikan ke UUD 1945 dan Pancasila. Perbedaan harus berlandaskan kesatuan asas hukum (Hartono, dalam Kompas 30 Mei 2006).

Sinergi antara tiga pilar hukum yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif sebagaimana diajarkan oleh Montesquieu (Carrithers, 1977, 2002) harus menciptakan payung hukum yang kuat bagi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Secara fisik ketiganya memang telah berdiri sendiri secara independen di Indonesia, namun masih tampak bahwa visi masing-masing sangat kurang jelas dalam upaya pembangunan dan penegakkan hukum. Ada yang sangat berambisi merevisi UUD 1945; sementara di sisi lain ada yang mangkir dari kewajibannya memenuhi panggilan pengadilan dengan alasan yang tidak jelas, jual beli sidang dan mafia peradilan; serta beberapa kasus lainnya yang menundukkan bahwa pembangunan hukum di Indonesia masih sangat membutuhkan perhatian serius. Pembangunan hukum dalam rangka memberikan payung hukum yang kuat bagi masyarakat plural seperti Indonesia menjadi sesuatu yang mutlak guna mencegah terjadinya disintegrasi bangsa.

Harus dicegah bahwa dalam masyarakat Indonesia yang sangat plural dalam sistem keagamaan, akhirnya sampai pada ungkapan yang disampaikan oleh Warburton sebagaimana dikutip Rousseau dalam bukunya *The Social Contract Discourses* bahwa politik dan agama hanya digunakan sebagai instrumen dari kelompok tertentu untuk menekan yang lainnya (Rousseau, 35)

BAB VI

NILAI-NILAI PENDIDIKAN ISLAM BERBASIS MULTIKULTURAL

A. Pluralisme dan Multikulturalisme dalam Perspektif Agama Islam

Pendidikan multikultural didefinisikan sebagai sebuah kebijakan sosial yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemeliharaan budaya dan saling memiliki rasa hormat antara seluruh kelompok budaya di dalam masyarakat. Pembelajaran multikultural pada dasarnya merupakan program pendidikan bangsa agar komunitas multikultural dapat berpartisipasi dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang ideal bagi bangsanya. Dalam konteks yang luas, pendidikan multikultural mencoba membantu menyatukan bangsa secara demokratis, dengan menekankan pada perspektif pluralitas masyarakat di berbagai bangsa, etnik, kelompok budaya yang berbeda.

Pendidikan multikultural masih diartikan sangat ragam, dan belum ada kesepakatan, apakah pendidikan multikultural tersebut berkonotasi pendidikan tentang keragaman budaya, atau pendidikan untuk membentuk sikap agar menghargai keragaman budaya. Kamanto Sunarto menjelaskan bahwa pendidikan multikultural biasa diartikan sebagai pendidikan keragaman budaya dalam masyarakat, dan terkadang juga diartikan sebagai pendidikan yang menawarkan ragam model untuk keragaman budaya dalam masyarakat, dan terkadang juga diartikan sebagai pendidikan untuk membina sikap siswa agar menghargai keragaman budaya masyarakat.⁶⁶

Sementara itu, Calarry Sada dengan mengutip tulisan Sleeter dan Grant menjelaskan bahwa pendidikan multikultural memiliki empat makna (model), yakni: (1) pengajaran tentang keragaman budaya sebuah pendekatan asimilasi kultural, (2)

⁶⁶ Kamanto Sunarto, *Multicultural Education in Schools, Challenges in its Implementation*, dalam *Jurnal Multicultural Education in Indonesia and South East Asia*, Edisi I, 2004, h 47.

pengajaran tentang berbagai pendekatan dalam tata hubungan sosial, (3) pengajaran untuk memajukan pluralisme tanpa membedakan strata sosial dalam masyarakat, dan (4) pengajaran tentang refleksi keragaman untuk meningkatkan pluralisme dan kesamaan.⁶⁷ Gagasan pendidikan multikultural di Indonesia sendiri, sebagaimana dijelaskan oleh H.A.R Tilaar adalah pendidikan untuk meningkatkan penghargaan terhadap keragaman etnik dan budaya masyarakat.⁶⁸ Sementara Conny R. Semiawan memiliki perspektif tersendiri tentang pendidikan multikultural, bahwa seluruh kelompok etnik dan budaya masyarakat Indonesia memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas, dan mereka memiliki hak yang sama untuk mencapai prestasi terbaik di bangsa ini.⁶⁹

Pluralitas dan multikulturalitas adalah keniscayaan yang tidak dapat kita tolak. Berjalan sesuai dengan sunnatullah dengan banyak bukti Allah swt telah menciptakan dunia ini dengan beraneka ragam suku bahasa bangsa dan agama. Didalam kerangka pluralitas ada kerangka kesatuan. Dan Islam sebagai agama yang rahmatan lil'alamini hadir dengan menawarkan konsepsi Islamnya adalah untuk menjadi tawashut (penengah) di antara dua kutub ekstrem pandangan manusia terhadap pluralitas. Dengan berbagai teori yang di munculkan oleh para ahli diyakinkan dengan al-Qur'an maka, pluralitas mengandung banyak hikmah yang utama bagi manusia. Dibalik keragaman ada potensi kerukunan yang didasari atas persamaan dan kebersamaan.⁷⁰ Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 148 yang berbunyi:

⁶⁷ Clarry Sada, Multicultural Education in Kalimantan Barat; an Overview, dalam Jurnal Multicultural Education in Indonesia and South East Asia, Edisi I, 2004, h. 85.

⁶⁸ H.A.R. Tilaar, Multikulturalisme, Tantangan-Tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional, Grasindo, Jakarta, 2004, hal. 137-138.

⁶⁹ Conny R. Semiawan, The Challenge of a Multicultural Education in a Pluralistic Society; the Indonesian Case, dalam Jurnal Multicultural Education in Indonesia and South East Asia, Edisi I, 2004, h. 40.

⁷⁰ <https://kostafi06.blogspot.com/2016/12/pluralisme-dan-multikulturalisme.html>

Artinya; "Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadapi kepadanya maka berlomba-lombalah kamu (dalam berbuat) kebaikan, dimana saja kamu berada. Allah pasti akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari kiamat) sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu" (Q.S. Al-Baqarah: 148).

Ayat diatas menjelaskan tentang pluralisme menurut pemahaman islam ayat itu dimulai dengan pernyataan tentang fakta bahwa masyarakat dalam dirinya sendiri terbagi ke dalam berbagai macam kelompok dan komunitas masing-masing mempunyai orientasi kehidupannya sendiri, dan memberikan arah petunjuk. Komunitas-komunitas tersebut diharapkan dapat menerima kenyataan tentang adanya keragaman sosial-kultural dan saling toleran dalam memberikan kebebasan dan kesempatan kepada setiap orang untuk menjalani kehidupannya sesuai dengan sistem kepercayaan mereka masing-masing. Dan yang diharapkan adalah komunitas yang berbeda tetapi tetap saling berlomba-lomba dengan cara yang dapat dibenarkan dan sehat guna meraih sesuatu yang terbaik bagi semua.

Sedangkan multikulturalisme menurut Islam: Dulu manusia adalah umat yang satu, setelah timbul perselisihan maka Allah mengutus rasul sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan,

Artinya; "Tidak berselisih tentang kitab itu melainkan orang yang telah datangkan kepada mereka kita, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, karena dengki antara mereka sendiri, maka Allah memberikan petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendak-Nya. Dan Allah selalu memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki kepada jalan yang lurus". (Q.S. Al-Baqarah : 213).

Di dalam ayat ini menjelaskan bahwa konsep kemanusiaan universal Islam yang mengajarkan bahwa umat manusia pada mulanya adalah satu, perselisihan terjadi disebabkan oleh timbulnya berbagai *vested interest* masing-masing kelompok manusia, yang masing-masing mereka mengadakan penafsiran yang berbeda tentang suatu hakikat kebenaran menurut *vested interest*nya.

Meskipun asal mereka adalah satu, pola hidupnya menganut hukum tentang kemajemukan, antara lain karena Allah menetapkan jalan dan pedoman hidup yang berbeda-beda untuk berbagai golongan umat manusia.

Artinya; "Untuk tiap-tiap manusia diantara kamu, kami berikan jalan dan pedoman hidup sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan satu umat saja, tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebaikan. Hanya kepada Allahlah kembali kamu semua lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu". (QS. Al-Maa'idah :48)

Dari dua ayat Al-Qur'an di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa betapapun perbuatan yang terjadi pada manusia di bumi ini, namun hakekat kemanusiaan akan tetap dan tidak akan berubah yaitu fitrahnya yang hanif, sebagai wujud primordial (*azali*) antara Tuhan dan manusia sendiri.

Dalam konteks pemahaman Islam, keberagaman juga terjadi. Keberagaman tersebut pada gilirannya memunculkan pola-pola artikulasi keberagaman, yang menurut Azra, sebagaimana dikutip Muhaimin, dikelompokkan dalam 3 tipologi, yaitu (1) Substansialisme yang lebih mementingkan substansi atau isi daripada label atau symbol-simbol eksplisit; (2) formalisme/legalisme yang cenderung sangat literal atau ketaatan formal dan hokum agama, diekspresikan dalam bentuk sangat lahiriyah semacam symbol keagamaan; (3) Spiritualisme yang lebih menekankan kepada pengembangan sikap batiniah, melalui keikutsertaan dalam kelompok spiritual

mistik, tasawuf, tarekat bahkan kelompok kultus. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa pemikiran dalam suatu agama saja dapat beragam apalagi berbagai macam agama dan berbagai suku yang berbeda-beda. Namun ketiga kategorisasi tadi dapat digunakan sebagai dasar pengembangan pendidikan Islam yang berbasisi multicultural.

Dalam ajaran Islam, manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang paling sempurna. Makhluk lain tidak ada yang memiliki kesempurnaan, baik ditinjau dari aspek fisik maupun aspek psikisnya, sebagaimana kesempurnaan yang dimiliki oleh manusia. Anugerah paling agung yang diterima manusia, dan anugerah ini tidak diterima oleh makhluk lainnya, adalah intelektualitas. Dengan anugerah intelektualitas, manusia mampu menghasilkan cipta, karya dan karsa yang beranekaragam. Berbagai bentuk karya telah dihasilkan manusia; baik bahasa, budaya, etnisitas bahkan dalam hal memilih keyakinan.

Dalam ajaran Islam yang membahas tentang awal kejadian manusia dinyatakan bahwa manusia dimulai dari sosok Nabi Adam a.s. yang diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang sebaik-baiknya dan di dalamnya ditiupkan ruh-Nya, sebagaimana termaktub dalam QS al-Hijr: 28-29,

Artinya; “Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya Aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering (yang berasal) dari lumpur yang hitam yang diberi bentuk. Maka apabila Aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan Aku telah meniupkan ke dalamnya ruh (ciptaan)-Ku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud”.

Manusia kemudian berkembang biak dari asal Adam a.s. dan istrinya, Hawa. Perkembangbiakan dan penyebarluasan manusia sesungguhnya datang dari sosok yang sebenarnya satu.

Artinya; *“Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu, dan darinya Allah menciptakan istrinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturrahi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”* (QS. al-Nisâ’: 1).

Menurut ajaran Islam, pluralitas dan multikulturalitas merupakan *sunnatullah* yang tidak bisa diingkari. Justru dalam pluralitas dan multikulturalitas terkandung nilai-nilai penting bagi pembangunan keimanan.

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-anda bagi orang yang mengetahui”. (QS. al-Rûm; 22).

Sejak masa awal perkembangannya, Islam telah menjadi agama dan peradaban yang senantiasa bersentuhan dengan agama dan peradaban lain. Di awal pertumbuhan dan perkembangannya, Islam berhadapan dengan budaya dan peradaban masyarakat Arab jahiliah yang menganut kepercayaan paganisme. Nabi Muhammad sebagai pembawa pesan (*risalah*) dan ajaran Allah berusaha meluruskan dan membenahi akidah masyarakat Arab pada waktu itu dengan tetap menjalin hubungan baik dengan mereka. Walaupun dalam perjalanan menyampaikannya sering terjadi perbenturan dengan masyarakat jahiliah, namun sebenarnya benturan dan perang itu hanya ditempuh sebagai alternatif terakhir setelah segala jalan damai yang ditempuh gagal. Dengan demikian, sebenarnya Islam tidak pernah mengajarkan umatnya untuk memusuhi agama lain. Sebaliknya, Islam menyuruh manusia untuk menjalin kerjasama dan hubungan

yang baik dengan siapapun untuk membangun peradaban manusia yang lebih baik.

Islam pada esensinya memandang manusia dan kemanusiaan secara sangat positif dan optimistik. Menurut Islam, seluruh manusia berasal dari satu asal yang sama; Nabi Adam dan Hawa. Meskipun nenek moyangnya sama, namun dalam perkembangannya kemudian terpecah menjadi bersuku-suku, berkaum-kaum, atau berbangsa-bangsa, lengkap dengan segala kebudayaan dan peradaban khas masing-masing. Semua perbedaan yang ada selanjutnya mendorong mereka untuk saling mengenal dan menumbuhkan apresiasi satu sama lain. Inilah yang kemudian oleh Islam dijadikan dasar perspektif “kesatuan umat manusia” (*universal humanity*), yang pada gilirannya akan mendorong solidaritas antar manusia.

B. Nilai-Nilai Pendidikan Islam Perspektif Multikultural

Menurut Islam, manusia dilahirkan dalam keadaan suci (*fitrah*). Dengan fitrahnya, setiap manusia dianugerahi kemampuan dan kecenderungan bawaan untuk mencari, mempertimbangkan dan memahami kebenaran, yang pada gilirannya akan mampu mengakui Tuhan sebagai sumber kebenaran. Kemampuan dan kecenderungan inilah yang disebut sebagai sikap *hanif*. Atas dasar prinsip ini, Islam menegaskan prinsipnya bahwa setiap manusia adalah *homo religious*.

Al-Qur'an sebagai representasi pesan-pesan Allah untuk menjadi panduan umat manusia, sesungguhnya telah memberikan beberapa isyarat penting, baik secara eksplisit maupun implisit tentang eksistensi keragaman dan perbedaan tersebut. Di antaranya dapat dilihat dalam QS. al-Hujurat [49]: 13: Artinya:

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa di

antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal."

Melalui ayat ini Allah swt menyatakan bahwa manusia diciptakan terdiri atas jenis laki-laki dan perempuan, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar mereka dapat saling kenal dan mengenal atau saling *taffahum, ta'awun*, dan *tabayyun* sesama mereka. Manusia yang secara fitrah adalah makhluk sosial, maka hidup bermasyarakat merupakan suatu keniscayaan adanya. Melalui kehidupan yang bersifat kolektif sebagai sebuah masyarakat, tentu di dalamnya terdapat banyak keragaman atau perbedaan dalam berbagai hal. Kata *Syu'ub* yang teradapat dalam ayat ini merupakan bentuk plural dari kata *sy'aba* yang berarti golongan atau cabang, sedangkan kata *qaba'il* merupakan bentuk jamak dari kata *qabilah* yang berarti sekumpulan orang yang bertemu yang satu sama lainnya bisa saling menerima. Kata *qaba'il* selalu menunjuk pada dua pihak atau lebih yang saling berpasangan atau berhadap-hadapan. Oleh karena itu, manusia sejak diciptakan walaupun dari rahim yang berbeda-beda tetapi hakikatnya ia adalah makhluk interdependensi (sosial) yang saling bergantung satu sama lainnya.

QS. Al-Hujurat [49]: 13 yang secara konteks turun sebagai respons atas pemikiran sempit sebagian sahabat terhadap fenomena perbedaan kulit serta kedudukan, dan menyebabkan mereka memiliki pandangan yang diskriminatif terhadap orang lain, merupakan salah satu persoalan yang masih terus terjadi hingga saat ini. Sikap memandang rendah orang lain, primordialisme (*ashabiyah*), tidak siap berbeda dan memperlakukan orang lain dengan tidak adil, adalah di antara sikap-sikap yang mengindikasikan masih lemahnya semangat multikulturalisme dalam kehidupan masyarakat saat ini, baik secara konsep maupun praktek.

Ajaran-ajaran al-Qur'an jika dilaksanakan dengan maksimal dan istiqamah dalam kehidupan sehari-hari, akan memberikan dampak positif yaitu rahmat, kasih sayang, dan kenyamanan. Bukan saja pada umat manusia tanpa membedakan

agama, suku dan ras, melainkan juga bagi seluruh alam semesta (QS. Al-Anbiya': 107.).⁷¹ Betapa tidak, orang yang merusak tanaman dan hewan tanpa alasan yang bisa dipertanggungjawabkan, dianggap sebagai orang yang berbuat fasik dan berbuat jahat yang sangat dimurkai Allah swt.(QS. Al-Baqarah: 205).⁷² Apalagi terhadap manusia sebagai makhluk paling mulia, yang diberikan akal untuk berpikir, hati untuk merasa, telinga untuk mendengar, mulut untuk berbicara, dan mata untuk melihat. Jadi, terhadap sesama manusia pun umat Islam harus bersikap toleran. Hal ini ditegaskan dalam Hadis yang diriwayatkan Anas ra, bahwa Nabi Muhammad saw bersabda, *"Demi dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, tidak beriman seorang hamba sehingga ia mencintai tetangganya seperti ia mencintai dirinya sendiri"* (Bukhori Muslim).

Dalam Islam tidak ada paksaan dalam agama. Karena pada dasarnya, manusia diberikan kebebasan untuk memeluk sesuatu agama sesuai dengan keyakinannya tanpa ada paksaan sedikitpun. Sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah 256 bahwa:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ
 اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*Terjemahnya: Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*⁷³

⁷¹ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), h. 592.

⁷² Ibnu Hajar al-Atsqolani al-Hadidh, *Dar al-Kutub al-Islamiyah, Kitab al-Jami' Bab al-Adab* (Jakarta: Printers, Publisher & Distributor, t.th.), h. 341.

⁷³ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 34.

Sekalipun tidak ada paksaan dalam agama, sikap toleransi umat Islam terhadap pemeluk agama lain, hanya terbatas pada urusan yang bersifat duniawi, tidak menyangkut tataran aqidah, syari'ah, dan ubudiyah. Karena toleransi beragama menurut Islam bukanlah untuk saling melebur dalam keyakinan. Bukan pula untuk saling bertukar keyakinan di antara kelompok-kelompok agama yang berbeda tersebut. Toleransi di sini adalah dalam pengertian *mu'amalah* (interaksi sosial). Jadi, ada batas-batas bersama yang boleh dan tak boleh dilanggar. Inilah esensi toleransi di mana masing-masing pihak untuk mengendalikan diri dan menyediakan ruang untuk saling menghormati keunikannya masing-masing tanpa merasa terancam keyakinan maupun hak-haknya. Dari keterangan al-Qur'an dan Hadis tersebut, terlihat bahwa Islam telah mengajarkan nilai-nilai kesetaraan, kemanusiaan, kasih sayang dan kedamaian.

Berdasarkan kenyataan tersebut, maka keberadaan pendidikan multikultural sebagai strategi pendidikan yang diaplikasikan pada semua jenis mata pelajaran, dengan cara menggunakan perbedaan-perbedaan kultural yang ada pada peserta didik sangat diperlukan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Pendidikan multikultural secara inheren sudah ada sejak bangsa Indonesia ada. Falsafah bangsa Indonesia adalah suka gotong royong, membantu, menghargai antara suku dan lainnya.
2. Pendidikan multikultural memberikan secercah harapan dalam mengatasi berbagai gejala masyarakat yang terjadi akhir-akhir ini. Keberhasilan pendidikan dengan mengabaikan ideologi, nilai-nilai, budaya, kepercayaan dan agama yang dianut masing-masing suku dan etnis harus dibayar mahal dengan terjadinya berbagai gejala dan pertentangan antar etnik dan suku. Salah satu penyebab munculnya gejala seperti ini, adalah model pendidikan yang dikembangkan selama ini lebih mengarah pada pendidikan kognitif intelektual dan keahlian psikomotorik

yang bersifat teknis semata. Padahal kedua ranah pendidikan ini lebih mengarah kepada keahlian yang lepas dari ideologi dan nilai-nilai yang ada dalam tradisi masyarakat, sehingga terkesan monolitik berupa nilai-nilai ilmiah akademis dan teknis empiris. Sementara menurut pendidikan multikultural, adalah pendidikan yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai keyakinan, heterogenitas, pluralitas agama apapun aspeknya dalam masyarakat.

3. Pendidikan multikultural menentang pendidikan yang berorientasi bisnis. Pendidikan yang diharapkan oleh bangsa Indonesia sebenarnya bukanlah pendidikan ketrampilan semata, melainkan pendidikan yang harus mengakomodir semua jenis kecerdasan, yang sering disebut kecerdasan ganda (*multiple intelligence*). Menurut Howard Gardner, kecerdasan ganda yang perlu dikembangkan secara seimbang adalah kecerdasan *verbal linguistic*, kecerdasan *logika matematika*, kecerdasan yang terkait dengan *spasial ruang*, kecerdasan *fisik kinestetik*, kecerdasan dalam bidang musik, kecerdasan yang terkait dengan lingkungan alam, kecerdasan interpersonal dan kecerdasan intrapersonal. Jadi, jika ketrampilan saja yang dikembangkan maka pendidikan itu jelas berorientasi bisnis.
4. Pendidikan multikultural sebagai resistensi fanatisme yang mengarah pada jenis kekerasan. Kekerasan muncul ketika saluran perdamaian sudah tidak ada lagi.⁷⁴

⁷⁴ Imam Machalli dan Musthofa, *Pendidikan Islam dan Tantangan Globalisasi* (Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2004), h. 278-279.

BAB VII

NILAI-NILAI PENDIDIKAN KATOLIK BERBASIS MULTIKULTURAL

A. Gereja Katolik Selayang Pandang

Gereja Katolik memandang dirinya sebagai satu kesatuan Gereja yang universal. Meskipun ada di banyak negara di dunia, Gereja Katolik memandang dirinya sebagai Gereja yang satu dengan 4 sifat Gereja sebagaimana terumuskan dalam syahadat para rasul (*credo*), yakni: *satu, kudus, katolik dan apostolik*.

1. Satu

Gereja Katolik percaya akan kehendak Allah bahwa orang-orang yang beriman kepada Kristus hendaknya berhimpun menjadi Umat Allah (1Ptr 2:5-10) dan menjadi satu Tubuh (1Kor 12:12). Gereja Katolik percaya bahwa kesatuan itu menjadi begitu kokoh dan kuat karena secara historis bertolak dari penetapan Petrus sebagai penerima kunci Kerajaan Surga. Setelah Petrus menyatakan pengakuannya bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup, maka Yesuspun menyatakan akan mendirikan jemaat-Nya di atas batu karang yang alam maut tidak akan menguasainya (Mt 16:16-19).

2. Kudus

Gereja itu kudus. Gereja Katolik meyakini diri kudus bukan karena tiap anggotanya sudah kudus tetapi lebih-lebih karena dipanggil kepada kekudusan oleh Tuhan, “Hendaklah kamu sempuran sebagaimana Bapamu di surga sempurna adanya.” (Mat5:48)

3. Katolik

Ciri yang ketiga adalah Katolik (dari kata Latin: *catholicus* yang berarti universal atau umum). Nama ini sudah dipakai sejak awal abad ke II M. pada masa St. Ignatius dari Antiokia menjadi Uskup. Ciri Katolik ini

mengandung arti Gereja yang utuh, lengkap, tidak hanya setengah atau sebagian dalam mengetrapkan sistem yang berlaku dalam Gereja. Bersifat universal artinya Gereja Katolik itu mencakup semua orang yang telah dibaptis secara Katolik di seluruh dunia dimana setiap orang menerima pengajaran iman dan moral serta berbagai tata liturgi yang sama di manapunberada.

4. Apostolik

Ciri yang terakhir dari Gereja Katolik adalah apostolik. Dengan ciri ini mau ditegaskan adanya kesadaran bahwa Gereja “dibangun atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru” (Ef. 2:20). Gereja Katolik mementingkan hubungan historis, turun-temurun, antara para rasul dan pengganti mereka, yaitu para uskup. Itulah sebabnya Gereja Katolik tidak hanya mendasarkan diri dalam hal ajaran-ajaran dan eksistensinya pada Kitab Suci melainkan juga kepada Tradisi Suci dan Magisterium Gereja sepanjang masa.

Secara umum, Gereja Katolik adalah sebuah komunio (persekutuan) dari Gereja Katolik ritus barat dan 23 Gereja Katolik Timur, yang membentuk 2.795 keuskupan. Gereja Katolik dipimpin oleh Paus sebagai uskup Roma dalam kesatuan dengan para uskup yang berjumlah sekitar 5000an uskup dalam apa yang disebut sebagai *successio apostolica* sebagai pengganti pada rasul. Dalam pengembalaannya para uskup ini dibantu oleh lebih dari 450 ribu imam/pastor dan 49 ribu diakon. Di Indonesia, terdapat 37 Keuskupan dengan 37 uskup, yang mengembalakan hampir 6 juta umat Katolik Indonesia.

Sebagaimana diajarkan oleh Konsili Vatikan II, Gereja Katolik memiliki tujuan menjadi sakramen atau tanda dan sarana keselamatan Allah bagi dunia. Gereja Katolik melalui ratusan ribu sekolah-sekolah dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi, rumah-rumah sakit, panti-panti asuhan dan lembaga kemanusiaan lain, yang tersebar di seluruh

dunia, telah berkontribusi bagi kecerdasan, kualitas hidup dan peningkatan sumber daya manusia di seluruh dunia, tanpa memandang suku, agama, ras dan golongan.

Namun cerita tentang Gereja Katolik bukan hanya berkaitan dengan cerita tentang realitas sebagaimana tergambar di atas. Dalam konteks multikulturalisme, Gereja Katolik, dari zaman para rasul hingga saat ini, yang ditandai dengan perpecahan Gereja timur dan barat sampai pada reformasi protestan, telah mengalami banyak sekali persoalan. Sejak masalah bersunat atau tidak bersunat antara Perus dan Paulus pada zaman rasuli, penyebaran Kristen ke luar Eropa, sampai Gereja di era digital sekarang ini Gereja selalu diperhadapkan dengan masalah multikulturalisme. Tidak sedikit tantangan yang dihadapi, bahkan pada abad-abad yang lalu tak jarang banyak umat Katolik yang menjadi martir (orang yang mati untuk membela agama) karena benturan kebudayaan, seperti di Kamboja, Vietnam, Korea dan Jepang. Fakta sejarah ini memperlihatkan bahwa pada banyak zaman Gereja Katolik mengalami juga kesulitan dalamewartakan iman Kristen di antara bangsa-bangsa.

Dalam Gereja Katolik pun muncul adagium *extra ecclesia nulla salus*, di luar Gereja (Katolik) tidak ada keselamatan. Di sini Gereja Katolik menganggap diri superiori atas agama-agama serta gereja-gereja lain, dan atas kebudayaan-kebudayaan lain. Hal inilah yang membuat Gereja Katolik sering terlibat konflik dengan Protestan, Islam dan banyak suku bangsa di banyak Negara dan di banyak zaman, yang memakan jutaan korban pada masa-masa yang lampau.

Namun ada satu momentum penting yang merubah cara pandang Gereja Katolik tentang dirinya dalam hubungan dengan dunia, agama-agama dan kebudayaan-kebudayaan. Momentum itu adalah Konsili Vatikan II, yang berlangsung dari tahun 1962- 1965. Dalam konsili ini Gereja Katolik mengadakan pembaharuan tentang hakekat dan

tujuannya. Ada dua kata penting yang digunakan selama konsili: *ressorcement* dan *aggiornamento*. *Ressorcement* adalah kata bahasa Perancis yang berarti “kembali ke sumber-sumber” yang dapat dipertanggungjawabkan tentang iman Kristiani untuk menemukan kembali kebenaran dan artinya. Sedangkan *aggiornamento* adalah kata Italia, yang secara bebas dapat diartikan dengan “penyesuaian dengan zaman”. Hal ini ditandai dengan dibukanya jendela pada basilica St. Petrus agar udara segar berhembus ke dalam Gereja. Dengan menghadirkan para pembicara dari lintas agama dan bahkan ateis, para bapa konsili diajak menemukan cara baru untuk merumuskan kembali penegasan-penegasan fundamental tentang iman Kristiani, agar Injil dapat diwartakan lebih bermakna dan berdaya guna sesuai dengan keadaan zaman.

B. Pandangan Gereja Katolik tentang Multikulturalisme

Kata “multikulturalisme” tentu saja tidak ditemukan dalam Kitab Suci. Meskipun demikian, jika kini Gereja Katolik menaruh hormat pada agama dan kebudayaan lain, hal ini tentu saja tidak lepas dari pandangan alkitabiah dalam kerangka teologi Katolik. Dalam konteks multikulturalisme, gagasan teologi yang dapat dipakai adalah ajaran tentang *inkarnasi*, Allah menjadi manusia dan tinggal di antara manusia. Allah yang tinggi luhur dan melampaui budaya manusiawi rela menjadi manusia, terikat pada konteks manusia dan menggunakan pula budaya manusiawi.

Secara etimologis inkarnasi berasal-usul dari kata Latin: *in* yang berarti “masuk ke dalam” dan *carne*, yang berarti “daging”. Secara harafiah, kata inkarnasi menunjuk pada Yesus, yang masuk ke dalam daging, dikandung oleh Santa Maria dan kemudian menjadi manusia sama seperti kita. Secara teologis, dalam ajaran inkarnasi, Yesus Kristus adalah Roh Allah (dimensi Ilahi) yang menerima kemanusiaan (dimensi manusiawi) demi keselamatan umat manusia (Luk 1, 35). Dalam konteks ini Yesus Kristus disebut sebagai *Imanuel*, yang

berarti Allah beserta kita. Dalam ajaran inkarnasi ini pula Yesus dikenal sebagai Sang Sabda (*Logos*) yang menjadi manusia seutuhnya dalam segala hal, kecuali dalam hal dosa (Fil 2, 10-11). Yohanes menulis dalam Injilnya, "Sabda menjadi daging dan tinggal di antara kita" (Yoh 1, 12, 13; 1, 1-3).

Dalam inkarnasi ini manusia memiliki nilai yang tinggi di antara semua yang diciptakan. Karena manusia luhur dan berharga, maka Allah berkenan menjadi manusia. Allah memilih menjadi sosok manusia untuk menyelamatkan manusia dan mendatangkan rahmat bagi seluruh semesta. Proses penyelamatan manusia terus berlanjut. Allah tidak hanya menjadi manusia. tetapi Ia tinggal di dalam diri manusia. Inilah yang kemudian terjadi dalam peristiwa Pantekosta. Kenyataan ini dapat dijelaskan demikian: jika dalam inkarnasi Allah menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus, maka dalam peristiwa Pantekosta manusia yang percaya kepada Kristus diangkat masuk dalam kodrat Ilahi melalui pencurahan Roh Kudus. Artinya, manusia yang fana ini diilahirkan, sehingga janji Yesus dapat tergenapi, "dimana Aku berada di situpun kamu akan berada".

Kembali pada ajaran inkarnasi, ketika Allah menjadi manusia dalam diri Yesus, Ia hidup dalam konteks kemanusiaan. Dalam berkomunikasi Yesus menggunakan bahasa Aram. Ia pun hidup menurut adat-istiadat Yahudi. Ia makan dan minum sebagaimana yang dimakan dan diminum oleh orang Yahudi. Bahkan Ia memahami dengan baik tabiat bangsanya, tabiat para ahli Taurat-orang Farisi dan ketidaksukaan orang-orang sebangsanya terhadap orang-orang Samaria. Dengan bahasa yang dipahami oleh murid-murid dan orang-orang yang mengikuti Dia, Yesus mulai mengajarkan tentang cinta kasih sebagai ajaran yang utama. Bahkan tahap demi tahap, Yesus mulai mengajarkan bahwa Diri-Nyalah sebagai inti iman dan pedoman untuk hidup kekal. "Akulah jalan, kebenaran dan hidup".

Konsekuensi dari teologi inkarnasi ini melahirkan inkulturasi dalam Gereja Katolik. Gereja katolik menemukan

pembenaran dalam membangun dialog dengan unsur-unsur kebudayaan setempat, meskipun di pihak lain Gereja Katolik mempertahankan unsur-unsur liturgi yang fundamental demi mempertahankan universalitas dan kesatuan Gereja. Inkulturasi sesuai arti katanya berarti *in*, “masuk ke dalam” dan *cultural*, “budaya”. Bagi Gereja Katolik, inkarnasi berarti Allah menyapa dan membangun relasi dengan manusia. Supaya sapaan Allah ini bermakna bagi manusia, Allah menggunakan bahasa manusiadan manusia menjawabnya dengan bahasa dan kebudayaannya. Dengan demikian, inkulturasi itu terjadi ketika orang-orang dalam lingkup bahasa dan kebudayaan tertentu menerima sapaan Allah melalui bahasa dan kebudayaan yang dihayati oleh mereka. Dalam arti ini liturgi dirayakan dengan citarasa lokal.

Proses inkulturasi ini hanya terjadi bila ada kedewasaan iman dan ada pula penyortiran atas unsur-unsur budaya lokal. Tidak semua unsur-unsur budaya sejalan dengan iman dan ajaran kristiani. Karena itu, hanya unsur-unsur yang sejalan saja yang kemudian dipraktekkan. Dalam arti inilah iman dihayati dalam kebudayaan tertentu dan senantiasa mendapat bentuk yang baru. Bagi Gereja Katolik, kebudayaan dalam zaman tertentu adalah lahan dimana Tuhan telah mempersiapkan orang-orang setempat bagi penerimaan akan Yesus Kristus. Di sini berlaku prinsip teologi *gratia supponit naturam* yang artinya rahmat Allah bekerja melalui bakat-bakat dan proses alamiah yang tersedia dalam diri setiap orang dan di dalam setiap kebudayaan. Dengan demikian kebudayaan adalah juga buah karya Allah yang melaluinya, orang dimampukan untuk menerima Kristus dan menghayati amanat Injil. Ibaratnya, kebudayaan terkadang seperti Yohanes Pembaptis yang mempersiapkan orang menyambut Kristus.

Kebudayaan dengan segala unsurnya adalah sarana untuk menghayati iman, mengamalkan Injil dan merayakan liturgi. Teologi inkarnasi dan konsekwensinya pada litugi yang inkulturatif telah membuat Gereja dari hakikatnya bersifat dialogis dan hidup berdampingan dengan budaya dan agama

manapun juga. Dengan demikian, Gereja Katolik seharusnya tidak memiliki persoalan serius dalam hal hidup dengan aneka budaya lokal. Di sini Gereja Katolik berprinsip: *in principiis unitas* (satu di dalam hal-hal prinsip, misalnya dalam ajaran tentang Kristus, tentang Tritunggal, tentang iman), *in dubiis libertas* (dalam hal-hal yang terbuka, bebas menentukan pilihan) dan *in omnibus caritatis* (dalam segala hal harus ada kasih).

Segala prinsip ini seharusnya menghantar umat katolik memiliki karakter dialogis dan berwawasan multikultural. Hal ini yang secara kongkrit tampak dalam diri Paus Fransiskus dan Uskup Petrus Kanisius Mandagi, yang terus menyuarakan perdamaian, dialog dan hubungan saling menghormati dengan siapa pun, tanpa memandang suku, agama, ras dan golongan. Meskipun demikian, harus diakui juga bahwa ada pula umat katolik yang masih saja kaku dan bahkan radikal. Untuk mereka, perlu diadakan pendekatan dan upaya pendidikan terus-menerus.

C. Multikulturalisme dalam Dokumen Gereja Katolik

Dalam bagian berikut ini akan coba ditunjukkan beberapa dokumen Gereja Katolik (*magisterium*) yang menerangkan relasi terbuka dan sederajat antara Gereja Katolik dan agama-agama serta kebudayaan lain. Magisterium adalah nama untuk menjelaskan kuasa mengajar Gereja Katolik. Kuasa ini pertama-tama ada dalam diri Paus sebagai uskup Roma, yang adalah representasi Gereja Universal. Selain itu ada pula konferensi para uskup di setiap benua, konferensi tingkat nasional dan masing-masing uskup di Keuskupannya. Setiap uskup memegang kewibawaan rasuli dalam mengajar dan menggembalakan umatnya dalam kesatuan dengan para uskup lain dan Uskup Roma.

Dokumen Konsili Vatikan II, "Gereja di sepanjang zaman dan dalam berbagai situasi telah memanfaatkan sumber-sumber aneka kebudayaan, untuk menyebarluaskan dan menguraikan pewartaan Kristus kepada semua bangsa, untuk menggali dan makin menyelaminya, serta untuk

mengungkapkan secara lebih baik dalam perayaan liturgi dan dalam kehidupan jemaat beriman yang beranekaragam".Dokumen *Deus Caritas Est* art.9, Paus Benediktus XVI menyatakan bahwa "Allah yang diyakini tersebut tidak diklaim sebagai satu-satunya Allah milik umat kristiani. Semua umat beragama, bahkan mereka yang tidak bergabung dalam komunitas agama mana pun, bebas menerima Allah yang satu itu sebagai Allahmereka".

Dokumen *Federation of Asian Bishops' Conferences*, dalam pertemuan FABC di Hongkong pada bulan April 1990: "Di Asia, Gereja setempat mewujudkan diri dengan menjalin hubungan-hubungan baru dengan sesama yang menganut iman kepercayaan lain, serta dengan melibatkan diri dalam pokok-pokok kepedulian mengenai keadilan, martabat manusiawi dan hak-hak azasi manusia, dan dalam pelaksanaan kongkrit prioritas cinta-kasih yang mengutamakan kaum miskin"

Hasil Sidang Tahunan Konferensi Waligereja Indonesia, "Gereja Katolik harus terus membuka diri, membangun dialog dengan agama-agama lain. Dialog ini penting untuk membangun sikap saling mengenal satu sama lain, meruntuhkan berbagai kecurigaan dan mengikis fanatisme. Dengan dialog, Gereja Katolik di Indonesia harus meneruskan misi Tuhan, yakni merobohkan tembok-tembok pemisah dan membangun jembatan persahabatan dengan semua orang demi terwujudnya persaudaraan sejati yang mengarah pada hidup bersama, yang lebih damai dantenteram".

Gereja tidak hidup bagi dirinya sendiri. Gereja kita adalah Gereja yang terbuka dan senantiasa merasa punya tanggung-jawab untuk memulihkan persekutuan manusiawi dalam masyarakat. Mengikuti teladan Kristus,Gerejamerasa terutus untuk membangun persaudaraan manusiawi secara universal dengan merobohkan dinding-dinding pemisah yang didirikan oleh keserakahan, kesombongan, diskriminasi sosial yang berat sebelah dan bahkan oleh distorsi- distorsi keagamaan. Gereja bertekad untuk bersama masyarakat

membangun persekutuan dimana setiap orang dari segala suku serta dari agama yang berbeda- beda dapat saling menyapa sebagaisaudara”.

D. Pandangan Umat Katolik terhadap Multikulturalisme

Dengan semangat multikulturalisme, umat Katolik diharapkan memiliki sikap-sikap sebagai berikut:Dapat menghargai dan dapat menerima seseorang tanpa harus melihat latar belakangnya, seperti: suku, budaya, adat istiadat, kebiasaan, cara pandang, cara berpikir dan agama yangberbeda. Dapat menolong antar sesama dan memperlihatkan serta menunjukan solidaritas kepada semua orang tanpa melihat latar belakangnya. Karena untuk menolong, orang harus didasari olehkeikhlasan.Jangan pernah memandang remeh orang-orang yang berbeda suku, budaya, adat istiadat, kebiasaan, cara pandang, cara berpikir dan agama yangberbeda.

Tetap berfikir positif terhadap semua orang tetapi harus tetap kritis terkait tindakan- tindakan maupun peristiwa yang memang tidak sesuai dengan ajaran dan norma padaumumnya.Menjadikan hukum kasih sebagai landasan dan pedoman dalam pergaulan dengan semua orang dan jangan sampai ada perselisihan karna adanya perbedaan latar belakang.

Uraian di atas telah memperlihatkan prinsip-prinsip yang dipegang oleh Gereja Katolik dalam relasinya dengan dunia yang ada di sekitarnya. Gereja Katolik berprinsip bahwa Allah telah menciptakan manusia untuk saling mengisi dan melengkapi, sehingga umat dapat memiliki kesadaran multikultur terhadap segala perbedaan di dalam berbagai suku, budaya, adat, kebiasaan serta geografis yang berbeda-beda. Gereja yang multikultur adalah Gereja yang mampu menerima segala perbedaan, karena sebenarnya nilai-nilai positif yang dimiliki oleh budya dan suku dapat memperkaya liturgi di dalam ibadah. Gereja Katolik senantiasa mendorong umat beriman untuk menghindari sikap-sikap yang tidak

mencerminkan ajaran Gereja dan ajaran Alkitab, seperti primordialisme, etnosentrisme, diskriminatif dan stereotip, sebaliknya mulai untuk menanamkan kebersamaan, solidaritas, kerjasama dan hidup berdampingan secara damai di dalam perbedaan.

BAB VIII

NILAI-NILAI PLURALISTIK-MULTIKULTURAL DAN TOLERANSI DALAM PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN

A. Pendahuluan

Publikasi Statistik Kriminal oleh Badan Pusat Statistik (2019) menyajikan gambaran umum mengenai tingkat dan perkembangan kriminalitas di Indonesia selama periode tahun 2016–2018. Informasi yang disajikan mencakup tiga pendekatan utama statistik kriminal, yakni pendekatan pelaku, korban, dan kewilayahan. Data yang disajikan diperoleh dari dua sumber utama statistik kriminal, yaitu (1) Data berbasis registrasi (*administrative based data*) yakni data kriminal yang dihimpun oleh Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan (2) Data berbasis survei (*survey based data*) yakni data kriminal yang bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan Pendataan Potensi Desa (Podes) yang dihasilkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Data registrasi Polri mencatat bahwa tingkat kejahatan (*crime rate*) selama periode tahun 2016–2018 mengalami penurunan. Tingkat resiko terkena tindak kejahatan setiap 100 ribu penduduk pada tahun 2015 sekitar 140, menjadi 129 pada tahun 2017, dan menurun menjadi 113 pada tahun 2018.

Data Susenas yang menggambarkan persentase penduduk menjadi korban kejahatan di Indonesia selama periode tahun 2016–2018 juga memperlihatkan pola yang fluktuatif. Persentase penduduk korban kejahatan mengalami penurunan dari 1,22 persen pada tahun 2016 menjadi 1,08 persen pada tahun 2017, dan meningkat menjadi 1,11 persen pada 2018. Berdasarkan data Podes, selama tahun 2011–2018 jumlah desa/kelurahan yang menjadi ajang konflik massal cenderung meningkat, dari sekitar 2.500 desa pada tahun 2011 menjadi sekitar 2.700 desa/kelurahan pada tahun 2014, dan kembali meningkat menjadi sekitar 3.100 desa/kelurahan pada tahun 2018.

Kemiskinan juga menjadi masalah yang semakin penting yang mempengaruhi kualitas pendidikan. Badan Pusat Statistik (2019) merilis persentase penduduk miskin pada Maret 2019 sebesar 9,41 persen, menurun 0,25 persen poin terhadap September 2018 dan menurun 0,41 persen poin terhadap Maret 2018. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2019 sebesar 25,14 juta orang, menurun 0,53 juta orang terhadap September 2018 dan menurun 0,80 juta orang terhadap Maret 2018. Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2018 sebesar 6,89 persen, turun menjadi 6,69 persen pada Maret 2019. Sementara persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada September 2018 sebesar 13,10 persen, turun menjadi 12,85 persen pada Maret 2019. Dibanding September 2018, jumlah penduduk miskin Maret 2019 di daerah perkotaan turun sebanyak 136,5 ribu orang (dari 10,13 juta orang pada September 2018 menjadi 9,99 juta orang pada Maret 2019). Sementara itu, daerah perdesaan turun sebanyak 393,4 ribu orang (dari 15,54 juta orang pada September 2018 menjadi 15,15 juta orang pada Maret 2019).

Garis Kemiskinan pada Maret 2019 tercatat sebesar Rp425.250,-/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp313.232,- (73,66 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp112.018,- (26,34 persen). Pada Maret 2019, secara rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,68 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp1.990.170,-/rumah tangga miskin/bulan. Kendati demikian pada tahun 2020 patut diduga tren menurun tersebut akan bergerak menaik karena pengaruh pandemi covid19 yang mengakibatkan bisnis lesu, pemutusan hubungan kerja yang diprediksi mencapai angka sekitar 60% dari angkatan kerja yang bekerja sebelum pandemi, pengangguran dan masalah-masalah lain terkait yang menyebabkan dugaan angka kemiskinan nasional meningkat.

Dalam berbagai informasi tertulis disebutkan adanya kaitan antara kemiskinan dengan kejahatan, Semakin tinggi angka kemiskinan maka semakin tinggi pula angka kejahatan. Dalam sejumlah kasus, antara lain kasus kerusuhan Mei 1998 yang telah menelan korban nyawa sekitar 500 orang, masalah aneka kejahatan yang terjadi (perusakan, perampokan, penganiayaan dan perkosaan) bersinggungan dengan perjuangan mahasiswa mengatasi krisis ekonomi, sosial, politik dan budaya ternyata merembet kepada sentimen-sentimen kesukuan/etnistas dan keagamaan. Pada saat itu banyak orang agama tertentu yang tidak berani menggunakan identitas simbolik mereka karena merasa terancam dan banyak pula keturunan Tionghoa yang melarikan diri ke luar negeri karena takut.

Raharja (2010) mengatakan korupsi, kolusi, nepotisme, premanisme, perseteruan politik, kemiskinan, kekerasan, sparatisme, perusakan lingkungan dan hilangnya rasa kemanusiaan untuk saling menghormati hak-hak orang lain, merupakan bentuk nyata sebagai bagian dari fenomena multikultural. Pasca rezim Orde Baru sampai sekarang di Era Reformasi, pertentangan antarsuku, antarkampung, antargolongan, antarkelompok agama, entah antar apalagi masih kerap terjadi. Hal ini menunjukkan masih rendahnya penghargaan masyarakat kita terhadap derajat budaya yang berbeda-beda. Realitas konflik yang berlatar multikultural dengan berbagai dimensi kejahatan yang diwarnai sentimen-sentimen keagamaan, kesukuan dan strata sosial di dalamnya mengantar kita pada satu keniscayaan bahwa masalah pendidikan multikultural adalah hal yang sangat penting di abad kedua puluh satu, khususnya di Indonesia.

Sebagaimana dikatakan Banks & Banks (2001) bahwa kecenderungan demografis, sosial, dan ekonomi ini memiliki implikasi penting bagi pendidikan. Pendidikan multikultural dimaksudkan untuk mengurangi divisi ras, etnis, kelas, dan gender dengan membantu semua siswa memperoleh pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang mereka butuhkan

untuk menjadi warga negara yang aktif dalam masyarakat demokratis dan berpartisipasi dalam perubahan sosial (Valdez, 1999). Sangat penting bahwa guru belajar bagaimana mengenali, menghormati, dan menggabungkan kemampuan pribadi siswa ke dalam strategi pengajaran mereka (Gay, 2000). Jika ini dilakukan, maka prestasi sekolah akan meningkat dan kehadiran sekolah dengan alumni mereka yang memiliki kecerdasan budaya akan menjadi kontribusi yang sangat berarti bagi penciptaan ruang kehidupan bersama yang diwarnai kehidupan yang saling berbagi (*wishfull coexistent among religious*, hidup damai di antara umat beragama di muka bumi).

B. Pengertian Pluralisme, Multikulturalisme Dan Toleransi Beragama

Akhir-akhir ini kata “pluralisme” dan “multikulturalisme” sering terlontar di ranah publik. Gejala ini dapat dipahami, jika mengingat keadaan masyarakat Indonesia yang semakin terlibat dalam berbagai konflik dan peningkatan radikalisme. Dalam situasi seperti itu, kedua kata di atas memang selalu dirapalkan ibarat mantra yang diharapkan mampu meredakan kegerahan akan hiruk-pikuk perbedaan dan meredam dorongan untuk menang sendiri. Namun, apakah keduanya akan dapat memenuhi harapan itu, tentu akan sangat terkait dengan pemahaman akan kedua konsep tersebut. Barangkali ada orang yang berpendapat bahwa kedua konsep itu bukanlah barang baru bagi masyarakat Indonesia, itu ada benarnya. Sejak negara RI didirikan lebih dari tujuh puluh yang lalu konsep-konsep itu telah ada dan seringkali dikaitkan dengan semboyan “Bhinneka Tunggal Ika”, yang diartikan ‘berbeda-beda tetapi tetap satu adanya’. Namun perlu disadari bahwa tafsir makna akan selalu mengalami perubahan sesuai dengan dinamika sosial dan budaya masyarakat Indonesia sendiri maupun dunia. Karena itu, agaknya kini merupakan saat yang tepat untuk mengkaji dan memahami

kembali konsep tentang plurasilisme dan multikulturalisme dalam konteks Indonesia sekarang.

1. Pluralisme

Pluralisme merujuk pada keadaan masyarakat yang terdiri atas berbagai suku, agama, asal, dan latarbelakang budaya. Yang terpenting di sini adalah adanya keragaman atau kemajemukan, tanpa melihat interaksi di antara mereka. Ini hanya memenuhi unsur “*bhinneka*” semata, tidak mengandung unsur “*tunggal*”, yang sesungguhnya menyiratkan adanya sifat hubungan antara yang beragam ini, yaitu kesatuan (Tanudirjo, 2015).

Dalam kaitan dengan agama, Hastings (1951) mendefinisikan pluralisme agama sebagai pemahaman dan penghayatan sekaligus penerimaan terhadap kenyataan bahwa ada agama-agama lain yang berbeda dengan kita dan bahwa di dalam agama-agama itu Allah menyatakan dirinya secara khusus juga, dan karena itu di dalam agama-agama yang ada, orang dapat menemukan Allah dan mendapatkan ridha, berkat dan keselamatan dari-Nya.

Definisi yang lebih kurang sama dinyatakan oleh Thompson (2009) yang mengatakan bahwa pluralisme agama mengacu pada situasi di mana ada pemahaman yang berbeda tentang Tuhan, klaim-klaim yang berbeda dan kadang bertentangan dengan validitas, superioritas, kebenaran dan pemaknaan inti yang dibuat oleh agama-agama dalam konteks budaya tertentu. Dari sudut pandang kekeristenan, pluralisme agama menawarkan pemahaman adanya ruang bagi klaim yang sama terhadap validitas dan kebenaran di antara agama-agama, yang pada dasarnya bertentangan dengan ajaran tradisional Kristen bahwa Tuhan telah membuat dirinya dikenal di dalam Yesus dengan cara yang tak tertandingi.

Sementara Eck (1993) mendefinisikan pluralisme sebagai sebuah pergumulan yang bertujuan menciptakan sebuah masyarakat (*common society*) yang dibangun atas dasar kebhinekaan. Pluralisme menawarkan kohesifitas

dalam keberagaman. Pluralitas harus digandengkan dengan pluralisme, kata Eck. Pengakuan terhadap pluralitas agama-agama tidak cukup, harusnya juga mengakui realitas kebenaran agama-agama tanpa meninggalkan identitas agama sendiri. Dalam bahasa yang lebih sederhana: Saya benar menurut saya, kalian juga benar menurut kalian masing-masing; jadi tidak ada yang salah, karena semua kita (masing-masing) benar adanya. Kebenaran mutlak adanya pada agama masing-masing, namun pada ruang publik (*common society*) tidak ada alasan bagi kita masing-masing untuk sekadar menjadi penonton yang mengagumi keindahan pluralitas melainkan kita bersama-sama harus berpartisipasi merayakan pluralitas dalam suasana tatap muka dan kebersamaan. Sebagaimana dikatakan lebih jauh oleh Eck, "*...pluralism is not the sheer fact of this plurality alone, but is active engagement with plurality. Pluralism and plurality are sometimes used as if they were synonymous. But plurality is just diversity, plain and simple – splendid, colorful, maybe even threatening. Such diversity does not, however, have to affect me. I can observe diversity. I can even celebrate diversity, as the cliché goes. But I have to participate in pluralism....Pluralism requires the cultivation of public space where we all encounter one another.*"

Sementara Bedjo(2007) mengatakan, pluralisme agama bisa dipahami dalam minimum tiga kategori. Pertama, kategori sosial. Dalam pengertian ini, pluralisme agama berarti "semua agama berhak untuk ada dan hidup". Secara sosial, kita harus belajar untuk toleran dan bahkan menghormati iman atau kepercayaan dari penganut agama lainnya. Kedua, kategori etika atau moral. Dalam hal ini pluralisme agama berarti bahwa "semua pandangan moral dari masing-masing agama bersifat relatif dan sah". Jika kita menganut pluralisme agama dalam nuansa etis, kita didorong untuk tidak menghakimi penganut agama lain yang memiliki pandangan moral berbeda, misalnya terhadap isu pernikahan, aborsi, hukuman gantung, eutanasia, dll. Ketiga, kategori teologis-filosofis. Secara

sederhana berarti "agama-agama pada hakikatnya setara, sama-sama benar dan sama-sama menyelamatkan". Mungkin ungkapan yang lebih umum dan sederhana adalah "banyak jalan menuju Roma". Semua agama menuju pada Allah, hanya jalannya yang berbeda-beda.

Berdasarkan pandangan keempat pakar di atas dapat dikatakan bahwa pluralisme agama pada dasarnya secara filosofis menolak paham superioritas agama yang menekankan aspek tradisional dalam memahami Tuhan dan klaim-klaim kebenaran dalam perspektif yang sempit dan terbatas. Pluralisme membuka ruang bagi penemuan klaim-klaim validitas dan kebenaran yang baru dalam agama (Thompson), namun tidak berarti pembiaran atau sama sekali permisif untuk "ganti baju" agama (Eck). Dalam wacana pluralisme agama-agama tidak harus menjadi sinkretis atau melebur dan kehilangan identitasnya. Agama-agama hanya harus terbuka bagi penemuan-penemuan hal baru yang justru akan memperkaya khasanah wawasan dan memperjelas identitasnya sebagai agama.

2. Multikulturalisme

Istilah "multikulturalisme" lebih kompleks dipahami, karena sesungguhnya ia adalah konsep politik, khususnya politik identitas, karena itu mempunyai berbagai makna yang dapat dikaitkan dengan konteks penggunaannya (Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2010). Multikulturalisme berbeda dengan multikultural yang diartikan "berbagai budaya", karena multikulturalisme sebenarnya muncul sebagai kebijakan pemerintah dalam memperlakukan warganya. Penyeragaman budaya dengan dalih persatuan dan kesatuan bangsa melalui kebijakan asimilasi telah gagal. Pada tahun 1960-an, kondisi ini sempat menimbulkan isu-isu diskriminasi terhadap kaum kulit hitam di Amerika dan separatisme Quebec di Kanada. Pada tahun 1965 pemerintah Kanada mempopulerkan istilah multikulturalisme untuk menjamin kesetaraan kedudukan

warganegaranya. Disebutkan, multikulturalisme lahir dari keyakinan bahwa setiap warganegara itu sama kedudukannya. Multikulturalisme menjamin setiap warga dapat mempertahankan jatidirinya (identity), bangga terhadap nenekmoyangnya (ancestry), dan mempunyai rasa miliknya (sense of belonging). Konsep ini dipandang sebagai gerakan sosial alternatif terhadap kebijakan asimilasi.

Gerakan ini merupakan penegasan dalam menghargai keragaman budaya terutama dari kelompok minoritas yang selama ini tersisihkan. Selanjutnya, istilah ini banyak dipergunakan di Australia dan negara lain sejak 1970-an (Bennet et als., 2005). Jadi, dari konteks kesejarahan Indonesia jauh lebih dulu menyadari, menghargai dan bahkan menggunakan paham multikulturalisme dibanding bangsa-bangsa lain. Sejak Indonesia merdeka, negara ini telah menunjukkan politik identitas Bhinneka Tunggal Ika, yang maknanya tidak berbeda jauh dengan konsep multikulturalisme yang muncul di negara-negara barat.

Sebagai konsep politik, multikulturalisme bukan hanya merujuk pada keragaman 'budaya' tetapi juga keragaman dalam agama, etnis, ras, dan bahasa, bahkan juga mayoritas dan minoritas. Dalam konsep ini ada semangat untuk mengangkat kembali harkat orang-orang yang selama ini jatidirinya tidak dihargai dan mencoba mengubah pola hubungan dan komunikasi yang selama ini telah meminggirkan kelompok-kelompok tertentu. Dalam konteks ini, multikulturalisme lalu terkait dan membawa dampak pada kepentingan ekonomi maupun politik, di antaranya adalah tuntutan memperbaiki kedudukan ekonomi dan politis dari kelompok yang tidak diuntungkan karena status mereka yang 'dibedakan' atau minoritas (Stanford Encyclopedia of Philosophy).

3. Toleransi Agama

Toleransi berasal dari bahasa Inggris *tolerance* yang menurut Webster's New American Dictionary berarti memberi kebebasan (*to let*, membiarkan) pendapat orang lain dan berlaku sabar menghadapi orang lain. Dalam bahasa Arab toleransi sama dengan *tasamuh*, artinya membiarkan sesuatu untuk saling mengijinkan, saling memudahkan. Sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia, toleransi didefinisikan sebagai sikap saling menghargai, membiarkan, membolehkan pendirian, pendapat, kepercayaan, kelakuan yang lain dari yang dimiliki oleh seseorang atau yang bertentangan dengan pendirian seseorang. Intinya, toleransi adalah konsep modern untuk menggambarkan sikap saling menghormati dan saling bekerjasama di antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda baik secara etnis, bahasa, budaya, politik, maupun agama berdasarkan prinsip saling menghormati. Toleransi, karena itu, demikian Fios dan Gea (2013), mensyaratkan adanya sikap yang mendahuluinya yaitu inklusif dan bukan eksklusif.

Terkait dengan pemahaman tentang toleransi itu adalah menarik untuk memperhatikan pandangan Tanja(1998) mengenai dialog untuk toleransi antarumat beragama, "...maka jangan khawatir dengan dialog, karena yang ingin dicapai dalam dialog bukan soal kompromi akidah, melainkan bagaimana akhlak keagamaan kita dapat disumbangkan kepada orang lain." Jadi toleransi tidak harus mengorbankan atau melecehkan agama untuk menegakkan kerukunan antarumat beragama, namun juga tidak berarti mengatasnamakan ajaran agama untuk mengorbankan kerukunan antarumat beragama.

Berdasarkan pemahaman di atas dapat dikatakan bahwa pluralisme, multikulturalisme dan toleransi agama adalah tiga kata yang saling berhubungan. Pemahaman toleransi tidak dapat dilepaskan dari pemahaman tentang pluralisme dan multikulturalisme dalam hubungannya

dengan nation-building. Idealnya semakin besar pengakuan dan penerimaan seseorang terhadap fenomena pluralisme dan multikulturalisme maka akan semakin tinggi pula toleransinya kepada sesama yang berbeda (agama, suku, etnis, budaya dan status sosial) dengannya di republik ini.

C. Pentingnya Pemahaman Pluralistik-Multikultural Dan Toleransi Beragama dalam Perspektif Alkitab Di Tengah Masyarakat Plural Yang Berpotensi Konflik

Toleransi beragama sangat penting di Indonesia sedikitnya berkaitan dengan dua hal. Pertama adalah realitas kemajemukan yang rawan konflik. Kedua berkaitan dengan pemahaman bahwa toleransi sesungguhnya merupakan konsep agung dan mulia yang sepenuhnya menjadi bagian organik dari ajaran agama-agama, termasuk agama Kristen. Alasan yang pertama kiranya tidak perlu kita bahas panjang lebar karena sudah cukup banyak contohnya. Contoh dalam kasus penafsiran peraturan bersama 2 menteri (SKB dua menteri mengenai rumah ibadah). Peraturan ini justru dipandang kelompok tertentu sebagai peraturan yang melegitimasi tindakan penutupan rumah ibadah. Sehingga muncullah aksi penutupan rumah ibadah secara serentak. Selain itu terdapat juga penyerangan FPI ke STTI Arastamar di Kramatjati Jakarta Timur (2015), dan di tempat lain Forum Masyarakat Penyelamat Neglasari (FMPN) menolak STTI Arastamar Kota Tangerang, yang menuntut agar sekolah tersebut ditutup karena merasa terganggu dengan kegiatan mahasiswa dan juga menyatakan bahwa sekolah tersebut ilegal walaupun terdapat fakta bahwa sekolah tersebut memiliki ijin. Selain itu ada juga kasus penutupan paksa GKI Pos Taman Yasmin dan HKBP Filadelfia di Bekasi (2012). Rentetan kasus-kasus intoleransi yang terjadi ini menunjukkan kepada kita bahwa konstitusi pun dapat diperalat untuk melanggar keinginan individu atau sekelompok golongan tertentu saja dalam meraih keuntungan dan kekuasaan yang lebih besar. Knitter (2003) mengemukakan realitas plural agama-agama dan

bagaimana sikap-sikap yang diperlihatkan terhadapnya; juga pentingnya menyikapi realitas plural itu secara positif dan bagaimana dialog dapat dilaksanakan sebagai bentuk tanggung jawab global umat beragama menyikapi dimensi kemajemukan.

Alasan yang kedua termuat dalam Alkitab yang menjadi pegangan utama kita dalam memandang pluralisme, multikulturalisme dan toleransi beragama di Indonesia yang ditandai aneka pluralitas.

1. Perjanjian Lama

Dalam sejarah bangsa Israel sebagaimana tertulis di dalam PL, tampak bahwa Israel telah hidup di dalam lingkungan masyarakat yang pluralis. Banyak bangsa dan agama lain yang hidup berdampingan dengan bangsa Israel. Leluhur bangsa Israel juga sudah mengalami perjumpaan dengan bangsa-bangsa lain. Misalnya, Abraham dan keturunannya seperti Ishak dan Yakub. Bahkan mereka juga sempat hidup di wilayah kekuasaan bangsa lain. Contoh yang paling jelas adalah Abraham yang keluar dari Ur di kota Kasdim (כְּשָׁדִים אִיר; sekarang Tell el-Muqayyar, dekat Nasiriyah di selatan Iraq) dan pergi hidup berpindah-pindah di daerah bangsa-bangsa lain, sampai keturunannya (yaitu dua belas suku Israel) hidup di dalam perbudakan di Mesir. Di Mesir tokoh Musa menjadi penting karena dialah yang memimpin pembebasan bangsa Israel dari perbudakan di negeri itu. Bangsa Israel lalu hidup 40 tahun dalam perjalanan di padang gurun untuk pergi dan menduduki tanah yang dijanjikan yaitu Kanaan. Di bawah kepemimpinan Yosua, mereka berhasil merebut tanah perjanjian. Israel menjadi kerajaan dengan raja-raja yang terkenal seperti Daud dan Salomo. Di bawah kepemimpinan raja-raja ini Israel hidup dalam kejayaan. Tapi penggantian-pengganti mereka hidup dalam kelaliman sehingga Tuhan menghukum Israel. Kerajaan runtuh dan bangsa Israel dibuang ke Babel. Tapi sekitar 200-an tahun kemudian mereka dibebaskan. Peristiwa ini adalah akhir dari cerita di dalam PL. (Catatan: Mengenai sejarah bangsa Israel itu, lihat

terutama kitab-kitab Keluaran, Ulangan, Yosua, Hakim-Hakim, I & II Tawarikh, dan beberapa Kitab nabi-Nabi). Dalam sejarah yang tidak tercatat dalam PL, bangsa Israel (Yahudi) dikuasai oleh Yunani dan kemudian Romawi. Di jaman penjajahan Romawi, Yesus muncul dan berkarya.

Dari pengalaman perjumpaan bangsa Israel dengan bangsa-bangsa lain, sikap umum atau dominan yang diperlihatkan adalah sikap eksklusif dan superior. Israel pada posisi khusus, diakui sebagai bangsa pilihan. Sebagai bangsa pilihan, ia diistimewakan, yaitu mendapat berkat dan perlindungan Allah. Ia bahkan dipakai sebagai saluran berkat bagi bangsa-bangsa lain. Dalam status ini, bangsa Israel berada pada posisi untuk menilai bangsa-bangsa lain. Namun, terutama yang dikritik adalah bangsa-bangsa yang lalim dan memusuhi Israel. Yang dikritik adalah kejahatan atau pihak yang jahat, baik yang ada pada bangsa-bangsa lain maupun yang ada di kalangan bangsa Israel sendiri. Allah bangsa Israel tidak toleran terhadap bangsa yang lalim. Bangsa lain, juga dikritik dan dimusuhi karena mereka menyembah berhala/dewa baal. Terhadap bangsa-bangsa dan kejahatan seperti ini, bangsa Israel diberi tugas untuk menobatkan mereka. Kasus Yunus, yang dikirim Allah untuk menyampaikan pesan kepada bangsa Niniwe memperlihatkan pelaksanaan tugas untuk membawa keselamatan kepada bangsa lain. Di sini ada pemahaman bahwa bangsa lain perlu diselamatkan; karena itu adalah tugas nabi Israel untuk menyampaikan pesan Allah kepada mereka supaya mereka bertobat. (Lihat cerita Yunus di dalam Alkitab, kitab Yunus).

Jadi bangsa-bangsa/agama-agama lain, dilihat sebagai pihak yang tidak selamat dan perlu diselamatkan. Pluralitas bangsa/agama di sini tidak dipahami dan disikapi sebagai sebuah keragaman yang harus diterima tetapi yang harus diselamatkan dengan membuat bangsa yang berbeda itu bertobat dan beralih-percaya kepada Allah. Kota Niniwe yang kemudian bertobat, diampuni dan diselamatkan

Tuhan. Namun Yunus yang semula diberi tugas untuk menyampaikan pesan kepada bangsa Niniwe (tetapi membelot) menjadi marah atau iri hati karena Allah membebaskan Niniwe dari penghukuman. Yunus di sini sebenarnya mewakili sikap bangsa Israel yang merasa sebagai bangsa terpilih dan yang ingin memonopoli kasih Allah kepada bangsa-bangsa lain. Tetapi Allah mengasihi bangsa Niniwe, dan kasih-Nya itu tidak dapat dikalahkan oleh kekecewaan Yunus. Cerita Yunus ini memperlihatkan bahwa Allah mengasihi bangsa-bangsa lain.

Dalam sejarah bangsa Israel, sebagai implikasi dari penolakan terhadap pluralitas dan toleransi, ada bangsa-bangsa lain yang diperangi dan dikuasai, khususnya bangsa-bangsa yang mendiami daerah-daerah di Palestina, yaitu tanah yang dijanjikan Tuhan. Bangsa-bangsa yang diperangi misalnya kota Yerikho (Yosua 6), Ai (Yosua 8), bangsa Het, Amori, Kanaan, Feris, Hewi dan bangsa Yebus, Amon, dll (Yosua 9-24). Peperangan dalam rangka perebutan daerah kekuasaan ini bukan didasarkan pada penolakan terhadap keberadaan bangsa-bangsa itu karena mereka menyembah ilah lain, jadi bukan karena anti-pluralisme, tetapi karena bangsa-bangsa lain itu mendiami tanah yang dijanjikan dan diberikan Allah. Untuk merebut tanah itu, bangsa Israel harus melakukan peperangan. Dengan kata lain, peperangan yang dilakukan terhadap bangsa lain bukan karena perbedaan agama tetapi karena janji Tuhan untuk memberikan tanah itu. (Catatan: Sebenarnya, peperangan yang dilakukan oleh bangsa Israel terhadap bangsa-bangsa lain itu karena kepentingan politis-kekuasaan, yaitu demi merebut daerah untuk didiami dan dikuasai).

Namun demikian, ada pandangan yang berbeda dari yang di atas, yaitu adanya pengakuan terhadap otoritas, perlindungan Allah dan pengangkatan oleh Allah terhadap bangsa-bangsa lain. Ternyata, ada bangsa-bangsa lain yang diakui sebagai bangsa yang diberkati Allah, yaitu Mesir dan

Asyur (yang sebenarnya adalah musuh-musuh Israel). Firman Tuhan melalui nabi Yesaya mengatakan:

“Pada waktu itu akan ada mezbah bagi TUHAN di tengah-tengah tanah Mesir dan tugu peringatan bagi TUHAN pada perbatasannya. Itu akan menjadi tanda kesaksian bagi TUHAN semesta alam di tanah Mesir: apabila mereka berseru kepada TUHAN oleh karena orang-orang penindas, maka Ia akan mengirim seorang juruselamat kepada mereka, yang akan berjuang dan akan melepaskan mereka. Tuhan akan menyatakan diri kepada orang Mesir, dan orang Mesir akan mengenal Tuhan pada waktu itu; mereka akan beribadah dengan korban sembelihan dan korban sajian, dan mereka akan bernazar kepada TUHAN serta membayar nazar itu.”(Yesaya 19:19-21; lihat juga pembahasan Ariarajah, 1987).

Lebih dari itu, menurut nabi Yesaya, bangsa-bangsa lain adalah sama dengan bangsa Israel dan bangsa Israel sama dengan bangsa-bangsa lain. Firman itu mengatakan:

“Pada waktu itu akan ada jalan raya dari Mesir ke Asyur, sehingga orang Asyur dapat masuk ke Mesir dan orang Mesir ke Asyur, dan Mesir akan beribadah bersama-sama Asyur. Pada waktu itu Israel akan menjadi yang ketiga di samping Mesir dan Asyur, suatu berkat di atas bumi, yang diberkati oleh TUHAN semesta alam dengan berfirman: “Diberkatilah Mesir, umatKu, dan Asyur, buatan tanganKu dan Israel, milik pusakaKu.”(Yesaya 19:23-25; lihat Ariarajah, ibid.).

Tambahan lagi, yang menunjukkan bangsa lain sebagai alat dan sarana berkat Tuhan adalah pernyataan nabi Yesaya:

“Inilah FirmanKu kepada orang yang Kuurapi, kepada Koresy yang tangan kanannya Kupegang supaya Aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya Aku membuka pintu-pintu di depannya dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup.”(Yesaya 45:1; lihat juga Ariarajah, ibid.)

Di sini tampak jelas bahwa Allah memilih dan memakai raja bangsa lain (Koresy adalah raja Persia) sebagai tangan kanan-Nya untuk menundukkan raja-raja bangsa lain. Pengakuan dan penerimaan terhadap kebenaran bangsa lain sehingga mereka juga diakui, diberkati dan dipakai oleh Allah karena kenyataannya adalah bahwa bangsa lain juga adalah ciptaan Allah dan Allah mengasihi mereka. Nenek moyang mereka adalah leluhur-leluhur yang saling bersaudara atau satu keturunan dan satu sumber, yaitu Allah Sang Pencipta. Leluhur mereka adalah Abraham/Ibrahim, Nuh dan Adam-Hawa. Oleh karena itu, sekalipun diakui, tegas dinyatakan dan umum dipahami bahwa bangsa Israel adalah bangsa pilihan Allah, tetapi bukan berarti Allah tidak memberkati bangsa lain. Allah tetap memberkati bangsa-bangsa lain. Bahkan, bangsa lain juga difungsikan Allah untuk menegur Israel atau menjadi saluran berkat bagi Israel (misalnya Mesir yang dipakai Allah untuk menyediakan makanan bagi bangsa Israel ketika mereka mengalami kelaparan). Di dalam kondisi perang antara bangsa Israel dengan bangsa lain, ada saat Israel mengalahkan mereka tetapi juga ada saat ketika mereka mengalahkan Israel.

Dari pemaparan tentang pandangan dan sikap Alkitab-PL terhadap pluralitas di atas, nyata bahwa di samping pengakuan terhadap bangsa Israel sebagai bangsa pilihan, bahwa Tuhan ternyata juga menerima dan mengakui keberadaan bangsa-bangsa lain dengan budaya mereka masing-masing. Allah mengasihi dan memberkati mereka. Kenyataan ini memperlihatkan beragam sikap terhadap pluralitas, yaitu eksklusif dan pluralis; serta toleran, kompromis dan bahkan submisif terhadap kenyataan bahwa ada pihak-pihak lain di sekitar dan mereka bahkan dikasihi dan dijadikan tangan kanan Allah juga.

2. Perjanjian Baru

Sumber utama bagi pandangan dan sikap Kristen dalam Alkitab Perjanjian Baru tentang pluralisme, multikulturalisme dan toleransi adalah teladan yang diperlihatkan Yesus. Yesus atau agama Kristen muncul, berkarya dan beredar mula-mula di dalam kalangan masyarakat dan agama Yahudi. Jadi ketika muncul itu, pluralitas sudah menjadi bagiannya. Karena itu, ajaran Yesus—kekristenan awal—menyangkut pluralisme dan multikulturalisme dipengaruhi oleh perjumpaannya dengan agama-agama lain, terutama Yahudi dan helenisme (budaya-agama Yunani). Secara garis besar, partikularisme atau eksklusifisme yang melihat Yesus dan ajarannya sebagai kebenaran utama atau yang satu-satunya tampak mendominasi ajaran Perjanjian Baru, baik teologi kitab-kitab Injil maupun surat-surat Paulus, serta surat-surat umum. Yesus dilihat sebagai satu-satunya jalan kepada keselamatan. Kitab Injil Yohanes memperlihatkan keistimewaan peran Yesus:

“Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anak-Nya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal.” (Yohanes 3: 16).

Kata Yesus kepadanya: *“Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorangpun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui Aku.”* (Yohanes 14:6).

Jadi di sini tampak adanya pandangan yang eksklusif atau partikular dari perkataan Yesus itu; bahwa Ia adalah jalan menuju kepada Allah atau Ia adalah jalan keselamatan. Ajaran partikular ini mewarnai ajaran Alkitab PB dan kekristenan di sepanjang sejarah sampai saat ini. Ini adalah ajaran inti dalam agama Kristen, yaitu bahwa Yesus adalah Juruselamat; Ia memberikan atau mengantarkan manusia pada jalan yang benar menuju Tuhan dan mencapai keselamatan.

Walaupun demikian, Yesus tidak menolak kehadiran bangsa/umat lain ada di sekitarnya. Yesus juga tidak memberikan penilaian negatif, atau ia menganggap buruk atau jahat bangsa-bangsa lain itu. Yesus menerima keberadaan bangsa-bangsa lain dan mau bergaul dengan mereka, dan bahkan mengambil contoh yang baik dari bangsa asing itu bagi ajaran moral-etis-Nya. Misalnya, ilustrasi "Orang Samaria yang baik hati." (Lukas 10:25-37). Ayat lain dalam PB adalah perkataan Yesus dalam Lukas 4:25-27 yang menyebabkan orang Yahudi, para pendengar-Nya, marah kepada-Nya:

"Dan Aku berkata kepadamu, dan kata-Ku ini benar: Pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama tiga tahun dan enam bulan dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat, di tanah Sidon. Dan pada zaman nabi Elisa banyak orang kusta di Israel dan tidak ada seorangpun dari mereka yang ditahirkan, selain dari pada Naaman, orang Siria itu."

Bahkan Yesus bersikap sangat terbuka, toleran dan inklusif terhadap kelompok yang dianggap sebagai musuh oleh masyarakat dan agama-adat Yahudi, seperti bangsa/orang Samaria yang mau bertemu dan bercakap-cakap dengan-Nya. Jadi, bangsa-bangsa lain oleh Yesus, dan juga kemudian oleh rasul-rasul (murid-murid atau sahabat-sahabat-Nya), diakui dan dipahami sebagai pihak yang perlu mendengar berita kesukaan atau Injil yang dibawa-Nya.

Pandangan dan sikap Yesus terhadap bangsa/agama lain menunjukkan pengakuan dan penerimaan-Nya terhadap eksistensi mereka; dan bahwa mereka adalah bangsa yang perlu diperlakukan secara baik, yaitu dengan memberikan perhatian dan mengangkat harkat martabat hidup mereka. Juga bahwa, masyarakat lain ini menjadi

tempat menyampaikan kabar baik, Injil atau berita keselamatan, supaya mereka dapat selamat; atau supaya mereka dapat dibebaskan dari belenggu kebodohan, kemiskinan, kesakitan dan penderitaan, dan mereka dapat hidup damai sejahtera.

Untuk melaksanakan usaha itu, orang harus memiliki iman yang kuat dan hidup dengan menerapkan cinta kasih (sesuai hukum kasih: secara vertikal kepada Allah dan horisontal kepada sesama manusia). Tugas ini sudah dilaksanakan oleh Yesus dan kemudian Dia mengutus murid-murid-Nya untuk melanjutkan karya itu ke dalam kehidupan dunia. Perintah Yesus adalah:

"Yesus mendekati mereka dan berkata: "KepadaKu telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridKu dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang Kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman.""(Matius 28:16-20).

Perkataan Yesus ini disebut oleh kebanyakan orang Kristen sebagai Amanat Agung atau perintah mulia dari Yesus. Hal ini dipegangi, khususnya oleh kalangan Kristen ortodoks sebagai tugas utama yang diberikan Yesus kepada umat Kristen. Di dalamnya mengandung makna tentang pandangan dan sikap terhadap dunia atau pihak lain. Bahwa bangsa (termasuk umat agama lain) adalah pihak yang menjadi tujuan untuk menyampaikan kabar keselamatan. Jadi pihak lain dipandang dan disikapi dalam rangka tugas kesaksian, atau tugas menyampaikan berita. Keberadaan mereka tidak ditolak, tetapi dianggap sebagai pihak yang belum selamat sehingga perlu diselamatkan. Tugas kesaksian ini dilakukan kepada bangsa-bangsa. Seperti Yesus katakan : *"..dan kamu akan menjadi saksiKu di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi."*(Kisah Para Rasul 1:8. Bdk, Sidjabat, 1982).

Ajaran atau keyakinan di atas telah mendorong banyak orang Kristen, mulai dari awal sejarah gereja, dalam diri para rasul, sampai saat ini di dalam diri para misionaris, untuk melakukan pekabaran Injil (yang oleh kalangan agama lain dinilai sebagai usaha kristenisasi). Jadi, di dalam ajaran Alkitab, pluralitas dinilai sebagai suatu kondisi yang baik, yang bahkan menjadi tempat bagi penyebaran dan persemaian nilai-nilai kerajaan Allah. Di sini pluralisme dan multikulturalisme dipahami sebagai sesuatu yang perlu ada; namun pluralisme dan multikulturalisme itu bukan ada untuk dirinya sendiri. Pluralisme dan multikulturalisme itu bersifat sosial-kultural dan historis, bukan pluralisme dan multikulturalisme teologis-doktrinal. Hal ini karena, sekalipun mengakui keberadaan pihak-agama lain, namun mereka masih dianggap sebagai pihak yang memiliki kekurangan yaitu kebutuhan akan keselamatan. Oleh sebab itu, menjadi tugas pengikut Yesus-lah untuk membawa mereka kepada keselamatan. Untuk melakukan tugas ini, orang Kristen diajarkan untuk bersedia menderita (atau memikul salib) atau bahkan mati. Inilah yang dilakukan oleh para murid Yesus pada awal perkembangan sejarah gereja dan kemudian di jaman penyebaran kekristenan selanjutnya.

Dalam kerangka pemahaman ajaran seperti itu, toleransi agaknya bukan merupakan istilah yang cocok. Toleransi hanya menjadi relevan jika keadaan sekitar, atau adanya pihak-pihak yang berbeda, tidak dikehendaki. Tetapi di dalam ajaran Alkitab itu, justru pengikut Yesus atau orang Kristen akan merasa senang jika mereka berada di dalam masyarakat yang plural atau pergi ke daerah yang terdiri dari berbagai latarbelakang budaya dan agama karena tempat atau masyarakat seperti itu menjadi tempat bagi pelaksanaan tugas kesaksian tentang Yesus yang menyelamatkan.

Dari ajaran Yesus dalam Alkitab-PB itu tampak bahwa ada pandangan dan sikap eksklusif di dalam

berhadapan dengan pluralitas. Namun itu tidak menunjukkan penolakan atau antipati Yesus terhadap pluralitas. Pluralitas diterima, dipahami dan dihargai sebagai sebuah kenyataan mutlak. Terhadap pluralitas seperti ini, yang diajarkan Yesus, seperti dalam contoh yang Ia lakukan terhadap perempuan Samaria, adalah perjumpaan yang proaktif dan melakukan dialog. Ini dimaksudkan dan berfungsi menghasilkan saling paham, saling menerima dan saling mengangkat harkat dan martabat hidup. Yesus mengambil contoh atau teladan yang baik dari pihak lain; dalam hal ini cerita tentang orang Samaria yang baik hati (Lukas 10: 25-37) dan kisah seorang perwira di Kapernaum (Lukas 7:1-10) di mana Yesus menunjukkan kekaguman-Nya dan memberikan pujian kepada orang yang disebut kafir oleh masyarakat Yahudi pada masa itu karena jiwa toleransi kemasyarakatan dan kepedulian si perwira terhadap nasib budak/hambanya.

Kata Yesus: "*Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah Aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel!*". (Lukas 7:9). Ayat lain yang menunjukkan keterbukaan dan penerimaan Yesus terhadap orang bukan Yahudi (Matius: Kanaan; Markus: Siro-Fenisia/Yunani) juga tercatat dalam Matius 15:21-28//Markus 7:24-30. Kerendahan hati, kebesaran jiwa dan kesadaran diri si ibu dalam kisah itu mendorong Yesus mengucapkan perkataan ini: "*Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kaukehendaki.*" (Matius 15:27). Jadi di samping penerimaan terhadap pluralitas, penerimaan itu—dalam pandangan Yesus—harus bermanfaat dan menjadi berkat, membawa damai sejahtera bagi semua pihak.

Iman memiliki dua rentang dimensi: vertikal dan horisontal, eksklusif dan inklusif. Berdasarkan pandangan, sikap dan perbuatan Yesus sebagaimana terdapat dalam Alkitab-PB dapat dikatakan pada akhirnya bahwa beriman itu adalah soal percaya penuh kepada Allah di dalam dan melalui anak-Nya, Yesus Kristus (vertikal-

eksklusif/partikular) dan menerima serta mengasihi sesama yang berbeda keyakinan (horisontal-inklusif). Dasar dari sikap inklusif berhadapan dengan realitas plural adalah kasih Allah yang bersifat universal (Yohanes 3:16).

D. Pendidikan Agama Kristen Yang Memuat Nilai-Nilai Pluralisme, Multikulturalisme Dan Toleransi Beragama

Pendidikan Agama Kristen (PAK) yang konvensional yang lebih menekankan kesalahan pribadi dan relasi terbatas dengan orang lain, terutama yang berbeda agama, sudah tidak relevan jika dihadapkan dengan realitas kemajemukan dan situasi kekinian di negeri kita yang kerap diwarnai potensi konflik, bahkan konflik itu sendiri. PAK bermuatan nilai-nilai pluralisme, multikulturalisme dan toleransi agama adalah mutlak, bukan bersifat pilihan. PAK yang berwawasan pluralistik-multikultural adalah model pendidikan agama alternatif yang mengusung pendekatan dialogis untuk untuk menanamkan kesadaran hidup bersama dalam keragaman dan perbedaan sehingga menghasilkan individu-individu yang berjiwa toleran terhadap sesamanya manusia dan alam lingkungan sekitarnya.

Titik tolak PAK yang demikian itu adalah prinsip kasih yang universal sebagaimana diajarkan Yesus dalam Injil Matius 22: 37-40,

"Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah: Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi."

Kasih kepada Allah meliputi: (a) kesetiaan dan keterikatan kita kepada-Nya; (b) iman kita sebagai sarana pengikat yang kokoh dengan Dia; (c) kesetiaan dalam wujud penyerahan diri kita kepada-Nya; (d) ketaatan yang sungguh-sungguh, yang dinyatakan dalam pengabdian kita sesuai

standar kebenaran-Nya di tengah-tengah dunia yang menolak Allah; dan(e) kerinduan kita akan kehadiran dan persekutuan-Nya. Sedangkan kasih kepada sesama manusia, yang sama bobot dan terkait dengan yang pertama, adalah kasih yang bersumber dari Allah yang kita nyatakan kepada sesama manusia secara universal tanpa pamrih dan tanpa membedakan latar belakang.

Bagaimana integrasi dan implementasi nilai-nilai pluralisme, multikulturalisme dan toleransi itu ke dalam PAK? Pendidikan pluralistik-multikultural adalah pendidikan yang “memanusiakan manusia”, pendidikan yang mengajarkan kesetaraan, penghargaan atas derajat kemanusiaan dari latar belakang agama, etnis, suku dan budaya yang berbeda. Supardan (2019) mengatakan sedikitnya ada tiga tujuan inti pendidikan multikultural, yakni perubahan diri (self transformation), perubahan sekolah dan pendidikan (schools and education transformation), perubahan masyarakat (social transformation). Sementara Banks & Banks (2010) menjelaskan adanya lima dimensi yang harus masuk ke dalam implementasi pendidikan multikultural, yakni: integrasi isi (content integration), konstruksi pengetahuan (knowledge construction), pedagogi keadilan berdasarkan prinsip kesetaraan (equity pedagogy), pengurangan prasangka (prejudice reduction), and pemberdayaan kultur sekolah (empowering school culture). Burnett (1994) mengusulkan tiga model (typology) dalam pendidikan multikultural, yakni program yang berorientasi pada konten (content-oriented programs), program yang berorientasi pada siswa (student-oriented programs) dan program yang berorientasi pada masyarakat (socially-oriented programs). Selanjutnya Baidhawiy (2005) mengatakan ada sejumlah nilai atau karakteristik utama yang perlu diintegrasikan ke dalam isi kurikulum pendidikan agama yang pluralistik-multikultural, yakni belajar hidup dalam perbedaan, membangun rasa saling percaya, saling memahami, saling menghargai, terbuka dalam berpikir, apresiasi dan interdependensi, resolusi konflik dan rekonsiliasi nirkekerasan.

Berdasarkan pandangan para pakar di atas maka PAK yang berwawasan pluralisme, multikulturalisme dan toleransi agama kiranya dapat dikembangkan dengan sejumlah pendekatan atau cara. Beberapa contoh cara penerapannya dari penelitian para ahli adalah sebagai berikut;

Dalam konteks sekolah, Simmons & Bearden (1998) menawarkan contoh yang sangat baik tentang bagaimana kehidupan sehari-hari siswa dapat dihubungkan dengan kurikulum ilmu sosial. Misalnya materi PAK dengan topik menghargai atau mengasihi sesama, dapat disampaikan dengan tugas proyek. Siswa diminta membentuk kelompok dengan anggota yang tidak homogen, tetapi heterogen, dari latar belakang yang berbeda. Mereka diminta untuk mewawancari keluarga, om dan tante mereka, atau tetangga dekat mereka yang berbeda agama. Mereka diminta untuk menemukan poin-poin positif apa saja yang ada dalam kehidupan keluarga mereka, misalnya: bagaimana mereka mengatasi konflik-konflik berlatar perbedaan di antara anggota keluarga. Kemudian mereka diminta membuat laporan yang bersifat reflektif dari perspektif iman dan mempresentasikan di kelas.

Yang kedua adalah berdasarkan hasil riset Butler (1998), yang bersifat kualitatif. Ia melakukan uji coba terhadap murid-murid kelas 2 SD dengan meminta siswa merefleksikan pengalaman hidup mereka dengan bahasa mereka sendiri tentang kekuasaan, keadilan, kesetaraan, penghargaan, daya tahan, penindasan dan perubahan, kemudian kisah yang mereka ceritakan itu dianalisis dan diambil hikmahnya oleh siswa-siswa lainnya. Untuk mengetahui apakah kisah mereka ini real atau fiksi, konfirmasi bisa didapat dari siswa itu sendiri, orangtua atau kerabat yang mengantar jemput mereka. Dalam konteks pembelajaran PAK yang pluralistik-multikultural maka siswa dari kelas yang lebih tinggi di Indonesia dapat diminta bersaksi atau menceritakan pengalaman hidup mereka terkait masalah-masalah misalnya ketidakadilan, diskriminasi atau bullying yang mereka hadapi. Kemudian siswa lainnya di kelas

diminta untuk melakukan proses refleksi teologis ke dalam analisa kasus yang disampaikan oleh teman mereka yang bersaksi. Hasilnya dapat didiskusikan dalam kelompok kecil dan dipresentasikan di kelas.

Yang ketiga adalah berdasarkan penelitian Goodman (1996). Ia meneliti hubungan masyarakat dan budaya. Dalam tesisnya, Goodman melihat pengetahuan itu ibarat media massa yang berpengaruh besar terhadap pemikiran seorang siswa. Karena itu siswa harus dididik untuk berpikir kritis. Goodman mengilustrasikan kehidupan anak-anak itu sendiri sebagai "teks utama". Jadi yang terpenting adalah bagaimana siswa harus membaca "teks utama" itu dan merefleksikannya secara kritis dalam rangka hidup bersama dengan orang lain yang berbeda dengan mereka. Dalam hal ini Goodman melihat terdapatnya hubungan yang saling mempengaruhi antara sekolah dan masyarakat. Dalam konteks PAK, maka PAK melalui aktivitas belajar idealnya menjadi medium (jembatan) yang menolong siswa dalam hal penguatan dan pengayaan nilai-nilai hidup yang menjunjung tinggi perjuangan pluralisme, multikulturalisme dan toleransi beragama. Siswa harus dilatih agar dapat berperan seperti media massa bagi masyarakat. Siswa harus sadar akan adanya masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan dalam masyarakat. Inilah titik awal untuk merefleksikannya secara kritis dan menerjemahkannya dalam praksis kehidupan sosial.

Yang keempat adalah penelitian Marri (2005) yang berfokus pada pengembangan rasa hormat guru terhadap pengalaman siswa untuk membantumembangun kepekaan mereka dalam hidup bermasyarakat, membantu siswa belajar lebih kenal dan akrab dengan berbagai budaya, kelompok etnis, dan kelompok ras melalui pendidikan multikultural yang demokratis. Para guru dalam penelitian ini diminta untuk sering menggunakan pendekatan kerjasama kelompok di mana para siswa dapat saling belajar dari perbedaan-perbedaan yang ada di antara mereka. Dalam konteks pembelajaran PAK, pendekatan ini dapat diwujudkan dengan pembahasan tematik

tentang isu-isu kemiskinan yang dikaitkan dengan kepedulian Allah, diskriminasi gender yang dikaitkan dengan kisah dan tujuan penciptaan, ujaran kebencian (hate speech) yang dikaitkan dengan perintah Tuhan untuk saling mengasihi, diskriminasi agama dan lain-lain dalam kelompok-kelompok kecil. Diskusi terbuka dengan iklim demokratis yang diciptakan kiranya membawa siswa ke dalam suasana toleransi di mana para siswa dapat saling berinteraksi dan bekerjasama dengan saling menghormati dan menghargai satu sama lain.

BAB IX

KONSEP-KONSEP HINDU DALAM MEMBANGUN MULTIKULTURALISME

A. Pendahuluan

Agama sesungguhnya dimaksudkan sebagai panduan moralitas manusia, dan dengan itu mereka akan menemukan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaannya. Kesadaran beragama diharapkan dapat membangkitkan kesadaran tentang betapa penting dan bernilainya kehadiran orang lain yang mungkin memiliki perbedaan dan keunikan tersendiri. Kesadaran tentang pentingnya kehadiran orang lain sehingga memberikan peluang bagi eksistensi diri serta tumbuhnya kesantunan individu dan kesalehan sosial menjadi tujuan pendidikan agama.

Pendidikan agama dipandang sebagai agen perubahan yang membantu manusia untuk menemukan citra dirinya sebagai manusia beradab. Dengan pendidikan agama manusia diharapkan mampu menggali segala potensi kemanusiaannya hingga bisa menumbuhkan kesadaran diri tentang betapa luhurnya nilai kemanusiaan itu. Kesadaran ini penting artinya dalam masyarakat Indonesia yang multikultur.

Namun dalam kenyataannya, ternyata agama disinyalir telah menjadi pemicu terjadinya konflik dan kekerasan dalam masyarakat Indonesia belakangan ini. Ketulusan pengabdian pada Tuhan, sering membuat manusia tidak peduli pada dirinya sendiri dan nasib sesamanya. Demi Tuhan, manusia seolah dituntut mengorbankan diri dan hidup orang lain. Pemahaman yang dangkal dan keliru telah membuat agama dan Tuhan sebagai pemicu terjadinya berbagai kekerasan dalam masyarakat. Ironis, ketika kebenaran yang demikian diyakini sebagai kebenaran yang suci dan mutlak (Mulkhan,2005).

Agama semakin menunjukkan wajah janusnya; di satu sisi ia menjadi sumber nilai manusia dalam menjalani hidup, mengabarkan kedamaian, moralitas, persaudaraan, kesalehan

sosial, dengan mengakui keberadaan Tuhan sebagai yang absolut, namun di sisi lain atas nama agama, manusia bisa berperilaku bengis, penuh kebencian, sampai berujung pada pembantaian, pembunuhan massal, dan terkebirnya nilai-nilai kemanusiaan. Setidaknya, paradoks ini sedang terjadi di republik ini. Seseorang bisa saling memaki, membunuh, menstigmatisasi buruk, hanya gara-gara berbeda kepercayaan. “Agama lain adalah neraka,” begitu logika mereka. Dan mereka menganggap membunuh agama lain adalah surga!

Dalam situasi seperti ini, dunia pendidikan kita sedang gencar bicara soal pendidikan karakter. Menariknya, agama menjadi salah satu sumber acuan pendidikan karakter tersebut. Pertanyaan sederhana muncul, pendidikan karakter seperti apa yang dimaksud dan diberikan oleh agama dalam situasi ketegangan agama seperti ini?

Apalagi jika agama melulu diajarkan secara eksklusif bukan inklusif. Kotbah agama yang digelar di tempat suci secara eksklusif, termasuk di dalam ruang kelas, sekonyong-konyong dengan materi-materi agama yang justru mempertajam imaji kebencian umat beragama, hanya akan melonggarkan disparitas ‘aku’ dan ‘bukan aku’, menganggap agama lain sebagai sesuatu yang ‘liyan’. Pada titik ini, penganut agama malah akan bersikap intoleran terhadap sesamanya.

Tugas pendidikan agama, khususnya pendidikan agama Hindu, di sini memang cukup berat. Ia harus mampu mengatasi problem fundamentalis tersebut, membuka cakrawala baru pendidikan agama yang menghargai nilai-nilai kemanusiaan, toleransi, hidup bersama, kedamaian dunia, menjadi sumber nilai yang universal dan memberi ‘nutrisi’ segar dalam menghadapi kemajuan zaman.

Di sini agama menjadi penting menunjukkan sifat yang kontekstual, ia tidak lagi berada dalam ruang pengap yang tertutup, ia harus hadir untuk menjawab persoalan dunia, persoalan kemanusiaan, dengan tetap mengedepankan nilai-nilai spiritualitas – sesuai dengan tujuan pendidikan dalam

pandangan Hindu. Seperti kata Hans Kung dalam buku Etik Global (1999), mustahil muncul perdamaian dunia, jika tidak didahului dengan perdamaian antar agama. Maka cukup jelas, pendidikan agama sangat berperan dalam membangun perdamaian tersebut dengan menyelipkan nilai-nilai agama yang universal.

Berangkat dari kondisi tersebut di atas maka harus diupayakan membangun paradigma baru dalam pendidikan agama yang diharapkan mampu membangun semangat multikulturalisme di Indonesia; tentu saja melalui penggalian konsep-konsep keagamaan yang bisa ditawarkan untuk itu.

B. Kerangka Pemikiran

Menurut Liliweri (2005) multikulturalisme bertautan dengan doktrin atau “isme” tentang penyadaran individu atau kelompok atas keberagaman kebudayaan, yang pada gilirannya mempunyai kemampuan untuk mendorong lahirnya sikap toleransi, dialog, kerjasama diantara beragam etnis dan ras. Dari paparan tersebut tercatat dua hal penting dari multikulturalisme yaitu (1) adanya proses penyadaran individu atau kelompok atas keberagaman kebudayaan; dengan tujuan (2) mendorong lahirnya sikap toleransi, dialog dan kerjasama diantara beragam etnis dan ras.

Hubungan dengan sesama harus dilihat sebagai interaksionisme yang memandang hubungan diri dengan “yang lain” secara dialektis. Pandangan ini menyangkal bahwa identitas tertentu sama artinya dengan sama sekali berbeda dari yang bukan penyandang identitas tersebut. Malahan pandangan ini menegaskan bahwa identitas diri sangat erat kaitannya dengan identitas “yang lain” (dan sebaliknya), bahwa diri maupun “yang lain” senantiasa berubah dan bahwa keduanya sama sekaligus berbeda. Interaksionisme meyakini bahwa pertukaran kultural maupun sosial tidak dan juga tidak harus menyebabkan penghapusan perbedaan atau

pelestariannya, tetapi akan melakukan tantangan diri, pembelajaran dan pertumbuhan yang terus menerus (Fay,2002).

Salah satu bentuk atau proses penyadaran individu atau kelompok atas keberagaman kebudayaan itu adalah melalui pendidikan agama. Penanaman nilai-nilai kemanusiaan melalui pendidikan agama diharapkan mampu menghasilkan manusia-manusia yang memiliki sikap toleransi. Ketika terjadi berbagai kerusuhan dan tindak kekerasan yang bernuansa agama maka disinyalir bahwa pendidikan agama telah gagal membentuk manusia yang memiliki kesalehan dan kesantunan sosial.

C. Paradigma Baru Dalam Pendidikan Agama

Ketidakberdayaan sistem pendidikan agama wajar dipertanyakan ketika pluralisme tidak dihargai banyak orang di Indonesia; ketika begitu banyak orang tega membunuh sesamanya hanya karena mereka menganut sistem keyakinan yang berbeda – untuk tidak menyebut berbeda agama- atau ketika orang dengan sangat mudah melakukan kekerasan hanya karena berbeda etnik dan sebagainya.

Pendidikan agama sebagai bagian penting dari pendidikan humaniora dipandang telah gagal karena hanya menstransfer pengetahuan agama kepada peserta didik namun kurang berhasil dalam menterjemahkan pengetahuan agama tersebut menjadi bekal untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan agama selama ini hanya sebatas mengajarkan ajaran agama secara skriptural (sesuai doktrin-doktrin dalam kitab sucinya) dan kurang kontekstual oleh karenanya kurang teraplikasikan dalam kehidupan nyata. Ajaran-ajaran agama yang termuat dalam kitab suci semestinya menjadi agama sosial yaitu internalisasi ajaran agama yang selanjutnya dipraktekkan dalam kehidupan nyata sebagai pedoman perilaku (O'Dea;1985; Nottingham,1985; Scharf,1995).

Kuatnya pengaruh kapitalisme juga dipandang sebagai penyebab kurang berhasilnya pendidikan agama di Indonesia. Sebagai fakta sejarah kapitalisme tidak mungkin dilepaskan dari kehidupan masyarakat termasuk dalam bidang agama.

Kapitalisme tak mungkin dihindari namun harus digiring menuju keseimbangan dan harmoni dengan alam melalui teologi kontekstual. Artinya pendidikan agama harus berusaha agar agama dapat tampil dalam performa yang menawan, yang secara fleksibel dapat menyediakan nilai-nilai yang berlaku dalam berbagai diferensiasi sosial.

Globalisasi telah menimbulkan semakin tingginya intensitas pergulatan antara nilai-nilai budaya lokal dan global. Sistem nilai lokal yang selama ini digunakan sebagai acuan pola laku tidak jarang mengalami transformasi. Proses globalisasi juga telah merambah wilayah kehidupan agama yang serba sakral menjadi sekuler, dapat menimbulkan ketegangan bagi umat beragama (Ardika,2005). Modernisasi pada level tertentu sesungguhnya menyebabkan merosotnya agama, baik dalam ranah masyarakat maupun ranah individu. Beberapa institusi keagamaan telah kehilangan kekuatan dan pengaruhnya dalam berbagai masyarakat, namun demikian baik keyakinan dan praktek-praktek keagamaan lama maupun baru terus berkembang dalam kehidupan individu, kadang membentuk suatu institusi baru serta mendorong begitu semaraknya semangat keagamaan. Dengan demikian modernisasi yang melahirkan masyarakat yang sangat beragam dan lonjakan quantum dalam komunikasi interkultural, dua faktor yang mendorong munculnya pluralisme dan bukan tegaknya (atau penegakan kembali) monopoli agama (Berger, 2003).

Menyoal pendidikan agama dalam masyarakat multikultur ada baiknya mencermati apa yang disampaikan oleh Durkheim bahwa agama hanya bisa dipahami dengan melihat peran sosial yang dimainkannya dalam menyatukan komunitas masyarakat (Turner,2003). Dengan kata lain bahwa pendidikan agama secara fungsional harus bisa mempersatukan masyarakat. Hal ini akan tercapai bila tumbuh kesadaran bahwa agama merupakan fenomena budaya yang otonom yang tidak bisa direduksi menjadi hanya sebatas

kepentingan ekonomi dan tuntutan politis dalam masyarakat multikultur.

D. Hindu dan Multikulturalisme

Triguna (2004) mengatakan bahwa salah satu ciri dinamika kebudayaan adalah integrasi dan disintegrasi. Integrasi digambarkan sebagai harmoni maksimal pada masing-masing unsur budaya. Sedangkan disintegrasi mengandung pengertian sebaliknya. Dalam kerangka ini dinamika kebudayaan bukan saja linier melainkan memiliki ritme. Pertama-tama berupa integrasi atau strukturasi, kemudian terjadi proses destrukturasi akibat ketidakmampuan kebudayaan menampung berbagai kebutuhan baru. Destrukturasi atau disintegrasi itu sendiri sekaligus dijadikan momentum untuk menghasilkan integrasi baru atau restrukturasi yang lebih luas. Disintegrasi itu sendiri merupakan keadaan *krisis*, namun dianggap sebagai suatu hal yang normal, karena dalam strategi kebudayaan itu sendiri diperlukan adanya ketahanan.

Ritme cepat globalisasi yang ditentukan oleh negara-negara adidaya pada gilirannya telah menimbulkan dikotomi baru dalam hubungan multilateral, yaitu negara *centrum* dan *periferi*. Negara-negara yang tidak mengikuti irama globalisasi secara 'global' dimasukkan ke dalam katagori negara 'primitif' dan ini merupakan lahan subur bagi sikap ketidakberumahan. Ujung dari rasa ketidakberumahan ini adalah pemutarbalikan nilai-nilai yang selama ini diintroduksikan melalui jaringan teknologi informasi oleh negara-negara centerum. Kegiatan pembalikan nilai-nilai oleh negara periferi diteranliterasikan oleh politikus menjadi kata teroris.

Akar dari paradoks globalisasi itu bertalian dengan pandangan tentang ilmu pengetahuan dan teknologi yang berasal dari paradigma kebudayaan Barat. Revolusi dalam ilmu pengetahuan telah merintis jalan bagi suatu revolusi lainnya. Revolusi ilmu pengetahuan menjadi nyata ketika dinyatakan dalam aparatus teknologis produksi. Oleh karena itu, peranan

ilmu dalam produksi semakin besar. Jarak antara penemuan dengan menerapkan praktis, yaitu penggunaanya dalam industri semakin kurang.

Salah satu keberhasilan penyebaran kebudayaan Barat ialah meluasnya anggapan bahwa ilmu dan teknologi yang berkembang di Barat merupakan suatu yang universal. Hal ini terlihat dalam beberapa gejala. Pada satu pihak, timbul skeptisisme terhadap masyarakat, sementara di pihak lain timbul antusiasme terhadap ilmu dan teknologi Barat secara signifikan. Fenomena ini telah membawa implikasi bahwa ilmu dan teknologi [yang dihasilkan dunia Barat] bersifat universal. Celakanya, hal ini merupakan bentuk internalisasi masyarakat Timur dan Indonesia untuk menerima cara produksi dominan. Pada sisi inilah globalisasi telah merasuki berbagai sistem nilai sosial dan budaya Timur [termasuk Indonesia] sehingga terbuka pula konflik nilai antara teknologi dan nilai-nilai ketimuran.

Gencarnya serbuan teknologi disertai nilai-nilai interinsik yang diberlakukan di dalamnya, telah menimbulkan isu mengenai globalisasi dan pada akhirnya menimbulkan nilai baru tentang kesatuan dunia. Radhakrishnan dalam bukunya *Eastern Religion and Western Thought* (1924) menyatakan “untuk pertama kalinya dalam sejarah umat manusia, kesadaran akan kesatuan dunia telah menghentak kita, entah suka atau tidak, Timur dan Barat telah menyatu dan tidak pernah lagi terpisah. Kedekatan spasial telah membuka jalan bagi terjalinnnya suatu kedekatan spiritual dan saling menukar warisan pemikiran dan emajinasi. Jika terlalu terpaku pada sejarah masa lampau Eropa atau Asia saja, manusia tidak akan memperoleh pencerahan. Pemikiran dan pengalaman sebagian besar manusia tidak bisa diabaikan tanpa resiko tertentu. Jika hendak memperbaiki kedangkalan yang timbul akibat keasyikan sepihak dan eksklusif, entah itu dengan pemikiran Timur atau pemikiran Barat, jika memperkuat kehidupan batin dengan martabat dari suatu pengalaman yang lebih sempurna dan universal, maka perlu ada kesadaran untuk memahami

budaya-budaya satu sama lain, dengan tidak harus mendominasi di antara yang lainnya.

Pandangan Radhakrishnan itu sesungguhnya mengandung kritik internal bagi pemikir agama 'tradisionalis'. "Kita seringkali berbangga bila berhasil menghilangkan sama sekali pengaruh luar, karena sesungguhnya kemajuan spiritual atau ilmiah yang dicapai setiap kelompok keluarga manusia bukan digunakan untuk dirinya semata, tetapi untuk semua umat manusia. Di samping itu tidak ada kekuasaan yang dimiliki oleh suatu ras manusia atas ras lainnya. Yang membedakan di antara keduanya adalah masalah kadar. Sebut saja, mitisisme India kuno atau rasionalisme Eropa modern hanyalah suatu perkembangan yang memiliki ritmenya sendiri. Artinya, isu mengenai penyatuan budaya adalah suatu keniscayaan dan keinginan suatu negara mendominasi, apalagi menjajah juga suatu keniscayaan. Pandangan Radhakrishnan mengenai pendidikan terletak pada tujuannya dalam mempertemukan pendidikan spiritual dan sosial untuk merekonstruksi sebuah masyarakat ideal di mana orang-orangnya bebas dari kebodohan dan tabiat buruk. Pendidikan spiritual tidak meniadakan aspirasi sosial, namun ia menandakan cita-cita duniawi. Tujuan tertinggi dari pendidikan spiritual adalah *moksa*, namun ini mesti dicapai di dunia ini, bukan di akhirat kelak. Tujuan dari pendidikan spiritual adalah memanunggalkan jasmani dan ruhani. Dengan begitulah kehidupan akan damai dengan sendirinya. Sementara itu, secara sosial, fungsi dari pendidikan sejati adalah meredakan perselisihan dan kekasaran sosial yang lain. Ia dapat membebaskan masyarakat dari semua kebodohan yang tidak manusiawi ini; pendidikan harus ditanamkan dalam-dalam untuk mengetahui watak dan tujuan masyarakat, ikatan ekonomi dan slogan politik saja tidak bisa menutup kesenjangan antar masyarakat.

Jika demikian, bagaimana suatu bangsa menyusun strategi kebudayaan agar ketahanan budaya tidak mengalami disharmoni dan diorientasi ?

Untuk memasuki inti suatu peradaban, diperlukan usaha yang sistematis dan terencana, terutama dalam mempelajari ide-ide tersembunyi dari gagasan-gagasan religiusnya. Sejak awal agama telah menjadi penopang budaya manusia. Agama adalah pencapaian agung dari pengalaman menakjubkan umat manusia. Ia adalah bentuk kehidupan terdalam yang merefleksikan tahap-tahap berbeda, kompleks dan saling bertentangan dari kehidupan manusia. Oleh karena itu, "tatanan dunia baru harus memiliki dorongan spiritual untuk memberikan kesantunan dan landasan rasional bagi program sosial". Munculnya berbagai problem sosial, kekerasan, dan lahirnya berbagai sekte spiritual di tengah-tengah produk modernitas menunjukkan adanya kebutuhan spiritual dalam diri manusia yang belum terpenuhi. Spiritualitas tidak hanya dapat dipenuhi dengan keberhasilan duniawi dan atau pencapaian ilmu pengetahuan materialis. Dalam memenuhi spiritualitas, manusia menciptakan ideal-ideal dan untuk itu ia bersedia berjuang dan berkorban melalui doa dan pemujaan.

Doa dan pemujaan dalam bentuk ritual merupakan usaha manusia terbesar untuk mencapai sifat kedewataan. Agama adalah disiplin yang menyentuh suara hati dan membantu berjuang untuk melawan kekuatan gelap (*butha*), kenistaan (*nista*), menyelamatkan manusia dari ketamakan (*tamas*), nafsu (*kama*) dan kebencian (*dvesa*) serta memberikan kekuatan moral (*susila*) dan keberanian dalam usaha menyelamatkan dunia (*dira purusa*). Sebagai disiplin pikiran, agama memiliki alat-alat penting dan utama untuk mengatasi kejahatan yang mengancam eksistensi dunia yang beradab. Ia mengimplikasikan penyerahan pikiran dan tindakan kepada kebenaran-kebenaran *Pararatman*.

Dalam kenyataannya selama ini agama yang diharapkan memberikan solusi, ternyata telah mengalami reduksi fatal. Dogma yang dahulu merupakan jalan menuju kedewataan, sekarang justru menjadi penghambat, malahan agama dimaknai sebagai penghalang antara manusia dengan Tuhan dan telah merusak simplisitas pokok kehidupan spiritual.

Agama harus dimaknai sebagai kekuatan penyatu yang memperkuat solidaritas masyarakat Indonesia, meskipun terdapat kelemahan-kelemahan pada historisnya. Agama merupakan panggilan menuju petualangan spiritual. Ia bukan teologi, tetapi praktek dan disiplin. Hakikat agama bukan hanya berhenti pada dogma dan kredo dalam ritus dan upacara, tetapi berupa kebijaksanaan paling dalam dari segala jaman, *sanatana dharma*.

Ketidakhadiran spirit spiritualitas dalam kehidupan sosial politik telah menghasilkan sikap tirani pemegang kekuasaan serta tersudutnya kelompok minoritas sehingga dinamika kebudayaan yang lahir dari sistem politik demokratis menjadi mandeg. Padahal tujuan demokrasi adalah kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Artinya, semua individu apapun ras dan agamanya harus diterima ke dalam masyarakat politik semata-mata berdasarkan ke-manusia-an mereka. Setiap anggota individu dewasa memiliki hak atas suatu pangsa yang setara. Ketika menyatakan 'semua manusia setara atau semua negara setara' yang dimaksud adalah semua manusia atau negara adalah pusat dari nilai absolut. Tindakan yang lahir dari sikap bahwa manusia atau negara tertentu saja memiliki nilai absolut sementara manusia atau negara lain hanya memiliki nilai instrumental, sebagai alat untuk memenuhi tujuan kita, seharusnya tidak perlu terjadi lagi. Sebuah negara demokrasi akan menjadi sebuah negara ademokratis jika tetap melakukan penindasan terhadap minoritas dan opini minoritas. Jika suatu minoritas ditindas atau dibungkam, maka demokrasi menjadi sebuah tirani.

Spiritualitas merupakan etos bagi kehidupan sosial budaya Indonesia. Spiritualitas ini merupakan ketahanan utama dalam menyongsong era globalisasi. Dalam semangat spiritualitas, tidak ada ruang sedikitpun bagi manusia untuk menjadi Tuhan [*playing God*], menentukan dan mempermainkan jiwa manusia lain. Tugas manusia yang beragama adalah melaksanakan *yadnya* dan menciptakan visi kesejahteraan bersama dalam terminologi *brotherhood* bukan

kinship. Oleh karena visi tentang kesejahteraan umat manusia adalah satu visi yang muncul secara alami, maka tidak ada kewajiban bagi manusia untuk menyebarkannya dengan cara paksa apalagi dengan cara menjajah dalam bentuk baru.

Beberapa konsep Hindu dapat ditawarkan pada kesempatan ini dalam upaya membangun multikulturalisme. Beberapa sloka yang mengacu kepada semangat multikulturalisme adalah sebagai berikut:

Dalam ajaran Hindu terdapat konsep *wasudewa kuthumbhakam* yang artinya kita semua bersaudara. Jika direnungkan konsep ini mengandung ajaran dan pemikiran yang sangat mendalam. Kita semua bersaudara, jika ini bias menjadi pegangan bersama di antara kita umat manusia maka sesungguhnya kita bias hidup berdampingan secara damai.

Yajur Weda 36.17

“Damai di surga, damai di angkasa, damai di bumi, damai di air, damai dalam semua tumbuh-bumbuhan, damai atas pohon-pohon, damai bagi semua dewa, damailah dalam Tuhan. Semoga kedamaian seperti itu hamba peroleh”.

Kalau dihayati seloka tersebut di atas, pada hakikatnya manusia mendambakan kedamaian dalam segala aspek kehidupannya. Kedamaian dalam segala aspek kehidupannya. Kedamaian akan terwujud bila kerukuna dapat terbina dalam masyarakat. Masalahnya tidaklah gampang mewujudkan kerukunan dan kedamaian itu.

Dalam membangun multikulturalisme introspeksi diri menjadi sangat penting artinya. Menurut ajaran agama Hindu ada enam musuh dalam diri manusia yang harus dikendalikan yang disebut Sad Ripu (Sad = enam, Ripu = musuh) yang terdiri dari Kama, Lobha, Krodha, Mada, Moha dan Matsarya. Keenamnya merupakan musuh dalam upaya menciptakan kerukunan dan kedamaian. Keenamnya itu bersumber pada pikiran , karena itu bila ingin mengendalikan pikiran. Pikiranlah yang paling utama, sebab pikiranlah yang

menentukan segalanya, mau ribut, bertengkar atau mau hidup rukun.

Sarasamuccaya sloka 79 menyebutkan:

“maka kesimpulannya pikirkanlah yang merupakan unsur yang menentukan. Jika penentuan perasaan hati telah terjadi, maka mulailah orang berkata atau mulai berbuat oleh karena itu pikirkanlah yang menjadi pokok sumbernya”.

Selanjutnya dalam Katha Upanisad I 3 terdapat pengandaian sebagai berikut:

“ Ketahuilah bahwa sang pribadi adalah Tuannya kereta
Badan adalah kereta, Ketahuilah bahwa kebijaksanaan itu adalah kusir, dan pikiran adalah tali kekangnya.”

Dari dua kutipan di atas jelas bahwa bila manusia menghendaki terciptanya kerukunan dan keharmonisan antarumat demi semangat multikulturalisme, terlebih dahulu ia harus mampu mengendalikan pikirannya ke arah kebaikan bersama, serta menghindari hal-hal-hal yang dapat menimbulkan konflik sebab segala bersumber pada pikiran. Khusus menyangkut tentang kerukunan. Atharwa Weda Kanda 3 sukta 30 menyebutkan :

1. Dengan doa ini, saya jalin dan mantapkan kerukunan, yang terwarnai dengan ketulusan hati, kemantapan pikiran, dan dijauhkan dair suasana permusuhan, antara saya dengan Anda. Tentukanlah Anda juga menanggapi dengan penuh cinta kasih, satu terhadap yang lainnya, seperti hubungan tak terpisahkan antara sapi dengan anak yang baru dilahirkan.
2. Semoga hubungan saya dengan Anda berkeadaan seperti antara dengan ayahandanya, seperti ibu dengan anaknya, seperti istri dengan suaminya, yang ke semuanya itu terwarnai oleh kata-kata semanis madu dengan hati yang tulus dan penuh cinta kasih.

3. Dengan doa ini semoga sesama saudara tidak berselisih, dan karena satu dengan yang lainnya berkeadaan rukun, maka kata-kata yang diucapkan saling merupakan berkah yang satu terhadap yang lainnya.
4. Semoga doa ini dapat mendatangkan kebajikan, sehingga para Dewa pun rukun yang satu terhadap yang lainnya. Demikian juga semoga doa ini juga dapat menciptakan suasana rukun dan damai di antara para anggota keluarga di rumah ini.
5. Superioritas kalian makin meningkat, kejayaan kalian tercapai, karena kalian tidak terpecah belah. Kalian telah menyelesaikan tugas secara berama-sama. Kalian telah bergerak dan menggerakkan segala sesuatu secara bersama-sama dengan doa ini, semoga kalian mau datang kemari dan berkeadaan seja sekata, serta semoga kerukunan kalian makin mantap.
6. Tempat kalian minum adalah satu, tempat kalian makan pun adalah satu; kalian saya tempatkan di dalam satu teman kerja. Pujalah Dewa Agni, agar kalian dapat disatupadukan, seperti jari-jari roda yang disatukan pada titik asnya.
7. Dengan doa ini saya rujukkan dan saya persatukan kalian, seperti pisang-pisang dalam satu sisir yang sama. Dengan selalu rukun itu, cepat atau lambat Tuhan Yang Maha Esa akan menganugrahi kekuatan kepada kalian, sekuat Tuhan mempertahankan Amerta-Nya.

Kitab Reg Weda X. 191. 2.3.4 juga memberikan petunjuk demi terciptanya semangat multikulturalisme, sebagai berikut :

1. Berkumpullah, bermusyawarahlah bicara satu dengan yang lain, satukan pikiranmu Laksana Dewa-dewa dahulu kala, bersatu, bersama-sama dalam persembahan.
2. Semoga tujuanmu sama, musyawarahmu sama (mufakat).
Samalah pikiran dan kehendak dalam persatuan itu. Tujuan yang sama yang telah Kugariskan kepadamu.
3. Pikiranmu satu dan dengan demikian kamu dapat hidup bersama dengan bahagia.

Di samping sloka-sloka tersebut di atas banyak lagi ajaran agama Hindu yang mengacu pada semangat membangun multikulturalisme. Beberapa di antaranya adalah;

1. Tat Twam Asi

Secara harfiah Tat Twam Asi berarti Itu adalah kamu. Tat Twam Asi mengajarkan suatu ajaran kesusilaan sebagai sikap budi pekerti yang luhur bagi manusia agar gemar menolong orang lain yang memerlukan pertolongan. Ajaran ini juga mengajarkan bahwa penderitaan yang dialami oleh orang lain juga merupakan bagian dari derita yang kita alami, dan juga kebahagiaan dan kesentosaan yang dinikmati oleh orang lain pun memberi kebahagiaan tersendiri pada diri kita sendiri. Dengan menghayati ajaran ini kita akan dibimbing untuk selalu berusaha membahagiakan. Menolong serta membantu orang lain yang sedang mengalami penderitaan. Sikap tenggang rasa, tolong-menolong dan gotong royong adalah sikap-sikap yang perlu dikembangkan guna terciptanya multikulturalisme dalam masyarakat.

2. Tri Kaya Parisudha

Tri Kaya Parisudha bila diartikan secara harfiah berarti tiga anggota badan yang telah disucikan, meliputi:

- a. Kayika parisudha
- b. Wacika parisudha
- c. Manacika parisudha

Kayika Parisudha adalah segala perilaku yang berhubungan dengan badan yang telah disucikan, wacika parisudha adalah berkata yang baik dan benar dan Manacika parisudha adalah pikiran yang baik dan benar. Inilah yang diperintahkan oleh ajaran agama Hindu untuk dilaksanakan dalam hidup ini, untuk mendapat kerahayuan untuk diri sendiri maupun untuk orang lain.

3. Yama dan Niyama Brata

Ajaran ini merupakan ajaran tentang pengendalian diri pada tingkat yang lebih tinggi. Pada tingkat awal (Yama) aplikasinya lebih banyak diarahkan /dipraktekkan sebagai sedoman tingkah laku bermasyarakat. Selanjutnya pada Niyama lebih ditingkatkan lagi sebagai persiapan untuk mengadakan hubungan dengan Hyang Widhi Wasa.

Demikianlah beberapa konsep ajaran agama Hindu yang mengajarkan umatnya untuk selalu mengembangkan tata susila dalam kehidupan sehari-hari guna terciptanya hubungan yang harmonis di antara sesama makhluk ciptaan Tuhan.

BAB X

NILAI-NILAI PENDIDIKAN BUDDHA BERBASIS MULTIKULTURAL

A. Pengantar

Indonesia merupakan bangsa yang majemuk dengan berbagai macam suku, ras, etnis, agama dan budaya. Keberagaman itulah yang menjadi identitas bangsa Indonesia. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila adalah konsensus dasar yang mengikat persatuan dan kesatuan Negara Republik Indonesia.

Bangsa Indonesia selalu diingatkan agar dapat hidup berdampingan secara damai dalam masyarakat yang beraneka suku bangsa, agama, ras, dan antar golongan. Pentingnya mengerti perbedaan SARA, menghayati, dan melaksanakan konsensus dasar itu untuk kehidupan bersama demi terciptanya persatuan dan kesatuan dalam perbedaan. Ini merupakan bentuk sosialisasi nilai yang terkandung dalam multikulturalisme.

Multikulturalisme secara sederhana dapat dikatakan pengakuan atas pluralisme budaya. Pluralisme budaya bukanlah suatu yang “given” tetapi merupakan suatu proses internalisasi nilai-nilai di dalam suatu komunitas. Tidak mengherankan apabila tokoh politik demokrasi dan pendidikan demokrasi, John Dewey, telah melahirkan karya besarnya mengenai hubungan antara demokrasi dan pendidikan (Tilaar, 2004: 1790)

Sikap saling menghargai, toleransi, mampu hidup bersama dalam keragaman adalah tujuan dari multikulturalisme, yang dapat dimiliki setiap insan melalui pendidikan, yang dikenal dengan pendidikan multikultural.

B. Maklumat Raja Asoka

Asokavadana -- seorang pangeran kejam yang luar biasa kejam dan brutal yang membunuh saudara-saudaranya dalam

perebutan tahta yang setelah memeluk agama Buddha dan bertransformasi drastis menjadi rajaarif-bijaksana yang pernah memerintah India pada jaman lampau.

Raja Asoka diyakini lahir sekitar tahun 304 SM. dan menjadi raja ke tiga dari dinasti *Maurya* sepeninggal ayahnya, *Bindusara*. Nama asli Beliau adalah Asoka, namun Beliau mengambil gelar *Devanampiya Piyadasi* yang berarti '*Yang-dicintai-oleh-para Dewa, Ia yang memandang dengan penuh cinta kasih*'. Nampaknya kemudian telah terjadi perang perebutan kekuasaan selama dua tahun, di mana setidaknya salah seorang saudara laki-laki Asoka terbunuh. Pada tahun 262 SM., delapan tahun setelah penobatannya sebagai raja, prajurit Asoka menyerang dan menaklukkan Kalinga. Korban jiwa, penderitaan dan kekacauan yang ditimbulkan dari perang tersebut sangatlah memukul Asoka dan membawa perubahan besar dalam kepribadiannya.

Sebetulnya Asoka menjadi penganut Buddha setidaknya 2 (dua) tahun sebelum perang Kalinga terjadi tetapi hanya setengah hati saja dan ada yang menyebutkan bahwa terdapat motif politik di balik hal itu. Namun sehabis masa perang Kalinga tersebut, Asoka sungguh-sungguh membaktikan seluruh sisa hidupnya mempelajari dan menerapkan nilai-nilai Buddhis dalam kehidupan kerajaannya. Beliau memegang peran penting dalam menyebarluaskan ajaran Buddha ke seluruh pelosok India dan dunia, yaitu dengan membangun monumen-monumen besar Buddhis dimana diyakini Buddha pernah beraktivitas di tempat itu. Asoka wafat pada tahun 232 SM., di tahun ke 38 di masa pemerintahannya.

Maklumat Asoka terpahat di pilar dengan tinggi rata-rata antara 40-50 kaki dengan berat hingga lima puluh ton masing-masingnya, semua pilar tersebut diambil dari *Varanasi* dan diangkut hingga ratusan mil ke tempat di mana mereka diletakkan misalnya pilar *Lumbini*, menandakan tempat kelahiran Buddha, dan isi maklumat pada pilarnya menunjukkan ziarah Raja Asoka ke tempat tersebut. Setiap pilar awalnya ditandai oleh sebuah simbol kerajaan, terkadang

seekor singa, seekor sapi jantan suci dan kuda, dan beberapa simbol kerajaan yang dapat bertahan lama, dikenal luas sebagai benda seni termegah India. Baik pilar-pilar maupun benda sejarah tersebut yang tak terlupakan mampu bertahan selama berabad-abad meski mereka terpapar terhadap pelbagai perubahan alam.

Maklumat Asoka ditemukan terpecah di lebih dari tiga puluh tempat di seluruh pelosok India, Nepal, Pakistan, dan Afghanistan. Kebanyakan dari maklumat-maklumat ini ditulis dalam bahasa *Brahmi*, Bahasa Magadhi yang kemungkinan adalah Bahasa resmi kerajaan, Bahasa sansekerta, Bahasa Arab dan Yunani. Maklumat Asoka, yang diyakini sebagai naskah tertua India yang ditulis di atas batu atau pilar yang masih dapat bertahan dan diterjemahkan oleh ilmuwan seperti James Prinsep. Pilar-pilar ini menunjukkan kemajuan teknologi dan kesenian dari peradaban India kuno.

Maklumat Asoka tersebut nampak: ditulis dengan gaya-bahasa pribadi beliau sendiri. Isi maklumat ini memberikan gambaran unik kepribadian tokoh dan luarbiasa ini yang menceritakan hasil-hasil karya kebajikan yang telah dilakukannya dan meyakinkan pembacanya mengenai ketulusan hatinya. Asoka berkisah bahwa ia memandang rakyatnya bagaikan anak-anaknya sendiri, bahwa kesejahteraan mereka merupakan perhatian utamanya; Beliau meminta maaf atas perang Kalinga yang telah dilakukannya dan meyakinkan orang-orang di daerah perbatasan kerajaan bahwa ia tidak punya niatan untuk ekspansi terhadap mereka.

Ven. S. Dhammika dalam bukunya *Maklumat Raja Asoka* menyatakan bahwa Asoka memandang bahwa reformasi yang dilakukannya sebagai bagian dari kewajiban seorang umat Buddha. Tetapi, walau Beliau adalah seorang Buddhis yang sangat antusias, Beliau jelas: bukan seorang yang fanatik buta terhadap agamanya sendiri, juga bukan orang yang tidak toleran terhadap ajaran lainnya. Beliau kelihatan memiliki pengharapan yang tulus buat mengajak setiap orang untuk menerapkan ajaran yang dianutnya masing-masing dengan

kemantapan yang sama seperti sebagaimana Beliau mempraktikkan agamanya sendiri.

Dengan kata lain bahwa raja Asoka merupakan raja yang toleran, ia menghargai tumbuh kembang berbagai agama atau keyakinan masyarakatnya. Konsep toleransi Raja Ashoka dapat ditemukan dalam Maklumat Raja Ashoka, yang ditulis pada pilar-pilar batu. Dalam maklumat Empat Belas Batu disebutkan bahwa setiap agama dapat berkembang dimana saja, maklumat tersebut selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Yang-dicintai-oleh-para-Dewa, Raja Piyadasi, berhasrat bahwa semua ajaran agama dapat berkembang di mana saja, bagi semuanya berhasrat untuk mengendalikan diri dan menjaga kemurnian hati. Tetapi manusia memiliki berbagai macam hasrat dan nafsu keinginan, dan mereka boleh berlatih semua yang semestinya mereka latih atau cukup sebagian saja darinya. Tetapi seseorang yang memiliki kemampuan lebih namun tidak dapat mengendalikan dirinya, kurang memiliki kualitas hati, rasa-syukur dan bakti, adalah orang yang patut dikasihani. (Maklumat Batu ke 7).

Yang-dicintai-oleh-para-Dewa, Raja Piyadasi, menghargai baik para petapa maupun perumahtangga segala agama, dan Beliau memberi penghargaan kepada mereka dengan hadiah dan bentuk-bentuk penghargaan lainnya. Tetapi Yang-dicintai oleh para Dewa, Raja Piyadasi, tidak menghargai hadiah-hadiah dan penghormatan sebagaimana Beliau menghargai hal ini – bahwa musti ada tumbuh kembangnya esensi pokok ajaran setiap agama. Penumbuhkembangan esensi ajaran dapat dilakukan dengan beragam cara, tetapi semuanya pasti berakar pada terkendalinya ucapan, yakni: jangan membanggakan agamanya sendiri, jangan mencela ajaran agama orang lain tanpa alasan yang jelas. Dan jika memang ada alasan untuk mengkritik, haruslah dilakukan secara lembut. Dengan melakukan hal ini, akan memberi keuntungan bagi agama orang itu sendiri dan begitu pula bagi ajaran agama orang lain, dan berbuat yang sebaliknya bakal merugikan agama orang itu dan agama orang lainnya. Siapapun yang membanggakan ajaran agamanya sendiri, oleh karena keyakinan yang fanatik, dan menghina yang lain dengan

pemikiran 'Saya mengagungkan agama saya', hanya akan merugikan agamanya sendiri.

Dari maklumat Raja Asoka tersebut, mengajarkan bahwa kehidupan jaman modern seharusnya juga mengembangkan konsep toleransi seperti yang dicetuskan Raja Asoka. Sebaiknya tidak merasa superior, merasa paling benar dan besar serta menghambat perkembangan agama lain, tidak mencelanya, namun tetap mendukung dan menghargai agama lain sama seperti menghargai agama sendiri.

C. Bhinneka Tunggal Ika

Indonesia adalah negara multikultural terbesar di dunia. Kenyataan ini dimana negara Indonesia terdiri dari berbagai kelompok etnis, suku, agama, budaya dan lain sebagainya. Indonesia terdiri dari 17.000 pulau besar maupun kecil, Populasi penduduknya sekitar 275 juta jiwa dengan berbagai macam keberagamannya, terdiri dari 300 suku, dan 200 bahasa. Selain itu masyarakat Indonesia menganut 6 (enam) agama yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghuchu, serta berbagai macam aliran kepercayaan. Keberagaman bangsa Inonesia ini dapat menjadi sebuah berkah juga musibah. Menjadi sebuah berkah jika Indonesia sebagai sebuah entitas negara bangsa mampu merawat keberagamannya. Sebaliknya, dapat menjadi sebuah musibah jika bangsa ini tidak mampu merawat keberagaman, seperti disharmoni bangsa yang terjadi dewasa ini. Peristiwa disharmoni sosial yang dipertontonkan di media dan media sosial ini adalah cerminan bahwa negara ini dalam keadaan darurat kesadaran akan keberagaman

Salah satu tokoh *founding fathers* yakni Muh. Yamin, adalah tokoh yang pertama kali mengusulkan penggunaan kata Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan Negara kepada Presiden Soekarno. Ketika sidang BPUPKI berlangsung pada bulan Mei-Juni 1945. Muh. Yamin beberapa kali menyebutkan kalimat 'Bhinneka Tunggal Ika'. Bhinneka Tunggal Ika dalam sehelai pita yang dicengkram sang Garuda berdasarkan rancangan karya Sultan Hamid II (1913-1978) pertama kali

resmi digunakan dalam sidang kabinet Republik Indonesia Serikat pada 11 Februari 1950.

Bhinneka Tunggal Ika yang berasal dari Bahasa Jawa Kuno, merupakan sebuah kutipan dari karya sastra agama atau kakawin Jawa kuna yaitu kakawin Sutasoma yang dikarang oleh Mpu Tantular, seorang pujangga penganut agama Buddha Tantrayana yang hidup pada abad ke-14 di masa kerajaan Majapahit dibawah kekuasaan Prabu Rajasanagara atau Hayam Wuruk. Kakawin ini mengajarkan toleransi antar agama pada masa itu, terutama antar agama Hindu-Siwa, Buddha dan aliran kepercayaan lainnya. Arti harafiahnya Bhinneka Tunggal Ika, *bhinneka* = beraneka, *tunggal* = satu, *ika* = satu, sehingga artinya adalah beraneka tetapi tetap satu jua.

Konsensus Bhinneka Tunggal Ika mengikat persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia, yang terdiri dari beraneka ragam suku, budaya, ras, agama, dan bahasa. Sesuai dengan arti dari Bhinneka Tunggal Ika, Agama, ras, suku bangsa, bahasa, adat, dan budaya yang ada di Indonesia harus mempunyai sikap toleran dan saling mencintai.

Bhinneka Tunggal Ika itu diambil dari falsafah yang sudah digunakan sejak jaman Kerajaan Majapahit sebagai motto pemersatu seperti yang diikrarkan oleh Patih Gajah Mada dalam Kakawin Sutasoma, karya Mpu Tantular pada pupuh 139, bait 5:

*Rwāneka dhātu winuwus Buddha Wiswa,
Bhinnēki rakwa ring apan kena parwanosen,
Mangka ng Jinatwa kalawan Śiwatatwa tunggal,
Bhinnēka tunggal ika tan hana dharma mangrwa.*

Yang memiliki arti :

Konon Buddha dan Siwa merupakan dua zat yang berbeda.

Mereka memang berbeda, tetapi bagaimanakah bisa dikenali?

Sebab kebenaran Jina (Buddha) dan Siwa adalah tunggal Beraneka ragam, tetapi satu jugalah itu. Tidak ada dharma yang mendua.

D. Ajaran Buddha tentang Multikultural

Buddha adalah seorang guru yang mengajarkan pendidikan multikultural kepada para murid dan pengikutnya. Contohnya kepada Upali, seorang jutawan, adalah salah seorang murid terbaik dari Nigantha Nathaputta, yang ajarannya berbeda dengan ajaran Buddha. Karena pengetahuannya, Upali sangat mahir berdebat sehingga ia diminta gurunya untuk menjatuhkan Buddha dalam perdebatan tentang Hukum Sebab Akibat. Tetapi malah Buddha berhasil menyadarkan Upali akan pandangan keliru dari gurunya.

Hal tersebut membuat Upali sangat terkesan sehingga ia langsung meminta untuk diterima sebagai murid Buddha. Tetapi Buddha mengatakan, "*Upali, Selidikilah dengan seksama. Sungguh bagus bila orang-orang terkenal seperti engkau menyelidiki dengan seksama*".

Upali bahkan semakin senang dan ia berkata, "Yang Mulia, adalah sangat menakjubkan bahwasanya Anda meminta saya untuk mempertimbangkannya dengan hati-hati. Jika itu adalah guru-guru yang lain, mereka akan segera menerimaku dengan tanpa ragu-ragu, membawaku berkeliling di jalan-jalan dalam suatu prosesi dan mengumumkan bahwa seorang jutawan yang demikian-demikian telah meninggalkan agama/kepercayaan lamanya dan sekarang memeluk ajaran mereka. Ya, benar-benar, Yang Mulia, sudilah menerima saya sebagai pengikutMu".

Buddha akhirnya setuju menerima Upali sebagai pengikut dengan,

"Meskipun engkau sekarang telah menjadi pengikutKu, Upali, engkau harus mempraktekkan toleransi dan rasa welas-asih. Teruslah memberi dana kepada guru-guru agama terdahulumu, karena mereka masih amat tergantung pada tunjanganmu. Engkau tidak boleh mengabaikan mereka dalam menghentikan tunjangan yang biasanya engkau berikan kepada mereka".

Demikian nasihat Buddha tentang toleransi dalam ranah multikultural, dan menyelidiki sesuatu sebelum memutuskan dan tidak menerima sebuah ajaran hanya karena emosi sesaat, Agama Buddha mampu menyebar dalam cara yang damai, sebagian besar adalah karena keindahannya dan kemauan baik yang terkandung di dalamnya.

E. Nilai-nilai Pendidikan Buddha berbasis Multikultural

“Apabila di dalam dunia ini seseorang menghancurkan kehidupan makhluk hidup, suka berbicara tidak benar, mengambil apa yang tidak diberikan, melakukan perbuatan susila dengan istri orang lain. Atau menyerah pada minuman yang memabukkan, maka itu berarti mencabut akar kehidupannya sendiri, di dalam kehidupan yang sekarang di dunia ini.” Dhammapada 246-247

Selain itu umat Buddha, pada dasarnya secara sadar menyatakan berlindung kepada Buddha, Dharma dan Sangha (*Triratna*). Umat Buddha menjalankan selalu menjalankan latihan lima aturan moralitas yang disebut Pancasila Buddhis, dalam hal ini akan kita sebut sebagai 5 (lima) etik global sebagai nilai-nilai etik yang berlaku global yang terdiri dari beraneka ragam perbedaan (Multikultur) yang nyata dan tidak terpungkiri.

Lima etik global ini merupakan latihan tahap pertama seorang buddhis dan bila dilaksanakan dengan baik akan membawakan kemajuan, kemakmuran, kehidupan surga sampai merealisasi kebahagiaan tertinggi yaitu nirwana. Jika etik global ini dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari maka akan terwujudlah manusia yang susila dalam berpikir, berkata, dan berbuat yang tentukan akan membawakan kedamaian bagi lingkungan maupun dunia. Tidak ada lagi pertikaian akibat perbedaan yang ada.

Lima etik global Buddhis yang merupakan nilai-nilai pendidikan Buddha berbasis Multikultur adalah :

1. Aku bertekad melatih diri menghindari pembunuhan makhluk hidup
2. Aku bertekad melatih diri menghindari pengambilan barang yang tidak diberikan
3. Aku bertekad melatih diri menghindari perbuatan asusila
4. Aku bertekad melatih diri menghindari ucapan tidak benar
5. Aku bertekad melatih diri menghindari mengkonsumsi makanan/minuman yang menyebabkan lemahnya kesadaran.

Kelima hal di atas, diterjemahkan menjadi lebih sederhana menjadi :

1. Mencintai kehidupan
2. Menghargai kepemilikan
3. Menjaga kesetiaan
4. Menegakkan Kebenaran &Kejujuran
5. Mempertahankan kesadaran

Makna dari menerapkan 5 etik global ini berdasar pada :

1. Tidak ada makhluk yang menginginkan penderitaan
Setiap makhluk menginginkan kebahagiaan dan menghindari penderitaan, maka jika tidak ingin menderita, sebaiknya juga tidak membuat makhluk lain menderita.
2. Bertekad dimulai dari diri sendiri dan bukan tergantung dari pihak di luar diri. Tekad berarti berusaha sekuat mungkin untuk melaksanakan janji
3. Melatih diri berarti mengembangkan potensi diri menjadi kompetensi, dari yang kurang baik menjadi lebih baik. Dilakukan secara bertahap dari kadar yang rendah menjadi tinggi dan tertinggi.
4. Berlatih mulai dari “menghindari” untuk menjadi sebuah kebiasaan baru yang positif, misalnya dalam etik pertama disebutkan menghindari pembunuhan, dengan bertekad melatih dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari akan menjelma menjadi mencintai kehidupan, bukan saya tidak

melakukan pembunuhan tetapi karena kecintaan terhadap kehidupan maka akan terhindar dari mengganggu, menyiksa apalagi membunuh. Dan begitu seterusnya dengan 4 etik global berikutnya.

Etik Global #1 bertekad menghindari pembunuhan

Setiap makhluk ingin mempertahankan kehidupannya selama mungkin, hidup dengan normal dan tidak berakhir dengan kekerasan. Dan tidak ada satupun makhluk yang berhak menentukan jalan kehidupan makhluk hidup lain apalagi mengakhiri kehidupannya. Baik dari hukum negara, hukum agama maupun hukum-hukum lain. Negara selalu melindungi kehidupan dari pembunuhan dan memberikan hukuman berat atas pembunuhan yang terjadi.

Dalam buddhis dijelaskan pembunuhan terjadi jika kriteria berikut terpenuhi yaitu :

1. Adanya makhluk hidup
2. Tahu makhluk itu masih hidup
3. Ada niat membunuh
4. Melakukan pembunuhan
5. Makhluk itu mati

Karena landasan ajaran Buddha adalah Metta Karuna (Loving Kindness/Cinta Kasih & Compassion/Welas Asih) maka mencintai kehidupan adalah landasan pertama bagi seorang buddhis, dikarenakan juga dalam buddhis diyakini bahwa setiap makhluk memiliki benih kebuddhaan. Pembunuhan yang dilakukan berdasar kebencian adalah yang paling berat kadarnya baik usaha pembunuhan itu dilakukan langsung ataupun tidak langsung

Mencintai kehidupan

Mencintai kehidupan dapat berarti tidak menyebabkan makhluk lain menderita, tersakiti atau tersiksa. Tindakan kejam yang dilakukan dalam penyiksaan. Penyiksaan dapat

berarti menyakiti, melukai dan menghancurkan, dapat juga berupa mengadu makhluk untuk tontonan atau kesenangan, memukul, menendang, menjadikan sebuah makhluk sebagai umpan untuk menangkap yang lain, termasuk membiarkan makhluk kelaparan.

Dampak dari melakukan pembunuhan :

1. Umur pendek dan sering sakit
2. Selalu hidup dalam ketakutan
3. Sering hidup dalam kesedihan karena berpisah dengan yang dicintai

Etik Global #2 : bertekad menghindari pengambilan barang yang tidak diberikan

Setiap orang pasti berusaha mempertahankan benda atau harta bendanya masing-masing, tidak ada yang ingin kehilangan atau kecurian. Etik global kedua adalah bertekad menghindari mengambil barang yang tidak diberikan dan dapat diartikan sebagai pencurian karena tanpa izin dari pemiliknya.

Pencurian dianggap terjadi jika :

1. Ada barang yang dimiliki orang lain
2. Sadar bahwa ada pemiliknya
3. Ada niat mengambilnya
4. Melakukan pencurian
5. Barang berhasil diambil

Barang di sini meliputi benda mati ataupun benda hidup termasuk benda milik umum yang menjadi fasilitas umum ataupun sesajen sebagai persembahan di upacara keagamaan.

Menghargai kepemilikan

Dasar dari etik global kedua ini adalah menghargai kepemilikan orang lain terhadap harta bendanya. Ketika seseorang kehilangan, akan merasa sakit hati, menjadi kesal dan berkembang menjadi dendam.

Aturan emas yang selalu berlaku adalah kita tidak menginginkan harta benda hilang, dicuri ataupun dikurangi hak yang seharusnya diperoleh. Sehingga menghargai kepemilikan di sini dapat diterapkan menjadi lebih luas seperti tidak memeras, mencuri dengan berbohong, menipu dengan mengurangi timbangan ataupun kualitas barang, berdagang barang palsu, ingkar janji dengan tidak mengembalikan barang yang dipinjam, termasuk korupsi.

Menghargai kepemilikan dengan tidak melakukan perusakan atau penghancuran dengan niat jahat serta menjaga dan merawat fasilitas pinjaman atau umum dengan baik walaupun itu bukanlah milik sendiri. Seperti menjaga dan merawat fasilitas yang diberikan negara atau kantor.

Dampak dari melakukan pencurian adalah :

1. Sulit mendapatkan kepercayaan
2. Sering dihina
3. Selalu tergantung dengan orang lain
4. Sulit mencapai cita-cita
5. Bangkrut dan jatuh miskin

Etik Global #3 bertekad menghindari perbuatan asusila

Etik ketiga ini menjelaskan tentang tindakan yang tidak sesuai dengan norma-norma yang ada. Tujuan dari etik global ini adalah untuk membina kepercayaan dan kesetiaan dalam keluarga serta mengurangi dampak percekocokan dalam rumah tangga yang berujung perceraian.

Perbuatan Asusila terjadi jika faktor yang mendasari hal itu terpenuhi:

1. Adanya obyek,
2. Mempunyai kehendak,
3. Usaha, upaya untuk berbuat asusila,
4. Berhasil melakukannya.

Dampak dari perbuatan asusila adalah :

1. Mempunyai banyak musuh, dibenci,
2. Terlahir kembali sebagai waria,

3. Mempunyai kelainan jiwa, senantiasa gelisah,
5. Gagal bercinta atau sukar mendapat jodoh, dipisahkan dari orang yang dicintai,
6. Tidak mendapat kebahagiaan berumah tangga.

Menjaga kesetiaan

Pernikahan adalah suatu ikatan antara dua orang dan ikatan itu haruslah dijaga dengan baik. Kebahagiaan suami istri adalah akumulasi dari keberhasilan menjaga kepercayaan dari masing-masing pihak. Saling setia, menyayangi dan mengasihi sangat dibutuhkan dalam ikatan pernikahan tersebut. Kehadiran orang ketiga tentunya akan meretakkan keharmonisan dalam rumah tangga.

Etik Global #4 bertekad menghindari ucapan tidak benar

Tujuan dari etik global keempat ini adalah menyampaikan sesuatu hal yang merupakan kebenaran bukan membenaran, menggunakan kata-kata yang baik dan bersahabat, lemah lembut dan berguna untuk pendengarnya. Buddha mengajarkan bahwa lebih baik mengucapkan sepatah kata yang bermanfaat itu lebih baik daripada mengucapkan ribuan kata-kata yang tidak bermanfaat. Kejujuran tidak menyebabkan orang lain tertipu, tersesat atau mencemarkan nama baik orang lain.

Kata-kata yang diucapkan memiliki dampak yang sangat besar dapat bersifat baik ataupun sebaliknya. Pada jaman now ini, kata-kata tidak hanya terbatas pada oral tetapi juga tulisan melalui media sosial. ucapan dapat menjadi sebab perdamaian dan menghancurkan persahabatan, menjadi sumber perperangan dan menghancurkan sebuah kehidupan.

Ucapan tidak benar dapat disamakan dengan berbohong. Seorang ahli berbohong dapat mendramatisir sebuah kejadian melalui keahliannya memilih kata, intonasi bahkan Bahasa tubuhnya. Maka berhati-hatilah sebelum dan saat mengucapkan sesuatu.

Kebohongan dianggap terjadi karena :

1. Adanya hal yang tidak benar
2. Ada niat untuk menyesatkan
3. Usaha untuk menyesatkan
4. Ada yang tersesat

kata-kata tidak benar itu dapat terbagi menjadi beberapa bentuk seperti berbohong dengan mengatakan hal yang tidak benar padahal tahu itu tidak benar, membuat kata-kata yang berlebihan yang tidak sesuai kenyataan, misalkan promosi menggunakan Bahasa indah yang selangit tetapi kualitasnya tidaklah demikian, menginformasikan berita salah dengan tujuan menyesatkan atau mengacaukan kondisi (fitnah), menjilat dengan memuji berlebihan yang tidak sesuai dengan fakta supaya menguntungkan diri sendiri, berkata kasar dengan mencaci maki atau menghardik dan juga menyembunyikan fakta ketika ditanya termasuk melanggar janji merupakan sebuah kebohongan yang dilakukan.

Dampak dari melakukan kebohongan adalah :

1. Tidak dipercaya orang
2. Menjadi sasaran tuduhan
3. Sering dihina
4. Banyak musuh

Menegakkan Kejujuran

One lie leads to another, sebuah kebohongan memicu kebohongan berikutnya. Dan ada kata bijak yang mengatakan pembohong harus memiliki ingatan yang sangat kuat akan apa yang dikatakan sebelumnya maka sebaiknya kita selalu berlatih untuk menegakkan kebenaran dan kejujuran supaya kebohongan tidak sambung menyambung dari sebuah kebohongan menjadi kebohongan baru dan tidak perlu selalu mengingat kebohongan yang dikarang.

Latihan yang dapat dilakukan untuk menjaga kebenaran dan kejujuran adalah selalu memastikan :

1. Ucapan itu benar

2. Ucapan itu bertujuan baik
3. Ucapan itu dilakukan dengan lembut
4. Ucapan itu bermanfaat
5. Ucapan itu disampaikan tepat pada waktunya.

Karena pada prinsipnya semua orang mencintai kebenaran, kejujuran, tidak ingin dibohongi, ditipu apalagi disesatkan sehingga kebenaran dan kejujuran haruslah dilatih oleh setiap orang dengan check dan recheck sebuah informasi sebelum disampaikan, bukan hanya berdasar pada “katanya”, kebenaran itu disampaikan dengan lembut, bersahabat dan penuh cinta kasih sehingga bermanfaat dan bertujuan baik serta yang tidak kalah pentingnya adalah kebenaran yang bermanfaat, dengan Bahasa lembut disampaikan tepat waktunya bagaimana memberikan obat yang tepat ketika pasien membutuhkannya.

Etik Global #5 bertekad menghindari menghindari mengkonsumsi makanan/minuman yang menyebabkan lemahnya kesadaran

Tujuan dari etik global kelima ini adalah selalu menjaga kesadaran dengan tidak mengkonsumsi makanan atau minuman yang dapat membuat lemahnya kesadaran karena lemahnya kesadaran berarti sama dengan lemahnya pengendalian diri sehingga membuat seseorang dapat melakukan sesuatu yang di luar kendalinya dan biasanya akan mendatangkan penyesalan panjang. makanan dan minuman yang dimaksud adalah minuman keras, narkotika dan sejenisnya.

Kehilangan kesadaran terjadi karena :

1. Tahu ada sesuatu yang merupakan makanan atau minuman yang dapat memperlemah kesadaran
2. Ada niat mengkonsumsi
3. Mengkonsumsinya
4. Kesadaran melemah

Makanan dan minuman dikonsumsi yang melemahkan kesadaran akan menyebabkan pengendalian diri terganggu karena pikiran dan akal sehat tidak dapat bekerja dengan baik.

Dampak dari kehilangan kesadaran adalah :

1. Tidak ada kepercayaan dari orang lain
2. Pemborosan kekayaan
3. Sering terserang penyakit
4. Reputasi diri dan keluarganya diragukan

Mempertahankan Kesadaran

Ini adalah etik global terakhir tetapi bukanlah yang tidak penting, tapi sebaliknya malah yang cukup penting untuk selalu mempertahankan kesadaran karena pikiran dan akal sehat sangat berhubungan erat dengan kesadaran. Jika kesadaran melemah maka pikiran sulit dikendalikan kemudian merembet ke pengendalian nafsu keinginan yang tak terkendali maka banyak hal negatif seperti tindak kriminal akan terjadi. Selain itu, pelanggaran terhadap etik global

Bumi dipenuhi pasir yang panas, batu dan duri yang tajam, serta benda-benda lainnya yang dapat melukai kaki kita. Mungkinkah kita menutupi seluruh permukaan bumi dengan kulit agar kita terbebas dari luka? Dimanakah kita dapat menemukan kulit seluas itu?

Tapi ternyata kita dapat terbebas dari hal itu hanya dengan membungkus kaki dengan sepasang sandal kulit. Tindakan itu seolah membuat seluruh bumi tertutup dengan kulit (Shantideva: Bodhicaryavatara 5.13 - 14)

Syair indah di atas menjelaskan bahwa kita sulit untuk mampu mengendalikan hal-hal dari luar dan mengubah sesuatu yang ada di luar diri. Tapi kita dapat mengendalikan dan mengubah pikiran dan batin sendiri. Kalau pikiran dan batin terkendalikan, maka kita dapat mengatasi masalah-masalah dari luar, sehingga kita akan terbebas dari penderitaan dan juga terbebas dari ketakutan. Senada dengan fungsi pendidikan Nasional yaitu mengembangkan kemampuan dan

membentuk karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat.

Pendidikan multikultural dalam seluruh jenjang pendidikan memiliki tujuan untuk menunjukkan pengasahan, penanaman kesadaran, dan mengembangkan warganya agar memiliki keadaban (civility), keterampilan, menumbuhkan kesadaran akan cara hidup yang demokratis (Sulalah, 2012: 138). Ketika indikator-indikator tersebut berjalan secara seimbang, maka sikap saling menghargai, saling pengertian, dan saling percaya akan terbangun dan berkembang dengan baik.

Diurut dari ajaran Buddha yang sudah dimulai sejak 588 SM yang memutar Dharma ajaran mulia universalnya yaitu 5 etik global yang bersifat multikultur dan bermanfaat serta berdaya guna yang tidak hanya berpihak kepada satu kelompok atau golongan saja, sampai dengan jaman raja Asoka dalam maklumat-maklumat yang diwariskannya sampai saat ini adalah tentang menjaga agama/kepercayaan orang lain sama juga dengan menjaga agama/kepercayaan sendiri, diperkuat lagi oleh pupuh dari Mpu Tantular dalam karya Sutasomanya yaitu Bhinneka Tunggal Ika, Tan Hana Dharma Mangrwa, berbeda-beda tapi tetap satu, tiada Dharma yang mendua. Nilai-nilai ajaran Buddha, filosofi Asoka dan Mpu Tantular memiliki benang merah yang sangat kuat dalam pondasi pembelajaran Multikultural.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Syaibani, *Filsafat Pendidikan Islam*, Alih Bahasa Hasan Langgulung, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979)
- Abraham Nurcahyo dan Yudi Hartono, *Pengantar Antropologi; Bahan Ajar Untuk Peguruan Tinggi*, (Magetan: Lembaga Edukasi Swastika, 2008)
- Azyumardi Azra, Pendidikan Multikultural; Membangun Kembali Indonesia Bhineka Tunggal Ika, dalam Tsaqafah, Vol. I, No. 2, 2003
- Ardika, I Wayan. Strategi Bali Mempertahankan Kearifan Lokal di Era Global, dalam *Kompetensi Budaya Dalam Globalisasi, Kusumanjali untuk Prof.Dr.Tjok Rai Sudharta,MA*. Denpasar: Fakultas Sastra Universitas Udayana dan Pustaka Larasan.
- Alkitab, Lembaga Alkitab Indonesia (LAI), 2009.
- Ariarajah, W. 1987. Alkitab dan Orang-orang Yang Berkepercayaan Lain (Terj.). Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Adiprasetya, J. 2000. Ya Aku Penjaga Adikku! Etika Postmodern dari Kacamata Emmanuel Levinas, Berakar di dalam Dia dan dibangun atas Dia, diredaksi Latuihamallo P.D, Robert P Borrong, dkk., Yogyakarta: Kanisius.
- Azra, A. "Pendidikan Multikultural: Membangun Kembali Indonesia Bhineka Tunggal Ika." Makalah disampaikan dalam symposium International Antropologi Indonesia ke-3. Denpasar: Kajian Budaya UNUD. 2002. Diakses tanggal, 24 Juni 2020.
- Anton Bakker (2000). Antropologi Metafisik. Yogyakarta: Kanisius.

- Buchari Alma, dkk, *Manajemen Coorporate dan Strategi Pemasaran Lembaga Pendidikan* (Bandung; UPI Press, 2005
- Baharudin dan Makin, *Manajemen Pendidikan Islam*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010)
- Bagus, Lorens. 2002. *Kamus Filsafat*. Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Berger, Peter L. 2003. *Kebangkitan Agama Menentang Politik Dunia*. Jogjakarta : Khasanah Pustaka Indonesia.
- Budiman,Hikmat. 2005. *Hak Minoritas Dilema Multikulturalisme di Indonesia*. Jakarta: The Interseksi Foundation.
- Bedjo. 2007. Pluralisme Agama dalam Perspektif Kristen, makalah disampaikan dalam seminar bagi guru-guru Pendidikan Agama Kristen Se-Surabaya di GKI Darmo Satelit, Surabaya pada tanggal 24 Februari 2007.
- Badan Pusat Statistik. 2019. Statistik Kriminal. <https://www.bps.go.id/publication/2019/12/12/66c0114edb7517a33063871f/statistik-kriminal-2019.html>. Diakses tanggal 27 Juni 2020.
- Badan Pusat Statistik. 2019. Statistik Kemiskinan. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2019/07/15/1629/persentase-penduduk-miskin-maret-2019-sebesar-9-41-persen.html>.Diakses tanggal 27 Juni 2020.
- Baidhawry, Z. 2005. Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural. Jakarta: Erlangga.
- Bennet, T., L. Grossberg, and M. Morris. 2005. *New Keywords : A Revised Vocabulary for Culture and Society*. Blackwell.

- Butler, M. A., (1998). Negotiating place: The importance of children's realities. Steinberg, S. R. & Kincleloe, J. L. (Eds.) *Students as researchers: creating classrooms that matter*. (pp. 94-111). London: Falmer Press.
- Bertens, K., Ekumenisme dan Multikulturalisme, *Suara Pembaruan Daily*, edisi Minggu, 16 - Mar - '08.
- Budianta, Melani, Burhanuddin (ed), *Multikulturalisme dan Pendidikan Multikultural, Sebuah Gambaran Umum dalam Mencari Akar Kultural Civil Society di Indonesia*, (Jakarta; Indonesian Institute for Civil Society (INCIS) bekerjasama dengan CSSP- USAID, 2003).
- Banks, J.A. 1994. *An Introduction to Multicultural Education*. Boston: Allyn and Bacon.
- Buber, M. 1996. *I and Thou* Translated by Ronal G. Smith. Whiltshire: The Cromwell Press.
- Burnett, G. 1994. *Varieties of Multicultural Education: An Introduction*, Eric Clearinghouse on Urban Education, New York. N.Y.
- Butet, S., Saryono, D., Darmawan, T. 2018. Konstruksi Pengetahuan Multikultural Dalam Buku Tematik Terpadu Untuk Sd/Mi Kelas IV, dalam <http://journal.um.ac.id/index.php/jptpp/article/view/10644>. Diakses tanggal 24 Juni 2020.
- Baker G.C. 1994. *Planning dan Organizing for Multicultural Instruction*. (2nd). California: Addison-Elsey Publishing Company.
- Bhiku Parekh (2008). *Rethinking Multikulturalism, Keberagaman Budaya dan Teori Politik*. Yogyakarta: Kanisius.

- Bhiku Parekh. 1996. *The Concept of Multicultural Education in Sohen Modgil, et.al.(ed) Multicultural Education the Intermitable Debate*. London: The Falmer Press.
- Clarry Sada, Multicultural Education in Kalimantan Barat; an Overview, dalam Jurnal Multicultural Education in Indonesia and South East Asia, Edisi I, 2004,
- Conny R. Semiawan, The Challenge of a Multicultural Education in a Pluralistic Society; the Indonesian Case, dalam Jurnal Multicultural Education in Indonesia and South East Asia, Edisi I, 2004
- Choirul, M. 2010. Pendidikan Multikultural. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Cuga, C. 2012. Dimensi-dimensi Praktik Pendidikan Karakter (Dasim Budimansyah, Ed. P.). Bandung: Widya Aksara Press.
- Cherry A McGee Banks (editor). 2001. *Handbook of Research on Multicultural Education 2nd Edition*. San Fransisco: Jossey Bass.
- Dimeck, *The Executive in Action*, (New York: Harpen and Bross, 2007
- Didin Kurniadin dan Imam Machali, *Manajemen Pendidikan Konsep dan Prinsip Pengelolaan Pendidikan*, (Jogjakarta: Ar- Ruzz Media, 2012
- Didiek Ahmad Supadie, Sarjuni. Pengantar Studi Islam, cet. II, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012

- Deddy Mulyana dan Jalaluddin Rakhmat. 2006. *Komunikasi Antar budaya: Panduan Berkomunikasi dengan Orang-Orang Berbeda Budaya*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: CV. Toha Putra, 1989
- Darmaputera, E. 2005. *Pergulatan Kehadiran Kristen di Indonesia: Teks-Teks Terpilih Eka Darmaputera*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Driyarkara. 1980. *Tentang Pendidikan*. Jakarta: Kanisius
- David Theo Goldberg. *Multiculturalism: A Critical Reader*. Oxford UK & Cambridge USA: Blackwell
- E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003
- Elly M. SetiadI. *Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar*, Kencana, Jakarta, 2012
- Eck, D.L. 1993. The challenge of pluralism. The Pluralism Project, Harvard University, at: <http://www.pluralism.org/>.
Diakses tanggal 20 Juni 2020.
- Fred Luthans dan Jonathan P.Doh, *International Management Culture, Strategy and Behaviour*, (lincoln:University of Nebraska, 2012
- Fridreck Taylor W, *Scientific Management*, (Happer and Breos: New York, 2007
- Fay, Brian. 2002. *Filsafat Ilmu Sosial Kontemporer*. Yogyakarta: Penerbit Jendela.

- Fios, F.& Gea, A.A. 2013. *Character Building: Spiritual Development*. BINUS University Press.
- Farida Hanum. 2005. *Fenomena Pendidikan Multikural pada Mahasiswa Aktivis UNY*.
- FABC *Dokumen Sidang-sidang Federasi Konferensi-konferensi Para Uskup se-Asia 1992-1995*. Jakarta: Dokpen KWI, 1997.
- Frederikus Fios (2013). "Filsafat Multikulturalisme sebagai Strategi Kebudayaan Menyiasati Pluralisme di Indonesia" dalam *Proceeding International Seminar Kebhinekaan Budaya*, Universitas Indonesia: Depok.
- George R. terry, *Prinsip-prinsip Manajemen*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009
- Gay, G. 2000. *Culturally responsive teaching: Theory, research, and practice*. New York: Teachers College Press.
- Goodman, S. 1996. *Media Education: Culture and Community in the Classroom*. In *Contemporary Art and Multicultural Education* (pp. 18-23). Cahan, S. & Kocur, Z. (Eds.), New York: The New York Museum of Contemporary Art.
- Gollnick, M.Donna, and C. Philip Chinn. 1998. *Multicultural Education in a Pluralistic Society*. New Jersey: Prentice Hall.
- Husain Usman, *Manajemen Teori, Praktik dan Riset Pendidikan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006
- H.M. Arifin, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1993

H. Endang Saifuddin Anshari, M.A., *Wawasan Islam: Pokok-pokok Pikiran tentang Paradigma dan Sistem Islam*, cet. I, (Jakarta: Gema Insani, 2004

<https://knowledgeisfreee.blogspot.com/2015/10/manusia-sebagai-makhluk-individu-dan.html>

<http://pumariksa.blogspot.com/2013/03/makalah-hakekat-manusia-sebagai-mahluk.html>

Hans D. Jaeng.2000. Manusia, kebudayaan dan lingkungan. Yogyakarta : pustaka pelajar.

H.A.R. Tilaar, Multikulturalisme, Tantangan-Tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional, Grasindo, Jakarta, 2004

<https://kostafi06.blogspot.com/2016/12/pluralisme-dan-multikulturalisme.html>

Halim, Fachrizal.A. 2002. *Beragama dalam Belenggu Kapitalisme*. Magelang : Indonesiatara.

Hartono,Sunaryati.2006. Reformasi Picu Pluralisme Hukum dalam *Kompas* 30 Mei 2006.

Heelas, Paul.2003. *Agama Sudah Mati ?*. *Pergulatan Eksistensi Agama dalam Era Modernitas dan Pascamodernitas*. Bekasi : Mediator.

Hendropuspito,D. 1986. *Sosiologi Agama*. Jogjakarta: Kanisius

Hastings, J. 1951. "Pluralism" dalam *Encyclopedia of Religion and Ethics*, vol. x. New York: Charles's Sons.

- H.A.R Tilaar. 2004. *Kekuatan dan Pendidikan*. Jakarta: Grasindo.
- Hasyim Djalal. 2007. *Jati Diri Bangsa dalam Ancaman Globalisasi, Pokok-Pokok Pikiran Guru Besar Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Haviland, William A. 1998. *Antropologi 2*. Terj. Jakarta: Airlangga.
- Irjusz Indrawan. *Pengantar Manajemen Sarana dan Prasarana Sekolah*. Yogyakarta: Deepublish. 2015
- Irvan Jaya Musrida Batosai, *Dasar, Tujuan, Dan Peranan Filsafat* diakses dari <https://Van88.Wordpress.Com/Dasar-Tujuan-Dan-Peranan-Filsafat>
- Ibnu Hajar al-Atsqolani al-Hadidh, *Dar al-Kutub al-Islamiyah, Kitab al-Jami' Bab al-Adab* (Jakarta: Printers, Publisher & Distributor, t.th
- Imam Machalli dan Musthofa, *Pendidikan Islam dan Tantangan Globalisasi* (Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2004
- Internasional Encyclopedia of Social Science* (2010). Detroit: Maxmillan Reference. *Laporan Penelitian*. Lemlit UNY.
- Kamanto Sunarto, *Multicultural Education in Schools, Challenges in its Implementation*, dalam *Jurnal Multicultural Education in Indonesia and South East Asia*, Edisi I, 2004
- Knitter, P.F. 2003. *Satu Bumi Banyak Agama*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Khan, Hazrat Inayat. 2003. *Kesatuan Ideal Agama-Agama*. Yogyakarta : Penerbit Putra Langit.

- Liliweri, Alo. *Prasangka dan Konflik, Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur*. Yogyakarta : PT. LKIS Pelangi Aksara.
- Levinas, E. 1985. *Ethics and Infinity*, Translated by Richard A.Cohen. Pittsburgh: Dusquesne University Press.
- Lawrence, E. Harrison and Samuel P. Huntington. 2000. *Culture Matters, How Values Shape Human Progress*. New York: Basic Books.
- Mondy, R.W., Sharplin, A dan Plippo, *Management, Concept and Practices*, (Boston: Allyn and Bacon, Inc, 2008
- Mudji Sutrisno (2011). "Membaca Wajah-Wajah Kebudayaan", Jakarta: Warna Widya Jati.
- M. Arifin, *Filsafat Pendidikan Islam*, Cet. III, (Jakarta ; Bumi Aksara, 1993
- Made Pidarta, *Manajemen Pendidikan Indonesia*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004),
- Made Pidarta, *Manajemen pendidikan indonesia*, (Jakarta: PT Bina Aksara, 1988
- M. Noor Syam, *Filsafat Pendidikan dan Dasar Filsafat Pancasila*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1988
- Mulkhan, Abdul Munir. 2005. *Dilema Manusia dengan Diri Tuhan, dalam Pluralisme, Konflik dn Pendidikan Agama di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Marri, A.R. 2005. Building a framework for classroom-based multicultural democratic education: learning from three skilled teachers. *Teachers College Record*, 107(5), 1036-1059.
- Mandagi, P.C.Mgr., *Umat Katolik Keuskupan Amboina: Bangkitdalam Persaudaraan Sejati Membangun Masyarakat Baru*. Ambon: Keuskupan Amboina 2004.
- Moeis, I.2014. Pendidikan Multikultural Transformatif, Integritas Moral, Dialogis, dan Adil. Padang: UNP Press.
- Marcus, P. 2008. BEING FOR THE OTHER: Emmanuel Levinas, Ethical Living and Psychoanalysis. Milwaukee, Wisconsin: Marquette University Press.
- Mudji Sutrisno (2013). "Peta-Peta Multikulturalisme dan Relevansinya untuk RI". Depok: Materi Kuliah Filsafat dan Multikulturalisme pada Program Pasca Sarjana Filsafat, Universitas Indonesia
- Murrell, P. 1991. Cultural Politics in Teacher Education: What is missing in the preparation of minority teachers? *In M. Foster, ed., Reading on Equal Education*, vol. 11: *Qualitative Investigation into Schools and Schooling*, 2005-225. New York: AMS.
- MusaAsy'arie.2004.PendidikanMultikutluraldanKonflik1-2.www.kompas.co.id.
- Nanang Fattah, *Landasan Manajemen Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013

- Noer, Kautsar Azhari. 2005. Pluralisme dan Pendidikan di Indonesia, Menggugat Ketidakberdayaan Sistem Pendidikan Agama dalam *Pluralisme, Konflik dan Pendidikan Agama di Indonesia*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Nottingham, Elizabeth K. 1985. *Agama dan Masyarakat*. Jakarta: CV.Rajawali.
- Nieto, S. 1996. *Affirming Diversity: The Sociopolitical Context of Multicultural Education*. New York: Longman.
- Nieto, S., & Bode, P. 2008. *Affirming diversity The sociopolitical context of multicultural education*, (5th ed.). New York: Pearson.
- Nasikun. 2005. Imperatif Pendidikan Multikultural di Masyarakat Majemuk. *Makalah*. Disampaikan di Universitas Muhammadiyah Surakarta Sabtu, 8 Januari 2005 di Ruang Seminar FE UMS
- O'Dea, Thomas F. 1985. *Sosiologi Agama*. Jakarta : CV.Rajawali.
- OlaT. Pr, Benno, *Pemetaan Iman Kristiani dalam Multikultural*, Jurnal LPKUB Perwakilan Medan, edisi I tahun 2005.
- Putra, A.M. 2019. Perjumpaan dengan “Orang Lain” dan Persoalan Tanggung Jawab, dalam <http://lsfcogito.org/perjumpaan-dengan-orang-lain-dan-persoalan-tanggung-jawab/>.
- Prakoso Bhairawa Putra. 2008. Strategi Pemeliharaan Batas Wilayah Melalui Penguatan Pengelolaan Tata Ruang Pulau-Pulau Kecil Terluar. *Inovasi Online*, vol. 12/xx/Nov. 2008. <http://cc.msnsnscache.com/cache.aspx?q>.

- Robbin dan Coulter, *Manajemen* (ed. kedelapan), (Jakarta: PT Indeks, 2007
- Rohiat, *Manajemen Sekolah*, (Bandung: Refika Aditama, 2008
- Ramayulis. *Filsafat Pendidikan Islam (Analisis Filosofis Sistem Pendidikan Islam)*. Jakarta. Kalam Mulia. 2015
- Rusmin Tumanggor, *dkk.ilmu sosial dan budaya*.(Jakarta: Kencana, 2010
- Radhakrishnan, S. (Yudha Triguna, penyunting). 2003. *Agama-Agama Timur dan Pemikiran Barat*. Denpasar: Program Magister Ilmu Agama dan kebudayaan, Unhi.
- Rousseau, Jean Jacques. *The Social Contract Discourses*. Translated with Introduction by G.D.H.Cole,MA. London : J.M.Dent & Sons Ltd.
- Raharja, S. 2010. Mengkreasi Pendidikan Multikultural di Sekolah dengan Menerapkan Manajemen Mutu Sekolah Secara Total. *Jurnal Manajemen Pendidikan*. No 12/Th/Oktober/2010. hlm. 27-40.
- Ross, Mac Howard. 1993. *the Culture of Conflict: Interpretation and Interest in Comparative Perspective*. Connecticut: Yale University Press.
- Sondang P Siagian, *Filsafah Administrasi*, (CV Masaagung, Jakarta : 1990
- S. Takdir Alisjahbana, *Pembimbing ke Filsafat*, (jakarta: Pustaka Rakyat, 1952
- Stephen P. Robbins, Timothy A Judge. *Organizational Behavior*. America: Pearson Educational. 2013.

- Scharf, Betty R. 1995. *Kajian Sosiologi Agama*. Yogyakarta: CV. Tiara Wacana
- Stark, Rodney. 2003. *One True God, Resiko Sejarah Bertuhan Satu*. Yogyakarta: CV. Qalam Yogyakarta.
- Stevenson, Leslie & Haberman, David L. 2001. *Sepuluh Teori Hakikat Manusia*. Jogjakarta: Yayasan Bentang Budaya.
- Sukidi. 2002. *Kecerdasan Spiritual*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Supono, Eusta. 2003. *Agama Solusi atau Ilusi? Kritik Atas Kritik Agama Karl Marx*. Yogyakarta : Komunitas Studi Didaktika.
- Sidjabat, W.B. 1982. *Religious Tolerance and The Christian Faith*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Simmons, Y. & Bearden, P. 1998. Exemplary program: Getting to know you culturally. In S. Zemelman, H. Daniels, & A. Hyde (Eds.). *Best practice: New standards for teaching and learning in America's schools* (2nd ed.). (pp. 150-153). Portsmouth, NH: Heinemann.
- Stanford Encyclopedia of Philosophy. 2010. Multiculturalism. Dalam <https://plato.stanford.edu/entries/multiculturalism/>. Diakses tanggal 28 Juni 2020.

- Supardan, D. 2019. MULTICULTURALISM AND MULTICULTURALISM EDUCATION IN INDONESIA: Opportunities and Challenges. Dalam <http://sejarah.upi.edu/artikel/dosen/multiculturalism-and-multiculturalism-education-in-indonesia-opportunities-and-challenges-3/>. Diakses tanggal 25 Juni 2020.
- Shihab, Alwi, *Islam Inklusif; Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*. Bandung; Mizan, 1999.
- Sirry, Mun'im, *Agama, Demokrasi, dan Multikulturalisme*, Kompas, Edisi Kamis, 01 Mei 2003. <http://www.kompas.co.id>
- Situmorang, J. Maruli, *Inkarnasi-Inkulturas; Pergulatan Kristus dan Budaya*. Bandung: St. Louis Press, 1998.
- Shujaa, M.J. 1992. "Afrocentric transformation and parental choice in African American independent schools", *Journal of Negro Education*, 61 (2), 148-159.
- Sleeter, C.E., & Grant, C.A. 1993. *Making choices for multicultural education: Five approaches to race, class and gender* (2nd ed.), New york: Merrill.
- Siswantara, Y. 2017. PENDIDIKAN MULTIKULTURAL: Sebuah Tantangan Pendidikan di Indonesia, dalam <http://unpar.ac.id/pendidikan-multikultural-sebuah-tantangan-pendidikan-di-indonesia/>. Diakses tanggal 20 Juni 2020.
- Setya Raharja. 2006. Pengembangan Model dan Modul Pendidikan Multikultural di SD. (Sebagai suplemen Mata Pelajaran IPS). *Laporan Penelitian Hibah Bersaing*. Lemlit UNY.

- Soedjatmoko. 1996. Etika Pembebasan. Jakarta: LP3ES.
- Suryadinata,Leo,EviNurvidaArifin.2003.PendudukIndonesia.Jakarta:LP3
- Tjaya, T.H. 2012. Enigma Wajah Orang Lain. Jakarta: KPG.
- Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI, *Manajemen Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2010
- Triguna,Ida Bagus Gede Yudha. Bunuh Diri, Orang Bali Mengalami Anomia dalam *Kompetensi Budaya Dalam Globalisasi, Kusumanjali untuk Prof.Dr.Tjok Rai Sudharta,MA*. Denpasar: Fakultas Sastra Universitas Udayana dan Pustaka Larasan.
- Triguna, Ida Bagus Gde Yudha. 2004. Ketahanan Sosial Budaya Indonesia Terhadap Ancaman Dunia Barat. *Makalah*, disampaikan pada Seminar Nasional Ancaman Neo Kolonialisme terhadap Negara Kesatuan Indonesia. Jakarta, 5 Januari 2004.
- Trijono, Lambang,ed. 2004. *The Making of Ethnic & Religious Conflicts in Southeast Asia Cases and Resolution*.Jogjakarta : CSPA Books.
- Turner, Bryan S. 2003. *Agama dan Teori Sosial*. Yogyakarta: Penerbit IRCiSoD.
- Tanja, V.I. 1998. Pluralisme Agama dan Problema Sosial : Diskursus Teologi tentang Isu-isu Kontemporer. Jakarta : Pustaka Cidesindo.

- Tanudirjo, D.A. 2011. Membangun Pemahaman Multikulturalisme: Perspektif Arkeologi. Makalah disajikan dalam Workshop “Multikulturalisme dan Integrasi Bangsa dalam Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata” di Kusuma Sahid Prince Hotel, Solo 5 Mei 2011.
- Thompson, L. 2009. A Protestant Theology of Religious Pluralism. Bern-Switzerland: Peter Lang AG, International Academic Publishers.
- Toety Heraty Noerhadi (2013). *Aku dalam Budaya: Telaah Teori dan Metodologi Filsafat Budaya*. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Tony Bush, *Leadership and Management Development* (Los Angeles & London; SAGE Pub. 2008
- Will Kymlicka (2001). *Politics in the Vernacular: Nationalism,*
- Winayarti, E. 2017. Pendidikan Multikultural sebagai Suatu Kebutuhan dalam Pengembangan Pendidikan di Kalimantan Tengah, dalam <http://sejarah.upi.edu/artikel/dosen/pendidikan-multikultural-sebagai-suatu-kebutuhan-dalam-pengembangan-pendidikan-di-kalimantan-tengah/>. Diakses tanggal 22 Juni 2020.
- Will Kymlicka, *Multicultural Citizenship, A Liberal Theory of Minority Rights*, Oxford University Press, New York, 2000
- Warren Bennis, *on Becoming a Leader* (Philadelphia; Basic Book inc, 2009
- Nashir, Haedar. 1999. *Agama dan Krisis Kemanusiaan Modern*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Nicholson, Michael, *Mereka Yang Berjasa Bagi Dunia: Mahatma Gandhi*. Jakarta: Gramedia, 1994.

Valdez, A. 1999. *Learning in Living Color Using Literature to Incorporate Multicultural Education Into the Primary Curriculum*. Boston: Allyn and Bacon.

Zuhairini, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bina Aksara, 1991

BIODATA PENULIS



Nama : **Dr (C). IRJUS INDRAWAN, S.Pd.I.,M.Pd.I**
Tempat/Tanggalahir : Pungkat, 09 september 1986
JenisKelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Alamat : Parit Nibung Dusun Mekar Jaya Desa
Pungkat Kec. Gaung Kab. Inhil
Nomor Telephone : 0811-762-666 / 0813-7131-7553
E-mail : irjus9986@gmail.com / iirjus@yahoo.com

Nama Orang Tua
Bapak : DJASMAN
Ibu : SALIMAH
NamaIstri : NURVAWATI, Amd.Keb
NamaAnak : TARTILA PUTRI INDRAWAN
: KANAYA PUTRI INDRAWAN
: YAZID PUTRA INDRAWAN

Pendidikan Formal

1. S3 Program Pascasarjana UIN STS Jambi : 2018-Sekarang
2. S2 Pogram Pascasarjana UIN SUSKA Riau : Tamat Tahun 2013
3. S1 Fakultas Tarbiyah UIN SUSKA Riau : Tamat Tahun 2010
4. MAN 039 Tembilahan Kab. Inhil : Tamat Tahun 2004
5. SMPN 02 Gaung Kab. Inhil : Tamat Tahun 2001
6. SDN 051 Desa Pungkat Kec. Gaung : Tamat Tahun 1998

Pengalaman Pekerjaan dan Organisasi

1. Asesor Badan Akreditasi Nasional PAUD dan PNF Provinsi Riau (2019-Sekarang)
2. Dewan Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir (2016 – 2021)
3. Kepala Bidang Seni dan Budaya MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Indragiri Hilir (2017-2022)
4. Sekjend Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI)- Kabupaten Indragiri Hilir (2017-2022)
5. Penasehat PAC Pemuda Pancasila Kec. Gaung (2017-2022)
6. Dosen Universitas Islam Indragiri (UNISI) 2014 – sekarang
7. Direktur Lembaga Riset dan Pemberdayaan Masyarakat (LRPM-INDRAGIRI HILIR) 2014-2019
8. Pendamping Desa Pogram Desa Maju Inhil Jaya Kabupaten Indragiri Hilir (2014 - 2016)
9. Pembina Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Gaung (HPPMKG)-Tembilahan (2014-2017).
10. Kabid Penelitian dan Pengembangan Organisasi Pengurus Besar Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Inhil (PB.HIPPMIH)-Pekanbaru (2007 – 2009)
11. Bendahara Umum Pengurus Besar Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Inhil (PB HIPPMIH)- Pekanbaru (2009 – 2011)
12. Ketua Umum Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Kecamatan Gaung (IPPMKG- Pekanbaru) 2009 – 2011
13. Sekjen Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Kecamatan Gaung (IPPMKG-Pekanbaru) 2007 – 2009

KARYA ILMIAH

1. Konsep Dasar Manajemen Sarana dan Prasara Sekolah. Pena Persada. Purwokerto Selatan: 2020
2. Manajemen Lembaga PAUD dan PNF. Pena Persada. Purwokerto Selatan: 2020
3. Media Pembelajaran Berbasis Multimedia. Pena Persada. Purwokerto Selatan: 2020
4. Manajemen Pendidikan Karakter. Pena Persada. Purwokerto Selatan: 2020

5. Manajemen Pendidikan Islam. Pena Persada. Purwokerto Selatan: 2020
6. Pendidikan Anak Pra Sekolah. Pena Persada. Purwokerto Selatan: 2020
7. Pendidikan Luar Sekolah. Pena Persada. Purwokerto Selatan: 2020
8. Pendidikan Kewirausahaan dan Etika Bisnis. Pena Persada. Purwokerto Selatan: 2020
9. Self Accredition (Perbaikan Mutu PAUD dan PNF Pasca Akreditasi). Pena Persada. Purwokerto Selatan: 2020
10. Pengelolaan PAUD dan PNF Berbasis Mutu. Pena Persada. Purwokerto Selatan: 2020
11. Implementasi ISO 9001:2015 di Institusi Pendidikan. Pena Persada. Purwokerto Selatan: 2020
12. Pendidikan Budi Pekerti Anak Pra Sekolah. Pena Persada. Purwokerto Selatan: 2020
13. Fiqih Islam Untuk Perguruan Tinggi. Trusmedia Grafika. DIY. 2019
14. Isu-Isu Global Dalam Manajemen Pendidikan. Salim Media Indonesia. Jambi: 2019
15. Proceeding International. Peningkatan Kemampuan Literasi Baru Dosen Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (Ptki) Di Era Revolusi Industry 4.0 (UIN STS Jambi, Prince Of Songkla University Thailand, University Sultan Idris Malaysia) Thailand: 2019
16. Optimalisasi Politik Pendidikan Nasional Melalui Manajemen Berbasis Sekolah (Jurnal Innovatio Pascasarjana UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi: 2019
17. Peran Kepala Sekolah Dalam Manajemen Sarana Dan Prasarana Sekolah (Jurnal Al-Afkar MPI FIAI UNISI. 2017)
18. Mengoptimalkan Proses Pembelajaran Pai Melalui Media Lingkungan (Jurnal Al-Afkar MPI FIAI UNISI. 2015).
19. Menjadi Guru Profesional (Trussmedia. Yogyakarta: 2015)
20. Pengantar Manajemen Sarana Dan Prasarana Sekolah (Penerbit Deepublish. Cv. Budi Utama. Yogyakarta. 2015)

21. Meningkatkan Mutu Pendidikan Melalui Metode E-Learning (Jurnal Al-Afkar MPI FIAI UNISI.2015).
22. Internastional Conference Proceedings. Optimalisasi Politik Pendidikan Nasional Melalui Manajemen Berbasis Sekolah (UUM, UTHM, UNISI) Tembilahan: 2015
23. Proceeding International. Maqomat Al Ahwal Dalam Sufisme (Seminar Internasional, IAIN Imam Bonjol Padang: 2014)
24. Pendidikan Karakter Dalam Perspektif Islam (Jurnal Al-Afkar MPI FIAI UNISI.2014)
25. Model Pembelajaran Nabi Muhammad Saw: (Hiwar , Analogi , Tashbih dan Amthal) (Jurnal Al-Afkar MPI FIAI UNISI.2014)
26. Peta Kerukunan Umat Beragama Dalam Keragaman Agama Di Kabupaten Indragiri Hilir (Dibiayai Oleh Daftar Isian Pelaksana Anggaran (Dipa) Uin Suska Riau, Lembaga Penelitian Dan Pengembangan (LPP) UIN SUSKA Riau: 2013)
27. Manajemen Pendidikan Vokasi. Pena Persada. Purwokerto Selatan: 2020
28. Pendidikan Leadership di Era Millenial. Pena Persada. Purwokerto Selatan: 2020
29. Kewirausahaan Berbasis Teknologi (Teknopreneurship). Pena Persada. Purwokerto Selatan: 2020
30. Pengantar Psikologi Pendidikan. Qiara Media. Pasuruan: 2020
31. Pengantar Sosiologi Pendidikan. Qiara Media. Pasuruan: 2020
32. Manajemen Perpustakaan Sekolah. Qiara Media. Pasuruan: 2020
33. Manajemen Personalia dan Kearsifan Sekolah. Lakeisha. Boyolali: 2020
34. Guru Sebagai Agen Perubahan. Lakeisha. Boyolali: 2020

CURRICULUM VITAE



Nama : **Hadion Wijoyo, S.E., S.H., S.Sos., S.Pd., M.H., M.M., Ak., CA., QWP®**

Tempat dan Tanggal Lahir : Selat Baru, 8 Maret 1976

Jenis Kelamin : Laki-laki

Status Perkawinan : Kawin

Alamat Rumah : Jln. Angkasa Gang Angkasa 2 No. 48
P, Kel. Air Hitam, Kec. Payung Sekaki,
Kotamadya Pekanbaru-Riau

Mobile/Faks. : 085271273675 / 0761-571387

Alamat e-mail : dionwijoyo@yahoo.com

Pekerjaan : Dosen Tetap STMIK Dharmapala Riau

Jabatan Fungsional : Lektor Kepala

RIWAYAT PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI

Tahun Lulus	Jenjang	Perguruan Tinggi	Jurusan/ Bidang Studi
1998	S1	Universitas Riau	Akuntansi
2001	S1	Universitas Lancang Kuning	Ilmu Hukum
2005	S1	Universitas Terbuka	Administrasi Niaga
2019	S1	Sekolah Tinggi Agama Buddha Dharma Widya, Tangerang Banten	Dharma Acarya (Pendidikan Keagamaan Buddha)

2003	S2	Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta	Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Bisnis
2008	S2	Universitas DR. Soetomo (Unitomo) Surabaya	Ilmu Manajemen Konsentrasi Manajemen Pemasaran
2019	S2	Sekolah Tinggi Ilmu Agama Buddha Smaratungga, Ampel, Boyolali, Jawa Tengah (On Going)	Pendidikan Keagamaan Buddha

Karya Buku

1. Manajemen Lembaga PAUD dan PNF. Pena Persada. Purwokerto Selatan: 2020
2. Media Pembelajaran Berbasis Multimedia. Pena Persada. Purwokerto Selatan: 2020
3. Manajemen Pendidikan Karakter. Pena Persada. Purwokerto Selatan: 2020
4. Pendidikan Anak Pra Sekolah. Pena Persada. Purwokerto Selatan: 2020
5. Pendidikan Luar Sekolah. Pena Persada. Purwokerto Selatan: 2020
6. Pendidikan Kewirausahaan dan Etika Bisnis. Pena Persada. Purwokerto Selatan: 2020
7. Self Accredition (Perbaikan Mutu PAUD dan PNF Pasca Akreditasi). Pena Persada. Purwokerto Selatan: 2020
8. Pengelolaan PAUD dan PNF Berbasis Mutu. Pena Persada. Purwokerto Selatan: 2020
9. Implementasi ISO 9001:2015 di Institusi Pendidikan. Pena Persada. Purwokerto Selatan: 2020
10. Pendidikan Budi Pekerti Anak Pra Sekolah. Pena Persada. Purwokerto Selatan: 2020

11. Manajemen Pendidikan Vokasi. Pena Persada. Purwokerto Selatan: 2020
12. Pendidikan Leadership di Era Millenial. Pena Persada. Purwokerto Selatan: 2020
13. Kewirausahaan Berbasis Teknologi (Teknopreneurship). Pena Persada. Purwokerto Selatan: 2020
14. Pengantar Psikologi Pendidikan. Qiara Media. Pasuruan: 2020
15. Pengantar Sosiologi Pendidikan. Qiara Media. Pasuruan: 2020
16. Manajemen Personalia dan Kearsifan Sekolah. Lakeisha. Boyolali: 2020

BIODATA PENULIS



Hermawan Winditya, SS., M.Hum., M.Pd. lahir di Banjarnegara, 23 Desember 1975. Menyelesaikan S1 Filsafat Agama di Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng Manado Sulawesi Utara (2000). Magister di Bidang Ilmu Filsafat di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara Jakarta (2004). Magister Pendidikan di Universitas Indraprasta PGRI Jakarta (2012). Dosen Mata Kuliah Religiositas dan Filsafat di Universitas Multi Media Nusantara Tangerang (2007-2009). Dosen Mata Kuliah Character Building di Universitas Bina Nusantara Jakarta (2007-sekarang).

CURRICULUM VITAE



N a m a : **Dr. I Wayan Budi Utama, M.Si**
Tempat/tanggal lahir : Denpasar, 15 Januari 1958
Agama : Hindu
Unit Kerja : Universitas Hindu Indonesia
Denpasar
Pangkat/Golongan : Lektor Kepala/Iva
Jabatan : Asdir Pascasarjana Universitas Hindu
Indonesia
Alamat Unit Kerja : Jln Sanggalangit, Tembau ,Denpasar
Timur
Alamat Rumah : Jalan Rambutan 3 Denpasar
Email : budiutama904@gmail.com
Nomor HP : 081236029739
Pendidikan : S1 Ilmu Agama dan Kebudayaan IHD
Denpasar
S2 Ilmu Agama dan Kebudayaan
UNHI Denpasar
S3 Kajian Budaya UNUD Denpasar

Pengalaman Jabatan : PD 1 Fakultas Ilmu Agama dan
Kebudayaan
Kaprodi S2 Ilmu Agama dan
Kebudayaan Pascasarjana UNH
Asdir Pascasarjana UNHI Denpasar

BIODATA PENULIS



Christian Siregar, S.Th., M.Pd

Christian Siregar lahir pada 19 Maret 1967 di Jakarta. Menyelesaikan pendidikan sarjana teologi (S1) di STT Jakarta (sekarang STFT Jakarta) tahun 1991, melanjutkan studi magister pendidikan (S2) –Teknologi Pembelajaran–di UPH, tamat tahun 2005. Pernah bekerja di beberapa perusahaan: PT BPK Gunung Mulia Jakarta sebagai staf editor dan kepala bagian personalia (1993-1996), PT Total Chemindo Loka Jakarta sebagai kepala bagian personalia (1996-1998). Mengajar sebagai dosen Universitas Pelita Harapan untuk mata kuliah Learning and Communication Skill dan Character Building (2005-2011). Sejak 2005 sampai sekarang mengajar di Universitas Bina Nusantara untuk mata kuliah Character Building. Juga bekerja sebagai tenaga pelayanan gerejawi di GKI (1998-sekarang).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



I. DATA PRIBADI

Nama : **Dr. Suherman, S.Kom, M.M.**
Nama Panggilan : Heru Suherman Lim
Tempat/TGL lahir : Jakarta, 2 Nopember 1973
Alamat : Angel Residence Blok F/6,
Kalideres, Jakarta Barat
Telepon : 0811-97-9268
Alamat Email : herusuhermanlim@gmail.com

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

1991 – 1998 S1 Teknik Informatika di Universitas Bina Nusantara, Jakarta
2003 – 2005 S2 Magister Manajemen di Universitas Pelita Harapan, Jakarta
2010 – 2015 S3 Administrasi Pendidikan di Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung
2016 Sertifikasi CPS (Certified Public Speaker) dari IPSA (Indonesia Profesional Speaker Association), Jakarta,
2016 2017 Program Pendidikan Regular Angkatan (PPRA) ke-56 Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI)

III. RIWAYAT PEKERJAAN

- 1992 – 1994 Guru SD-SMP-SMA Chandra Kusuma
- 1994 – 1996 Wakil Kepala SMP Chandra Kusuma
- 1996 – 1998 Ka. Sekretariat Yayasan Chandra Kusuma
- 1998 – 2003 Koordinator Pendidikan Sekolah Citra Kasih
- 2000 – 2008 Pembantu Ketua III Bidang Kemahasiswaan STMIK Buddhi
- 2003 – sekarang Managing Director Mutiara Bangsa Group, Tangerang 2003 - 2017 Presenter Radio Cakrawala & TVRI
- 2003 – sekarang Moderator & Pembicara di beberapa kalangan di Indonesia
- 2013 Dosen Pascasarjana Univ. Nusa Mandiri dan STAB Nalanda
- 2017 - sekarang Dosen Pascasarjana STAB Smaratungga

IV. PENGALAMAN ORGANISASI

- 2003 – 2013 Ketua Lembaga Media Komunikasi PP Majelis Buddhayana Indonesia (MBI)
- 2006 – sekarang Ketua Umum Badan Koordinasi Sekolah Minggu Buddhis Indonesia (BKSMBI)
- 2006 – sekarang Pengurus Pusat Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) Bidang Pendidikan, Anggota Dewan Pakar.
- 22 Des 2007 Penerima Piagam Penghargaan “Tokoh Pemuda & Cendekiawan Buddhis” dari STAB Bodhi Dharma, Medan
- 2007 – 2008 Penanggungjawab Program “Dharma for Kids” di Spacetoon TV
- 2018 – sekarang Anggota Lembaga Sumber Daya Manusia PP Majelis Buddhayana Indonesia (MBI)

V. KARYA

- 2008 Penulis Buku “The Spirit of Dharma” 2008 Penulis di Buku “Ayo Bangkit, Bangun Negeri Tercinta

- Indonesia" dalam rangka 100 tahun Kebangkitan Nasional
- 2009 – 2013 Pimpinan Redaksi Majalah Agama Buddha Indonesia "Manggala"
- 2010 Penulis buku "Enjoy dalam Dharma"
- 2013 Penulis buku "Gethek Kecil"

CURRICULUM VITAE EDITOR



Prof. Dr. H. Mukhtar Latif, M.Pd. lahir di Jambi, 26 Januari 1964, dari pasangan bapak H. Yunus (alm) yang mantan Pasirah di Batang Asai Sarolangun, dan ibu bernama Hj. Syarifah (almh) seorang profesional penggiat bisnis perdagangan, perkebunan dan pertanian. Saat ini bekerja sebagai Dosen dan Guru Besar pada Pascasarjana UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, dalam mata kuliah keahlian Manajemen Pendidikan (MP), di samping sebagai pengajar pada berbagai perguruan tinggi Negeri dan Swasta di Tanah Air. Perjalanan karir sebagai Guru Besar (IV/e) yang disandanginya, telah mengantarkannya pada berbagai jabatan yang prestise di perguruan tinggi tempat dia mengabdikan, yang dimulai dari Dekan Fakultas Tarbiyah IAIN STS Jambi (2002-2006), Rektor IAIN STS Jambi (2006-2010), Koordinator Kopertais Wilayah XIII (2007-2010) dan Direktur Pascasarjana IAIN STS Jambi (2013-2017). Banyak karya yang telah dihasilkan beliau, tercatat hingga tahun 2019, ada 80 Judul buku, dan Jurnal yang telah terbit pada Jurnal Internasional Scopus dan Thomson sejumlah 40 Jurnal, serta telah membimbing 40 orang Doktor. Telah pula melahirkan 15 album lagu religi dan melayu di sepanjang karirnya, serta menciptakan lagu Mars dan Hymne UIN STS Jambi serta menciptakan lagu Mars dan Hymne IAI Nusantara Batang Hari, yang dimuat dalam statuta. Hingga saat ini masih aktif memimpin organisasi kemasyarakatan dan Profesi: ICMI Orwil Jambi, MUI Provinsi Jambi, Lembaga Adat Provinsi Jambi, Bakomubin Provinsi Jambi, ADI Provinsi Jambi, Pergubi Provinsi Jambi, Tarbiyah Perti Provinsi Jambi, selain menjadi Anggota Dewan Pertimbangan MUI Pusat dan Wakil Ketua Umum PP. Tarbiyah Perti Pusat. Puncak karir yang diraih tidak luput dari dukungan seorang wanita yang besar dan hebat di belakangnya yakni, istri tercinta Hj. Zuryah, wanita yang ulet, teguh, tegas, disiplin, mandiri dan sholehah. Dari wanita yang mempesona ini dianugerahi tiga putra/i, Qarnan

Akharin, Marwah Dwipa dan Imam Ahmad Mizan. Seiring dengan itu puncak kebahagiaan telah karuniai dua orang cucu kecil yang manis Ratu dan Raja.